

BAHAN AJAR
KEBANSENTRALAN

BAHAN AJAR KEBANSENTRALAN

Penyusun Bahan Ajar:

Dr. Dimas Bagus Wiranatakusuma

Prodi Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

April 2020

Silabus Mata Kuliah Per Minggu		
Pertemuan	Materi	Bacaan
1	1 Uang – Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian	Seri Kebanksentralan No.1
	A Uang	
	B Uang beredar	
	C Mekanisme penciptaan uang beredar	
	D Peranan uang dalam perekonomian	
	2 Penyusunan statistik uang beredar	Seri Kebanksentralan No. 2
	A Prinsip dalam penyusunan statistik uang beredar	
	B Neraca Bank Umum	
	C Neraca Sistem moneter	Seri Kebanksentralan No. 13
	3 Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia	
	A Pendahuluan	
	B Gambaran Umum kebijakan pengedaran uang	
	C Sejarah pengedaran uang di Indonesia	
	D Kebijakan pengedaran uang di beberapa negara	
E Kebijakan pengedaran uang di Indonesia		
2	3. Sistem Akuntansi Bank Indonesia	Seri Kebanksentralan No. 16
	A Pendahuluan	
	B Sistem akuntansi dan penerapannya di bank sentral	
	C Sistem akuntansi bank Indonesia	
3	4 Pasar Uang Rupiah: Gambaran Umum	Seri Kebanksentralan No. 15
	A Pendahuluan	
	B Gambaran umum pasar uang	
	C Kebijakan moneter dan pasar uang di beberapa negara	
	D Pasar uang di Indonesia	

4	UJI KOMPETENSI 1	Seri Kebanksen tralan 1, 2, 13 15, 16
	A Pilihan Ganda	
	B Uraian	
5	5 Kebijakan Moneter di Indonesia	Seri kebanksen tralan No 6
	A Gambaran umum kebijakan moneter	
	B Kebijakan moneter di Indonesia: Kerangka Inflation Targeting framework	
	C Kebijakan moneter periode setelah krisis 1997	
	D Kebijakan nilai tukar dan devisa	
	6 Instrumen – instrumen pengendalian moneter	Seri Kebanksen tralan no. 3
	A Instrumen langsung	
	B Instrumen tidak langsung	
	C Instrumen pengendalian yang biasa digunakan	
	D Instrumen pengendalian moneter di Indonesia	
	7 Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia	Seri kebanksen tralan no 11
	A Pendahuluan	
	B Gambaran umum mekanisme transmisi moneter	
	C Saluran saluran transmisi moneter	
	D Transmisi moneter di Indonesia	
	E Perspektif ke depan	
	8 Operasi pasar terbuka	Seri kebanksen tralan no. 10
	A Pendahuluan	
	B Kerangka Kebijakan moneter	
	C Instrumen kebijakan moneter	
D Operasi pasar terbuka di Indonesia		

6	9	Neraca Pembayaran - Konsep, Metodologi, dan Penerapannya	Seri Kebanksen tralan No. 4	
	A	Pengertian umum dan tujuan penyusunan neraca pembayaran		
	B	Metode pencatatandan penyajian neraca pembayaran		
	C	Struktur dan Keseimbangan Neraca pembayaran		
	D	Neraca pembayaran Indonesia dan Karakteristiknya		
	10	Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia	Seri Kebanksen tralan No. 8	
	A	Pendahuluan		
	B	Gambaran umum		
	C	Peran bank sentral dalam sistem pembayaran		
		D	Sistem pembayaran di Indonesia	
		11	Pengelolaan Cadangan devisa di Bank Indonesia	Seri kebanksen tralan No. 17
		A	Pendahuluan	
		B	Konsepsi Pengelolaan Cadangan Devisa	
	C	Pengalaman Negara lain mengelola cadangan devisa		
	D	Pengelolaan Cadangan devisa di Bank Indonesia		
7	Ujian Kompetensi 2		Seri Kebanksen tralan No. 3, 6, 10, 11, 4, 8, 17	
	A	Soal Pilihan Ganda		
	B	Soal Uraian		
8	12	Konsep, Dinamika, dan Respon Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia	Seri Kebanksen tralan No. 24	
	A	Pendahuluan		
	B	Landasan Teori Nilai Tukar		
	C	Mikrostruktur dalam Pasar Valas		
	D	Reim Nilai tukar dalam Sejarah Internasional		
	E	Volatilitas Nilai tukar dan respon Bank Sentral		
	F	Kebijakan nilai tukar dan devisa di Indonesia		
	13	Sistem dan kebijakan nilai tukar	Seri	

	A	Pendahuluan	Kebanksen tralan No. 12
	B	Pengertian nilai tukar	
	C	Faktor yang mempengaruhi nilai tukar	
	D	Sejarah singkat sistem moneter internasional	
	E	Kebijakan dan sistem nilai tukar di dunia	
	F	Nilai tukar dan kebijakan moneter	
	G	Perkembangan sistem dan kebijakan nilai tukar di Indonesia	
9	14	Penerapan Kebijakan Moneter dalam Kerangka Inflation Targeting di Indonesia	Seri Kebanksen tralan No. 21
	A	Pendahuluan	
	B	Gambaran umum inflation targeting framework	
	C	Implementasi ITF di Negara lain	
	D	Penerapan ITF di Indonesia	Seri Kebanksen tralan No. 22
	15	Inflasi	
	A	Pendahuluan	
	B	Gambaran umum	
	C	Inflasi di Indonesia	
	D	Inflasi daerah	Seri Kebanksen tralan No. 23
	16	Inflasi di Indonesia: Karakteristik dan Pengendaliannya	
	A	Pendahuluan	
	B	Konsep dan Teori Inflasi	
	C	Inflasi di Indonesia	Seri Kebanksen tralan No. 25
D	Pengendalian inflasi di Indonesia		
10	17	Bauran Kebijakan Bank Sentral: Konsepsi pokok dan pengalaman Bank Indonesia	Seri Kebanksen tralan No. 25
	A	Pendahuluan	
	B	Peran bank sentral dalam stabilitas sistem keuangan	

	C Bauran kebijakan bank sentral	
	D Bauran kebijakan bank Indonesia	
11	Ujian Kompetensi III	Seri Kebanksen tralan No. 12, 24, 21, 22, 23, 25
	A Pilihan Ganda	
	B Uraian	
12	18 Paris Club	Seri Kebanksen tralan No. 18
	A Pendahuluan	
	B Gambaran umum Paris Club	
	C Prinsip dan Ketentuan Paris Club	
	D Prosedur Paris Club	
	E Penjanjian Agreed Minute	
	F Beberapa jenis Rescheduling Paris Club	
	G Rescheduling utang luar negeri pemerintah Indonesia melalui Paris Club	
	19 Pinjaman Sindikasi Luar Negeri	Seri Kebanksen tralan No. 20
	A Pendahuluan	
	B Konsep dan prinsip dasar pinjaman sindikasi	
	C Mekanisme pinjaman sindikasi	
	D Pinjaman sindikasi pemerintah Indonesia	Seri Kebanksen tralan No. 21
	20 Peranan Bank Indonesia dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
	A Pendahuluan	
	B Profil UMKM	
	C Program pemberdayaan UMKM	
	D Peran bank sentral dalam pengembangan UMKM di beberapa negara	
	E Peran bank Indonesia dalam pengembangan UMKM	
13	21 Bank Syariah: Gambaran umum	Seri

	A	Gambaran umum perbankan Syariah	Kebanksentralan No 14
	B	Perkembangan perbankan Syariah di beberapa negara	
	C	Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia	
	D	Kelembagaan perbankan Syariah di Indonesia	
14	22	Mengupas Kebijakan Makroprudensial	Seri Bank Indonesia
	A	Apa dan bagaimana kebijakan makroprudensial	
	B	Mengapakebijakan makroprudensial diperlukan	
	C	Siapa yang melaksanakan kebijakan makroprudensial	
	D	Bagaimana strategi Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan makroprudensial	
	E	Bagaimana Bank Indonesia mencegah dan menangani krisis: Protokol manajemen krisis	
15		Kuliah Umum Kebansentralan	Slides Kuliah Umum
16		Ujian Kompetensi 4	Seri Kebanksentralan No. 18, 20, 21, 14, seri bank Indonesia, dan
	A	Soal Pilihan Ganda	
	B	Soal Uraian	

MODUL 1 PERTEMUAN 1 BAGIAN 1 RINGKASAN UANG (PENGERTIAN, PENCIPTAAN, DAN PERANANNYA DALAM EKONOMI)

Tujuan: Untuk mempelajari Uang dari aspek fungsi dan perannya dalam perekonomian

Capaian Pembelajaran: Pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

A Uang
B Uang beredar
C Mekanisme penciptaan uang beredar
D Peranan uang dalam perekonomian

Uang adalah merupakan salah satu alat untuk transaksi apapun itu transaksinya, jadi ini adalah suatu benda yang bisa ditukarkan dengan barang yang lain, menilai benda juga. Uang ini juga mempunyai fungsi-fungsi: pertama sebagai alat tukar, alat penyimpanan nilai, satuan hitung, dan sebagai ukuran untuk pembayaran yang tertunda. Tetapi jaman sudah semakin maju dimaju sekarang uang tidak hanya dengan kertas atau logam lagi, atau disebut dengan uang kartal. Tetapi ketika ingin membayar sesuatu dengan jumlah yang besar kita tidak perlu memakai uang kartal tersebut karena sudah ada yang namanya tranfer, cek, giro, kartu kredit dll ini disebut juga dengan uang giral.

Uang dicetak oleh perusahaan umum percetakan uang republic Indonesia (PERUM PERURI) yang mana perusahaan milik BUMN yang ditugasi untuk mencetak uang kertas. Maupun logam.

Kemudian siapa sih yang mengeluarkan uang tersebut serta mengedarkannya, Bank Indonesia yang mana merupakan bank sentral republic Indonesia inilah yang melaksanakan semua itu.

Uang akan beredar ke seluruh penjuru negeri, kita sebagai masyarakat Indonesia umumnya lebih mengenal dua macam jika diartikan uang beredar dalam arti sempit M1 didefinisikan sebagai kewajiban dari sistem moneter terhadap swasta terdiri uang kartal dan uang giral, namun jika diartikan dalam arti luas M2 atau sering disebut dengan likuiditas perekonomian yang terdiri dari kartal, giral dan uang kuasi, atau dengan kata lain M1 ditambah dengan uang kuasi. Mekanisme penciptaan uang, penciptaan uang dilakukan oleh bank umum, tadi sudah membahas uang kartal, sekarang uang giral,

bagaimana terciptanya sebuah uang giral dan uang kuasi. Secara umum penciptaan kedua uang tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, pertama dengan substitusi yang mana sebagai contoh kita menabung ke bank dengan bentuk simpanan giro, tabungan atau deposito. Transformasi dimana bank umum membeli surat-surat berharga kemudian dibukukan lah surat-surat berharga tadi kedalam simpanan giro atas nama yang bersangkutan dalam simpanan tabungan. Pembelian kredit dimana bank umum memberikan kredit kepada nasabah kemudian dibukukan ke rekening giro atas nama debitur yang menerima kredit.

Selain kedua uang tadi ada juga yang namanya uang primer, yang mana uang primer ini didefinisikan sebagai uang tunai yang dipegang oleh nasabah maupun bank umum, dengan saldo rekening giro dan cadangan di Bank Indonesia.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi uang primer tersebut yang mana bisa dijelaskan dalam neraca Otoritas moneter, dilihat dari garis pasiva (kewajiban) yang memuat komponen dari uang primer terdiri dari uang kartal yang beredar di masyarakat atau di kas bank umum, kemudian saldo rekening giro atau cadangan bank umum dan masyarakat di BI. Bila dilihat dari garis aktiva faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer, yaitu:

- a. Aktiva luar negeri bersih disini karena adanya transaksi luar negeri yang dilakukan pemerintah, misal penarikan dan pelunasan utang.
- b. Aktiva dalam negeri bersih transaksi dalam negeri yang dilakukan swasta, bank umum maupun pemerintah biasanya terjadi berkaitan dengan transaksi APBN
- c. Aktiva lainnya bersih, pos yang disediakan untuk menampung pos yang tidak dimasukkan kelompok yang telah disebutkan contohnya pos modal dan cadangan.

Penciptaan uang oleh bank umum, penciptaan uang giral dan kuasi dapat melalui beberapa cara seperti:

- a. Substitusi, yang mana disini seseorang bisa menyetorkan uang kartal ke bank kemudian dimasukkan dalam simpanan giro, tabungan atau deposito.
- b. Transformasi, dalam proses ini si bank-bank umum ini bisa membeli surat-surat berharga kemudian membukukannya ke dalam simpanan giro dengan atas nama bersangkutan atau bisa juga tabungan atau deposito
- c. Pemberian kredit, di dalam proses ini bank bank umum dapat memberikan kredit kepada nasabah kemudian membukukannya ke rekening giro atas nama debitur yang menerima kredit tersebut.

Dilanjutkan dengan Hubungan Uang Primer dan Uang Beredar. Pertanyaannya apakah Otoritas Moneter sepenuhnya mengendalikan

uang beredar? Kita tahu tidak mudah mengendalikan jumlah uang beredar karena tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya terutama juga peranan Bank umum serta kemampuan untuk menciptakan uang giral serta kuasi, pengaruh masyarakat juga yang membelanjakan uangnya.

Disini kita akan mengenal Pelipat ganda uang yang mana di dalam konsep ini sejalan dengan kondisi bahwa menciptakan uang giral atau kuasi bank tidak harus ada jaminan sepenuhnya dengan uang tunai yang ada di kasnya.

Kemudian Currency Ratio, tinggi rendahnya ini dipengaruhi oleh perilaku dari masyarakat itu sendiri yang mana lebih memilih memegang uang kartal atau giral

- a. Biaya penggunaan yang giral, masyarakat lebih cenderung memegang uang kartal dari pada uang giral, karena rasio dari uang kartal terhadap giral berubah searah dengan biaya penggunaan uang giral.
- b. Kenyamanan dan keamanan, uraian diatas merupakan kasus dalam negara maju, karena masyarakat pasti akan mempertimbangkan faktor yang dianggap relevan untuk transaksi yang jumlahnya lebih besar pembayaran dengan uang giral lebih praktis dan mudah karena tinggal transfer, kemudian minim adanya kasus pencurian.

Dilanjutkan dengan Time and Saving Deposit ratio, tinggi rendahnya ini dipengaruhi oleh perilaku dari masyarakat itu sendiri yang memegang uang kuasi atau giral. Adapun beberapa faktor lainnya, yaitu:

- a. Biaya relative
Asumsi pertama terdapat bunga atau jasa giro walaupun relatif sangat rendah. Dengan demikian, rasio uang kuasi terhadap uang giral akan berubah secara berlawanan arah dengan biaya untuk menahan uang kuasi relatif terhadap biaya menahan uang giral. Biaya relatif menahan uang kuasi adalah sebesar suku bunga pasar dikurangi dengan suku bunga yang dibayarkan untuk uang kuasi. Biaya relatif untuk menahan uang giral adalah suku bunga pasar dikurangi dengan suku bunga rekening giro. Dengan demikian, rasio uang kuasi terhadap uang giral berubah searah dengan suku bunga untuk uang kuasi dan berlawanan arah dengan suku bunga untuk uang giral.
- b. Pendapatan masyarakat
Perubahan pendapatan umumnya akan mendorong perubahan dari rasio uang kuasi terhadap uang giral, sepanjang kedua jenis uang tersebut mempunyai respon (elastisitas) terhadap pendapatan yang berbeda. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa uang

kuasi lebih elastis terhadap pendapatan dibandingkan dengan uang giral. Dengan demikian, rasio uang kuasi terhadap uang giral akan berubah searah dengan perubahan tingkat pendapatan.

c. Kemajuan layanan sektor perbankan

Jaman sudah semakin maju, dimana layanan perbankan sekarang pun sudah mulai canggih karena adanya layanan bank otomatis melalui elektronik, transaksi tidak perlu jauh-jauh misalnya kita akan mentransfer ke orang lain harus melalui ATM center, dengan adanya gadget kalian tidak perlu pergi karena ATM itu sudah berada di tangan kalian.

Reserve ratio. Komponen yang terdapat dalam reserve ratio, komponen pertama yang tentunya dapat diperkirakan jumlahnya dikenal sebagai cadangan resmi (legal reserve). Sementara itu, komponen kedua adalah kelebihan cadangan (excess reserve). Dengan demikian, reserve ratio dapat dibagi menjadi dua komponen juga, yaitu rasio cadangan resmi terhadap simpanan masyarakat (legal reserve ratio) yang dipengaruhi oleh ketentuan otoritas moneter dan rasio kelebihan cadangan terhadap simpanan masyarakat (excess reserve ratio) yang dipengaruhi oleh keperluan bank akan likuiditas jangka pendek.

Kemudian lanjut kepada hubungan yang menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu: angka pelipat ganda dimana faktor-faktor yang mempengaruhi determinan uang primer itu sendiri (c , t , dan r), yaitu antara lain biaya penggunaan uang giral, kenyamanan dan keamanan, biaya relatif (opportunity cost) — yaitu suku bunga, pendapatan masyarakat, kemajuan layanan sektor perbankan, ketentuan otoritas moneter, dan keperluan bank akan likuiditas jangka pendek. dan yang mempengaruhi uang primer, faktor-faktor ini terkait dengan perubahan transaksi keuangan oleh masyarakat yang tercermin pada pos-pos Neraca Otoritas Moneter, baik dari sisi penggunaan uang primer (uang kartal dan saldo giro/ cadangan bank umum di bank sentral)

Peranan uang dalam perekonomian, apa peranannya yang telah dipaparkan di atas tadi sebenarnya? Salah satu cara pertama kita harus memahami aliran dan perputaran barang dan uang terjadi di dalam perekonomian. Perekonomian yang kita tahu ada 2 sektor yaitu sektor riil (barang dan jasa) serta sektor moneter (uang). Ilustrasi singkatnya arus perputaran barang dan uang yang ada di perekonomian pertama kita pasti membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memperlakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, dan investasi juga. Dan disana ada aliran uang dan barang, misal dalam kegiatan produksi perusahaan membutuhkan input berupa bahan baku juga tenaga kerja.

Disitu pasti akan memli bahan baku juga menyewa tenaga kerja. Nah disitu aliran uang keluar dari perusahaan akan menjadi pos biaya dan aliran masuk akan mejadi pos pendapatan. Sebaliknya ketika perusahaan menghasilkan dan menjual ke masyarakat aliran uang masuk yang merupakan pendapatan perusahaan. Jadi bisa disimpukjan bahwa perekonomian aliran uang akann barnag sebanding dengan aliran barang dan jasa.

Sekarang pertanyaannya apa yang terjaid ketiak jumlah uang yang tersedia sangat terbatas sehngga tidak dapat membiayai kegiatan ekonomi terserbut? Dan apa yang terjadi jika sebaliknya? Dalam lingkup ekonomi sektor riil. mengarah pada pemahaman bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara uang dan kegiatan ekonomi di sektor riil, seperti yang telah disinggungpadaawalbabini.³⁸ Pengaruhuangterhadapkegiatanekonomi di sektor riil pada dasarnya dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Pengaruh tidak langsung uang dapat dijelaskan melalui pengaruhnya terhadap perkembangan suku bunga seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dalam hal ini, apabila terjadi penambahan jumlah uang beredar (misalnya sebagai akibat kebijakan bank sentral) maka suku bunga akan cenderung turun. Penurunan suku bunga tersebut akan menurunkan biaya pendanaan kegiatan investasi, yang selanjutnya mendorong kegiatan investasi dan kegiatan ekonomi pada umumnya.

Pengendalian jumlah uang beredar. Pengendalian jumlah uang beredar pada hakikatnya merupakan salah satu bagian dari kerangka kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh otoritas moneter. Yang maan sesuia dengan tujuan kebijakn onter yang mana untuk menjaga kestabilan nilai uang dan mendorong kegaiatn ekonomi . Pengendalian jumlah uang beredar tersebut juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kerangka kebijakan ekonomi makro. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan yang erat antara uang dengan variabel- variable ekonomi lainnya, seperti suku bunga, output, dan harga. Dengan mengendalikan jumlah uang beredar tersebut, otoritas moneter akan dapat mempengaruhi nilai uang sedemikian rupa sehingga perkembangannya akan mampu mendorong perekonomian ke arah yang diinginkan sesuai dengan sasaran akhir yang ditetapkan, seperti inflasi yang rendah dan/ atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Trus bagaimana dengan penengndalian JUB di Indonesia dimaan ada UU tentang bank Indonesia yaitu UU no. 23 tahun 1999. Dalam pada itu, pengendalian jumlah uang beredar dianggap cukup relevan, khususnya apabila dikaitkan dengan arah baru penerapan kebijakan moneter di Indonesia yang menekankan pada pencapaian sasaran tunggal, yaitu kestabilan nilai rupiah (harga).

Namun, dalam kenyataan pengendalian jumlah uang beredar yang optimal sangatlah sulit dilakukan. Paling tidak, terdapat tiga faktor yang menyebabkan sulitnya pengendalian jumlah uang beradar tersebut.

Pertama adalah adanya unsur-unsur yang sifatnya kontradiktif untuk mencapai sasaran kebijakan. Misalnya, Bank Indonesia melakukan kebijakan ekspansi moneter untuk mendorong kegiatan ekonomi yang sedang lemah. Dimana tindakan seperti ini biasanya mempunyai dampak pada meningkatnya inflasi. Sebaliknya, apabila diambil kebijakan kontraksi moneter untuk meredam laju inflasi tersebut, perkembangan kegiatan ekonomi diperkirakan akan terhambat. Faktor kedua adalah sulitnya memprediksi dan mengendalikan permintaan uang masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perilaku permintaan uang masyarakat sangat beragam motifnya. Sejalan dengan pesatnya perkembangan dan inovasi sektor keuangan dan keterbukaan perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, perilaku tersebut cenderung tidak stabil sehingga sulit untuk diprediksi dan dikendalikan. Faktor ketiga adalah sulitnya memprediksi perilaku angka pelipat ganda uang. Sebaiknya perkembangan permintaan uang, perilaku angka pelipat ganda uang juga cenderung tidak stabil sehingga sulit untuk diprediksi. Kesulitan dan tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam rangka pengendalian jumlah uang beredar di masa mendatang diperkirakan akan semakin berat dan kompleks. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk menjajagi dan mengkaji beberapa kemungkinan penerapan kerangka kerja kebijakan moneter lain yang lebih optimal dalam rangka pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu stabilitas nilai rupiah.

Langsung kepada isu-isu mengenai Uang pada jaman sekarang. Saya ambil contoh ketika kita sedang melakukan transaksi pembayaran dengan jumlah yang besar dengan membawa uang tunai dengan jumlah besar? Pasti orang akan berpikiran ngapain bawa uang sekarung untuk melakukan pembayaran yang besar, alternatifnya adalah cek, ya cek adalah sesuatu yang dianggap sebagai alat pembayaran tunai juga, hanya bermodalkan kertas selebar kita bisa membayar pembayaran dengan jumlah yang besar. Tetapi ketika kita ingin melakukan pembayaran melalui cek ini, kita harus terlebih dahulu mempunyai rekening giro. Dimana suatu rekening simpanan di bank umum tetapi penarikannya hanya dilakukan sewaktu-waktu saja.

Jaman sekarang masyarakat jarang yang melakukan transaksi dengan uang kartal, belanja kebutuhan pun tinggal duduk manis, tidur santai, karena apa? Karena sekarang ada yang namanya e-money, apa sih e-money itu? Sama saja dengan uang elektronik dimana uang ini bisa memudahkan konsumen dan produsen dalam bertransaksi secara online, tetapi ada syaratnya dalam menggunakan e-money, yang harus dilakukan yaitu dengan menyetor atau menyimpan terlebih dahulu, setelah itu nominal yang tadi disetorkan akan diubah dalam bentuk saldo e-money. Di Indonesia e-money banyak macamnya ya, ada dengan kartu juga dengan digital atau basis server,. Memang dengan adanya uang ini bisa

mempermudah bertransaksi tapi apakah ada dampaknya bagi perekonomian?

Berikut dampak yang bisa muncul karena adanya e-money ini bagi perekonomian bagi suatu negara.

1. Dapat menimbulkan inflasi, inflasi terjadi karena ketidakseimbangan ekonomi yang mengancam stabilitas negara, banyak factor yang bisa menyebabkan inflasi ini, e-money pun bisa, terutama ketika e-money ini tidak sesuai nilainya dengan nilai uang tunai
2. Efeknya pada perputaran uang, sebenarnya sama saja dengan uang tunai, tetapi fakta sekarang e-money lebih efektif dibanding uang tunai, karena dengan adanya uang ini kita tidak khawatir lagi dalam membawa uang banyak, bermodalkan gadget yang tentunya meningkatkan perputaran uang.
3. Dampak kepada permintaan uang tunai, dengan adanya e-money ini minat masyarakat terhadap uang tunai menurun karena keefektifan uang ini masyarakat lebih memilih yang simple aja. Dengan permintaan uang menurun efeknya permintaan uang akan turun, suku bunga turun, malah investasi akan naik dan akan meningkatkan pertumbuhan.

Dengan adanya uang elektronik ini, apakah missal nanti uang kartal akan hilang, menurut saya uang kartal tidak akan hilang. Karena kebutuhan uang tidak akan seluruhnya dipenuhi oleh nontunai, apabila perekonomian tumbuh dengan baik dengan salah satunya lewat nontunai, maka otomatis kebutuhan uang, baik kertas atau logam akan meningkat. Jadi menurut saya e-money ini hmay sebagai komplemen atau pelengkap saja, karena uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah.

Quiz 1 Pertemuan 1 Bag 1

Soal Pilihan Ganda

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Dalam artian umum uang adalah untuk...
 - a. Sebagai alat tukar
 - b. Sebagai alat penyimpan kekayaan
 - c. Sebagai alat pajangan
2. Berikut fungsi-fungsi uang, kecuali...
 - a. *Unit of Account*

- b. Medium of exchange*
 - c. Tool for sales*
- 3. Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah dengan...
 - a. Penggunaan sistem yang canggih
 - b. Penggunaan alat pembayaran
 - c. Penggunaan kebijakan untuk mencapai kestabilan
- 4. Selain kita kenal uang kartal ada juga uang yang sangat simple tanpa perlu membawa uang kartal seperti halnya menggunakan gadget yaitu disebut dengan...
 - a. Cek
 - b. E-money
 - c. Giro
- 5. Uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya disebut dengan...
 - a. Uang kartal
 - b. Uang barang
 - c. Uang giral

Soal Essai

1. Mengapa uang yang kita gunakan haruslah tahan lama dan tidak mudah dipalsukan?
2. Sebelum kita mengenal rupiah pada jaman dulu ada uang resmi yang digunakan sebutkan!
3. Apa yang anda ketahui tentang ATM?
4. Sebutkan syarat-syarat uang!
5. Kestabilan nilai rupiah yang terdiri dari dua aspek jelaskan!

PERTEMUAN 1 MODUL 1 BAGIAN 2

UANG

Tujuan: Untuk mempelajari Uang dari aspek fungsi dan perannya dalam perekonomian

Capaian Pembelajaran: Pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

A Uang
B Uang beredar
C Mekanisme penciptaan uang beredar
D Peranan uang dalam perekonomian

Uang adalah seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (medium of exchange), (2) alat penyimpan nilai (store of value), (3) satuan hitung (unit of account), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deferred payment). Perlu dikemukakan pula bahwa pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada saat ini.¹ Di bawah ini akan diuraikan secara singkat keempat fungsi dasar uang yang telah disampaikan di atas.

Uang sebagai alat tukar. Dapat dibayangkan betapa sulitnya hidup dalam perekonomian moderen ini tanpa adanya benda yang dapat digunakan sebagai alat penukar. Apabila tidak ada uang maka transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar-menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain. Misalnya, seseorang yang memiliki ayam dan ingin menukarkannya dengan garam – karena ia mempunyai ayam yang banyak dan sangat membutuhkan garam – harus bertemu dengan orang lain yang memiliki garam dan ingin menukarkan garam dengan ayam. Selanjutnya, mereka saling menukarkan ayam dengan garam. Kondisi ini dinilai terlalu kaku dan sulit dipenuhi. Dengan adanya uang, seseorang

dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkannya kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut.

Uang sebagai alat penyimpan nilai. Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang yang berharga untuk dipergunakan di masa yang akan datang. Barang-barang berharga tersebut pada umumnya berupa tanah, rumah, dan benda berharga lain. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan.

Uang sebagai satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Tanpa satuan hitung seseorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan dua ekor kambing dsb. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan.

Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam; uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar satu juta rupiah selama lima tahun daripada meminjamkan satu ekor kambing dalam waktu yang sama mengingat keadaan kambing dalam lima tahun mendatang akan berbeda dengan keadaan kambing semula.

Jenis jenis uang beredar

Dalam praktik, berbagai negara menggunakan uang beredar dengan jenis yang beragam. Jenis-jenis uang beredar tersebut secara resmi didefinisikan berdasarkan komponen yang tercakup di dalamnya. Komponen tersebut pada umumnya adalah ketiga jenis uang yang telah dikenal pada bagian sebelumnya, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Dengan demikian, sesuai dengan cakupan uang beredar yang beragam, jenis uang beredar pun beragam, mulai dari pengertian atau definisi yang paling sempit sampai yang paling luas. Uang kartal atau uang tunai seperti yang telah diuraikan di atas sebenarnya merupakan jenis uang beredar dalam pengertian yang paling sempit.

uang beredar didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik. Di Indonesia saat ini kita hanya mengenal dua macam uang beredar saja.

- Uang beredar dalam arti sempit, yang sering diberi simbol M1, didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal (C) dan uang giral (D).

- Uang beredar dalam arti luas, yang sering juga disebut sebagai likuiditas perekonomian dan diberi simbol M2, didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal (C), uang giral (D), dan uang kuasi (T). Dengan kata lain M2 adalah M1 ditambah dengan uang kuasi (T).

Sementara itu, definisi uang beredar di berbagai negara dapat bervariasi sesuai dengan kondisi sektor keuangan dan perbankan serta kebutuhan otoritas moneter negara yang bersangkutan. Di Amerika Serikat misalnya, definisi uang beredar tidak hanya mengenal istilah M1 dan M2 saja, namun juga M3.

Mekanisme Penciptaan Uang

Dalam bab satu telah dibahas pengertian uang menurut fungsinya, perkembangan penggunaan uang, dan otoritas yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan serta mengedarkan uang. Adapun dalam bab dua telah dibahas pula pengertian uang beredar, jenis-jenis uang beredar, dan perkembangan pengertian uang beredar dari waktu ke waktu. Selanjutnya, akan dibahas bagaimana uang beredar itu diciptakan.

Untuk menjelaskan hal tersebut, perlu diuraikan terlebih dahulu siapa saja pelaku dalam proses penciptaan uang. Berdasarkan pengelompokan peranannya, secara umum dikenal tiga pelaku utama, yaitu (i) otoritas moneter, (ii) bank umum, dan (iii) masyarakat atau sektor swasta domestik. Pada dasarnya, ketiga pelaku tersebut berinteraksi sedemikian rupa sehingga penyediaan (penawaran) uang oleh otoritas moneter dan bank sesuai dengan kebutuhan (permintaan) masyarakat akan uang tersebut. Secara sederhana dapat diuraikan: otoritas moneter menciptakan uang kartal, sementara bank umum menciptakan uang giral dan uang kuasi, sedangkan masyarakat akan menggunakan uang yang diciptakan oleh otoritas moneter dan bank umum tersebut untuk melaksanakan kegiatan ekonomi.

Currency Ratio

Tinggi rendahnya *currency ratio* pada dasarnya dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memilih memegang uang kartal atau uang giral. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut, antara lain biaya pemegangan, kenyamanan, dan keamanan dalam menggunakan uang kartal atau uang giral.

a. Biaya penggunaan uang giral

Dalam hal memilih untuk menggunakan uang kartal atau uang giral, masyarakat tentunya akan memperhitungkan biaya-biaya yang timbul dari penggunaan uang tersebut, antara lain biaya transportasi menuju ke bank dan biaya pemeliharaan rekening giro yang dikenakan oleh bank. Dalam perekonomian yang kurang maju, khususnya di daerah yang tidak didukung oleh sektor perbankan dengan baik, biaya tersebut bisa jadi merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh masyarakat, terutama kalau mengingat pemeliharaan rekening giro yang umumnya tidak diberikan bunga; kalau pun ada, bunga atau jasa giro yang diberikan sangat rendah.³⁰ Dalam hal terdapat bunga atau jasa giro, masyarakat akan memperhitungkan biaya penggunaan yang timbul, yaitu biaya pemeliharaan rekening dikurangi jasa giro. Dalam kasus ini, biasanya biaya pemegangan uang giral lebih tinggi dibandingkan dengan bunga atau jasa giro sehingga masyarakat cenderung memegang uang kartal daripada uang giral. Dapat disimpulkan bahwa rasio uang kartal terhadap uang giral berubah searah dengan biaya penggunaan uang giral.

b. Kenyamanan dan Keamanan

Namun, kondisi yang diuraikan di atas bukan merupakan kasus dalam perekonomian yang sudah maju, yang masyarakatnya akan mempertimbangkan faktor lain yang dianggap lebih relevan, antara lain kenyamanan dan keamanan. Dua faktor tersebut merupakan dua di antara beberapa kelebihan uang giral apabila dibandingkan dengan uang kartal. Untuk transaksi dalam jumlah yang relatif besar, pembayaran dengan menggunakan uang giral dapat dilakukan dengan lebih praktis dan mudah karena selain dapat dilakukan melalui transfer, pembayaran tersebut juga tidak memerlukan pecahan tertentu dan sebagainya. Selain itu, penyimpanan dalam bentuk uang giral lebih aman dari pencurian, kebakaran, dan sebagainya.

Peranan Uang Dalam Perekonomian

Dalam pembicaraan sehari-hari mengenai kondisi perekonomian, masyarakat sering mengaitkan uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga (inflasi), suku bunga, dsb. Sering dikatakan bahwa jumlah uang beredar yang terlalu banyak akan mendorong kegiatan ekonomi berkembang dengan sangat pesat. Apabila berlangsung terus, hal ini dianggap berbahaya karena harga barang-barang akan

meningkat tajam. Sebaliknya, apabila uang beredar terlalu sedikit maka kegiatan ekonomi menjadi seret atau melambat. Sering juga dikatakan bahwa apabila uang beredar terlalu banyak maka suku bunga akan cenderung turun dan sebaliknya

Ilustrasi sederhana mengenai aliran atau arus perputaran barang dan uang terjadi dalam suatu perekonomian dapat dijelaskan sebagai berikut. Sesuai dengan fungsi uang sebagaimana telah diuraikan dalam bab pertama, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan uang untuk memperlancar kegiatan ekonominya baik berupa kegiatan produksi, investasi, maupun konsumsi. Sebagaimana diketahui, dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut selalu terdapat dua macam aliran, yaitu aliran barang dan aliran uang atau dana. Sebagai contoh, dalam suatu kegiatan produksi, untuk menghasilkan suatu produk perusahaan membutuhkan *input*, misalnya berupa bahan baku dan tenaga kerja. Dalam proses tersebut perusahaan akan membeli bahan baku dan menyewa tenaga (keahlian) dari masyarakat sehingga akan terjadi aliran barang dan jasa berupa bahan baku dan tenaga kerja dari masyarakat. Pada saat yang sama juga terjadi aliran uang dari perusahaan untuk pembayaran bahan baku yang dibeli tersebut. Aliran uang keluar tersebut bagi perusahaan akan menjadi pos biaya, sementara bagi masyarakat, aliran uang masuk tersebut merupakan pos pendapatan. Sementara itu, setelah perusahaan menghasilkan suatu produk dan menjualnya ke masyarakat akan terjadi aliran uang keluar dari masyarakat dan sebaliknya terjadi aliran uang masuk yang merupakan pendapatan perusahaan. Mekanisme yang serupa juga terjadi pada kegiatan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perekonomian aliran uang akan sebanding dengan aliran barang dan jasa.

Uang Dan Harga

Pada bagian-bagian terdahulu telah dibahas secara berturut-turut keterkaitan uang dengan suku bunga dan keterkaitan uang dengan kegiatan ekonomi sektor riil. Keterkaitan uang dengan kedua variabel tersebut pada dasarnya menunjukkan peranan uang dalam mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi secara keseluruhan, yang tercermin pada perkembangan permintaan agregat (*aggregate demand*) masyarakat akan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut tentunya harus didukung oleh *kapasitas ekonomi*, yaitu suatu kondisi yang mencerminkan ketersediaan sumber daya yang mencukupi, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi. Dalam ilmu ekonomi makro, kondisi ini dikenal dengan penyediaan atau penawaran agregat (*aggregate supply*). Berbeda dengan permintaan agregat yang dapat

berubah dalam jangka pendek, penawaran agregat relatif lebih sulit untuk berubah dalam jangka pendek. Dalam kaitan ini, perubahan penawaran agregat lebih terkait dengan struktur dan perkembangan suatu perekonomian.

Idealnya, permintaan agregat harus sama dengan penawaran agregat. Bagaimana apabila tidak? Apabila permintaan agregat tidak sama dengan penawaran agregat maka diperlukan penyesuaian kegiatan ekonomi agar terjadi kesesuaian (keseimbangan), yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perubahan harga barang dan jasa. Dalam hal ini, peningkatan permintaan agregat yang melebihi penawaran agregat akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa.

Dengan demikian, mengingat perubahan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi perkembangan permintaan agregat, dapat disimpulkan bahwa perubahan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi perkembangan harga. Hal ini juga berarti bahwa kecenderungan kenaikan harga umum secara terus-menerus (*inflasi*) dapat terjadi apabila penambahan jumlah uang beredar melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Dapat dinyatakan secara sederhana bahwa: “jumlah uang beredar bertambah, harga barang-barang naik”. Dalam kasus ini, mengingat inflasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan uang beredar maka inflasi dikenal sebagai fenomena moneter.

Pengendalian uang beredar

Pengendalian jumlah uang beredar pada hakikatnya merupakan salah satu bagian dari kerangka kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh otoritas moneter. Dalam hal ini, sesuai dengan tujuan kebijakan moneter, pengendalian jumlah uang beredar pada umumnya ditujukan untuk menjaga kestabilan nilai uang dan mendorong kegiatan ekonomi. Yang dimaksud dengan pengendalian di sini adalah upaya otoritas moneter baik untuk menambah jumlah uang yang beredar (kebijakan ekspansi moneter) maupun mengurangi jumlah uang yang beredar (kebijakan kontraksi moneter). Pengendalian jumlah uang beredar tersebut juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kerangka kebijakan ekonomi makro. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan yang erat antara uang dengan variabel-variabel ekonomi lainnya, seperti suku bunga, *output*, dan harga. Dengan mengendalikan jumlah uang beredar tersebut, otoritas moneter akan dapat mempengaruhi nilai uang sedemikian rupa sehingga perkembangannya akan mampu mendorong perekonomian ke arah yang diinginkan sesuai dengan sasaran akhir yang ditetapkan, seperti inflasi yang rendah dan atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Quiz 1 Modul 1 Bag 1

Soal pilihan ganda

1. Alat yang di gunakan untuk melakukan pertukaran agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan terkhusus adalah barang, dan alat tersbut di setuju oleh banyak pihak adalah...
 - a. Uang
 - b. Jasa
 - c. Barang
 - d. Komoditas
2. Uang yang berbentuk kertas dan logam yang biasa kita gunakan untuk bertransaksi setiap harinya termasuk dalam uang apa..
 - a. Uang Giral
 - b. Uang Kuasi
 - c. Uang Kartal
 - d. Semua jawaban benar
3. Ada beberapa fungsi dasar uang yang sebenarnya, dibawah ini yang merupakan fungsi dasar uang adalah, Kecuali..
 - a. Sebagai alat tukar
 - b. Sebagai alat penyimpan nilai
 - c. Sebagai satuan Hitung
 - d. Sebagai alat menabung
4. Yang sering diberi simbol M1, didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal dan uang giral, adalah uang beredar dalam arti..
 - a. Dalam arti sempit
 - b. Dalam arti sedang
 - c. Dalam arti luas
 - d. Dalam arti keseluruhan
5. Yang sering juga disebut sebagai likuiditas perekonomian dan diberi simbol M2, didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Dengan kata lain M2 adalah M1 ditambah dengan uang kuasi. Merupakan uang beredar dalam arti..
 - a. Dalam arti luas
 - b. Dalam arti sedang
 - c. Dalam arti kecil
 - d. Dalam arti keseluruhan

Soal Esai

1. Apakah yang di maksud fungsi dasar uang sebagai satuan hitung..
2. Apa yang di maksud dengan uang fiat..
3. Apa yang anda ketahui tentang kesepakatan Bretton Woods..
4. Apa yang di maksud dengan Aktiva Dalam Negeri Bersih (net Domestic assets)..
5. Apa yang anda ketahui tentang (Opportunity Cost) atau biaya relatif..

PERTEMUAN 1 MODUL 2

PENYUSUNAN STATISTIK UANG BEREDAR

Tujuan: untuk mempelajari konsep statistik uang beredar di Indonesia

Capaian Pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

A	Prinsip dalam penyusunan statistik uang beredar
B	Neraca Bank Umum
C	Neraca Sistem moneter

Uang beredar merupakan salah satu indikator penting dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi. Karena setiap kebijakan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, konsumsi, dan investasi itu pasti akan selalu membutuhkan uang. Hal ini menunjukkan bahwa uang beredar mempunyai peran yang tidak terpisahkan dalam suatu perekonomian. Bahkan, keterkaitan antara kegiatan ekonomi dan uang itu ibarat dua sisi yang dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Uang beredar sering dikaitkan dengan suku bunga, pertumbuhan ekonomi, perkembangan harga dan lain-lainnya. Jumlah uang beredar banyak mendapatkan atau mendorong kenaikan harga dari barang-barang yang memiliki harga jual atau bisa disebut inflasi. Namun, jika jumlah yang beredar itu sedikit maka kegiatan ekonomi akan menjadi seret, contohnya itu seperti mesin yang kekuarang minyak oli. Maka dari itu, jumlah uang yang beredar harus perlu diatur supaya sesuai dengan kuantitas ekonomi yang bisa dibilangin itu agar uang beredar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit.

Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) merupakan otoritas moneter yang mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter seperti kebijakannya itu menagatur pengendalian jumlah uang yang beredar di negaranya. Pengendalian tersebut akan berjalan baik jika didukung oleh penyediaan informasi yang berkualitas seperti statistic uang beredar. Dengan mengetahui perkembangan jumlah uang yang beredar serta yang bisa mempengaruhi nya itu, Bank Indonesia dapat menentukan arah kebijakan moneter dengan melakukan penambahan (ekspansi) atau pengurangan (kontraksi) jumlah yang beredar. Bukan hanya itu juga, Bank Indonesia secara periodic bisa memberitahuikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang perkembangan statistic uang beredar tersebut.

Uang beredar dikatakan sebagai kewajiban system moneter terhadap sector swasta domestic yang terdiri dari uang kartal, uang giral dan uang kuasi. Namun jika dilihat dari kelembagaannya system moneter terdiri dari otoritas moneter dan bank umum. Uang beredar bisa juga disebutkan kewajiban dari system moneter yang dilihat dari neraca system moneter, yang menggabungkan antara neraca otoritas moneter dan neraca bank umum. Selain itu, sector swasta domestic adalah kegiatan untuk melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga pemerintah, ataupun individu.

Neraca otoritas moneter itu neraca Bank Indonesia yang berbentuk format analitis. Sedangkan, neraca bank umum itu gabungan dari neraca-neraca bank umum yang telah tersusun kedalam format analitis dengan berdasarkan laporan bulanan bank umum terus disampaikan kepada Bank Indonesia.

Jumlah uang beredar itu memiliki arti sempit (M1) dan arti luas (M2). Arti sempit (M1) terdiri dari uang giral dan uang kertas, sedangkan arti luas (M2) terdiri dari uang kuasi dan M1. Pada sisi aktiva dalam neraca system moneter terdapat factor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang beredar tersebut.

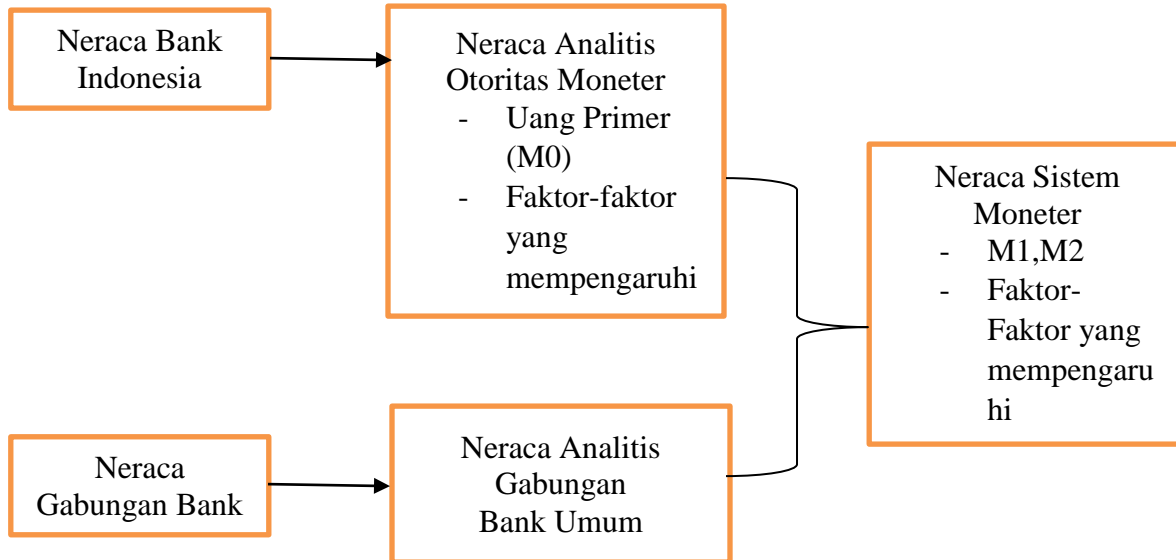
Prinsip – Prinsip dalam Penyusunan Statistik Uang Beredar

Untuk menyusun statistic uang beredar terdapat beberapa tahap tahap yang dilakukan penyusunan neraca system moneter, neraca otoritas moneter dan neraca gabungan umum. Tahapan tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Menyusun neraca analitis moneter dari neraca bank sentral (neraca otoritas moneter)
- 2) Menyusun neraca analitis moneter dari neraca gabungan bank umum
- 3) Menyusun neraca system moneter yaitu mengkonsolidasikan neraca analitis otoritas moneter dan neraca analitis gabungan bank umum.

Neraca analitis moneter adalah neraca yang disusun dengan mengelompokkan pos-pos dari neraca bank sentral yang bertujuan untuk keperluan analisis moneter. Dari neraca otoritas moneter terdapat jumlah uang primer (M0) dan factor yang mempengaruhi perubahannya. Jika neraca analitis otoritas moneter itu bergabung dengan neraca analitis dari gabungan bank umum maka hasilnya itu neraca system moneter. Maka dari hasil tersebut didapatkan jumlah uang beredar dari M1 dan M2 serta juga factor yang mempengaruhi perubahannya itu.

Berikut ini alur penyusunan neraca system moneter :



Neraca Otoritas Moneter

Penyusunan Neraca Bank Indonesia

Penyusunan ini memperhatikan dua kepentingan. Yang pertama, kepentingan Bank Indonesia sebagai suatu badan hukum. Yang kedua, kepentingan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Pada kepentingan pertama itu telah menyusun catatan dari semua kegiatan yang terkait dengan perubahan rekening-rekening kekayaan (aktiva) dan kewajiban (pasiva) Bank Indonesia. Pada kepentingan kedua itu telah menghasilkan catatan transaksi Bank Indonesia untuk diklasifikasikan dalam worksheet uang primer yang berasal dari penggabungan seluruh neraca kantor pusat dan kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia.

Worksheet uang primer adalah suatu lembar kerja yang didalamnya itu terdapat kelompok-kelompok dari sisi aktiva dan pasiva. Kelompok tersebut antara lain sebagai berikut :

Aktiva	Pasiva
1. Emas dan valuta asing a. Emas b. Valuta asing c. Penyisihan penghapusan aktiva valuta asing 2. Special Drawing Rights (SDR) 3. Surat Berharga 4. Tagihan pada Pemerintah	1. Kewajiban Moneter a. Uang kartal dalam peredaran b. Giro bank c. Giro pemerintah d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) e. Lainnya

<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam rupiah b. Dalam valuta asing c. Penyisihan penghapusan tagihan pada pemerintah <p>5. Kredit dan Pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perbankan b. Lainnya c. Penyisihan penghapusan piutang ragu-ragu <p>6. Penyertaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyertaan b. Penyisihan penghapusan penyertaan <p>7. Aktiva Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktiva tetap b. Akumulasi penyusutan aktiva tetap c. Lainnya 	<p>2. Pinjaman dalam valuta asing</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pinjaman sindikasi b. Pinjaman bilateral c. Pinjaman kepada pemerintah <p>3. Pasiva lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam rupiah b. Dalam valuta asing <p>4. Ekuitas lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Modal dan cadangan b. Laba tahun lalu c. Surplus tahun berjalan d. Cadangan revaluasi harga pasar e. Cadangan selisih kurs
---	---

Penyusunan Neraca Otoritas Moneter

Dari neraca yang dijelaskan diatas itu belum digunakan untuk kepentingan analitis moneter, maka dari itu disusunlah neraca otoritas moneter. Penyusunan pada sisi aktiva terdapat pos emas dan valuta asing, Special Drawing Rights (SDR) serta penempatan lainnya yang berbentuk simpanan dan surat-surat berharga diluar negeri. Sedangkan pada sisi passive terdapat pinjaman-pinjaman dari luar negeri dalam valuta asing yang telah dikelompokkan ke dalam pos Pasiva Luar Negeri. Dari neraca otoritas moneter tersebut dapat diperoleh berapa besar jumlah uang primer (M0) yang dicerminkan oleh komponen dan factor-factor yang menyebabkan perubahannya.

Terdapat beberapa pos yang berada di sisi pasiva yang merupakan komponen uang primer, yaitu:

1. Uang tunai yang dipegang baik oleh bank-bank umum maupun oleh masyarakat umum (uang kartal)
2. Saldo rekening giro rupiah milik bank-bank umum di Bank Indonesia

Terdapat beberapa pos yang berada di sisi aktiva yang merupakan pengaruh dari jumlah uang primer, yaitu:

1. Aktiva luar negeri
2. Tagihan bersih pada pemerintah pusat
3. Tagihan pada Lembaga dan perusahaan pemerintah
4. Tagihan pada perusahaan dan perorangan
5. Tagihan pada bank
6. Lainnya bersih

Neraca Bank Umum

Pada neraca bank umum terdapat dua kepentingan yang harus diperhatikan. Namun yang paling penting itu ialah kepentingan bank umum sebagai suatu badan usaha. Pada kepentingan sebelumnya, Bank Indonesia menyusun kembali penyusunan neraca yang berdasarkan status kepemilikannya. Dari format neraca yang telah berdasarkan status kepemilikannya itu didasarkan komponen uang beredar (uang giral dan uang kuasi) dan factor-faktor yang mempengaruhi perubahannya. Pos pos yang berada pada sisi aktiva merupakan factor yang mempengaruhi perubahan uang beredar. Sedangkan pos-pos pada sisi pasiva merupakan komponen-komponen uang beredar yaitu uang giral dan uang kuasi.

Neraca Sistem Moneter

Setelah menyusun kedua neraca sebelumnya, maka sekarang disusun dengan menggabungkan neraca analitis otoritas moneter dan bank umum. Dalam penggabungan itu pos pos yang bersifat intra akan saling menghapuskan, sedangkan pos-pos yang bersifat sama akan digabungkan sebagai suatu pos aktiva/pasiva dari system moneter.

Pada sisi aktiva terdapat pos pos sebagai berikut :

- a. Aktiva luar negeri bersih
- b. Tagihan bersih pada pemerintah pusat
- c. Tagihan pada Lembaga dan perusahaan pemerintah
- d. Tagihan pada perusahaan dan perorangan
- e. Lainnya bersih

Pada sisi pasiva terdapat pos pos sebagai berikut :

- a. Uang kartal dan saldo giro perusahaan dan perorangan pada neraca otoritas moneter
- b. Uang giral dan uang kuasi pada neraca analitis ban umum
- c. Membentuk uang beredar M1 dan M2

Penjelasan Pos – Pos dalam Neraca Sitem Moneter

1. Sisi Aktiva

a. Aktiva Luar Negeri Bersih

Merupakan penggabungan antara aktiva luar negeri bersih dari neraca otoritas moneter dan neraca gabungan bank umum karena terdiri dengan cadangan devisa bersih dan luar negeri lainnya

b. Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat

Merupakan hasil selisih bersih dari tagihan kepada pemerintah dengan kewajiban terhadap pemerintah. Jika tagihan moneter kepda pemerintah lebih besar dari kewajibannya maka tagihan bersih. kepada pemerintah akan berangka positif, dan sebaliknya juga.

c. Tagihan kepada Lembaga dan Perusahaan Pemerintah

Jumlah tagihan terhadap Lembaga dan perusahaan pemerintah ada di neraca otoritas moneter dan neraca gabungan bank umum

d. Tagihan kepada Perusahaan dan Perorangan (Sektor Swasta Domestik)

Tagihan ini diperoleh dengan menambahkan jumlah tagihan yang berada pada neraca otoritas moneter dengan tagihan yang berada di neraca gabungan bank umum

e. Lainnya Bersih

Untuk menampung pos yang tidak masuk kedalam kelompok yang disebutkan sebelumnya. Kelompok tersebut antara lain : Jaminan Impor, Rekening Modal, serta Hubungan Keuangan antara bank sentral dengan bank umum

2. Sisi Pasiva

Mencerminkan kewajiban moneter dari system moneter yang berupa uang beredar yaitu M1 dan M2 yang mana dimiliki oleh sector swasta domestik. Uang kartal maksudnya uang yang beredar dimasyarakat. Uang giral maksudnya uang yang diperoleh dengan menambahkan saldo giro milik sector swasta domestik. Sedangkan uang kuasi maksudnya uang yang diperoleh dengan menggabungkan simpanan berjangka dan tabung serta juga rekening valuta asing milik sector swasta domestik pada Bank Umum ataupun BI.

Factor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang beredar terjadi pada 5 pos saja yaitu :

- a. Aktiva luar negeri bersih
- b. Tagihan bersih pada pemerintah pusat
- c. Tagihan pada Lembaga dan perusahaan pemerintah
- d. Tagihan pada perusahaan dan perorangan
- e. Lainnya bersih

Isu Isunya :

-Uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh melambat pada Agustus 2019.-

Posisi M2 pada agustus 2019 tercatat Rp5.993,0 triliun atau tumbuh 7,3%(yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,8% (yoy). Perlambatan ini terjadi karena komponen uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi. Berdasarkan factor yang mempengaruhinya, perlambatan M2 terutama disebabkan oleh aktiva dalam negeri bersih. Akibatnya dalam negeri bersih pada agustus 2019 tumbuh 8,9% (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sebelumnya pada bulan sebelumnya yang sebesar 10,1% (yoy). Perlambatan aktiva dalam negeri bersih terutama disebabkan oleh

pertumbuhan penyaluran yang lebih rendah, dari 9,7% pada juli 2019 menjadi 8.6% pada agustus 2019. Sedangkan pada tagihan bersih kepada pemerintah pusat juga masih mengalami kontraksi sebesar -2,5% meskipun tidak sedalam bulan sebelumnya. Meskipun demikian, perlambatan M2 tersebut tertahan seiring dengan pertumbuhan aktiva luar negeri bersih yang meningkat dari 1,5% pada juli 2019 menjadi 2,9% pada agustus 2019 sejalan dengan meningkatnya cadangan devisa dan penurunan DPK valas.

Modul 2 Pertemuan 1

PERTANYAAN PENYUSUNAN STATISTIK UANG BEREDAR

ESSAY

1. Apa yang dimaksud dengan uang beredar ?
2. Sebutkan 2 kepentingan pada penyusunan neraca bank Indonesia?
3. Apa yang dimaksud dengan worksheet uang primer?
4. Apa yang dimaksud dengan tagihan bersih kepada pemerintah pusat ?
5. Apa yang dimaksud dengan tagihan kepada perusahaan dan perorangan (sector swasta domestic)?

PILIHAN GANDA

1. Yang mana bukan prinsip prinsip dalam penyusunan statistic uang beredar?
 - a. Menyusun neraca analitis moneter dari neraca bank sentral
 - b. Menyusun neraca analitis moneter dari nerca bank swasta
 - c. Menyusun neraca analitis dari neraca gabungan bank umum
 - d. Menyusun neraca system moneter yaitu mengkonsolidasikan neraca analitis otoritas moneter dan neraca analitis gabungan bank umum
2. Yang termasuk jumlah uang beredar dalam arti sempit adalah?
 - a. Uang kuasi
 - b. Deposito
 - c. Uang giral dan uang kertas
 - d. Sertifikat

3. Kepentingan bank umum sebagai suatu badan usaha, merupakan kepentingan dari?
 - a. Neraca Bank Umum
 - b. Neraca Sistem Moneter
 - c. Neraca Analitis Moneter
 - d. Neraca Otoritas Moneter

4. Yang tidak termasuk dalam pos aktiva pada neraca otoritas moneter?
 - a. Emas dan Valuta Asing
 - b. Pinjaman dalam Valuta Asing
 - c. Surat Berharga
 - d. Special Drawing Right (SDR)

5. Penampungan pos yang tidak termasuk kedalam kelompok, pengertian dari?
 - a. Aktiva Luar Negeri Bersih
 - b. Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat
 - c. Lainnya Bersih
 - d. Tagihan Sektor Swasta Domestik

PERTEMUAN 1 MODUL 3

KEBIJAKAN PENGEDARAM UANG DI INDONESIA

Tujuan: Untuk mempelajari kebijakan pengedaran uang di Indonesia

Capaian pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

A	Pendahuluan
B	Gambaran Umum kebijakan pengedaran uang
C	Sejarah pengedaran uang di Indonesia
D	Kebijakan pengedaran uang di beberapa negara
E	Kebijakan pengedaran uang di Indonesia

Sejarah perkembangan peradaban manusia menunjukkan bahwa uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian terutama karena fungsi utamanya sebagai alat pembayaran sehingga pada awalnya sering diartikan bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran, fungsi dan peranan uang mengalami perkembangan dan definisi uang juga mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Fungsi uang yang semula hanya sebagai alat pembayaran berkembang menjadi alat satuan hitung, alat penyimpan kekayaan, dan alat penyelesaian utang-piutang.

Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian. Tanpa adanya uang dapat dibayangkan betapa sulitnya dilakukan suatu transaksi baik transaksi barang maupun transaksi jasa, yang pada gilirannya akan menghambat kegiatan investasi, produksi, dan konsumsi. Di samping peranannya dalam perekonomian, uang juga memiliki peranan lain yang tidak kalah pentingnya, antara lain dalam rangka menjaga kedaulatan suatu negara. Uang sering dikaitkan sebagai identitas suatu negara yang berdaulat.

Untuk memenuhi jumlah uang beredar, maka masalah yang dihadapi adalah sulitnya memperkirakan jumlah uang yang berada di tangan masyarakat atau sering disebut sebagai *autonomous liquidity factor*.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang berdiri pada tahun 1953 sesungguhnya merupakan hasil nasionalisasi dari De Javasche Bank yang sebelumnya berfungsi sebagai bank sirkulasi. Di Indonesia, kebijakan pengedaran uang dilakukan oleh Bank Indonesia yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kegiatan pengelolaan pengedaran uang tentunya mencakup kegiatan yang luas yakni mulai dari perencanaan, pengadaan dan pencetakan uang sampai dengan penarikan uang dari peredaran.

Gambaran Umum Kebijakan Pengedaran Uang

Uang kartal di peredaran dikatakan sebagai autonomous liquidity factor. Permintaan uang oleh masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sulit diduga perubahannya. Di samping itu, uang yang dipegang masyarakat berada di luar sistem perbankan sehingga sulit dikontrol oleh bank sentral secara langsung. Oleh karena itu, untuk memprediksikan berapa jumlah permintaan uang tunai oleh masyarakat dalam suatu periode sulit diperkirakan secara akurat. Untuk itu, bank sentral di beberapa negara diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan uang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang antara lain sebagai berikut:

1) Kecepatan perputaran uang (Velocity of circulation)

Tingkat perputaran/perpindahan uang dari satu individu ke individu lain yang digunakan untuk kegiatan transaksi ekonomi di masyarakat akan mempengaruhi usia peredaran uang. Semakin besar tingkat perputaran uang akan memperpendek usia peredaran uang karena uang menjadi cepat lusuh. Umumnya denominasi pecahan kecil memiliki tingkat perputaran lebih cepat dibandingkan dengan pecahan besar.

2) Inflasi

Tingkat inflasi akan menyebabkan permintaan uang meningkat oleh karena harga barang cenderung lebih mahal sehingga untuk mendapatkan barang yang sama dibutuhkan lebih banyak uang. Di samping itu, kenaikan harga barang dapat menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap denominasi pecahan uang yang lebih besar semakin bertambah.

3) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Umumnya pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya peningkatan investasi dan transaksi kegiatan ekonomi. Apabila transaksi ekonomi meningkat dan

menyebabkan pendapatan masyarakat juga meningkat, maka kebutuhan uang menjadi bertambah.

4) Kondisi Sistem Perbankan

Persepsi masyarakat terhadap kondisi perbankan dan atau sektor perbankan secara keseluruhan yang buruk, misalnya, isu penutupan bank yang dapat menimbulkan niat masyarakat melakukan penarikan uang tunai secara besar-besaran. Keadaan tersebut dapat menyebabkan permintaan uang meningkat secara tiba-tiba.

5) Pengaruh musiman

Perilaku masyarakat terhadap permintaan uang pada waktu-waktu tertentu, misalnya, pada hari libur, hari raya keagamaan, menjelang waktu pergantian tahun, waktu penerimaan gaji karyawan pada akhir/awal bulan, dan menjelang akhir pekan. Pada waktu tersebut umumnya permintaan akan uang meningkat.

Kerangka kebijakan Pengedaran Uang

Umumnya arah dan tujuan kebijakan pengedaran uang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang (uang kertas dan uang logam) dalam jumlah nominal yang cukup, menjaga kualitas uang layak edar, dan menanggulangi tindakan pemalsuan uang. Kebijakan pengedaran uang tidak hanya menyangkut aktivitas pengadaan dan distribusi uang, tetapi juga kegiatan yang berkaitan dengan kualitas dan penggunaan uang sehingga masyarakat memiliki kebanggaan untuk menggunakan mata uangnya sendiri.

Untuk pencapaian sasaran mengenai kelancaran dan ketersediaan uang yang efisien maka langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain sebagaiberikut:

1) Penetapan jumlah uang yang dibutuhkan dalam perekonomian.

Jumlah uang yang diedarkan harus disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian. Apabila jumlah uang yang diedarkan lebih kecil dari kebutuhan maka akan menghambat kelancaran transaksi yang berdampak pada terganggunya kegiatan produksi dan investasi. Sebaliknya, apabila uang yang diedarkan melebihi kebutuhan, maka akan mengakibatkan naiknya harga-harga.

2) Pemetaan wilayah pengedaran uang.

Dalam rangka pengelolaan pengedaran uang, letak dan karakteristik suatu daerah perlu dipertimbangkan. Daerah yang sulit dijangkau oleh alat angkutan biasanya membutuhkan stok uang yang lebih besar. Di

samping itu, ada juga daerah yang memiliki karakteristik khusus, misalnya lebih senang menggunakan uang seri atau pecahan tertentu.

3) Perhitungan jumlah uang lusuh/rusak.

Perhitungan jumlah uang lusuh/rusak merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan dalam membuat rencana pencetakan uang.

4) Penyediaan stok uang yang optimal.

Perhitungan stok uang yang perlu dipelihara tidak hanya didasarkan pada kebutuhan pada kondisi normal, tetapi juga perlu dipertimbangkan kondisi darurat dan perlunya stok uang yang setiap saat harus tersedia.

Sejarah Pengedaran Uang di Indonesia

Sejarah pengedaran uang di Indonesia dapat ditelusuri sejak berdirinya De Javasche Bank, sebuah bank di masa pemerintahan Hindia Belanda yang pada akhirnya merupakan awal pendirian Bank Indonesia. De Javasche Bank berdiri pada tanggal 24 Januari 1828 dan dimaksudkan sebagai bank sirkulasi di wilayah Hindia Belanda⁵. Pendirian DJB ini mengikuti De Nederlansche Bank yang telah berfungsi sebagai bank sirkulasi di Belanda. Sejak awal pendiriannya, DJB merupakan badan hukum privat yang sahamnya dimiliki secara patungan oleh pemerintah Belanda (50%)⁶, Nederlandsche Handel-Mij (15%), dan masyarakat (35%). Berdasarkan Octroi en Reglement voor De Javasche Bank yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1828, DJB memegang monopoli dalam pengeluaran uang kertas bank.

Kebijakan pengedaran uang di Indonesia

Bank Indonesia telah menetapkan misi yang menjadi arah dari setiap kebijakan pengedaran uang. Rumusan misi tersebut adalah memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Rumusan misi ini dijabarkan dalam aktivitas dengan dukungan sarana maupun prasarana yang diperlukan.

Misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Setiap uang yang diterbitkan dimaksudkan agar dapat mempermudah kelancaran transaksi pembayaran tunai, dapat diterima, dan dipercaya oleh masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, uang perlu memiliki beberapa karakteristik, yaitu mudah digunakan dan nyaman (user friendly), tahan lama (durable), mudah dikenali (easily recognized), dan sulit dipalsukan (secure against counterfeiting).

- 2) Bank Indonesia mengupayakan tersedianya jumlah uang tunai di masyarakat secara cukup, dengan memperhatikan kesesuaian jenis pecahannya. Untuk ini, diperlukan perencanaan yang baik terutama dalam perencanaan pengadaan maupun perencanaan distribusinya.
- 3) Perlu diupayakan tersedianya kelembagaan pendukung untuk mewujudkan terciptanya kelancaran arus uang tunai yang layak edar, baik secara regional maupun nasional.

Dalam rangka mencapai misi tersebut di atas, Bank Indonesia merumuskan kegiatan strategis pengedaran uang sebagai berikut :

- 1) Penerbitan uang (emisi) baru harus dilandasi dengan suatu penelitian dan perencanaan yang matang sehingga uang baru yang diterbitkan memiliki kualitas yang baik sebagaimana karakteristik uang yang diuraikan di atas. Penelitian dan perencanaan tersebut dilaksanakan dalam rangka penetapan disain gambar uang, bahan uang, unsur pengaman, teknik cetak, serta kesesuaiannya dengan peralatan perkasan, seperti mesin sortasi, ATM, kemasan, dan sebagainya.
- 2) Kebijakan stok uang yang memungkinkan selalu tersedianya uang dalam jumlah yang cukup dengan berbagai pecahan untuk memenuhi penarikan dan persediaan uang. Kebijakan ini harus didukung oleh rencana cetak yang akurat, kebijakan tingkat kelayakan edar yang dapat ditolerir, serta sistem distribusi yang memadai.
- 3) Pemilikan sistem distribusi uang yang efektif yang menjamin ketersediaan stok uang yang cukup, lancar, dan tepat waktu. Hal ini dapat terealisasi apabila terdapat rencana distribusi uang yang akurat, kelancaran transportasi, dan efektivitas Depot Kas dalam melaksanakan fungsinya.
- 4) Adanya suatu kebijakan yang lebih mendorong keterlibatan perbankan maupun lembaga lainnya dalam membantu tugas pengedaran uang oleh Bank Indonesia yang meliputi :
 - a) Kebijakan yang mengatur kembali ketentuan setoran dan bayaran bank-bank.
 - b) Mendorong terbentuknya lembaga cash/money center yang memiliki fungsi melakukan kegiatan memproses uang (menghitung dan sortasi)
 - c) Kegiatan pertukaran uang kepada masyarakat tidak semata-mata dilakukan oleh bank indonesia, tetapi didukung pula oleh perbankan serta lembaga tertentu lainnya.
 - d) Mendorong terjadinya transaksi antarbank dalam bentuk uang tunai antara bank-bank yang surplus dengan bank-bank yang memerlukan

- e) Penyempurnaan prosedur dan ketentuan di bidang pengedaran uang, baik yang menyangkut kegiatan maupun infrastruktur yang mendukung terlaksananya kegiatan pengedaran uang yang efektif dan efisien.
- f) Pengembangan penerapan teknologi informasi di bidang pengedaran uang agar dapat menghasilkan informasi yang cepat dan akurat.
- g) Penyempurnaan organisasi yang melaksanakan tugas pengedaran uang, dengan tujuan agar mampu melaksanakan manajemen dan tugas pengedaran uang secara efektif

Manajemen Pengedaran uang

Sebagaimana diketahui, fungsi manajemen lazimnya dirumuskan sebagai POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Mengelola berarti merencanakan, menyiapkan pengorganisasian, melaksanakan, dan mengontrol bahwa pelaksanaan berjalan sedemikian rupa, untuk selanjutnya memberikan masukan bagi perencanaan yang lebih baik. Demikian halnya, manajemen pengedaran uang dijalankan dengan memperhatikan fungsi manajemen dimaksud.

Pengelolaan pengedaran uang oleh Bank Indonesia dapat pula dilihat dari proses “kehidupan” uang, yakni sejak tahap persiapan pengeluaran sampai dengan uang itu kembali kepada Bank Indonesia untuk “dikebumikan” dengan tertib dan aman. Oleh karena itu, dilihat dari proses pelaksanaan pengedaran uang, maka tahap-tahap kehidupan uang dapat dibagi menjadi empat fase, yaitu fase pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah. Selain keempat fase tersebut, manajemen pengedaran uang mencakup pula pengelolaan terhadap kegiatan penanggulangan uang palsu.

Pengeluaran Uang Rupiah

Penggunaan istilah pengeluaran digunakan oleh Undang-undang Bank Indonesia. Dalam Bahasa Inggris istilah pengeluaran lazimnya dikatakan sebagai issuing atau penerbitan uang. Dalam setiap penerbitan uang diperlukan suatu perencanaan yang matang dan komprehensif agar uang yang diterbitkan memiliki mutu yang baik, dan diupayakan agar kepercayaan masyarakat terhadap uang tetap terjaga. Perencanaan yang terkait langsung dengan pengedaran uang, antara lain meliputi: perencanaan penerbitan uang emisi baru dan perencanaan distribusi uang.

Perencanaan yang terkait langsung dengan pengedaran uang, antara lain meliputi: perencanaan penerbitan uang emisi baru dan perencanaan distribusi uang.

1) Perencanaan penerbitan uang emisi baru

Dalam setiap penerbitan uang diupayakan agar kepercayaan masyarakat terhadap uang tetap terjaga. Maka dari itu setiap uang yang diterbitkan dibuat sebaik mungkin agar dapat diterima oleh masyarakat

2) Penerbitan uang khusus (commemorative money)

Guna memperingati suatu kejadian tertentu yang bersifat momental dalam bentuk uang khusus. Kejadian tertentu yang dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan uang khusus adalah hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mencapai kurun waktu tertentu dan momentum atau flora/fauna tertentu yang sangat menonjol yang dapat meningkatkan citra Indonesia di mata internasional atau bisa juga peringatan momental lain seperti hari anak sedunia, dll.

Dalam perencanaan penerbitan uang baru ini juga dilakukan pengkajian terhadap persyaratan fisik uang agar memberi kenyamanan dalam penggunaan, mudah dikenali ciri keasliannya, tahan lama, dan sulit dipalsukan.

a) Kenyamanan dalam penggunaan

Uang rupiah yang hendak diterbitkan nantinya mampu memberikan kenyamanan bagi pengguna, para kasir, juru parkir, dan lapisan masyarakat lainnya. Untuk dapat memenuhi karakteristik ini, uang haruslah mempunyai sifat – sifat dibawah ini:

- Kepraktisan, yakni uang tersebut mudah disimpan di dalam saku atau dompet uang maupun pada alat penyimpan uang di perbankan yang sudah standar atau lazim digunakan;
- Kemudahan, yakni uang memiliki spesifikasi teknis yang tidak menyulitkan untuk digunakan pada peralatan-peralatan kas, vending machine, ATM, dan sebagainya. Masyarakat juga tidak akan mengalami kesulitan untuk membedakan antara pecahan yang satu dengan pecahan lainnya.
- Mudah Dikenali
Setiap jenis uang dengan berbagai pecahannya hendaklah mudah dikenali secara cepat oleh masyarakat, termasuk penyandang tuna netra. Masyarakat juga tidak akan mengalami kesulitan untuk membedakan antara pecahan yang satu dengan pecahan lainnya.

Perbedaan warna dan disain uang masing-masing pecahan dibuat dengan jelas termasuk ukurannya, terutama pada uang logam.

b) Tahan Lama

Spesifikasi uang direncanakan sedemikian rupa untuk menghasilkan uang rupiah yang tahan lama, tidak mudah sobek, dan tidak cepat lusuh. Dengan demikian, uang rupiah yang dikeluarkan akan memiliki usia edar yang cukup panjang di masyarakat. Usia edar ini memiliki arti penting karena akan berpengaruh kepada kesegaran dan kebersihan uang yang dipegang oleh masyarakat.

c) Sulit dipalsukan

Bank Sentral selaku otoritas pengedaran uang senantiasa mengantisipasi tindak kejahatan pemalsuan uang. Kemampuan pemalsu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang percetakan, electronic scanners, color management software dan color printers, fotocopy, dan piranti cetak lainnya. Perlu disadari bahwa tidak ada pemalsuan uang yang sempurna dan tidak ada pula disain uang yang begitu sempurna tahan sepenuhnya terhadap pemalsuan. Oleh karena itu, ketahanan uang terhadap upaya pemalsuan merupakan suatu perpaduan antara kualitas disain uang, unsur pengaman (security features), dan proses cetak yang sedemikian rupa sehingga relatif tidak mudah dipalsukan.

Dengan perencanaan dan pengkajian yang dilakukan, maka untuk merealisasikan penerbitan uang baru diperlukan suatu penetapan disain uang dan kebijakan penempatan unsur-unsur pengaman baik yang ada pada bahan uang maupun penggunaan teknik cetaknya.

a) Desain uang

Proses disain uang melalui penetapan gambar utama dan gambar lainnya sebagai pendukung gambar utama yang dipilih dengan memperhatikan unsur estetikanya. Gambar utama pada disain uang yang dipilih biasanya menampilkan ciri khas nasional, seperti flora, fauna, kesenian, kebudayaan nasional, pemandangan alam, ataupun pahlawan nasional.

b) Unsur pengaman pada bahan uang maupun teknik cetaknya

Unsur pengaman pada uang dapat diletakkan sejak awal, tertanam pada bahan uang, ada pula yang dibentuk melalui proses pencetakan. Unsur pengaman tersebut dapat dibedakan unsur pengaman yang terbuka (overt security features) dan yang tidak terbuka (covert security features). Kebanyakan unsur pengaman adalah unsur pengaman yang terbuka yang dapat dilihat secara mudah oleh masyarakat awam, kasir perbankan, dan pengguna lainnya untuk mampu segera mengenali keaslian uang.

Perencanaan Distribusi Uang

Rencana Distribusi Uang (RDU) adalah penetapan jumlah dan komposisi pecahan uang yang akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan kas setiap kantor Bank Indonesia selama satu tahun. Dalam penyusunan RDU terdapat beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan, yaitu : (i) jumlah setoran (inflow) dan bayaran (outflow) ; (ii) uang yang dimusnahkan (PTTB) ; (iii) jumlah posisi kas; dan (iv) kondisi ekonomi serta geografis daerah secara spesifik. Perkembangan outflow dan inflow, baik di Jakarta maupun di daerah, sesungguhnya mencerminkan suatu pola pergerakan permintaan uang kartal yang dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi, perbandingan jumlah kredit dan dana, jumlah kantor bank & jaringan ATM, perkembangan suatu daerah (termasuk otonomi daerah), faktor musiman, tingkat usia edar uang dan jarak suatu daerah.

Pengadaan uang

Tujuan pengadaan uang adalah agar Bank Indonesia mempunyai stok uang yang cukup dalam berbagai pecahan dengan kondisi layak edar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengadaan uang mempunyai fungsi yang penting untuk memperlancar pembayaran tunai dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah karena selalu tersedianya uang yang dibutuhkan.

Jumlah uang atau bahan uang untuk diadakan didasarkan pada rencana cetak uang tahunan. Kegiatan pengadaan uang dilakukan untuk mendukung penerbitan uang (emisi) baru maupun pencetakan rutin terhadap uang yang telah diterbitkan.

Pengedaran Uang

Pengedaran uang terdiri dari kegiatan distribusi uang dan layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengiriman uang yang dilakukan oleh Kantor Pusat ke Kantor Koordinator dan selanjutnya kepada kantor-kantor Bank Indonesia di daerah, dan sebaliknya.

1) Distribusi Uang

Tujuan distribusi uang adalah untuk memenuhi kebutuhan kas setiap kantor Bank Indonesia dalam rangka menjaga posisi/persediaan kas yang aman.

2) Layanan Kas

Kegiatan layanan kas oleh Bank Indonesia, pada garis besarnya terdiri dari penerimaan setoran dari bank-bank, kegiatan bayaran, penukaran, dan layanan kas lainnya.

Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kelayakan edar uang adalah :

- a) Kualitas bahan uang, di samping faktor lainnya seperti *master dies* yang digunakan.

- b) Iklim dan kelembaban udara, semakin panas dan lembab dapat mempercepat kerusakan uang.
- c) Kebiasaan masyarakat dalam menangani uang. Uang akan cepat rusak bilamana masyarakat memiliki kebiasaan seperti melipat atau menstaples uang.

Pencabutan dan penarikan uang

Penarikan adalah suatu proses masuknya uang-uang yang telah dicabut ke dalam perkasan Bank Indonesia. Uang yang telah dicabut tidak akan dibayarkan kembali, walaupun kondisinya masih relatif baik. Uang yang telah ditetapkan tidak akan diedarkan kembali, akan dilakukan pemusnahan oleh Bank Indonesia.

Tujuan dari pencabutan uang dari peredaran adalah untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta untuk penyederhanaan komposisi dan emisi pecahan. Adapun dasar pertimbangan yang menentukan suatu pecahan harus ditarik dari peredaran, antara lain karena:

- a) Tingkat pemalsuan yang cukup tinggi, dilihat dari realisasi jumlah penemuan uang palsu dibandingkan dengan UYD (uang yang diedarkan) pecahan tersebut serta memperhatikan pula tingginya mutu pemalsuan yang dapat mengecohkan masyarakat.
- b) Pecahan tersebut sudah cukup lama beredar (lebih dari 7 tahun).

ISU : saat ini maraknya sistem keuangan digital yang dapat menggeser peredaran uang tunai kedepannya, memang tidak akan sepenuhnya menggeser uang tunai akan tetapi dengan sistem keuangan digital ini harus dilakukan kebijakan peraturan pembayaran digital agar terjaminnya keamanan sistem digital tersebut.

Quiz 1 Pertemuan 1 Modul 3

1. Dalam perekonomian uang memiliki peranan strategis karena fungsi utama uang ialah sebagai alat . . .
 - a. Pertukaran
 - b. Pembayaran
 - c. Pembelian
 - d. pendapatan
2. Pada tahun berapakah Bank sentral Republik Indonesia berdiri?
 - a. 1951
 - b. 1952
 - c. 1953
 - d. 1954
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan uang, kecuali?
 - a. Kecepatan perputaran uang
 - b. Inflasi
 - c. Pertumbuhan produk domestik bruto
 - d. Kecepatan penarikan uang
4. Penyebab permintaan uang meningkat oleh harga barang cenderung lebih mahal disebut?
 - a. Deflasi
 - b. Inflasi
 - c. Menyusut
 - d. Semua salah
5. Uang kertas dan uang logam termasuk uang?
 - a. Uang giral
 - b. Uang kartal
 - c. uang giro
 - d. uang kertas
6. Jelaskan arah dan tujuan pengedaran uang . . .
7. Sebutkan langkah-langkah mengenai kelancaran dan ketersediaan uang . . .
8. Sebutkan fungsi manajemen pengedaran uang . . .
9. Sebutkan perencanaan langsung dengan pengedaran uang. . .
10. Jelaskan tujuan distribusi uang . . .

PERTEMUAN 2 MODUL 3 SISTEM AKUNTANSI BANK INDONESIA

Tujuan: Untuk mempelajari Sistem Akuntansi Bank Indonesia

Capaian Pembelajaran: Pada akhir pertemuan, mahasiswa diharapkan mampu memahami:

A	Pendahuluan
B	Sistem akuntansi dan penerapannya di bank sentral
C	Sistem akuntansi bank Indonesia

Pengertian Sistem Akuntansi

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya akuntansi tidaklah dapat dipisahkan dengan masalah informasi, khususnya informasi keuangan. Tujuan utama akuntansi adalah bagaimana menyajikan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif secara tepat waktu, akurat, lengkap, andal, dan terpercaya, sehingga berhasil guna untuk pengambilan keputusan bagi para pemakainya, baik bagi pihak internal organisasi, yaitu manajemen, maupun bagi pihak eksternal, seperti pemegang saham, calon investor, kreditor, dan juga pemerintah. Agar akuntansi dapat menghasilkan informasi keuangan atau yang lebih kita kenal dengan nama laporan keuangan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu didukung oleh suatu sistem akuntansi yang baik dan andal.

Aspek-aspek Sistem Akuntansi

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Salah satu pihak yang menggunakan laporan keuangan sebagai alat bantu pengambilan keputusan adalah pihak-pihak di luar perusahaan atau pihak eksternal, seperti investor, kreditor, pemerintah, calon investor, calon kreditor, dan lain sebagainya.

Sistematika Rekening atau Sistematika Akun

Transaksi keuangan suatu perusahaan, khususnya untuk perusahaan yang relatif besar, pada umumnya cukup banyak jumlahnya atau cukup tinggi frekuensinya. Oleh karena itu, agar pencatatan transaksi menjadi efisien dan mudah, maka disediakan tempat untuk mencatatnya.

Sistem Akuntansi di Bank Sentral

sistem akuntansi Bank Sentral tidak sama dengan sistem akuntansi bank komersial, meskipun memiliki kemiripan. Hal ini dikarenakan

tujuan dan tugas Bank Sentral bukanlah diutamakan untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana tujuan bank komersial, melainkan lebih untuk melaksanakan pengendalian moneter.

Kebijakan Akuntansi Bank Sentral

fungsi Bank Sentral sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa kekhususan perlakuan akuntansi di Bank Sentral dibandingkan dengan bank komersial. Pada umumnya Bank Sentral memiliki posisi aktiva bersih dalam valuta asing (net open position) dalam jumlah yang relatif besar. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kecukupan cadangan devisa negara yang bersangkutan. Dalam kaitan ini, tujuan utama Bank Sentral bukanlah untuk mencari keuntungan sebagaimana motif bank komersial, melainkan dalam rangka mempertahankan stabilitas harga. Mengingat fungsi dan tujuan kepemilikan valuta asing oleh Bank Sentral sebagaimana tersebut di atas, Bank Sentral tidak langsung mengakui hasil revaluasi aktiva dan kewajiban dalam valuta asing sebagai keuntungan atau kerugian, tetapi mencatatnya sebagai *unrealized income* dan disajikan di neraca dalam kelompok ekuitas. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari IMF.

Pertimbangan pencatatan hasil revaluasi aktiva dan kewajiban dalam valuta asing di neraca dan bukannya di laporan laba rugi adalah:

- untuk menjamin bahwa perubahan kurs valuta asing tidak berdampak inflatoir terhadap pendapatan Bank Sentral.
- untuk menghindari distribusi keuntungan yang bersumber dari *unrealized gains* kepada Pemerintah.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan oleh Bank Indonesia secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Sistem Akuntansi Bank Di Indonesia

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Bank Indonesia memerlukan berbagai macam informasi baik berupa informasi keuangan maupun nonkeuangan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan. Informasi keuangan disajikan dalam suatu laporan, yaitu laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam bab-bab terdahulu bahwa suatu informasi keuangan akan bermanfaat apabila informasi tersebut tepat waktu, akurat, relevan, dan lengkap. Untuk dapat menghasilkan informasi sebagaimana tersebut di atas, fungsi akunting harus didukung oleh suatu sistem akuntansi yang memadai. Sistem akuntansi di Bank

Indonesia diatur dalam suatu ketentuan berupa Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia **No.1/12/PDG/1999** tentang Sistem Akunting Bank Indonesia. Berdasarkan PDG dimaksud, sistem akuntansi Bank Indonesia meliputi prinsip-prinsip, kebijakan, hubungan organisasional, prosedur, dan hubungan antarprosedur yang dirancang untuk mencatat transaksi keuangan, mengendalikan kegiatan operasional dan sumber daya Bank Indonesia, serta menyajikan informasi keuangan dalam rangka perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaporan.

Perkembangan Sistem Akuntansi Bank Indonesia Sebelum Era Komputerisasi.

Sebelum tahun 1980, era ketika keberadaan BI diatur dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, sistem akuntansi Bank Indonesia yang pada masa itu lebih dikenal dengan istilah sistem pembukuan dan penyusunan neraca Bank Indonesia memiliki kondisi sebagai berikut:

- Neraca Gabungan Bank Indonesia disusun dengan menggabungkan neraca dari unit-unit pembukuan di kantor pusat dan kantor cabang yang mungkin mengandung angka-angka dari tanggal neraca yang berbeda sehingga berpotensi memberikan gambaran yang bias;
- Penyusunan neraca gabungan yang meliputi pengelompokan, penggabungan, pemindahbukuan, dan sebagainya ada sebagian yang dikerjakan di dalam catatan, dan hasilnya dipindahkan ke dalam formulir neraca gabungan;
- Neraca belum sepenuhnya menunjukkan informasi yang cermat sehubungan dengan tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral karena beberapa pengelompokan rekening-rekening yang disadari kemudian kurang tepat.

Emas

Emas terdiri dari emas batangan, deposito emas, dan uang logam emas. Emas batangan dan deposito emas dinilai secara periodik berdasarkan harga pasar.

Perlakuan akuntansi untuk emas di bank-Bank Sentral negara Eropa (ECB) adalah sebagai berikut :

- Emas direvaluasi dan disajikan dengan menggunakan harga pasar (*mid-market rates and prices*);
- Tidak ada pemisahan antara hasil revaluasi emas akibat perubahan kurs dan harga emas, tetapi revaluasi dihitung persatuan harga emas dalam euro berdasarkan perubahan kurs EUR terhadap USD.

Uang Asing

Uang Asing disajikan di neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

Hak Tarik Khusus (*Special Drawing Rights*)

Hak tarik khusus adalah simpanan wajib pada *International Monetary Fund* (IMF) dalam valuta *SDR* (*Special Drawing Right*). Hak tarik khusus disajikan di neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

Giro

Giro Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank sentral negara lain atau pada bank di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

Deposito pada Bank Koresponden

Deposito dalam valuta asing pada bank koresponden di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada tanggal laporan.

Surat Berharga

Surat berharga yang dimiliki Bank Indonesia dikelompokkan berdasarkan tujuan pemilikan, yaitu dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*) yang disajikan berdasarkan harga perolehan dan tersedia

Tagihan Kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah terdiri dari obligasi Pemerintah, surat utang Pemerintah, dan tagihan lainnya kepada Pemerintah.

a. Obligasi Pemerintah

Obligasi Pemerintah yang telah diperjualbelikan dalam rangka Operasi Pasar Terbuka disajikan di neraca sesuai harga pasar (bila ada).

b. Surat Utang Pemerintah

1) Surat utang Pemerintah disajikan sebesar nilai surat utang yang belum dilunasi ditambah atau dikurangi dengan indeksasi yang telah dilakukan.

2) Hasil indeksasi surat utang disajikan di neraca pada pos Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah dalam kelompok ekuitas.

c. Tagihan Lainnya kepada Pemerintah

Tagihan lainnya kepada Pemerintah disajikan di neraca sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi oleh Pemerintah.

Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada bank disajikan di neraca sebesar jumlah bruto yaitu jumlah yang belum dilunasi oleh bank. Bunga yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Tagihan kepada Bank.

Tagihan kepada Lainnya

Tagihan kepada lainnya terdiri atas tagihan karena pemberian kredit *channeling*, sisa kredit program, dan lain-lain disajikan di neraca sebesar jumlah bruto yang belum dilunasi nasabah.

Penyisihan Kerugian Aktiva

Bank Indonesia membentuk penyisihan kerugian aktiva secara gabungan berupa penyisihan piutang dan penempatan, taksiran kerugian komitmen, dan kontinjensi.

Evaluasi manajemen atas kolektibilitas/nilai realisasi masing-masing aktiva dilakukan berdasarkan sejumlah faktor antara lain kondisi perekonomian saat ini maupunantisipasi perkembangan ekonomi untuk masa yang akan datang, kondisi keuangan peminjam, hubungan dan kesepakatan Bank Indonesia dengan peminjam sebelumnya, kelancaran pembayaran pada masa lampau, kemampuan membayar, nilai jaminan, dan faktor-faktor relevan lainnya.

Penyertaan

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, penyertaan Bank Indonesia harus didivestasi seluruhnya dalam periode tertentu, sehingga penyertaan yang dicatat dengan harga perolehan (*historical cost*) tersebut tidak dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia. Apabila terdapat penurunan permanen, maka nilai tercatat penyertaan harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut.

Aktiva Tetap

Bank Indonesia telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap. Selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku aktiva disajikan di neraca pada pos Hasil Revaluasi Aktiva Tetap. Aktiva yang telah dinilai kembali tersebut disajikan sebesar nilai revaluasi (nilai pasar atau nilai wajar) dikurangi akumulasi penyusutan.

Aktiva tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

Aktiva Sewa Guna Usaha

Aktiva sewa guna usaha dicatat pada sisi aktiva dalam pos Aktiva Sewa Guna Usaha dan pada sisi kewajiban dalam pos Kewajiban Sewa Guna

Usaha pada awal masa sewa guna usaha. Jumlah yang dicatat sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi). Setiap pembayaran sewa guna usaha dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga. Aktiva sewa guna usaha disusutkan selama masa manfaat dengan metode garis lurus.

Aktiva Tidak Berwujud

Aktiva tidak berwujud diakui apabila telah dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari dan disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Aktiva tidak berwujud diamortisasikan berdasarkan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Uang dalam Peredaran

Uang dalam peredaran disajikan sebagai komponen kewajiban sebesar nilai nominal jumlah uang kertas dan uang logam yang telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia.

Giro

Giro atau simpanan pihak lain pada Bank Indonesia terdiri atas giro dalam rupiah dan giro dalam valuta asing. Giro dalam rupiah disajikan sebesar nilai nominal, sedangkan giro dalam valuta asing disajikan dan dijabarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs neraca Bank Indonesia pada tanggal laporan.

Pinjaman dari Pemerintah

Bagian terbesar dalam pinjaman dari Pemerintah adalah Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) yang diindeksasi berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Selisih antara nilai nominal SUBI dengan nilai hasil indeksasi dicatat dalam pos Hasil Indeksasi SUBI dalam kelompok ekuitas. SUBI disajikan di neraca sebesar nilai nominal SUBI yang belum dilunasi, ditambah/ dikurangi dengan hasil indeksasi, dan ditambah bunga SUBI yang masih harus dibayar.

Hasil Revaluasi Aktiva Tetap

Hasil revaluasi aktiva tetap dicatat sebesar selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku aktiva tetap dan disajikan di neraca dalam kelompok ekuitas.

Transaksi dalam Valuta Asing

Transaksi valuta asing dibukukan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada saat terjadinya transaksi. Pada setiap periode waktu tertentu, termasuk akhir tahun, aktiva dan pasiva dalam valuta asing

dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca yang berlaku pada tanggal yang bersangkutan

Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah (SUP) dan Surat Utang Bank Indonesia (SUBI)

Indeks yang digunakan dalam menghitung indeksasi SUP dan SUBI adalah IHK yang disepakati bersama oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam hal kesepakatan belum diperoleh, indeks yang digunakan adalah IHK yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

Pengakuan Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari pinjaman dan penempatan diakui sebagai pendapatan secara akrual.

Taksiran Manajemen

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban, pengungkapan aktiva, dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran-taksiran tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Jurnal ini sebelumnya, dapat diketahui bahwa Bank Indonesia sesuai dengan kedudukannya sebagai Bank Sentral memiliki karakteristik dan tugas yang jauh berbeda dibandingkan dengan bank komersial, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tugas Bank Indonesia yang non profit oriented dan boleh dikatakan unik tersebut membawa "konsekuensi" terhadap sistem akuntansi yang diterapkan.

Sistem akuntansi Bank Indonesia pada dasarnya telah mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku umum. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi, Bank Indonesia juga telah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan International Accounting Standard (IAS). Namun demikian, sebagai akibat dari keunikan tugas sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia juga melakukan transaksi-transaksi yang tidak lazim dilakukan oleh entitas-entitas lain, tetapi hanya dilakukan oleh bank-Bank Sentral. Dalam mencatat transaksi seperti ini, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Bank Indonesia adalah mengikuti praktek akuntansi yang diterapkan oleh Bank Sentral pada umumnya, seperti penyajian Kas di sisi kewajiban sebagai offsetting account, dan pengakuan keuntungan/kerugian hasil revaluasi aktiva, dan kewajiban dalam valas pada saat realisasi.

Dalam upaya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia, maka kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada stakeholder akan selalu dijaga baik dari segi

Isu Isu :

Revolusi Akuntansi Dimulai! Runtuhkan Sistem Balance Sheet!

Apa yang terjadi sebenarnya?

Jika selama ini kita kenal dalam sistem, dimana angka di sisi pasiva harus sama dengan pasiva. Pendapatan perusahaan jumlahnya harus sama persis dengan operasional lembaga.

Hampir semua orang tahu, ketika kita harus membuat laporan keuangan, maka satu rumus yang harus berlaku adalah pasiva=aktiva. Dengan kata lain, Pendapatan = pengeluaran, atau modal + hutang = aktiva lancar + aktiva tetap + Laba. Inilah yang disebut dengan teori balance sheet. Teori ini menegaskan bahwa wajib hukumnya aktiva dan pasiva pada neraca mencapai angka yang sama. Bagaimanapun caranya.

Padahal jika kita amati lebih lanjut komponen dari aktiva dan pasiva, disusun atas beberapa pos yang diantaranya berasal dari angka real transaksi, hasil akumulasi beberapa akun, namun ada pula yang merupakan angka prediksi. Seperti pada pos penyusutan, depresiasi, atau amortisasi. Singkatnya, untuk mencapai angka yang seimbang, para pakar akuntansi dan kini diikuti mungkin oleh semua akuntan baik perusahaan maupun individu dapat memakai banyak metode untuk membuat angka di sisi pasiva sama dengan aktiva.

Lalu, salahkah teori ini?

Secara teori dasar muamalah, selama tidak ada yang dirugikan dan tidak ada hukum yang melarang, maka sah. Namun dampaknya, pada situasi tertentu teori balance sheet tidak sesuai jika diterapkan pada lembaga keuangan yang menganut prinsip syari'ah. Dimana kita tahu bahwa prinsip syari'ah sangat menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Mencatat angka sesuai dengan transaksi yang terjadi tanpa manipulasi.

Quiz 2 Pertemuan 2 Modul 3

1. Ada berapa Aspek-aspek Sistem Akuntansi?
 - a. 3
 - b. 2
 - c. 6

2. Apa Kepanjangan dari SAK?
 - a. Standar Akuntansi Keuangan
 - b. Sistematika Rekeni Sistematika Rekening atau Sistematika Akunng atau Sistematika Akun
 - c. Sistematika Rekening atau Sistematika Akun

3. Apa nama lain dari chart of account?
 - a. Bank Sentral
 - b. Sistematika rekening
 - c. Biaya pelayanan

4. Apa singkatan dari Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia?
 - a. AKBI
 - b. PKBI
 - c. PAKBI

5. tugas pokok dari yang digunakan untuk mencatat transaksi/transfer dana antarbank, dalam rangka mendukung kelancaran sistem pembayaran?
 - a. On-line Processing Integrated Computer System (OPICS)
 - b. Data Akuntansi dan Keuangan (BIDAK)
 - c. Real Time Gross Settlement (RTGS)

6. Apa pengertian dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK)?
7. Sebutkan Kebijakan Akuntansi Bank Sentral pada Pertimbangan pencatatan hasil revaluasi aktiva dan kewajiban dalam valuta asing di neraca dan bukannya di laporan laba rugi?
8. Pada awalnya OSA di Bank Indonesia terdiri dari beberapa sistem yang belum terintegrasi, yaitu?
9. Apa nama-nama dari sistem aplikasi bank Indonesia aplikasi lain guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokoknya ?
10. Apa padoman dari Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI)?

PERTEMUAN 3 MODUL 4 BAGIAN 1

PASAR UANG RUPIAH

Tujuan: Untuk mempelajari peran pasar uang Rupiah di Indonesia

Capaian pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa diharapkan mampu memahami:

A	Pendahuluan
B	Gambaran umum pasar uang
C	Kebijakan moneter dan pasar uang di beberapa negara
D	Pasar uang di Indonesia

A. Pendahuluan

Secara garis besar pasar keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pasar modal dan pasar uang (money market). Pasar modal adalah pasar tempat diperdagangkan adalah surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Sementara itu, di pasar uang surat-surat berharga yang diperdagangkan berjangka pendek di bawah satu tahun. Dengan demikian, suatu surat berharga berjangka waktu lebih dari satu tahun, apabila ditransaksikan secara repo dengan jangka waktu yang kurang dari satu tahun, dikategorikan pula sebagai transaksi pasar uang.

Dalam sistem perekonomian karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara *inflows* dan *outflows* sehingga pasar uang dibutuhkan. Misalnya, perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode tertentu dan pada waktu yang lain perusahaan harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya operasionalnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut perusahaan pada saat kasnya mengalami defisit, maka perusahaan tersebut sementara dapat memasuki

pasar uang sebagai peminjam dengan mencari lembaga keuangan atau pihak lain yang memiliki *surplus* dana. Selanjutnya, pada saat perusahaan tersebut mengalami *surplus* dana, maka perusahaan tersebut menjadi kreditor dalam pasar uang untuk memperoleh pendapatan daripada membiarkan dananya tak terpakai atau *idle*.

Sesuai dengan namanya, pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Dan di pasar uang ini diperjualbelikan instrumen kredit jangka pendek. Kredit yang dimaksud bisa berupa kredit harian (*On Call*), kredit bulanan (*Prolongasi*) maupun kredit tiga bulanan (*Belening*). Oleh karena kredit yang diperjualbelikan kurang dari satu tahun, maka disebut kredit jangka pendek.

B. Gambaran Umum

1. Sejarah dan Landasan Hukum Pasar Uang

Pada tahun 1952 diawali dengan berdirinya Pasar Uang dan Modal (P.U.M). Tahun 1958 didirikan Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek (PPUE). Namun tekanan politik dan suramnya suasana dibidang moneter, pertumbuhan Bursa Efek mengalami kemunduran. Pada 26 Juli 1968 Kep Dir Bank Indonesia No.4/16 Kep.Dir Bank Indonesia membentuk Team Persiapan Pasar Uang dan Modal. Kemudian 13 Januari 1972 SK Menkeu No.Kep-25/MK/IV/1/1972 dibentuk Badan Pembina Pasar Uang sekaligus pembubaran Team Persiapan Pasar Uang dan Modal yang tugasnya telah selesai. Lalu Tahun 1976 lahir Keputusan Presiden RI No.52 tentang Pasar Modal.

2. Pengertian Pasar Uang

Pasar uang adalah pasar tempat suatu pihak meminjam dana dari pihak lainnya pada tingkat bunga tertentu dan biasanya untuk jangka waktu di bawah satu tahun. Jangka waktu pinjaman bisa bervariasi, mulai dari satu hari sampai satu tahun. Pinjaman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun digolongkan sebagai pasar hutang.

Pengertian pasar uang dalam teori ekonomi bukanlah suatu tempat secara fisik orang berjualan dan menjalankan barang dagangannya. Pasar diartikan secara lebih luas dan abstrak namun tetap mencakup pasar dalam pengertian sehari-hari, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Apabila permintaan bertemu penawaran di pasar, maka akan terjadi transaksi. Transaksi merupakan kesepakatan antara apa yang diinginkan pembeli dan apa yang diinginkan penjual. Dalam transaksi seperti itu kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai dua hal, yaitu harga dan volume dari apa yang ditransaksikan. Dalam praktik pasar uang yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi di pasar tersebut terjadi transaksi pinjam-memjam dana, yang selanjutnya menimbulkan utang-piutang. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secarik kertas berupa surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula. Tujuan pasar uang untuk memberikan alternatif, baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya.

3. Fungsi Pasar Uang

- a) Fungsi likuiditas pasar uang terkait dengan manfaat yang diberikannya kepada para investor dalam rangka mengelola dana jangka pendek mereka yang idle dengan membeli piranti-piranti pasar uang, seperti certificate deposit, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan deposito berjangka pendek untuk memperoleh pendapatan. Sementara itu, bagi pengusaha yang membutuhkan dana, pasar uang digunakan sebagai salah satu alternatif tempat untuk mencari sumber dana sementara. Misalnya, dalam hal terjadi mismatch temporer karena portfolio asetnya berjangka panjang, sementara sisi liabilitiesnya relatif berjangka pendek untuk memperoleh pendapatan yang optimal.
- b) Fungsi informasi, perkembangan pasar uang dapat memberikan informasi bagi pelaku-pelaku di pasar uang seperti perusahaan, perbankan, pemerintah, otoritas moneter mengenai kondisi moneter, arah kebijakan, preferensi, dan tingkah laku peserta pasar uang maupun kondisi dan prospek ekonomi di dalam maupun di luar negeri.
- c) Fungsi alloaction of weath adalah fungsi yang ditawarkan oleh pasar uang kepada para investor yang ingin mendiversifikasi asset yang mereka miliki. Dalam upaya mengurangi risiko yang dihadapi, investor dapat melakukan investasi pada berbagai alternatif yang tersedia, seperti deposito di bank, membeli saham atau surat-surat berharga (fixed income) lainnya di pasar modal, serta membeli berbagai piranti pasar uang lainnya.

4. Ciri-Ciri Pasar Uang

Berkaitan dengan pasar uang ini, Pandji Anoraga dan Piji Pakarti menjelaskan bahwa ada beberapa ciri dari pasar uang yaitu:

- a) Jangka waktu uang yang diperdagangkan masanya pendek
- b) Tidak terikat pada tempat dan waktu
- c) Pada umumnya *supply* dan *demand* bertemu secara langsung dan tidak perlu ada *guarator* dan *underwriter*.

5. Risiko Pasar Uang

- a) Risiko pasar (market risk, interest rate atau exchange rate risk), yaitu risiko yang timbul akibat fluktuasi harga, suku bunga, dan pergerakan nilai tukar;
- b) Risiko penanaman kembali (reinvestment risk), yaitu risiko karena mengalihkan investasi;
- c) Risiko gagal bayar (default risk), yaitu risiko yang timbul karena pembayaran yang tidak terpenuhi pada saat tagihan jatuh tempo; dan
- d) Risiko fundamental (fundamental risk), yaitu risiko akibat perubahan kondisi makro-ekonomi, moneter, fiskal, dan kebijakan lainnya pemerintah.

6. Pelaku Pasar Uang

- a) Pemerintah

Pemerintah adalah peminjam terbesar di pasar uang dan tidak pernah berperan sebagai pemberi pinjaman. Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk memperoleh dana jangka pendek yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan akan dibayar dari penerimaan pajak.

- b) Bank Sentral

Bank sentral berperan sebagai agen yang mendistribusikan sekuritas pemerintah seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Bank sentral mengendalikan SBI untuk mengendalikan jumlah uang beredar yang pada akhirnya mengendalikan inflasi, yang merupakan tugas utama bank sentral. Bila jumlah uang beredar terlalu banyak sehingga mengakibatkan inflasi, bank sentral dapat menekannya dengan menjual SBI. Sebaliknya, bila jumlah uang beredar terlalu sedikit sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang rendah, maka bank sentral dapat menambahnya dengan cara membeli SBI dari masyarakat. Aktivitas tersebut disebut operasi pasar terbuka.

c) Bank Komersil

Bank komersil memegang sekuritas pemerintah yang aman karena resiko yang rendah sebagai cadangan sekunder. Bank komersil dilarang dengan regulasi untuk memegang sekuritas yang beresiko seperti saham dan obligasi perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan sekuritas pemerintah oleh bank komersial dapat sedikit dipaksakan.

d) Sektor Bisnis

Perusahaan besar aktif dalam melakukan jual beli instrument pasar uang untuk dua tujuan, yaitu untuk menyimpan kelebihan dananya dan memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan menyimpan dananya di bank yang relatif lebih rendah karena dibatasi oleh regulasi dan juga untuk mencari dana pinjaman jangka pendek dengan biaya yang relatif lebih murah karena adanya skala ekonomis.

C. Kebijakan Moneter Bank Sentral dan Pasar Uang di Beberapa Negara

1. European Central Bank (ECB)

Di dalam melaksanakan kebijakan moneter dengan sasaran stabilitas harga (price stability), ECB mengendalikan likuiditas di pasar uang serta mengontrol perkembangan tingkat suku bunga jangka pendek pasar uang (Vitor Gaspar and Gabreil Perez-Qiros, 2001). European Central Bank menggunakan target corridor atau band overnight rates. Untuk melaksanakan kebijakan moneter, piranti moneter utama yang digunakan ECB adalah operasi pasar terbuka (OPT), standing facilities, dan reserve requirements.

2. Amerika Serikat (Federal Reserve)

Dalam melaksanakan kebijakannya, Amerika Serikat juga menggunakan tingkat suku bunga pasar uang sebagai target operasional dan sinyal kebijakan (policy rate). Federal Reserve menggunakan federal funds rate (ekuivalen dengan suku bunga PUAB-overnight rate) sebagai target untuk mempengaruhi suku bunga jangka menengah dan panjang yang akan berdampak kepada sasaran akhir kebijakan moneter mereka, yaitu stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja.

3. Inggris (Bank of England)

Didalam menentukan kebijakan moneter, Bank of England melakukan pertemuan bulanan yang dinamakan Monetary Policy Committee (MPC). Pertemuan MPC akan menentukan arah operasi pasar terbuka dengan menetapkan tingkat repo rate (fix tender) yang jatuh tempo dua minggu sebagai policy rate. Selain untuk menentukan OPT, MPC juga tertarik untuk mengetahui

ekspektasi pelaku pasar uang terhadap tingkat suku bunga masa datang. Dengan mengetahui ekspektasi pelaku pasar, MPC akan lebih mudah mengambil keputusan yang tepat melalui OPT mengenai arah kebijakan moneter yang harus diambil.

4. Jepang (Bank of Japan)

Seperti pada negara-negara lain, pasar uang di Jepang mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian, yaitu (1) sebagai sarana untuk mencari investasi dana jangka pendek bagi lembaga keuangan dan pembiayaan serta (2) sebagai sarana untuk mengimplementasikan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Sentral Jepang bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan dan pihak terkait lainnya selalu berupaya untuk mengembangkan dan memperbaiki pasar uang, serta menjaga agar mekanisme pasar dalam transaksi pasar uang tetap lancar.

D. Pasar Uang di Indonesia

1. Piranti

Perkembangan pasar uang di Indonesia relatif agak berarti setelah Pemerintah melakukan deregulasi sektor keuangan tahun 1988. Sejak saat itu, piranti pasar uang mulai beragam dan berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar uang. Beberapa piranti pasar uang yang utama, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat-surat berharga pasar uang (SBPU), promes, wesel, Pasar Uang Antarbank (PUAB), Certificate Deposit (CD), dan surat berharga komersial (Commercial Paper/CPs).

2. Promes dan wesel

Promes adalah surat sanggup bayar dalam jumlah, tanggal, dan jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh yang terhutang (issuer). Sedangkan wesel adalah surat tagih kepada debitur yang

diterbitkan oleh penarik (kreditur) dalam jumlah, tanggal dan jangka waktu tertentu dan harus diaksep oleh tertarik. Promes dan wesel tersebut masing-masing tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 174 dan pasal 100. Warkat promes di samping digunakan sebagai piranti pasar uang antarbank, juga dapat digunakan sebagai jaminan tambahan dari nasabah debitur atas setiap penarikan kredit yang dilakukan. Sedangkan wesel, lazim dipergunakan sebagai salah satu piranti pembayaran dalam transaksi dagang.

3. Sertifikat Deposito (CD)

- Sertifikat Deposito adalah surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang merupakan surat pengakuan hutang dari bank yang dapat diperjualbelikan di pasar uang (SK Direksi BI No. 21/48/KEP/DIR dan SE BI No. 21/27/UPG masing-masing tanggal 27 Oktober 1988). Sertifikat Deposito hanya dapat diterbitkan dalam Rupiah dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp 1 juta. Jangka waktu CD ditetapkan sekurang-kurangnya 30 hari dan selama-lamanya 24 bulan. Sertifikat Deposito dapat dipindahtanggankan dengan cara penyerahan. Sertifikat Deposito yang mempunyai jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dapat digolongkan sebagai piranti pasar uang, sedangkan CD yang mempunyai jatuh tempo lebih dari setahun masuk ke piranti pasar modal.
- Di samping sebagai piranti pasar uang, CD juga merupakan sarana pengerahan dana bagi perbankan. Sertifikat Deposito ditransaksikan antara penjual dan pembeli secara diskonto. CD hanya dapat diuangkan/ditagihkan oleh pembawa kepada bank penerbit CD setelah CD jatuh waktu.

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Selain dipergunakan sebagai piranti kebijakan moneter untuk mempengaruhi likuiditas bank-bank, SBI juga dimaksudkan untuk mendorong pengembangan pasar uang. Sejak krisis keuangan 1997, SBI menjadi alternatif utama perbankan untuk menempatkan dana mereka karena perbankan masih belum berani untuk mengambil risiko dalam penyaluran kredit ke dunia usaha.

Quiz 3 PASAR UANG RUPIAH – Pertemuan 3 Modul 4 Bag 1

1. Kapanjangan dari SBPU yang benar adalah
 - a. Surat Bukti Pasar Uang
 - b. Surat Berharga Pasar Uang
 - c. Surat Berharga Pasar Utang
2. Berikut yang tidak termasuk resiko pasar uang adalah
 - a. Risiko pasar
 - b. Risiko likuiditas
 - c. Risiko gagal bayar
3. Peran kebijakan moneter operasi pasar terbuka dalam pasar keuangan adalah
 - a. Mengendalikan inflasi
 - b. Mengendalikan likuiditas
 - c. Mengendalikan investasi
4. Sarana pinjam meminjam yang dilakukan oleh antar bank dengan menggunakan telepon atau melalui reuter disebut

- a. Commercial Paper
 - b. SBPU
 - c. PUAB
5. Wesel berjangka yang ditarik oleh eksportir dan yang menjadi debitur adalah importir yang diaksep oleh bank disebut
- a. Banker's Acceptance
 - b. Commercial Paper
 - c. SBPU
6. Sebutkan tiga peran utama bank bank komersial dalam pasar keuangan !
7. Sebutkan tiga jenis coupon bearing instrument yang digunakan dalam pasar uang !
8. Sebutkan dan jelaskan piranti dalam money market deposit !
9. Sebutkan beberapa piranti pasar uang yang digunakan di negara inggris !
10. Jelaskan prosedur lelang SBI pada bank Indonesia !

PERTEMUAN 3 MODUL 4 BAGIAN 2

PASAR UANG RUPIAH

Tujuan: Untuk mempelajari peran pasar uang Rupiah di Indonesia

Capaian pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa diharapkan mampu memahami:

A	Pendahuluan
B	Gambaran umum pasar uang
C	Kebijakan moneter dan pasar uang di beberapa negara
D	Pasar uang di Indonesia

A. Pendahuluan

Secara garis besar pasar keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pasar modal dan pasar uang (money market). Pasar modal adalah pasar tempat diperdagangkan adalah surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Sementara itu, di pasar uang surat-surat berharga yang diperdagangkan berjangka pendek di bawah satu tahun. Dengan demikian, suatu surat berharga berjangka waktu lebih dari satu tahun, apabila ditransaksikan secara repo dengan jangka waktu yang kurang dari satu tahun, dikategorikan pula sebagai transaksi pasar uang.

Dalam sistem perekonomian karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara *inflows* dan *outflows* sehingga pasar uang dibutuhkan. Misalnya, perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode tertentu dan pada waktu yang lain perusahaan harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya operasionalnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut perusahaan pada saat kasnya mengalami defisit, maka perusahaan tersebut sementara dapat memasuki

pasar uang sebagai peminjam dengan mencari lembaga keuangan atau pihak lain yang memiliki *surplus* dana. Selanjutnya, pada saat perusahaan tersebut mengalami *surplus* dana, maka perusahaan tersebut menjadi kreditor dalam pasar uang untuk memperoleh pendapatan daripada membiarkan dananya tak terpakai atau *idle*.

Sesuai dengan namanya, pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Dan di pasar uang ini diperjualbelikan instrumen kredit jangka pendek. Kredit yang dimaksud bisa berupa kredit harian (*On Call*), kredit bulanan (*Prolongasi*) maupun kredit tiga bulanan (*Belening*). Oleh karena kredit yang diperjualbelikan kurang dari satu tahun, maka disebut kredit jangka pendek.

B. Gambaran Umum

7. Sejarah dan Landasan Hukum Pasar Uang

Pada tahun 1952 diawali dengan berdirinya Pasar Uang dan Modal (P.U.M). Tahun 1958 didirikan Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek (PPUE). Namun tekanan politik dan suramnya suasana dibidang moneter, pertumbuhan Bursa Efek mengalami kemunduran. Pada 26 Juli 1968 Kep Dir Bank Indonesia No.4/16 Kep.Dir Bank Indonesia membentuk Team Persiapan Pasar Uang dan Modal. Kemudian 13 Januari 1972 SK Menkeu No.Kep-25/MK/IV/1/1972 dibentuk Badan Pembina Pasar Uang sekaligus pembubaran Team Persiapan Pasar Uang dan Modal yang tugasnya telah selesai. Lalu Tahun 1976 lahir Keputusan Presiden RI No.52 tentang Pasar Modal.

8. Pengertian Pasar Uang

Pasar uang adalah pasar tempat suatu pihak meminjam dana dari pihak lainnya pada tingkat bunga tertentu dan biasanya untuk jangka waktu di bawah satu tahun. Jangka waktu pinjaman bisa bervariasi, mulai dari satu hari sampai satu tahun. Pinjaman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun digolongkan sebagai pasar hutang.

Pengertian pasar uang dalam teori ekonomi bukanlah suatu tempat secara fisik orang berjualan dan menjalankan barang dagangannya. Pasar diartikan secara lebih luas dan abstrak namun tetap mencakup pasar dalam pengertian sehari-hari, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Apabila permintaan bertemu penawaran di pasar, maka akan terjadi transaksi. Transaksi merupakan kesepakatan antara apa yang diinginkan pembeli dan apa yang diinginkan penjual. Dalam transaksi seperti itu kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai dua hal, yaitu harga dan volume dari apa yang ditransaksikan. Dalam praktik pasar uang yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi di pasar tersebut terjadi transaksi pinjam-memjam dana, yang selanjutnya menimbulkan utang-piutang. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secarik kertas berupa surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula. Tujuan pasar uang untuk memberikan alternatif, baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya.

9. Fungsi Pasar Uang

- d) Fungsi likuiditas pasar uang terkait dengan manfaat yang diberikannya kepada para investor dalam rangka mengelola dana jangka pendek mereka yang idle dengan membeli piranti-piranti pasar uang, seperti certificate deposit, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan deposito berjangka pendek untuk memperoleh pendapatan. Sementara itu, bagi pengusaha yang membutuhkan dana, pasar uang digunakan sebagai salah satu alternatif tempat untuk mencari sumber dana sementara. Misalnya, dalam hal terjadi mismatch temporer karena portfolio asetnya berjangka panjang, sementara sisi liabilitiesnya relatif berjangka pendek untuk memperoleh pendapatan yang optimal.
- e) Fungsi informasi, perkembangan pasar uang dapat memberikan informasi bagi pelaku-pelaku di pasar uang seperti perusahaan, perbankan, pemerintah, otoritas moneter mengenai kondisi moneter, arah kebijakan, preferensi, dan tingkah laku peserta pasar uang maupun kondisi dan prospek ekonomi di dalam maupun di luar negeri.
- f) Fungsi alloaction of weath adalah fungsi yang ditawarkan oleh pasar uang kepada para investor yang ingin mendiversifikasi asset yang mereka miliki. Dalam upaya mengurangi risiko yang dihadapi, investor dapat melakukan investasi pada berbagai alternatif yang tersedia, seperti deposito di bank, membeli saham atau surat-surat berharga (fixed income) lainnya di pasar modal, serta membeli berbagai piranti pasar uang lainnya.

10. Ciri-Ciri Pasar Uang

Berkaitan dengan pasar uang ini, Pandji Anoraga dan Piji Pakarti menjelaskan bahwa ada beberapa ciri dari pasar uang yaitu:

- b) Jangka waktu uang yang diperdagangkan masanya pendek
- c) Tidak terikat pada tempat dan waktu
- d) Pada umumnya *supply* dan *demand* bertemu secara langsung dan tidak perlu ada *guarator* dan *underwriter*.

11. Risiko Pasar Uang

- e) Risiko pasar (market risk, interest rate atau exchange rate risk), yaitu risiko yang timbul akibat fluktuasi harga, suku bunga, dan pergerakan nilai tukar;
- f) Risiko penanaman kembali (reinvestment risk), yaitu risiko karena mengalihkan investasi;
- g) Risiko gagal bayar (default risk), yaitu risiko yang timbul karena pembayaran yang tidak terpenuhi pada saat tagihan jatuh tempo; dan
- h) Risiko fundamental (fundamental risk), yaitu risiko akibat perubahan kondisi makro-ekonomi, moneter, fiskal, dan kebijakan lainnya pemerintah.

12. Pelaku Pasar Uang

- a) Pemerintah

Pemerintah adalah peminjam terbesar di pasar uang dan tidak pernah berperan sebagai pemberi pinjaman. Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk memperoleh dana jangka pendek yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan akan dibayar dari penerimaan pajak.

- b) Bank Sentral

Bank sentral berperan sebagai agen yang mendistribusikan sekuritas pemerintah seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Bank sentral mengendalikan SBI untuk mengendalikan jumlah uang beredar yang pada akhirnya mengendalikan inflasi, yang merupakan tugas utama bank sentral. Bila jumlah uang beredar terlalu banyak sehingga mengakibatkan inflasi, bank sentral dapat menekannya dengan menjual SBI. Sebaliknya, bila jumlah uang beredar terlalu sedikit sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang rendah, maka bank sentral dapat menambahnya dengan cara membeli SBI dari masyarakat. Aktivitas tersebut disebut operasi pasar terbuka.

c) Bank Komersil

Bank komersil memegang sekuritas pemerintah yang aman karena resiko yang rendah sebagai cadangan sekunder. Bank komersil dilarang dengan regulasi untuk memegang sekuritas yang beresiko seperti saham dan obligasi perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan sekuritas pemerintah oleh bank komersial dapat sedikit dipaksakan.

d) Sektor Bisnis

Perusahaan besar aktif dalam melakukan jual beli instrument pasar uang untuk dua tujuan, yaitu untuk menyimpan kelebihan dananya dan memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan menyimpan dananya di bank yang relatif lebih rendah karena dibatasi oleh regulasi dan juga untuk mencari dana pinjaman jangka pendek dengan biaya yang relatif lebih murah karena adanya skala ekonomis.

E. Kebijakan Moneter Bank Sentral dan Pasar Uang di Beberapa Negara

1. European Central Bank (ECB)

Di dalam melaksanakan kebijakan moneter dengan sasaran stabilitas harga (price stability), ECB mengendalikan likuiditas di pasar uang serta mengontrol perkembangan tingkat suku bunga jangka pendek pasar uang (Vitor Gaspar and Gabreil Perez-Qiros, 2001). European Central Bank menggunakan target corridor atau band overnight rates. Untuk melaksanakan kebijakan moneter, piranti moneter utama yang digunakan ECB adalah operasi pasar terbuka (OPT), standing facilities, dan reserve requirements.

5. Amerika Serikat (Federal Reserve)

Dalam melaksanakan kebijakannya, Amerika Serikat juga menggunakan tingkat suku bunga pasar uang sebagai target operasional dan sinyal kebijakan (policy rate). Federal Reserve menggunakan federal funds rate (ekuivalen dengan suku bunga PUAB-overnight rate) sebagai target untuk mempengaruhi suku bunga jangka menengah dan panjang yang akan berdampak kepada sasaran akhir kebijakan moneter mereka, yaitu stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja.

6. Inggris (Bank of England)

Didalam menentukan kebijakan moneter, Bank of England melakukan pertemuan bulanan yang dinamakan Monetary Policy Committee (MPC). Pertemuan MPC akan menentukan arah operasi pasar terbuka dengan menetapkan tingkat repo rate (fix tender) yang jatuh tempo dua minggu sebagai policy rate. Selain untuk menentukan OPT, MPC juga tertarik untuk mengetahui

ekspektasi pelaku pasar uang terhadap tingkat suku bunga masa datang. Dengan mengetahui ekspektasi pelaku pasar, MPC akan lebih mudah mengambil keputusan yang tepat melalui OPT mengenai arah kebijakan moneter yang harus diambil.

7. Jepang (Bank of Japan)

Seperti pada negara-negara lain, pasar uang di Jepang mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian, yaitu (1) sebagai sarana untuk mencari investasi dana jangka pendek bagi lembaga keuangan dan pembiayaan serta (2) sebagai sarana untuk mengimplementasikan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Sentral Jepang bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan dan pihak terkait lainnya selalu berupaya untuk mengembangkan dan memperbaiki pasar uang, serta menjaga agar mekanisme pasar dalam transaksi pasar uang tetap lancar.

F. Pasar Uang di Indonesia

1. Piranti

Perkembangan pasar uang di Indonesia relatif agak berarti setelah Pemerintah melakukan deregulasi sektor keuangan tahun 1988. Sejak saat itu, piranti pasar uang mulai beragam dan berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar uang. Beberapa piranti pasar uang yang utama, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat-surat berharga pasar uang (SBPU), promes, wesel, Pasar Uang Antarbank (PUAB), Certificate Deposit (CD), dan surat berharga komersial (Commercial Paper/CPs).

2. Promes dan wesel

Promes adalah surat sanggup bayar dalam jumlah, tanggal, dan jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh yang terhutang (issuer). Sedangkan wesel adalah surat tagih kepada debitur yang

diterbitkan oleh penarik (kreditur) dalam jumlah, tanggal dan jangka waktu tertentu dan harus diaksep oleh tertarik. Promes dan wesel tersebut masing-masing tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 174 dan pasal 100. Warkat promes di samping digunakan sebagai piranti pasar uang antarbank, juga dapat digunakan sebagai jaminan tambahan dari nasabah debitur atas setiap penarikan kredit yang dilakukan. Sedangkan wesel, lazim dipergunakan sebagai salah satu piranti pembayaran dalam transaksi dagang.

3. Sertifikat Deposito (CD)

- Sertifikat Deposito adalah surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang merupakan surat pengakuan hutang dari bank yang dapat diperjualbelikan di pasar uang (SK Direksi BI No. 21/48/KEP/DIR dan SE BI No. 21/27/UPG masing-masing tanggal 27 Oktober 1988). Sertifikat Deposito hanya dapat diterbitkan dalam Rupiah dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp 1 juta. Jangka waktu CD ditetapkan sekurang-kurangnya 30 hari dan selama-lamanya 24 bulan. Sertifikat Deposito dapat dipindahtangankan dengan cara penyerahan. Sertifikat Deposito yang mempunyai jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dapat digolongkan sebagai piranti pasar uang, sedangkan CD yang mempunyai jatuh tempo lebih dari setahun masuk ke piranti pasar modal.
- Di samping sebagai piranti pasar uang, CD juga merupakan sarana pengerahan dana bagi perbankan. Sertifikat Deposito ditransaksikan antara penjual dan pembeli secara diskonto. CD hanya dapat diuangkan/ditagihkan oleh pembawa kepada bank penerbit CD setelah CD jatuh waktu.

5. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Selain dipergunakan sebagai piranti kebijakan moneter untuk mempengaruhi likuiditas bank-bank, SBI juga dimaksudkan untuk mendorong pengembangan pasar uang. Sejak krisis keuangan 1997, SBI menjadi alternatif utama perbankan untuk menempatkan dana mereka karena perbankan masih belum berani untuk mengambil risiko dalam penyaluran kredit ke dunia usaha.

SOAL PILIHAN GANDA PASAR UANG RUPIAH – Pertemuan 3 Modul 4

1. Apa yang dimaksud dengan pasar keuangan ?
 - a. Tempat jual beli valas dan barang berjangka
 - b. Tempat bertemunya permintaan dan penawaran dalam jangka panjang
 - c. Tempat penyelesaian transaksi barang dan jasa

2. Dibawah ini yang tidak termasuk dalam Pasar Keuangan adalah
 - a. Pasar modal
 - b. Pasar uang
 - c. Pasar valas

3. Dilihat dari jenis mata uangnya , pasar uang dibagi menjadi dua yaitu
 - a. Pasar modal dan pasar valas
 - b. Pasar domestic dan pasar valas
 - c. Pasar modal dan pasar domestic

4. Suatu tempat atau pasar yang memberikan fasilitas perdagangan surat surat berharga yang berjangka waktu lebih dari satu tahun disebut pasar

- a. Pasar uang
 - b. Pasar valas
 - c. Pasar modal
5. Dibawah ini yang tidak termasuk dalam piranti pasar keuangan adalah
- a. Sertifikat deposit
 - b. Sertifikat bank Indonesia
 - c. Giro berjangka

SOAL ESSAY PASAR UANG RUPIAH

1. Apakah yang dimaksud dengan pasar uang ?
2. Bagaimana peran pasar keuangan dalam perekonomian ?
3. Apakah yang dimaksud dengan pasar modal ?
4. Apakah fungsi utama dari pasar modal ?
5. Sebutkan pelaku pelaku dari kegiatan pasar uang !

PERTEMUAN 5 MODUL 5 BAGIAN 1

KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA

Tujuan: Untuk mempelajari aspek terkait kebijakan moneter di Indonesia

Capaian Pembelajaran: Pada akhir pertemuan, mahasiswa diharapkan mampu memahami:

A	Gambaran umum kebijakan moneter
B	Kebijakan moneter di Indonesia: Kerangka Inflation Targeting framework
C	Kebijakan moneter periode setelah krisis 1997
D	Kebijakan nilai tukar dan devisa

Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran.

Kebijakan moneter dilaksanakan melalui cara, termasuk penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar.

Bank sentral atau badan negara pengatur yang bertanggung jawab atas hal ini yang berhak merumuskan kebijakan ini. Untuk di Indonesia sendiri kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank sentral yaitu Bank Indonesia

Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah manajemen inflasi atau pengangguran, dan pemeliharaan nilai tukar mata uang. berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya:

1. Inflasi

Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini.

2. Pengangguran

Kebijakan moneter akan mempengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Sebagai contoh, kebijakan ekspansif umumnya mengurangi pengangguran karena pasokan uang yang lebih tinggi merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada perluasan pasar kerja.

3. Nilai tukar mata uang

Dengan menggunakan otoritas fiskal, bank sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. Sebagai contoh, bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti itu, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain.

Penjelasan lebih detail dari tujuan moneter adalah sebagai berikut:

- Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*) dalam perekonomian.
- Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga.
- Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.
- Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal.
- Menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.
- Menjaga kestabilan harga. Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar.
- Meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat.
- Memperbaiki neraca Perdagangan Kerja Masyarakat. Dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya.

Instrumen Kebijakan Moneter

Bank-bank sentral menggunakan berbagai instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. instrument yang banyak digunakan meliputi:

1. Penyesuaian tingkat suku bunga

Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto (tarif dasar) adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto, biaya pinjaman untuk bank meningkat.

Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat, dan jumlah uang beredar akan berkurang.

2. Penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM)

Bank sentral biasanya mengatur jumlah giro wajib minimum yang harus dipegang oleh bank komersial. Giro Wajib Minimum (GWM) sendiri adalah simpanan minimum yang wajib diperlihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank.

Dengan mengubah jumlah yang diperlukan, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar di pasar. Jika bank sentral meningkatkan giro wajib minimum, bank komersial hanya akan menyediakan sedikit uang tunai untuk diberikan kepada pelanggan dan dengan demikian, suplai uang menurun.

3. Operasi pasar terbuka

Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Misalnya, bank sentral dapat membeli obligasi pemerintah . Akibatnya, bank akan memperoleh lebih banyak uang untuk meningkatkan pinjaman dan uang beredar dalam pasar.

Jenis Kebijakan Moneter

Berdasarkan tujuannya, ada 2 kebijakan moneter yang biasa dipakai banyak negara, yaitu kebijakan ekspansi dan kebijakan kontraktif. Berikut adalah penjelasan dari 2 jenis kebijakan tersebut :

- Kebijakan Ekspansif

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank.

Bersamaan dengan itu, kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis dan kegiatan belanja konsumen. Tujuan keseluruhan dari kebijakan moneter ekspansif adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun resikonya, kebijakan ini dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi.

- **Kebijakan Kontraktif**

Tujuan dari kebijakan moneter kontraktif adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ini dapat dicapai dengan menaikkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan kontraksi digunakan ketika pemerintah ingin mengendalikan tingkat inflasi.

Kerangka kerja inflation targeting framework

Flexible ITF dibangun dengan tetap berpijak pada elemen-elemen penting ITF yang telah terbangun. Elemen-elemen pokok ITF termasuk pengumuman sasaran inflasi kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh secara forward looking, dan akuntabilitas kebijakan kepada publik tetap menjadi bagian inherent dalam Flexible ITF. Kerangka Flexible ITF dibangun berdasarkan 5 (lima) elemen pokok.

1. Pertama, inflasi tetap merupakan target utama kebijakan moneter.
2. Kedua, pengintegrasian kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan mendukung stabilitas makroekonomi.
3. Ketiga, penguatan kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi.
4. Keempat, penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik untuk pengendalian inflasi maupun stabilitas sistem keuangan.
5. Kelima, penguatan komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.

Kebijakan setelah krisis moneter 1997

fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia selama krisis ekonomi ini adalah mencapai dan memelihara kestabilan harga dan nilai tukar rupiah.

Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara jelas menyebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang di dalamnya mengandung pengertian kestabilan harga dan kestabilan nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia hingga saat ini masih menerapkan kerangka kebijakan moneter yang didasarkan pada pengendalian jumlah uang beredar. Di

dalam kerangka tersebut Bank Indonesia berupaya mengendalikan uang primer sebagai sasaran operasional kebijakan moneter.

Dengan menggunakan kerangka kebijakan moneter seperti telah diuraikan di atas, Bank Indonesia pada periode awal krisis ekonomi, terutama selama tahun 1998, menerapkan kebijakan moneter ketat untuk mengembalikan stabilitas moneter. Kebijakan moneter ketat tersebut tercermin pada pertumbuhan tahunan sasaran indikatif uang beredar yang terus ditekan dari level tertinggi 30,13% pada tahun 2000 menjadi 9,58% pada tahun 2001. Kebijakan moneter ketat terpaksa dilakukan karena dalam periode itu ekspektasi inflasi di tengah masyarakat sangat tinggi dan jumlah uang beredar meningkat sangat pesat.

Di tengah tingginya ekspektasi inflasi dan tingkat risiko memegang rupiah, upaya memperlambat laju pertumbuhan uang beredar telah mendorong kenaikan suku bunga domestik secara tajam. Suku bunga yang tinggi diperlukan agar masyarakat mau memegang rupiah dan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak mendesak serta tidak menggunakannya untuk membeli valuta asing.

Suku bunga SBI bulan yang selama ini menjadi patokan (*benchmark*) bagi bank-bank terus menurun dari level tertinggi 35,52% pada tahun 1998 menjadi 7,43% pada akhir April 2004.

Penurunan suku bunga SBI yang cukup tajam itu diikuti oleh suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) dan simpanan perbankan dengan laju penurunan yang hampir sama. Suku bunga kredit (kredit modal kerja) pun mengalami penurunan meskipun tidak secepat dan sebesar penurunan suku bunga simpanan perbankan. Penurunan laju inflasi, penguatan nilai tukar rupiah, dan penurunan suku bunga membentuk suatu lingkaran yang saling memperkuat sehingga membuka peluang bagi pemulihan ekonomi.

Kebijakan nilai tukar dan devisa

- Sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate) dimana lembaga otoritas moneter menetapkan tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu, tanpa memperhatikan penawaran ataupun permintaan terhadap valuta asing yang terjadi.
- Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali Nilai tukar mengambang terkendali, dimana pemerintah mempengaruhi tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing, biasanya sistem ini diterapkan untuk menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran.
- Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas Nilai tukar mengambang bebas, dimana pemerintah tidak mencampuri tingkat nilai tukar sama sekali sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaan dan

penawaran valuta asing. Penerapan sistem ini dimaksudkan untuk mencapai penyesuaian yang lebih berkesinambungan pada posisi keseimbangan eksternal (external equilibrium position).

Quiz 4 Modul 5 Pertemuan 4 Bag 1

1. Sebutkan variabel ekonomi utama dalam kebijakan moneter
 - a. Input
 - b. Inflasi
 - c. Uang
 - d. Depresiasi

2. Dalam kajian literatur kebijakan moneter dikenal dengan dua jenis, yaitu
 - a. Ekspansif dan kontraktif
 - b. Kontraktif dan depresi
 - c. Efektifitas dan ekspansif
 - d. Output dan inflasi

3. Untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi makro secara optimal biasanya diterapkan
 - a. Slump
 - b. Business cycle
 - c. Discretion
 - d. Policy mix

4. Mobilitas dana dari dan ke luar negeri dipengaruhi oleh sistem ... yang dianut oleh suatu negara
 - a. Nilai tukar dan sistem devisa
 - b. Nilai mata uang
 - c. Sistem nilai tukar
 - d. Aliran dana

5. Sebutkan salah satu faktor fundamental tercermin dari variabel variabel ekonomi makro, kecuali

- a. Pertumbuhan ekonomi
- b. Laju inflasi
- c. Ekonomi makro
- d. Perkembangan ekspor impor

1. Nilai tukar suatu mata uang didefinisikan sebagai harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Pada dasarnya terdapat tiga sistem nilai tukar yaitu.....
2. Penetapan sistem devisa pada suatu negara ditujukan untuk mengatur pergerakan lalu lintas devisa antara penduduk dan bukan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Pada dasarnya ada tiga sistem devisa, yaitu.....
3. Beberapa strategi pelaksanaan kebijakan moneter tersebut, antara lain.....
4. Sebutkan kelemahan penerapan strategis kebijakan moneter.....
5. Apa yang terjadi pada transmisi kebijakan moneter jangka menengah

PERTEMUAN 5 MODUL 5 BAGIAN 2

KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA

Tujuan: Untuk mempelajari aspek terkait kebijakan moneter di Indonesia

Capaian Pembelajaran: Pada akhir pertemuan, mahasiswa diharapkan mampu memahami:

A	Gambaran umum kebijakan moneter
B	Kebijakan moneter di Indonesia: Kerangka Inflation Targeting framework
C	Kebijakan moneter periode setelah krisis 1997
D	Kebijakan nilai tukar dan devisa

Kebijakan Moneter adalah : seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran.

Bank sentral atau badan negara pengatur yang bertanggung jawab atas hal ini yang berhak merumuskan kebijakan ini. Untuk di Indonesia sendiri kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank sentral yaitu Bank Indonesia

Tujuan utama dari Kebijakan Moneter adalah : manajemen inflasi atau pengangguran, dan pemeliharaan nilai tukar mata uang. berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya:

- **Inflasi**

Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika

inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini.

- **Pengangguran**

Kebijakan moneter akan mempengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Sebagai contoh, kebijakan ekspansif umumnya mengurangi pengangguran karena pasokan uang yang lebih tinggi merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada perluasan pasar kerja.

- **Nilai tukar mata uang**

Dengan menggunakan otoritas fiskal, bank sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. Sebagai contoh, bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti itu, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain.

KEBIJAKAN MONETER DAN SIKLUS KEGIATAN EKONOMI

Dalam suatu kegiatan perekonomian disuatu negara pasti mengalami pasang surut (Siklus). Dalam suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang pesat dan dalam suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang lambat. Untuk mengelola pertumbuhan ekonomi agar berlangsung dengan baik dan stabil, maka pemerintah atau otoritas moneter melakukan langkah-langkah yang dikenal dengan kebijakan ekonomi makro.

Langkah-langkah nya adalah pengelolaan sisi permintaan dan sisi penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi

keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dan juga dalam penerapan kebijakan moneter ini sesuai dengan keadaan siklus kegiatan ekonominya. Keadaan ekonomi yang sedang **boom** 'Pekembangan Ekonomi yang pesat' tentu akan berbeda dengan kebijakan moneter yang diterapkan pada keadaan ekonomi **depression** 'Perkembangan yang lambat'.

Kebijakan moneter ada dua yaitu kebijakan moneter 'Ekspansif' dan Kebijakan moneter 'Kontraktif'. Kebijakan moneter 'Ekspansif' adalah kebijakan moneter yang ditunjukkan untuk mendorong kegiatan ekonomi, antara lain dilakukan dengan peningkatan jumlah uang beredar. Kebijakan Moneter 'Kontraktif' adalah kebijakan ditunjukkan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar.

Soal Pertemuan 5 Modul 5 Bagian 2

5 soal pilihan ganda

1. Pada periode 1945-1952 pemerintah Indonesia mendirikan 2 bank milik negara yaitu ...
 - a) Bank Negara Indonesia (BNI) & Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - b) Bank Aceh & Bank Mandiri
 - c) Bank Bukopin & Bank BCA
 - d) Bank Mandiri Syariah
2. Dalam penggunaan ORI hanya mencapai usia ...
 - a) 1 tahun
 - b) 2 tahun
 - c) 1 tahun 6 bulan
 - d) 3 tahun 5 bulan

3. Nasionalisasi '***De Javasche Bank***' pada tanggal ...
- a) 10 Agustus 1951
 - b) 11 Agustus 1951
 - c) 6 Desember 1951
 - d) 7 November 1951
4. Dalam perkembangan kebijakan moneter selanjutnya pada periode 1953-1967 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU tentang Pokok Bank Indonesia, yaitu UU nomor ...
- a) UU no. 12 tahun 1953
 - b) UU no. 13 tahun 1953
 - c) UU no. 11 tahun 1953
 - d) UU no. 20 tahun 1953
5. Kebijakan Moneter kontraktif adalah kebijakan yang ditunjukkan untuk ...
- a) Memperlambat kegiatan ekonomi
 - b) Mempercepat kegiatan ekonomi
 - c) Memberhentikan kegiatan ekonomi
 - d) Jawaban A dan B benar

5 soal uraian

1. Apakah yang dimaksud dengan Kebijakan Moneter ?
2. Apakah tujuan dari kebijakan moneter ?
3. Apakah kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan moneter Ekspansif sama ? Jelaskan.
4. Bagaimana kebijakan moneter di Indonesia periode pre-krisis ekonomi 1997 ?
5. Jelaskan secara singkat tentang kebijakan moneter di Indonesia pada periode 1953-1967.

PERTEMUAN 5 MODUL 6

INSTRUMEN-INSTRUMEN PENGENDALIAN MONETER

Tujuan: Untuk mempelajari instrumen pengendalian moneter

Capaian pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami

A	Instrumen langsung
B	Instrumen tidak langsung
C	Instrumen pengendalian yang biasa digunakan
D	Instrumen pengendalian moneter di Indonesia

Kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen baik langsung maupun tidak langsung. Instrumen langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Adapun instrumen tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Dua hal utama yang dikendalikan adalah harga (suku bunga) dan kuantitas simpanan dan kredit yang ada pada sistem perbankan atau institusi keuangan selain bank. Pengendalian langsung ini dapat dilakukan melalui kebijakan langsung yang dikeluarkan oleh bank sentral atau dengan mempengaruhi neraca bank-bank komersial.

Instrumen langsung pada umumnya bersifat non-market based (tidak berorientasi pada mekanisme pasar) dan diskresinya (inisiatifnya) ada di bank sentral sedangkan instrumen tidak langsung dapat bersifat market based atau non-market based dan diskresinya ada yang di bank sentral atau peserta pasar (counterparts). Baik instrumen kebijakan moneter langsung maupun tidak langsung mempunyai berbagai macam bentuk dan masing-masing memiliki karakteristik dan kelebihan atau kekurangan. Bentuk instrumen langsung yang banyak dipergunakan adalah pengendalian suku bunga (interest rate ceilings), pagu kredit, dan kredit program/kredit khusus (directed credits) bank sentral. Sementara itu, secara umum terdapat 3 bentuk utama instrumen tidak langsung, yaitu OPT, cadangan primer (reserve requirement), dan fasilitas pendanaan jangka pendek atau fasilitas diskonto.

Instrumen langsung mempunyai keuntungan bahwa ia dapat dipergunakan sebagai alat yang efektif bagi bank sentral untuk mengendalikan harga (dalam hal ini suku bunga) atau kuantitas (dalam hal ini jumlah maksimum) kredit, terutama dalam tahap-tahap awal pembangunan atau dalam keadaan krisis yang bersifat sementara. Instrumen tidak langsung dirancang berdasarkan kebutuhan sesuai dengan proses liberalisasi keuangan yang menitikberatkan pada efisiensi alokasi tabungan dan kredit dalam perekonomian. Oleh karena itu, keuntungan utama instrumen tidak langsung adalah menghilangkan semua kekurangan yang ada pada instrumen langsung.

Dalam proses perkembangan tersebut, instrumen kebijakan moneter yang digunakan juga berkembang ke arah yang lebih berdasar pada mekanisme pasar (market based), yaitu instrumen tidak langsung, sejalan dengan berkembangnya pasar-pasar keuangan di negara tersebut.

Instrumen Langsung

Jenis instrumen langsung ada bermacam-macam, dengan berbagai variasi, antara lain:

1. Penetapan Suku Bunga
2. Pagu Kredit
3. Rasio Likuiditas (Statutory Liquidity Ratios)
4. Kredit Langsung ('Directed', 'Selected', Prioritas, dan yang sejenisnya)
5. Kuota Rediskonto
6. Instrumen Lain.
 - 6.1. Pengguntingan Uang
 - 6.2. Pembersihan Uang (Monetary Purge)
 - 6.3. Penetapan Uang Muka Impor.

1. Penetapan Suku Bunga

Penetapan suku bunga merupakan instrumen langsung bank sentral berupa penetapan tingkat suku bunga baik untuk pinjaman maupun simpanan di dalam sistem perbankan. Rancangan penetapan suku bunga dapat meliputi suku bunga tetap atau kisaran (*spreads*) antara suku bunga pinjaman dan simpanan.

2. Pagu Kredit

Pagu kredit merupakan instrumen langsung berupa penetapan jumlah atau kuantitas maksimum kredit yang dapat disalurkan oleh perbankan. Mengapa kredit yang dipatok? Penyebabnya ialah, dalam hal ini, bank sentral ingin mengendalikan jumlah atau kuantitas uang beredar dengan secara langsung mempengaruhi jumlah kredit domestik yang dapat disalurkan oleh perbankan yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah uang beredar.

3. Rasio Likuiditas (Statutory Liquidity Ratios)

Rasio likuiditas merupakan instrumen langsung yang digunakan bank sentral dengan mewajibkan bank-bank selain untuk memelihara cadangan primer juga untuk setiap saat memelihara surat-surat berharga tertentu atau mata uang tertentu dengan persentase tertentu (biasanya utang pemerintah).

4. Kredit Langsung ('Directed', 'Selected', Prioritas, dan yang sejenisnya)

Kredit langsung merupakan instrumen langsung berupa penyaluran kredit secara langsung (atau melalui agen pemerintah) kepada sektor, program, proyek, dan/atau kegiatan tertentu. Pada umumnya, kredit langsung ini diberikan kepada sektor yang sedang digalakkan oleh pemerintah namun belum cukup menarik bagi sektor swasta atau diberikan untuk membiayai program, proyek, dan/atau kegiatan yang diprioritaskan oleh pemerintah.

5. Kuota Rediskonto

Pada dasarnya, kuota rediskonto merupakan instrumen langsung yang mirip dengan kredit langsung (namun dijamin dengan surat berharga pasar uang) melalui kuota untuk memberikan insentif pengembangan sector tertentu. Dalam hal ini bank sentral menetapkan jumlah kuota surat-surat berharga sektor tertentu yang dapat di re-diskonto-kan dengan suku bunga di bawah harga pasar. Instrumen ini digunakan di negara-negara industry secara terbatas, yang suku bunganya di bawah suku bunga PUAB (Jerman dan Amerika), dan di negara-negara lain untuk memberikan insentif kesektor tertentu (Tunisia dan Cina).

6. Instrumen Lain

Selain instrumen-instrumen langsung yang disebutkan di atas, terdapat pula beberapa instrumen langsung yang pada masa dahulu (di Indonesia khususnya) pernah digunakan untuk mengendalikan uang beredar atau money supply. Instrumen-instrumen tersebut antara lain:

6.1. Pengguntingan Uang

Instrumen ini merupakan instrumen langsung yang ditujukan untuk mengurangi uang beredar. Instrumen ini pernah digunakan di Indonesia pada tahun 1950 yang terkenal dengan nama "Gunting Sjafruddin". Dengan pengguntingan uang, nilai pecahan uang yang terkena peraturan ini berkurang sejumlah persentase tertentu (misalnya tinggal 50%) sedangkan sisanya diganti dengan surat berharga pemerintah jangka panjang.

6.2. Pembersihan Uang (Monetary Purge)

Instrumen ini serupa tetapi tidak sama dengan pengguntingan uang. Dengan pembersihan uang, nilai uang diturunkan dengan persentase tertentu tanpa ada penggantian untuk jumlah yang diturunkan tersebut. Penurunan nilai mata uang ini dapat bervariasi. Indonesia pernah menurunkan menjadi 10% pada tahun 1959, menjadi 3% pada tahun 1946 (satu rupiah Jepang menjadi tiga sen uang NICA), menjadi 1% pada tahun 1949 (100 rupiah Jepang menjadi satu rupiah ORI), menjadi 0,1% pada tahun 1965 (1000 rupiah menjadi satu rupiah).

6.3. Penetapan Uang Muka Impor

Ketetapan ini berlaku bagi para importir yang akan melakukan transaksi pembelian dari luar negeri. Dengan ketetapan ini para importir diwajibkan untuk membayar sejumlah persentase tertentu sebagai uang muka untuk pembelian valuta asing yang mereka perlukan untuk mengimpor barang yang mereka perlukan dari luar negeri.

Instrumen Tidak Langsung

Jenis instrumen tidak langsung juga bermacam-macam dan bervariasi, antara lain:

1. Cadangan Wajib Minimum (CWM)
 - 1.1 Cadangan Primer (Primary Reserves)
 - 1.2 Cadangan Sekunder (Secondary Reserves)
2. Fasilitas Diskonto
3. Fasilitas Rediskonto
4. Operasi Pasar Terbuka
 - 4.1 Lelang Surat Berharga Bank Sentral
 - 4.2 Lelang Surat Berharga Pemerintah
 - 4.3 Operasi Pasar Sekunder
5. Fasilitas Simpanan Bank Sentral
6. Intervensi Valuta Asing
7. Fasilitas *Overdraft*
8. Simpanan Sektor Pemerintah
9. Lelang Kredit
10. Imbauan
11. Instrumen Lain.

1. Cadangan Wajib Minimum (CWM)

Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank. Cadangan wajib minimum dapat dibedakan mejadi cadangan primer atau primary reserves dan cadangan sekunder atau secondary reserves.

1.1. Cadangan Primer (*Primary Reserves*)

Cadangan primer atau yang umum dikenal dengan *reserve requirement* adalah instrumen tidak langsung yang merupakan ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank memelihara sejumlah alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Cadangan primer ini banyak digunakan oleh bank sentral sebagai instrumen pengendalian moneter di samping sebagai ketentuan kehati-hatian (*prudential regulation*) untuk memastikan bahwa bank-bank mempunyai likuiditas yang cukup setiap saat bila nasabah melakukan penarikan simpanannya.

1.2. Cadangan Sekunder (Secondary Reserves)

Di samping cadangan primer, ada kalanya bank sentral mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat likuid tambahan di atas cadangan primer (atau merinci lebih lanjut alat likuid tertentu yang harus dipelihara di dalam cadangan primernya). Tambahan alat likuid tersebut seringkali dinamakan cadangan sekunder (*secondary reserves*).

2. Fasilitas Diskonto

Fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit (dan/atau simpanan) yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan mempengaruhi permintaan kredit dari bank. Di beberapa negara tingkat diskonto yang ditetapkan untuk fasilitas ini ada yang berada di atas suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) dan ada pula yang berada di bawah suku bunga PUAB.

Bentuk fasilitas diskonto ini pada umumnya berupa pinjaman dengan jaminan kepada sistem perbankan dan suku bunga di atas suku bunga intervensi bank sentral (atau berupa simpanan dengan suku bunga di bawah pasar) sehingga suku bunga fasilitas diskonto ini akan menjadi patokan suku bunga pinjaman tertinggi (*ceiling*), atau suku bunga simpanan terendah (*floor*).

3. Fasilitas Rediskonto

Fasilitas rediskonto adalah instrumen tidak langsung serupa dengan fasilitas diskonto dalam bentuk fasilitas pinjaman jangka pendek (hanya berbeda pada surat berharga yang digunakan bukan surat berharga bank sentral melainkan surat berharga pasar uang) yang merupakan ketentuan bank sentral dalam menetapkan tingkat rediskonto surat-surat berharga pasar uang (SBPU) yang dapat digunakan dan dirediskontokan ke (dibeli oleh) bank sentral.

4. Operasi Pasar Terbuka (OPT)

karena melalui OPT bank sentral dapat mempengaruhi sasaran operasionalnya (yaitu suku bunga atau jumlah uang beredar) secara lebih

efektif. Dikatakan demikian karena sinyal arah kebijakan moneter dapat disampaikan melalui OPT, yang pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan pembentukan suku bunganya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.

4.1 Lelang Surat Berharga Bank Sentral di Pasar Primer

Lelang surat berharga bank sentral merupakan salah satu instrument operasional yang digunakan dalam OPT. Lelang ini dilakukan di pasar primer karena bank sentral sebagai penerbit menjual langsung ke pasar. Instrumen ini banyak digunakan di beberapa negara, khususnya untuk memisahkan sasaran kebijakan moneter dari sasaran manajemen utang pemerintah.

4.2 Lelang Surat Berharga Pemerintah di Pasar Primer

Lelang surat berharga pemerintah merupakan salah satu instrument operasional yang digunakan dalam OPT seperti lelang surat berharga bank sentral. Adapun perbedaannya ialah penerbitnya adalah pemerintah, bukan bank sentral.

4.3 Operasi Pasar Sekunder

Seperti telah disampaikan di atas, pasar sekunder merupakan pasar uang yang lebih baik untuk OPT. Di pasar sekunder dapat dilakukan jual-beli surat-surat berharga secara outright atau repo (repurchase agreement). Hal ini hanya akan dapat terlaksana apabila pasar sekunder telah berkembang baik sehingga operasi ini banyak digunakan di sebagian besar negara maju yang pasar sekundernya sudah sedemikian maju, likuid, dan surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan tersedia dalam jumlah yang memadai.

5. Fasilitas Simpanan Bank Sentral

Fasilitas simpanan bank sentral merupakan salah satu instrumen tidak langsung yang berbentuk simpanan bank-bank di bank sentral yang berjangka sangat pendek. Fasilitas ini digunakan oleh bank-bank apabila mereka mengalami kelebihan likuiditas pada akhir hari namun tidak dapat menempatkan dana kelebihannya itu di tempat lain. Oleh karena itu, suku bunga fasilitas simpanan ini pada umumnya berada di bawah suku bunga pasar.

6. Operasi Valuta Asing

Operasi valuta asing merupakan salah satu instrumen tidak langsung yang dapat digunakan dalam OPT, yaitu bank sentral melakukan jual-beli valuta asing di pasar valuta asing untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan nilai tukar. Misalnya, apabila bank sentral membeli valuta asing (dan membayarnya dengan valuta sendiri) berarti bank sentral telah

menambah jumlah uang beredar. Selain itu, permintaan akan valuta asing naik yang dapat menyebabkan melemahnya nilai tukar valuta sendiri.

7. Fasilitas Overdraft

Fasilitas overdraft adalah instrumen tidak langsung berupa fasilitas pemberian pinjaman (dengan atau tanpa jaminan) yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka sangat pendek (kalah kliring). Oleh karena itu, fasilitas ini pada umumnya memiliki suku bunga di atas suku bunga sumber-sumber dana lainnya di pasar uang.

8. Simpanan Sektor Pemerintah

Simpanan sektor pemerintah merupakan instrumen tidak langsung yang dapat digunakan oleh bank sentral terutama untuk pengendalian likuiditas jangka pendek. Cara kerja instrumen ini sebenarnya hanya berupa realokasi simpanan pemerintah yang berada di bank sentral dan di bank-bank pelaksana/umum. Apabila bank sentral akan mengurangi jumlah uang beredar maka dapat dilakukan dengan realokasi simpanan sector pemerintah yang berada di bank-bank umum ke bank sentral. Demikian pula sebaliknya.

9. Lelang Kredit

Lelang kredit merupakan instrumen sementara yang dipergunakan dalam masa awal transisi ke penggunaan instrumen tidak langsung untuk mengubah dari pemberian kredit langsung ke alokasi pasar. Oleh karena itu, instrumen ini biasanya hanya digunakan ketika pasar-pasar keuangan belum berkembang dan suku bunga patokan antarbank belum ada.

10. Imbauan

Imbauan juga dapat dipergunakan sebagai instrumen tidak langsung dalam pengendalian moneter oleh bank sentral. Imbauan akan menjadi efektif apabila bank sentralnya kredibel dan tidak sering digunakan.

11. Instrumen Lain

Surat berharga yang dijual oleh bank sentral pada umumnya berdasarkan suku bunga (interest based) namun dengan berkembangnya perbankan syariah, bank sentral juga dapat menjual surat berharga yang berdasarkan syariah. Salah satunya adalah surat berharga wadiah bank sentral. Instrumen ini pada awalnya disediakan oleh bank sentral sebagai fasilitas simpanan bagi bank-bank syariah sehingga mempunyai kemiripan dengan fasilitas simpanan bank sentral yang berdasar syariah.

MODUL 6 PERTEMUAN 5 BAG 1

1. Berikut adalah instrumen instrument langsung,kecuali..
 - a. Penetapan suku bunga
 - b. Investasi
 - c. Pagu kredit
 - d. Rasio likuiditas

2. Instrument langsung berupa penetapan jumlah atau kuantitas maksimum kredit yang dapat disalurkan oleh perbankan merupakan istilah dari
 - a. Pagu kredit
 - b. Rasio likuiditas
 - c. Kredit langsung
 - d. Penetapan suku bunga

3. Yang termasuk kedalam instrument lain adalah..
 - a. Kuto rediskunto
 - b. Kredit langsung
 - c. Pengguntingan uang
 - d. Cadangan wajib minimum

4. Maksud dari fasilitas overdraft adalah..
 - a. Instrument tidak langsung berupa fasilitas pemberian pinjaman cadangan atau tanpa jaminan
 - b. Instrument salah satu instrument tidak langsung yang digunakan dalam OPT
 - c. Instrument yang digunakan oleh bank sentral
 - d. Instrument lelang surat berharga

5. Yang tidak termasuk kedalam OPT yaitu..
 - a. Operasi pasar sekunder
 - b. Lelang surat berharga
 - c. Pasar terbuka
 - d. Operasi valuta asing

Essai

1. Instrumen langsung pada umumnya bersifat non-market based. Maksud dari non market based adalah? (tidak berorientasi pada mekanisme pasar)

2. Jenis instrumen langsung ada bermacam-macam, dengan berbagai variasi, antara lain sebutkan!
3. Maksud dari Penetapan Suku Bunga adalah?
4. Jenis instrumen tidak langsung juga bermacam-macam dan bervariasi, antara lain ada cadangan primer dan sekunder, jelaskan maksud dari instrument tersebut?
5. Mengapa OPT bank sentral dapat mempengaruhi sasaran operasionalnya (yaitu suku bunga atau jumlah uang beredar) secara lebih efektif.?

PERTEMUAN 5 MODUL 7

MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA

Tujuan: Untuk mempelajari mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia

Capaian pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

Pendahuluan
Gambaran umum mekanisme transmisi moneter
Saluran saluran transmisi moneter
Transmisi moneter di Indonesia
Perspektif ke depan

➤ **Hakekat Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter**

Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Secara spesifik, Taylor (1995) menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah *“the process through which monetary policy decisions are transmitted into changes in real GDP and inflation”*.

Mekanisme transmisi moneter dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter, apakah OPT atau yang lain, dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Tindakan itu kemudian berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan melalui

berbagai saluran transmisi kebijakan moneter, yaitu saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi.

Di bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham di samping volume dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi, saham maupun sekuritas lainnya. Sementara itu, di sektor ekonomi riil kebijakan moneter selanjutnya mempengaruhi perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor, hingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang merupakan sasaran akhir kebijakan moneter. Dalam kenyataannya, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks, dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan "*black box*"

➤ ***Interaksi di pasar keuangan***

Interaksi melalui pasar keuangan terjadi karena di satu sisi bank sentral melakukan pengendalian moneter melalui transaksi keuangan yang dilakukan dengan perbankan sesuai dengan arah dan sasaran kebijakan moneter yang telah ditetapkannya. Sementara di sisi lain, perbankan dan lembaga keuangan lainnya melakukan transaksi keuangan untuk portfolio investasinya baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Interaksi ini dapat terjadi baik melalui pasar uang rupiah pasar uang valuta asing, maupun pasar modal

Interaksi antara bank sentral dengan perbankan di pasar uang rupiah dan valuta asing tersebut akan berpengaruh pula terhadap perkembangan di pasar modal. Hal ini terjadi karena investor pada umumnya menanamkan dananya dalam suatu portfolio investasi yang terdiri dari instrumen atau produk yang ditransaksikan di pasar uang, pasar valas, dan pasar modal.

Interaksi di pasar uang rupiah terjadi ketika bank sentral, dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai sasaran akhir, melakukan operasi moneter untuk mencapai sasaran operasional yang ditetapkan, apakah target uang primer atau suku bunga jangka pendek

Interaksi di pasar uang valuta asing terjadi ketika di satu sisi bank sentral dalam kondisi tertentu perlu melakukan sterilisasi atau intervensi di pasar valuta asing sebagai bagian dari operasi moneter untuk mencapai sasaran operasional yang ditetapkan dan sekaligus dalam rangka upaya stabilisasi nilai tukar. Di sisi lain, bank-bank dalam operasinya melakukan transaksi valuta asing baik untuk kepentingannya sendiri ataupun untuk memenuhi permintaan nasabahnya. Interaksi antara bank sentral dan perbankan ini akan berpengaruh terhadap perkembangan nilai tukar dan volume transaksi valuta asing maupun posisi cadangan devisa yang dimiliki bank sentral dan perbankan. Sebagai contoh, apabila bank sentral

➤ ***Interaksi melalui fungsi intermediasi***

Tahap kedua dari transmisi kebijakan moneter dalam proses perputaran uang melibatkan interaksi antara perbankan dengan para pelaku ekonomi. Hal ini terjadi karena fungsi intermediasi perbankan dalam memobilisasi simpanan dari masyarakat dan dalam menyalurkan kredit dan bentuk pembiayaan lain kepada dunia usaha. Pertama-tama interaksi ini akan berpengaruh pada perkembangan volume dan suku bunga di pasar dana dan kredit. Di sisi mobilisasi dana, interaksi tersebut berpengaruh terhadap volume dan suku bunga giro, tabungan dan deposito sehingga berpengaruh pula terhadap perkembangan uang beredar (M1 dan M2), permintaan uang, dan tabungan masyarakat. Sementara di sisi penyaluran dana, interaksi tersebut akan berpengaruh pada perkembangan kredit perbankan yang

disalurkan kepada dunia usaha untuk pembiayaan investasi dan produksinya . Intermediasi perbankan juga berpengaruh terhadap perkembangan pasar modal baik ditinjau dari sisi penanaman dana oleh para investor

maupun dari sisi sumber pembiayaan oleh perusahaan emiten. Seperti disinggung di atas, penanaman dana oleh investor dalam portfolio investasinya tidak saja terdiri dari saham dan obligasi korporasi tetapi mencakup pula simpanan di perbankan, dan karenanya perkembangan volume dan suku bunga simpanan perbankan akan berpengaruh pula terhadap volume perdagangan dan harga saham dan obligasi. Sebagai contoh, apabila suku bunga simpanan di bank cenderung menurun, investor akan mengalihkan sebagian simpanannya di bank ke penanaman dalam bentuk saham dan obligasi. Sementara itu, pengaruh intermediasi perbankan terhadap penyediaan pembiayaan kepada dunia usaha melalui pasar modal terjadi karena dunia usaha memenuhi kebutuhan pembiayaannya tidak hanya dari kredit perbankan tetapi juga dari emisi saham dan obligasi di pasar modal.

➤ **Transmisi Moneter dan Proses Perputaran Uang**

Pemahaman mengenai pengertian dan kompleksitas transmisi kebijakan moneter barangkali akan lebih jelas apabila ditempatkan pada proses perputaran uang dalam perekonomian. Dalam kaitan ini, transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan dan lembaga keuangan lain, dan pelaku ekonomi di sektor riil melalui dua tahap proses perputaran uang. Pertama, interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas transaksi keuangan. Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi. intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku

ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor riil. Kedua tahap interaksi transmisi kebijakan moneter dalam proses perputaran uang tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut.

➤ **Pentingnya Transmisi Moneter bagi Teori dan Kebijakan Moneter.**

Kompleksitas mekanisme transmisi kebijakan moneter seperti diuraikan di atas menuntut perlunya analisis dan riset untuk memetakan bekerjanya berbagai saluran transmisi yang ada, apakah saluran uang beredar, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset ataupun ekspektasi, sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan yang terjadi. Dalam kaitannya dengan teori dan kebijakan moneter, studi mengenai transmisi moneter seperti ini biasanya bertujuan untuk mengkaji dua aspek penting. Yang pertama adalah untuk mengetahui saluran transmisi mana yang paling dominan dalam ekonomi untuk dipergunakan sebagai dasar bagi perumusan strategi kebijakan moneter. Apabila saluran uang beredar masih paling dominan, misalnya, maka strategi kebijakan moneter dengan penargetan uang beredar masih relevan dipergunakan. Namun demikian, apabila saluran suku bunga atau saluran nilai tukar menjadi yang paling dominan, maka perlu dipertimbangkan penargetan suku bunga atau penargetan nilai tukar sebagai strategi kebijakan moneter.

Yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa kuat dan lamanya tenggat waktu masing-masing saluran transmisi tersebut bekerja, baik dari sejak tindakan moneter dilakukan bank sentral ke perubahan masing-masing saluran maupun dari saluran transmisi ke perubahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Analisis seperti itu penting untuk menentukan variabel ekonomi dan keuangan mana yang paling kuat

dijadikan *leading indicators* terhadap pergerakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi ke depan serta variabel mana sebagai indikator untuk penentuan sasaran operasional kebijakan moneter. Dengan demikian, apabila uang beredar, kredit, suku bunga dan nilai tukar relatif kuat dalam mempengaruhi pergerakan ekonomi dan inflasi ke depan, maka variabel-variabel ini perlu dipergunakan dalam membangun *leading indicators*. Dari variabel-variabel ini pula dapat dipilih mana yang paling tepat dipergunakan sebagai sasaran operasional, misalnya apa uang primer atau suku bunga. dengan semakin berkembangnya perbankan dan sektor keuangan, dewasa ini muncul pandangan yang mengkritisi pendekatan tradisional dalam teori ekonomi moneter yang mendasarkan pada permintaan uang untuk transaksi tersebut. misalnya, berpandangan bahwa kunci untuk memahami ekonomi moneter adalah permintaan dan penawaran dana pinjaman, sehingga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya peran bank dan konsekuensi dari ketidaksempurnaan informasi yang sering terjadi di pasar keuangan. Pasar pinjaman tidak dapat disamakan dengan pasar barang, dan karenanya tidak dapat diasumsikan bahwa suku bunga yang terjadi di pasar akan selalu menyeimbangkan besarnya permintaan dan penawaran pinjaman. Resiko kredit macet, apakah disebabkan oleh debitur yang mengalami kegagalan usaha ataupun karena kecuranghati-hatian bank dalam memberikan pinjaman, dapat saja terjadi. Kondisi demikian memperkuat pandangan bahwa adalah perilaku bank dan pasar pinjaman yang lebih berperan dalam teori ekonomi moneter Dalam tataran empiris, permasalahan mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan topik yang menarik bagi dunia akademis. Bukti-bukti empiris masih perlu terus dikaji tidak saja untuk mempertajam

pengembangan teori ekonomi moneter dalam memberikan penjelasan yang rasional dan faktual mengenai fenomena yang sedang berkembang, tetapi juga untuk memberikan masukan bagi bank sentral dalam merumuskan kebijakan moneter. Secara khusus, semakin berkembangnya sektor keuangan dan adanya perubahan dalam struktur perekonomian tidak lagi dapat dijelaskan oleh transmisi moneter melalui saluran uang, suku bunga ataupun nilai tukar saja, tetapi juga dengan saluran pinjaman bank dan perilaku ekspektasi masyarakat. Berbagai perkembangan ini memerlukan pengembangan teknik-teknik pemodelan maupun bukti-bukti empiris yang mampu menjelaskan dengan lebih baik berbagai mekanisme transmisi kebijakan moneter yang terjadi dalam perekonomian.

➤ **Saluran Transmisi Kebijakan Moneter**

Dalam perkembangan lanjutan, dengan kemajuan di bidang keuangan dan perubahan dalam struktur perekonomian, terdapat lima saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter (*monetary policy transmission channels*) yang sering dikemukakan dalam teori ekonomi moneter (Mishkin, 1995, 1996; Bank for International Settlement, 1997; Kakes, 2000; De Bondt, 2000; Bofinger, 2001). Kelima saluran transmisi moneter dimaksud adalah saluran moneter langsung (*direct monetary channel*), saluran suku bunga (*interest rate channel*), saluran harga aset (*asset price channel*), saluran kredit (*credit channel*), dan saluran ekspektasi (*expectation channel*).

• **Saluran Uang**

Seperti dikemukakan di atas, transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang (*money channel*) mengacu pada dominasi peranan uang dalam perekonomian, yang pertama kali dijelaskan oleh *Quantity Theory of Money* (Fisher, 1911). Teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai

analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi, yang dinyatakan dalam suatu identitas yang dikenal sebagai "*The Equation of Exchange*" sebagai berikut:

$$MV = PT$$

- **Saluran Kredit**

Seperti dijelaskan di atas, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar (M1, M2) dipergunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan. Dalam kenyataannya, anggapan seperti tidak selamanya benar. Selain dana yg tersedia, perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti pemodal (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Selain itu, tidak semua permintaan kredit debitur dapat dipenuhi oleh bank-bank, khususnya karena kondisi keuangan debitur yang dinilai oleh bank tidak feasible antara lain karena tingginya rasio utang terhadap modal (*leverage*), risiko kredit macet, *moral hazard*, dan sebagainya. Adanya informasi yang tidak simetris (*assymetric information*) antara bank dengan debitur seperti itu dapat menyebabkan pasar kredit tidak selalu berada dalam keseimbangan

- **Saluran Suku Bunga**

Berbeda dengan saluran uang dan kredit yang mementingkan aspek kuantitas dari proses perputaran uang dalam ekonomi, saluran suku bunga (*interest rate channel*) lebih menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor riil. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter

yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai suku bunga di sektor keuangan dan selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan output riil

- **Saluran Nilai Tukar**

Seperti halnya saluran suku bunga, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar (*exchange rate channel*) menekankan pentingnya pengaruh perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Dalam kaitan ini, pentingnya saluran nilai tukar dalam transmisi kebijakan moneter terletak pada pengaruh aset finansial dalam bentuk valuta asing yang timbul dari kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Pengaruhnya tidak saja terjadi pada perubahan nilai tukar tetapi juga pada besarnya aliran dana yang masuk dan keluar suatu negara yang terjadi karena aktivitas perdagangan luar negeri maupun aliran modal investasi dalam neraca pembayaran

- **Saluran Harga Aset**

Selain pengaruh melalui nilai tukar terhadap aset valuta asing, kebijakan moneter juga berpengaruh terhadap perkembangan harga-harga aset lain, baik harga aset finansial seperti yield obligasi dan harga saham, maupun harga aset fisik khususnya harga properti dan emas. Transmisi ini terjadi karena penanaman dana oleh para investor dalam portfolio investasinya tidak saja berupa simpanan di bank dan instrumen investasi lainnya di pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga dalam bentuk obligasi, saham, dan aset fisik. Dengan demikian, perubahan suku bunga dan nilai tukar maupun besarnya investasi di pasar uang rupiah dan valuta asing akan berpengaruh pula terhadap volume dan harga obligasi, saham, dan aset fisik tersebut.

- **Saluran Ekspektasi**

Dengan semakin meningkatnya ketidakpastian dalam ekonomi dan keuangan, saluran ekspektasi (*expectation channel*) semakin penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter ke sektor riil. Para pelaku ekonomi, dalam menentukan tindakan bisnisnya, akan mendasarkan pada prospek ekonomi dan keuangan ke depan. Mereka akan membentuk persepsi tertentu terhadap kecenderungan perkembangan berbagai indikator ekonomi dan keuangan. Di samping persepsi yang bersifat individual, ekspektasi para pelaku ekonomi dimaksud biasanya akan dipengaruhi pula oleh perkembangan berbagai indikator ekonomi dan keuangan tersebut serta antisipasinya terhadap langkah-langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah dan bank sentral. Berkaitan dengan kebijakan moneter, yang paling diperhatikan adalah ekspektasi inflasi yang timbul di masyarakat. Di samping pengaruh perkembangan inflasi yang telah terjadi (*inertia*), ekspektasi inflasi pada umumnya dipengaruhi juga oleh kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral, yang ditunjukkan pada perkembangan suku bunga dan nilai tukar. Di sektor keuangan, seperti dijelaskan sebelumnya, kebijakan moneter bank sentral akan mempengaruhi perkembangan suku bunga jangka pendek (misalnya SBI dan PUAB), yang selanjutnya melalui transmisi saluran suku bunga akan berpengaruh pada perkembangan suku bunga perbankan (deposito dan kredit) serta melalui transmisi saluran nilai tukar akan berpengaruh terhadap perkembangan nilai tukar. Semakin kredibel kebijakan moneter, yang antara lain ditunjukkan pada kemampuan dalam mengendalikan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar, semakin kuat pula dampaknya terhadap ekspektasi inflasi masyarakat

Studi mengenai transmisi moneter juga penting untuk memahami kekuatan relatif dari masing-masing saluran dalam mentransmisikan kebijakan moneter dalam rangka mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Studi seperti ini sangat berguna dalam menyusun dan memilih berbagai indikator kunci dari perkembangan ekonomi dan keuangan sebagai dasar perumusan kebijakan moneter

Essai

1. Apa yang di nyatakan oleh taylor tentang kebijakan transmisi moneter.??
2. Di bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan.??
3. Interaksi di pasar uang valuta asing terjadi ketika.??
4. Interaksi antara bank sentral dengan perbankan di pasar uang rupiah dan valuta asing tersebut akan berpengaruh pula terhadap perkembangan di pasar modal. Hal ini terjadi karena.??
5. pelaku ekonomi di sektor riil melalui berapa tahap proses perputaran uang.??

Pilihan ganda

1. pelaku ekonomi di sektor riil melalui berapa tahap proses perputaran uang.??
A. 2 B. 3 C. 4
2. Ada berapa saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter.??
A. 4 B. 5 C. 3
3. Yang merupakan saluran mekanisme transmisi moneter adalah.??
A. Saluran debit B. saluran kredi C. salajh semua
4. Di bawah ini yang merupakan saluran mekanisme transmisi moneter kecuali
A. Saluran kredit B. saluran debit C. saluran nilai tukar
5. Di bawah ini yang merupakan saluran mekanisme transmisi moneter adalah??
A. Saluran kredit B. saluran harga asset C. semua benar

PERTEMUAN 5 MODUL 8 OPERASI PASAR TERBUKA

Tujuan: Untuk mempelajari konsep operasi pasar terbuka sebagai instrumen moneter

Capaian pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

A	Pendahuluan
B	Kerangka Kebijakan moneter
C	Instrumen kebijakan moneter
D	Operasi pasar terbuka di Indonesia

OPT (Operasi Pasar Terbuka) merupakan salah satu kebijakan Moneter terkait dengan upaya Pengendalian uang beredar.

Kerangka Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang strategis mengingat kebijakan moneter dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (social welfare) yang umumnya tercermin pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, keseimbangan neraca pembayaran, dan perluasan lapangan kerja.

Peranan kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro utama tersebut diyakini karena terdapat keterkaitan yang cukup erat antara perkembangan variabel indikator kebijakan moneter, uang beredar, dan suku bunga dengan perkembangan kegiatan sektor riil. dalam sektor riil yang tergantung pada likuiditas dan suku bunga dipasar, ketika tingkat pertumbuhan penawaran uang melebihi permintaan akan uang, maka laju inflasi akan mengalami kenaikan. Dengan mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar atau tingkat likuiditas perekonomian, bank sentral akan dapat mengendalikan kestabilan harga.

Disektor eksternal, pertumbuhan jumlah uang beredar yang terlalu besar dapat meningkatkan pengeluaran di dalam negeri, yang pada gilirannya akan meningkatkan harga. Peningkatan harga di dalam negeri yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan turunnya daya saing barang ekspor dan, sebaliknya, akan meningkatkan daya saing barang impor. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter yang diambil diharapkan secara

langsung akan mempengaruhi neraca modal melalui pengendalian jumlah penawaran uang dan nilai tukar. Kebijakan moneter tidak dapat dicapai secara bersamaan. Sebagai contoh, pada saat bank sentral menerapkan kebijakan uang ketat untuk menjaga kestabilan harga yang disebabkan oleh berlebuhnya penawaran uang, bank sentral akan mengurangi jumlah uang beredar sehingga terjadi kelangkaan dana di pasar keuangan dan selanjutnya akan mendorong kenaikan suku bunga.

Sementara itu, kenaikan suku bunga akan mengakibatkan investasi terhambat, yang pada gilirannya mempengaruhi produksi dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini telah mendorong bank sentral pada umumnya cenderung untuk menetapkan sasaran kebijakan moneter pada sasaran tunggal, yaitu menjaga kestabilan nilai mata uang yang tercermin pada tingkat inflasi dan nilai tukar.

Kerangka strategis kebijakan moneter meliputi dua sasaran, yaitu sasaran akhir yang biasanya diarahkan untuk mencapai stabilitas harga dan/atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, kerangka operasional meliputi penetapan sasaran operasional dan instrumen yang akan digunakan. Sasaran operasional yang ditetapkan oleh bank sentral meliputi likuiditas bank (bank reserves) dan suku bunga pasar uang jangka pendek (short-term money interest rates). Sementara itu, instrumen yang dipergunakan dapat berupa instrumen langsung atau instrumen tidak langsung.

Instrumen Kebijakan Moneter

Dalam melaksanakan kebijakan moneter bank sentral dapat menggunakan instrumen langsung (direct instrument) dan instrumen tidak langsung (indirect instrument). Instrumen langsung yaitu dengan mengeluarkan ketentuan sesuai dengan wewenangnya dan ditunjukkan untuk mengendalikan baik harga maupun jumlah besaran moneter dan terutama ditunjukkan untuk mempengaruhi neraca bank-bank komersial. Misal, penetapan pagu kredit. Sedangkan instrumen tidak langsung yaitu mempengaruhi kondisi pasar uang. Instrumen tidak langsung ini merupakan usaha untuk mengendalikan besaran moneter dengan cara mempengaruhi neraca bank sentral. Satu hal penting dalam instrumen tidak langsung adalah bahwa bank sentral dapat mempengaruhi posisi uang primer atau likuiditas bank yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kredit dan penawaran uang.

Disini ada bentuk instrument langsung yang di pergunakan yaitu pengendalian suku bunga, pagu kredit, dan kredit program atau kredit khusus bank sentral. Sementara itu, ada tiga bentuk utama instrument tidak langsung, yaitu OPT, cadangan wajib minimum, dan fasilitas pendanaan jangka pendek atau fasilitas diskonto.

Jadi, OPT bisa dibilang pembelian atau penjualan surat-surat berharga oleh bank sentral pada pasar perdana maupun pasar sekunder dengan tujuan untuk mempengaruhi kondisi likuiditas pasar uang. Surat yang biasanya digunakan untuk OPT adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, surat yang diterbitkan oleh bank sentral dan surat berharga yang diterbitkan oleh sektor swasta. Dalam fasilitas pendanaan jangka pendek dapat diberikan dalam berbagai bentuk, yang umumnya berbentuk rediskonto surat berharga yang berkualitas tinggi, seperti T-bills, pinjaman dengan jaminan surat berharga atau kredit melalui lelang.

OPT merupakan instrument yang paling sering dipergunakan oleh otoritas moneter dalam melaksanakan kebijakan moneternya mengingat instrument ini lebih berorientasi paasar. Bank sentral juga dapat mengontrol frekuensi OPT dan jumlah kuantitas lelang yang diinginkan, sehingga OPT merupakan instrument yang sangat bermanfaat untuk menstabilkan uang primer atau suku bunga jangka pendek.

Menggunakan instrument tidak langsung, maka bank sentral memiliki kemampuan untuk menentukan besarnya penawaran uang primer meskipun kemampuan untuk mengendalikan penawaran dalam jangka panjang hanya dapat dilakukan oleh negara yang melaksanakan system nilai tukar mengembang penuh. Bagi negara yang melaksanakan nilai tukar tetap atau system nilai tukar mengembang terkendali, kebijakan bank sentral ini dapat mempengaruhi uang primer untuk jangka pendek.

- Perkembangan penggunaan instrument kebijakan pengendalian moneter di beberapa negara

Tahun 1970 bank sentral di negara-negara industri mulai menggunakan dan mengandalkan instrument tidak langsung. Lalu, pada tahun-tahun berikutnya diikuti oleh negara-negara sedang berkembang dan negara berkembang yang menganut system external current and capital account convertibility yang menyebabkan instrument langsung menjadi kurang efektif dan menyebabkan inefisiensi dan disintermediasi sektor keuangan.

Pada tahun 1990 terlihat adanya kecenderungan bank sentral untuk mengadopsi kerangka strategis kebijakan moneter yang baru, yaitu penetapan sasaran inflasi. Sekitar 58% bank sentral menggunakan kerangka strategis tersebut dibandingkan dengan 5%, sementara beberapa negara masih menggunakan sasaran lebih dari satu.

Negara ASEAN yang terkena krisis ekonomi di pertengahan 1997 hampir semua bank sentral mengalihkan kebijakan dari penetapan sasaran besaran moneter ke sasaran inflasi. Korea beralih ke sasaran inflasi pada tahun 1998, Thailand pada tahun 2000, dan Filipina pada tahun 2001. Sedangkan negara-negara yang beralih ke penetapan sasaran inflasi adalah Selandia Baru, Australia, dan Brazil. Negara-negara tersebut beralih ke penetapan sasaran inflasi karena semakin diyakininya pandangan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu prasyarat bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Namun, ada juga yang menunjukkan bahwa semakin banyak negara yang menganut kerangka strategis kebijakan penetapan sasaran inflasi yang telah berhasil mengatasi permasalahan laju inflasi. Perkembangan tersebut didasari oleh:

1. Beralihnya rezim nilai tukar dari system nilai tukar tetap atau mengambang terkendali ke system nilai tukar fleksibel sehingga dibutuhkan nominal anchor yang baru
2. Semakin cepatnya perubahan perekonomian dunia dan lingkungan finansial
3. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan informasi dan berita
4. Kurang jelasnya kerangka kebijakan moneter yang sebelumnya dianut oleh banyak bank sentral.

Sementara itu, instrument kebijakan moneter yang digunakan pada umumnya meliputi instrument tidak langsung yang lazim digunakan, seperti OPT, cadangan wajib minimum, dan fasilitas diskonto. Instrument lain yang masih digunakan antara lain yaitu fasilitas rediskonto, lelang kredit, dan operasi valuta asing.

Operasi Pasar Terbuka

OPT merupakan instrumen yang paling banyak dipergunakan oleh otoritas moneter karena instrumen ini lebih berorientasi pasar, keterlibatan OPT tidak mengikat, arah kebijakannya yang mudah ditangkap pasar dan tidak membebankan pajak pada bank.

Bank Sentral dalam mengendalikan likuiditas perbankan melalui OPT dapat melakukan penjualan atau pembelian surat berharga. Apabila likuiditas perbankan melebihi permintaan maka bank sentral dapat melakukan penjualan surat berharga. Secara teori, penjualan surat berharga oleh bank sentral akan mengakibatkan uang primer mengalami penurunan. Sementara itu, penjualan surat berharga akan membawa suku bunga jangka pendek mengalami kenaikan dan pada gilirannya M1 dan M2 sebagai indikator pencapaian kebijakan akan mengalami penurunan. Demikian pula sebaliknya, apabila likuiditas perbankan lebih rendah dibandingkan dengan permintaan, bank sentral dapat melakukan pembelian. Dengan pembelian surat berharga, uang primer akan meningkat. Disamping itu, dengan pembelian surat berharga, suku bunga jangka pendek akan menurun dan, pada akhirnya, M1 dan M2 akan meningkat.

Operasi Pasar yang bersifat Kontraktif akan menimbulkan konsekuensi finansial berupa biaya yang akan menjadi beban otoritas moneter. Penanggung beban OPT bergantung pada jenis instrumen yang digunakan dalam OPT. Apabila Bank Sentral melakukan OPT dengan menggunakan surat utang (sertifikat) yang diterbitkan oleh bank sentral yang saat ini dilakukakn oleh Bank Indonesia maka beban OPT ini akan ditanggung oleh Bank Sentral. Namun, Apabila Instrumen operasional yang digunakan adalah T-bills atau obligasi pemerintah maka beban OPT akan menjadi beban negara. Sedangkan pada Operasi Pasar Ekspansif konsekuensi finansial yang timbul akan merupakan kebalikan dari operasi pasar yang bersifat kontraktif sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Operasi Pasar Terbuka di Indonesia

Sejak sdiberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, keberadaan Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan kebijakan moneternya mulai terwujud, terutama dalam aspek fungsional dan penggunaan instrumen kebijakan moneter dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan (instrument independence). Sasaran yang ditetapkan yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah. Lalu, Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter dengan menggunakan OPT sebagai instrumen operasionalnya. Tujuan OPT secara umum adalah mencapai sasaran akhir pada kebijakan moneter dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter yang ditetapkan. Sasaran operasional yang ditetapkan dalam kebijakan

moneter adalah Jumlah uang primer. Faktor-faktor yang mempengaruhi uang primer yang dilihat dari sisi aktiva neraca BI terdiri 2 kelompok :

- a. Cadangan Devisa bersih (net international reserves) yang likuid atau cadangan devisa setelah dikurangi kewajiban jangka pendek yang dimiliki BI
- b. Aktiva domestik bersih (net domestic assets) atau tagihan bersih BI (otoritas moneter) kepada sektor swasta dalam negeri (domestik). Tagihan ini terdiri dari tagihan bersih kepada pemerintah pusat, bantuan likuiditas, kredit likuiditas, tagihan lainnya, instrumen OPT, dan Lainnya.

Sedangkan kalau dilihat dari sisi passiva neraca BI, Uang primer terdiri dari 3 komponen besar yaitu :

- a. Uang kartal : uang logam dan kertas yang beredar dimasyarakat dan yang ada di kas bank
- b. Saldo giro bank : simpanan bank-bank dalam rupiah di BI
- c. Saldo giro : simpanan sektor swasta dalam rupiah di BI

Mekanisme Operasi Pasar Terbuka

Secara umum, OPT dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga dalam rupiah dipasar primer atau sekunder melalui mekanisme lelang/nonlelang. Surat berharga dalam rupiah meliputi SBI, Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang memiliki kualitas tinggi dan mudah untuk dicairkan. Kegiatan OPT dapat dilakukan melalui :

1. Penerbitan Surat Berharga Bank Indonesia (SBI)
2. Jual beli surat berharga dalam rupiah
3. Penyediaan fasilitas simpanan Bank Indonesia dalam rupiah (intervensi rupiah/FASBI)
4. Jual beli valuta asing terhadap rupiah

Yang termasuk instrumen OPT bersifat kontraktif adalah SBI dan intervensi rupiah kontraksi. Sedangkan yang bersifat ekspansif adalah SBI-Repo (Repurchase agreement) dan intervensi rupiah ekspansi lalu FASBI bersifat ekspansif.

1. Penerbitan SBI

Salah satu instrument OPT yang diterbitkan BI adalah SBI. SBI merupakan surat pengakuan utang yang berjangka pendek dalam rupiah dengan menggunakan diskonto. SBI diterbitkan dengan

mekanisme lelang/non lelang. SBI itu dapat dibeli hanya dipasar perdana oleh Bank atau pihak lain nonbank, seperti pialang yang ditetapkan oleh BI. Lalu SBI yang dibeli di pasar perdana boleh diperdagangkan di pasar sekunder.

2. Jual beli surat berharga rupiah

Surat berharga yang diperjualbelikan harus likui yang artinya surat berharga tersebut harus memenuhi syarat :

- a. Diperdagangkan di pasar sekunder dengan harga yang wajar
- b. Volume surat berharga memadai untuk keperluan OPT, dan syarat yang juga penting
- c. Diterbitkan secara kontinyu serta selalu tersedia setiap saat.

Surat berharga yang tersedia saat ini dan memenuhi ketiga syarat itu adalah SBI. Sedangkan surat berharga lainnya yang belum memenuhi ketiga syarat diatas meliputi obligasi pemerintah/SUN, dan surat lainnya yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.

3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI Merupakan instrumen OPT yang didasarkan pada prinsip syariah. SWBI merupakan fasilitas penitipan dana bagi bank-bank syariah. SWBI merupakan instrumen pengendalian yang bersifat kontraksi. Apabila Bank yang mengalami kelebihan likuiditas, SWBI dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek dengan prinsip bagi hasil atau imbalan atau bonus yang mengacu pada prinsip *wadiah yad dhamanah*. Fasilitas ini memiliki jangka waktu dan *window time* yang ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai kebutuhan OPT.

4. Penyediaan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI)

Pada awal diterapkannya, Desember 1997, instrumen ini lebih dikenal dengan nama intervensi rupiah (IR). Instrumen ini dipergunakan oleh Bank Indonesia untuk melakukan kontraksi dan ekspansi moneter melalui kegiatan pinjam-meminjam dana secara langsung di pasar uang antarbank (PUAB).

Secara umum, FASBI mempunyai karakteristik sebagai berikut.

- a. Penawaran jumlah atau kuantitas dan jangka waktu transaksi FASBI ditetapkan oleh Bank Indonesia¹¹
- b. FASBI, sebagaimana SBI, ditransaksikan dengan sistem diskonto

- c. Nilai tunai transaksi dihitung berdasarkan diskonto murni (true discount) dan nilai diskonto dihitung sama dengan nilai nominal dikurangi dengan nilai tunai (lihat Boks tentang SBI)
 - d. FASBI tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.
5. Jual beli valuta asing terhadap rupiah

Instrumen ini dikenal sebagai intervensi valuta asing di pasar keuangan. Di dalam OPT, instrumen ini dapat digunakan oleh BI untuk melakukan kontraksi atau ekspansi moneter. Transaksi ini dilakukan melalui jual-beli valuta asing terhadap rupiah secara langsung di pasar uang, antara lain melalui transaksi *spot* dan *swap*. Apabila menurut Bank Indonesia terdapat kelebihan atau kekurangan likuiditas di pasar uang rupiah, Bank Indonesia selain dapat menjual atau membeli surat berharga, dapat juga menjual atau membeli valuta asing di pasar secara langsung.

Pelaksanaan OPT

Dalam hal kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian suku bunga, Bank Indonesia menetapkan suku bunga pasar uang jangka pendek sebagai sasaran operasional. Untuk mencapai sasaran operasional tersebut baik dalam kerangka kebijakan moneter berdasarkan sasaran kuantitas maupun sasaran suku bunga, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter melalui OPT yang bersifat kontraksi atau ekspansi. Saat ini OPT dilaksanakan oleh Bank Indonesia melalui instrumen operasional utama berupa penerbitan SBI melalui lelang SBI dan penyediaan fasilitas simpanan yang dikenal dengan FASBI.

- Prosedur Pelaksanaan Lelang Sertifikat Bank Indonesia

Lelang SBI merupakan penjualan SBI yang dilakukan dipasar perdana kepada peserta lelang terdiri dari bank, pialang pasar uang dan pialang pasar modal yang telah ditunjuk oleh BI. Jumlah SBI yang yang diterbitkan akan disesuaikan oleh sasaran lelang dengan memperhatikan kondisi likuiditas perbankan. Sistem ini disebut Sistem Stop-Out Rate (SOR). Lelang SBI itu diadakan pada hari Rabu atau jika hari rabu libur bisa dilaksanakan pada hari berikutnya. Lalu penawaran lelang dilakukan pada saat hari pelaksanaan lelang ke BI dan pada hari itu BI juga akan mengumumkan pemenang lelang.

- Prosedur Pelaksanaan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI)

Fasilitas ini disediakan oleh BI kepada bank umum untuk menempatkan dananya di BI hanya pada saat diperlukan oleh BI dalam kerangka OPT.

Karakteristik FASBI :

1. Tidak dapat diperdagangkan
2. Tidak dapat digunakan sebagai agunan
3. Tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo waktu
4. Bersifat final dan tidak dapat dibatalkan

Lalu jangka waktu yang ditentukan itu 7 hari dan tingkat diskontonya ditentukan oleh BI. Mencari diskonto yaitu dengan nilai nominal – nilai tunai sedangkan mencari nilai tunai

$$\text{Nilai Tunai} = \frac{(\text{Nilai Nominal}) \times 360}{360 + (\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Jangka Waktu})}$$

Tindak lanjut yang pelaksanaan OPT, apabila BI perlu penyediaan fasilitas FASBI maka BI akan merencanakan penyediaan FASBI pada hari yang sama sebelum transaksi dimulai. Pengumuman akan dilakukan kepada Bbank melalui Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) yaitu sarana sarana transaksi dengan BI secara online dan Pusat Informasi Pasar Uang (jangka waktu, tingkat diskonto, hari dan waktu dilaksanakan transaksi). Bank yang mekaukakan fasilitas ini dapat mengajukan penawaran sesuai nominal yang telah ditetapkan BI. Apabila persyaratan semua terpenuhi pada hari yang sama BI akan mengumumkan penawaran melalui BI-SSSS setelahnya rekening giro penawar akan didebet sejumlah penawaran yang telah diterima. Ketika transaksi FASBI jatuh waktu BI akan mengkredit rekening giro bank yang bersangkutan.

- Prosedur Pelaksanaan Penitipan Dana Wadiah atau Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI itu merupakan instrumen OPT yang didasarkan pada prinsip syariah. Pelaksanaan SWBI adalah

1. Sebelum penitipan dilaksanakan, Bank Indonesia menyampaikan pengumuman melalui sarana BI-SSSS yang mencakup informasi mengenai rencana dan persyaratan penitipan dana wadiah serta daftar peserta BI-SSSS yang dapat mengajukan SWBI.
Penetapan daftar peserta SWBI ini mengacu pada kecukupan saldo rekening giro rupiah Bank Syariah atau UUS yang ada di Bank Indonesia.
2. Selanjutnya, Bank Syariah atau UUS dapat mengajukan permohonan penitipan, dan pada hari yang sama Bank Indonesia

menyampaikan pengumuman persetujuan penitipan SWBI. Pada saat SWBI jatuh waktu, pembayaran SWBI diberikan sebesar nilai nominal SWBI dan bonus (bila ada).

SOAL TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA – Modul 8

1. Apa yang dimaksud OPT ?
2. Apa yang dimaksud dengan instrumen kebijakan moneter yang bersifat langsung ?
3. Sebutkan 4 mekanisme OPT ?
4. Apa yang dimaksud SBI ?
5. Apabila likuiditas perbankan melebihi permintaan, maka Bank Sentral akan....
6. Yang bukan termasuk mekanisme OPT adalah
 - a. Jual Beli surat berharga dalam rupiah
 - b. Penerbitan SBI
 - c. FASBI
 - d. Melakukan Discount Facility
7.
 1. OPT
 2. RASIO LIKUIDITAS
 3. RESERVE REQUIREMENT
 4. GIRO WAJIB MINIMUMDari data diatas yang termasuk ke dalam instrumen kebijakan moneter tidak langsung adalah
 - a. 1,3,4
 - b. Semua benar
 - c. 1,3,2
 - d. 1,4,2
8. Mekanisme atau instrumen OPT yang didasarkan pada prinsip syariah adalah
 - a. FASBI
 - b. SWBI
 - c. SBI-Repo
 - d. UUS
9. Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) yaitu sarana sarana transaksi dengan BI secara online dan Pusat Informasi Pasar Uang (jangka waktu, tingkat diskonto, hari dan waktu dilaksanakan transaksi).

Pernyataan diatas

 - a. True
 - b. False
10. Uang primer terdiri dari
 - a. Uang kartal, saldo giro bank, dan saldo giro
 - b. Uang giral, diskonto, SBI
 - c. Uang kartal, SBI, saldo bank
 - d. Uang kuasai, uang kartal, uang giral

MODUL 9 PERTEMUAN 6
NERACA PEMBAYARAN KONSEP METODOLOGI DAN
PENERAPAN

Tujuan: untuk mempelajari konsep, metodologi dan penerapan neraca pembayaran

Capaian pembelajaran: Pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

A	Pengertian umum dan tujuan penyusunan neraca pembayaran
B	Metode pencatatandan penyajian neraca pembayaran
C	Struktur dan Keseimbangan Neraca pembayaran
D	Neraca pembayaran Indonesia dan Karakteristiknya

Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk (resident) suatu Negara dan penduduk luar negeri (rest of the world) untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

Dalam Kondisi perekonomian suatu negara dapat dilihat baik dari sisi internal maupun eksternal. Kondisi internal antara lain tercermin pada perkembangan sektor riil, seperti produksi, konsumsi, dan investasi, dan perkembangan sektor moneter, seperti inflasi dan jumlah uang beredar. Sementara itu, kondisi eksternal tercermin pada perkembangan neraca pembayaran. Perkembangan neraca pembayaran memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan sektor riil, fiskal, dan moneter. perkembangan permintaan dan penawaran barang dan jasa di sektor riil yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor tercermin pada perkembangan ekspor dan impor baik barang maupun jasa pada transaksi berjalan. Demikian pula transfer, seperti hibah dari luar negeri

kepada pemerintah yang merupakan bagian dari penerimaan anggaran negara, tercatat dalam transaksi berjalan. Selain itu, transaksi pembayaran bunga pinjaman pemerintah yang merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah dalam anggaran negara juga tercatat di neraca pembayaran pada pos penghasilan (income). Dalam pada itu, aliran modal luar negeri yang merupakan salah satu sumber pembiayaan baik pada kegiatan sektor pemerintah (fiskal) maupun bank umum akan tercatat pada perkembangan transaksi modal dan keuangan dalam neraca pembayaran.

Aliran dana dan keseluruhan transaksi yang mempengaruhi cadangan devisa yang tercatat dalam transaksi modal dan keuangan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi khususnya sektor moneter. Hal ini mengingat perubahan cadangan devisa akan mempengaruhi aktiva luar negeri bersih otoritas moneter, yang pada gilirannya akan mempengaruhi uang beredar dalam perekonomian. Dengan demikian, dalam lingkup analisis ekonomi makro, keterkaitan antara sektor eksternal dengan sektor lainnya seperti telah diuraikan di atas memegang peranan yang penting dalam proses perhitungan tingkat output nasional atau Produk Domestik Bruto, penyusunan anggaran negara, dan perumusan kebijakan moneter. Hal ini menjadikan neraca pembayaran sebagai salah satu indikator penting dalam perumusan kebijakan ekonomi makro suatu negara.

Dilihat dari strukturnya Neraca Pembayaran dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal. Masing-masing komponen dalam kelompok terdiri dari sisi kredit dan debit. Sisi kredit mencatat transaksi-transaksi yang menimbulkan hak bagi penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran seperti: Ekspor barang, Jasa-jasa yang diberikan penduduk kepada bukan penduduk (ekspor jasa), Penerimaan hadiah dari bukan penduduk

(transfer), Pembelian kekayaan (assets) milik penduduk oleh bukan penduduk, Penjualan surat-surat berharga (securities) milik penduduk kepada bukan penduduk, Penanaman modal langsung (direct investment) oleh bukan penduduk, Pinjaman yang diterima dari bukan penduduk, Pembayaran utang (debt repayments) oleh bukan penduduk, Penjualan emas milik penduduk kepada bukan penduduk dan sisi debit mencatat transaksi-transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar bagi penduduk suatu negara terhadap penduduk negara lain seperti: Impor barang, Jasa-jasa yang diterima penduduk dari bukan penduduk (impor jasa), Pemberian hadiah kepada bukan penduduk (transfer) , Penjualan kekayaan (assets) yang dimiliki oleh bukan penduduk, Pembelian surat-surat berharga (securities) milik bukan penduduk, Penanaman modal langsung oleh penduduk di luar negeri (direct investment abroad) , Pinjaman yang diberikan kepada bukan penduduk, Pembayaran utang (debt repayments) kepada bukan penduduk, Pembelian emas milik bukan penduduk. Sesuai dengan sistem yang dianut, pencatatan transaksi-transaksi tersebut di atas harus dibarengi dengan pencatatan di sisi debit. Sebagai contoh, apabila ekspor dibayar tunai maka pencatatan kredit (ekspor) dibarengi dengan pencatatan debit (pertambahan aset). Sementara itu, dalam pencatatan NP, setiap transaksi ekonomi tidak selalu mempengaruhi sisi aset dan kewajiban namun dapat juga hanya mempengaruhi sisi aset atau sisi kewajiban saja. Struktur NP terdiri dari beberapa komponen yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

a. Transaksi berjalan (current account)

1) Perdagangan barang (trade)

a) Ekspor (exports)

b) impor (imports)

2) Jasa-jasa (services)

3) Penghasilan (income) : Transfer

- b. Transaksi modal dan keuangan (capital and financial account)
 - 1) Transaksi modal (capital account)
 - 2) Transaksi keuangan di luar cadangan devisa (financial account)
 - a) Penanaman modal langsung (foreign direct investment)
 - b) Investasi surat berharga (portfolio investment)
 - c) Investasi lainnya
 - c. Perubahan cadangan devisa (changes in reserves)
 - d. Selisih perhitungan (errors and omissions)
 - a. Transaksi berjalan

Transaksi berjalan meliputi perdagangan barang dan jasa, penghasilan (income), dan current transfer. Secara keseluruhan, transaksi berjalan menggambarkan nilai bersih antara sisi kredit dan sisi debit dari seluruh transaksi yang tercatat dalam setiap komponen transaksi berjalan. Secara analitis, dalam kelompok transaksi berjalan tersebut terdapat dua neraca lainnya, yaitu neraca perdagangan, yang merupakan hasil bersih dari perdagangan barang atau ekspor dan impor barang, dan neraca jasa yang merupakan hasil bersih antara ekspor jasa dan impor jasa.

Adapun konsep keseimbangan dalam neraca pembayaran untuk mengetahui apakah neraca pembayaran mengalami surplus atau defisit. Komponen yang menimbulkan terjadinya surplus atau defisit meliputi transaksi yang termasuk dalam transaksi berjalan (current account) dan transaksi yang termasuk dalam transaksi modal dan keuangan (capital and financial account) di luar cadangan devisa. Khusus mengenai neraca perdagangan, perhitungan baik ekspor maupun impor harus dalam nilai free on board (f.o.b), bukan dalam nilai keseluruhan, termasuk cost, insurance, dan freight (c.i.f), mengingat ongkos dan jasa pengiriman merupakan kelompok transaksi jasa sehingga harus dikelompokkan dalam jasa-jasa. Beberapa transaksi yang termasuk dalam kelompok jasa antara lain ialah jasa transportasi, pariwisata, dan komunikasi.

Sementara itu, hasil penggunaan faktor produksi, modal dan tenaga kerja dicatat dalam kelompok penghasilan (income), misalnya dividen dan bunga. Selanjutnya transaksi dalam kelompok transfer meliputi transaksi yang tidak menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran (unrequited transfer), seperti hibah yang diterima pemerintah maupun swasta.

b. Secara keseluruhan, transaksi modal dan keuangan menggambarkan nilai bersih antara sisi kredit dan sisi debit dari seluruh transaksi yang tercatat dalam setiap komponen transaksi modal dan keuangan. Transaksi modal dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu capital transfer dan pembelian/penjualan non-financial asset, seperti paten, dan copyrights. Capital transfer selain mencakup pemberian barang modal (fixed assets), juga transfer uang dalam rangka pembelian barang modal. Sementara itu, transaksi keuangan yang meliputi transaksi yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya aset dan atau kewajiban luar negeri dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu transaksi keuangan di luar cadangan devisa (reserve assets) dan transaksi yang mengakibatkan perubahan cadangan devisa. Kelompok transaksi keuangan di luar reserve mencakup transaksi yang terkait dengan lalulintas keuangan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang yang dilakukan baik oleh Pemerintah, perusahaan pemerintah, maupun swasta, termasuk penanaman modal asing. Perlu dikemukakan bahwa pembayaran bunga pinjaman tidak diperhitungkan dalam lalu lintas modal melainkan dalam jasa-jasa mengingat transaksi tersebut merupakan transaksi jasa.

c. Perubahan Cadangan Devisa (Changes in Reserves) Sementara itu, transaksi keuangan yang menyangkut cadangan devisa atau reserve assets merupakan pos yang menampung surplus atau defisit NP. Pos ini menunjukkan besarnya perubahan jumlah cadangan devisa yang dikuasai oleh otoritas moneter⁶ sehubungan dengan transaksi internasional yang

terjadi pada periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Adapun komponen cadangan devisa yang dicatat dalam neraca pembayaran meliputi:

- Emas moneter (monetary gold), yaitu emas yang dikelola otoritas moneter baik yang disimpan di dalam negeri maupun di luar negeri
- Reserves Position in the Fund (RPF), merupakan rekening yang dimiliki anggota IMF yang bersifat likuid (liquid claim) terhadap IMF. Jumlah RPF yang dimiliki masing-masing anggota tergantung pada besarnya setoran kuota dalam valuta asing.⁷ RPF dapat diperhitungkan sebagai komponen cadangan devisa mengingat sewaktu-waktu dapat ditarik dalam bentuk fasilitas yang dapat diberikan oleh IMF
- Special Drawing Rights (SDR), merupakan rekening giro yang dimiliki negara anggota IMF dalam satuan hitung SDR yang diciptakan oleh IMF untuk digunakan dalam setiap kali melakukan transaksi keuangan dengan IMF. Pembentukan rekening tersebut dimaksudkan untuk menunjang stabilitas moneter internasional dengan cara melakukan alokasi pada saat kondisi likuiditas internasional mengalami ketidakseimbangan. Dengan demikian, SDR memungkinkan bertambah besarnya cadangan devisa masing-masing negara, sekaligus menambah likuiditas internasional. Besarnya rekening SDR masing-masing negara anggota dapat berubah pada saat memperoleh alokasi atau tambahan alokasi SDR dan pada saat melakukan pembelian atau melakukan transaksi keuangan dengan IMF
- Valuta asing (foreign exchange), tagihan kepada bukan penduduk dalam bentuk mata uang asing, saldo rekening giro, dan saldo simpanan berjangka dalam valuta asing serta kertas berharga dalam valuta asing.

d. Errors and Omissions (Selisih Perhitungan) Selisih perhitungan merupakan komponen penyeimbang neraca untuk menampung selisih atau perbedaan antara pencatatan di sisi kredit dan di sisi debit. Selisih

antara sisi kredit dan sisi debit tersebut dapat terjadi, mengingat dalam praktik sumber data pencatatan transaksi NP pada sisi debit berbeda dengan sisi kredit sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan masing-masing sisi. Selain itu, selisih perhitungan juga dapat terjadi karena kesalahan pencatatan, selisih waktu pencatatan (time-lag), selisih kurs, dan kesulitan dalam pengumpulan data.

Konsep Keseimbangan Neraca Pembayaran

NP akan selalu menunjukkan keseimbangan, artinya bahwa dalam neraca tersebut jumlah sisi kredit akan selalu sama dengan sisi debit. Apabila antara sisi kredit dan debit tidak seimbang maka perbedaan tersebut akan ditampung dalam pos “selisih perhitungan”. Konsep keseimbangan neraca pembayaran bukan dilihat dari sisi neraca itu sendiri melainkan dilihat dari komponen tertentu yang ada dalam neraca pembayaran sehingga akan terlihat apakah NP mengalami surplus atau defisit. Komponen yang menimbulkan terjadinya surplus atau defisit meliputi transaksi yang termasuk dalam transaksi berjalan (current account) dan transaksi yang termasuk dalam transaksi modal dan keuangan (capital and financial account) di luar cadangan devisa (reserves assets), dan disebut dengan “autonomous transaction”. Sementara itu, komponen yang menampung surplus atau membiayai defisit meliputi transaksi yang mengakibatkan perubahan cadangan devisa dan disebut “accommodating transaction”. Surplus pada autonomous transaction terjadi apabila sisi kredit dari transaksi-transaksi yang dicatat lebih besar daripada sisi debetnya; demikian pula sebaliknya apabila terjadi defisit. Dalam literatur ekonomi dan keuangan internasional, autonomous transaction digolongkan dalam transaksi-transaksi yang disebut transaksi-transaksi “above the line” (di atas garis pemisah), sedangkan accommodating transaction merupakan transaksi-transaksi “below the line” (di bawah

garis pemisah). Secara umum, dikenal empat konsep keseimbangan NP, yaitu:

a. Konsep Keseimbangan Perdagangan (Trade Balance) Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit hanya transaksi ekspor dan impor barang sehingga keseimbangan NP diukur dari besarnya surplus atau defisit kedua transaksi tersebut. Apabila ekspor lebih besar daripada impor maka NP negara bersangkutan mengalami surplus; demikian pula sebaliknya.

b. Konsep Keseimbangan Transaksi Berjalan (Current Account Balance) Untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa, termasuk penghasilan (income) dan transfer. Surplus terjadi apabila ekspor barang, jasa, penghasilan, dan transfer lebih besar daripada impor barang, jasa, penghasilan, dan transfer; demikian pula sebaliknya.

c. Konsep Basic Balance Dalam konsep ini, yang termasuk dalam autonomous transaction selain pos-pos dalam transaksi berjalan, juga komponen-komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka panjang.

d. Konsep Overall Balance Yang termasuk autonomous transaction dalam konsep ini adalah komponen-komponen dalam transaksi berjalan, komponen-komponen transaksi modal dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Neraca Pembayaran Indonesia dan Karakteristiknya

a. Penyusunan NPI

Dalam penyusunan statistik NPI penyajian analitis dimuat pula beberapa rincian komponen di luar NPI penyajian standar, misalnya transaksi barang dan jasa dirinci dalam dua kelompok, yaitu kelompok migas dan nonmigas. Selain itu, dalam transaksi jasa

dimunculkan jasa untuk keperluan ibadah haji, dan dalam transaksi financial account dimunculkan data pinjaman yang dikelompokkan menjadi pinjaman pemerintah dan pinjaman swasta. Selanjutnya, pinjaman pemerintah dikelompokkan lebih lanjut menjadi pinjaman dari CGI dan dari luar CGI.

b. Sumber data penyusunan NPI

Sumber data dalam penyusunan NPI berasal dari berbagai sumber, baik intern Bank Indonesia sendiri maupun dari luar Bank Indonesia. Rincian sumber data NPI penyajian standar dan analitis adalah sebagai berikut.

- Ekspor dan impor nonmigas bersumber pada dokumen ekspor (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan impor (Pemberitahuan Impor Barang)

- Ekspor dan impor migas bersumber pada laporan dan informasi dari lembaga terkait, seperti Direktorat Minyak dan Gas Bumi dan Pertamina.

- Jasa nonmigas, income, dan transfer bersumber pada laporan dan informasi dari berbagai sumber, antara lain Departemen Agama, Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata, Bank Indonesia, PT Garuda, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Luar Negeri, dan perbankan.

- Jasa migas bersumber pada laporan dan informasi antara lain dari Departemen Pertambangan dan Energi, Pertamina, dan perusahaan kontraktor migas.

- Data transaksi modal dan keuangan bersumber antara lain dari Bank Indonesia, Bappenas, Departemen Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pertamina, PT Garuda, dan perbankan. Sementara itu, khusus untuk penyusunan NPI cash

basis, data berasal dari laporan kegiatan lalu lintas devisa yang memberikan informasi pokok mengenai besarnya pergerakan dana. Laporan tersebut disampaikan oleh bank-bank devisa, lembaga-lembaga keuangan nonbank, dan perusahaan-perusahaan kepada Bank Indonesia.

Berdasarkan analisis struktur dan perkembangan NPI dapat disimpulkan bahwa NPI selama tiga tahun terakhir dalam kondisi tertekan dan faktor-faktor penyebabnya cenderung bersifat struktural. Selain itu terlihat pula struktur NPI semakin rentan terhadap gejolak eksternal, karena bertambah besarnya peranan modal asing masuk (capital inflows). Kinerja NPI berpengaruh terhadap posisi cadangan devisa Indonesia.

. Karakteristik Neraca Pembayaran sebelum krisis ekonomi

1) Neraca perdagangan pada umumnya selalu mengalami surplus. Namun, apabila ditinjau lebih lanjut dengan mengeluarkan transaksi ekspor dan impor minyak dan gas bumi (migas), maka karakteristik neraca perdagangan nonmigas pada umumnya mengalami defisit. Sementara itu, neraca perdagangan migas, selalu menunjukkan surplus.

2) Neraca jasa Indonesia selalu menunjukkan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya, sehingga karakteristik neraca jasa selalu menunjukkan defisit. Sebagaimana halnya dengan neraca perdagangan, neraca jasa mempunyai karakteristik yang sama yaitu pada umumnya menunjukkan defisit pada neraca jasa nonmigas dan selalu surplus pada neraca jasa migas. Selalu defisitnya neraca jasa terutama berkaitan erat dengan cukup besarnya pengeluaran untuk pembayaran bunga utang dan biaya transportasi impor barang.

3) Transaksi berjalan secara umum selalu menunjukkan defisit. Ditinjau lebih lanjut, karakteristik transaksi berjalan sebagaimana neraca perdagangan dan neraca jasa pada umumnya menunjukkan defisit untuk

transaksi berjalan nonmigas dan menunjukkan surplus untuk transaksi berjalan migas.

4) Transaksi modal pada umumnya mengalami surplus. Hal ini menunjukkan masih terdapatnya kebutuhan dana dari luar negeri.

Quiz 6 Modul 9

Neraca Pembayaran Konsep Metodologi dan Penerapan

1. (1) Deposito penduduk luar negeri di Indonesia
- (2) Ekspor minyak dan gas bumi
- (3) Menerima pinjaman dari luar negeri
- (4) Menerima devisa dari sektor pariwisata
- (5) Adanya investasi dari luar negeri

Yang merupakan neraca modal adalah...

- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (3), dan (5)
 - C. (2), (3), dan (4)
 - D. (2), (4), dan (5)
2. 1) Pemasukan barang dari luar negeri
 - (2) Bunga dan deviden yang diterima dari luar negeri
 - (3) Bunga dan deviden yang dibayarkan ke luar negeri
 - (4) Pendapatan jasa yang dikerjakan di luar negeri
 - (5) Jasa yang harus dibayar ke luar negeri

Transaksi-transaksi yang dicatat sebelah debet neraca pembayaran adalah...

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (3), dan (5)
- C. (2), (3), dan (4)
- D. (2), (4), dan (5)

3. Surplus dan defisitnya neraca pembayaran dilihat dari
 - A. Neraca Modal dan lalu lintas Devisa
 - B. Neraca Perdagangan dan Neraca Modal
 - C. Neraca transaksi berjalan dan Neraca Modal
 - D. Lalu lintas devisa dan Neraca transaksi berjalan
4. Neraca pembayaran secara keseluruhan harus
 - A. Surplus
 - B. Defisit
 - C. Seimbang
 - D. Berlawanan
5. Bila neraca pembayaran surplus maka
 - A. Ada aliran modal ke luar negeri
 - B. Ada impor
 - C. Ekspor jasa meningkat
 - D. Cadangan Devisa meningkat
1. Sebutkan jenis-jenis dari neraca pembayaran
2. Neraca pembayaran terdiri atas bagian sisi debit dan sisi kredit . Jelaskan kegunaan dari masing-masing bagian tersebut!
3. apa yang dimaksud dengan neraca pembayaran ?
4. Sebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam neraca pembayaran !Komponen neraca pembayaran meliputi :
5. Masing-masing komponen tersebut dipergunakan untuk mencatat apa ?

Modul 10 Pertemuan 6

Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia

Tujuan: untuk mempelajari kebijakan sistem pembayaran di Indonesia

Capaian pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

A	Pendahuluan
B	Gambaran umum
C	Peran bank sentral dalam sistem pembayaran
D	Sistem pembayaran di Indonesia

Perkembangan sistem pembayaran didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi, peningkatan risiko, kompleksnya transaksi, dan perkembangan teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari commodity money sampai fiat money, sementara sistem pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan electronic money).

Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan, sebaliknya risiko ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan serta kelancarannya oleh suatu lembaga, dan umumnya dilakukan oleh bank sentral.

Sistem pembayaran yang aman dan lancar merupakan salah satu prasyarat bagi pencapaian stabilitas moneter dan keuangan yang merupakan tujuan utama dari bank sentral. Oleh karena itu, bank sentral pada umumnya terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, terutama sebagai pembuat kebijakan dan peraturan, penyelenggara, serta oversight 'pengawas' dalam rangka mengontrol risiko, baik yang diakibatkan oleh transaksi harian, seperti risiko likuiditas dan risiko kredit, maupun risiko yang bersifat sistemik.

Gambaran Umum

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antarperorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun cross border ‘antarnegara’. Dalam prakteknya, transaksi pembayaran dilakukan dengan instrumen tunai dan nontunai. Instrumen pembayaran yang digunakan oleh suatu masyarakat tergantung kepada banyak faktor, antara lain tingkat ekonomi, budaya, dan preferensinya. Namun demikian, instrumen tunai biasanya digunakan untuk transaksi bernilai kecil di tingkat ritel dan antarindividu, sementara instrumen nontunai umumnya digunakan untuk transaksi bernilai besar. Persentase penggunaan pembayaran nontunai pada umumnya meningkat terus sejalan dengan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan, dengan kecenderungan penggunaan pembayaran tunai yang menurun.

Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia

Semakin berkembang suatu perekonomian, peran sistem pembayaran nontunai semakin penting. Dengan adanya perkembangan seperti tersebut di atas, pembahasan sistem pembayaran lebih banyak terkait dengan instrumen nontunai dan umumnya menggunakan instrumen yang berbasis dokumen maupun elektronik.

Sesuai dengan pengertian sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas, dalam pelaksanaan diperlukan adanya komponen sistem pembayaran yang memadai, antara lain:

1. Institusi atau lembaga yang menyediakan jasa pembayaran
2. Instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran yang mengatur hak dan kewajiban keuangan peserta pembayaran
3. Kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum dan instrumen sistem pembayaran, hak dan kewajiban peserta, sanksi, dan aturan lainnya untuk menjamin terlaksananya sistem pembayaran secara hukum dan
4. Kerangka kebijakan sistem pembayaran yang jelas, baik kebijakan umum maupun operasional, yang mendasari pengembangan sistem pembayaran.

Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian

Peran sistem pembayaran dalam perekonomian semakin hari semakin penting seiring dengan semakin meningkatnya volume dan nilai transaksi, serta sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi.

Dengan semakin meningkatnya transaksi tersebut, maka risiko yang ditimbulkan menjadi semakin besar karena dengan terganggunya sistem pembayaran dapat membahayakan stabilitas sistem dan pasar keuangan secara keseluruhan.

Dapat disimpulkan bahwa peranan sistem pembayaran penting dalam suatu perekonomian, yaitu untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Untuk itu, sistem pembayaran perlu diatur dan diawasi dengan baik agar sistem pembayaran berjalan dengan aman dan lancar.

Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia

Elemen-elemen Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran ditujukan untuk memungkinkan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dapat melakukan transaksi pembayaran. Menurut Sheppard (1996), apa pun bentuk sistem pembayaran pada umumnya memiliki tiga elemen utama.

1. Otorisasi pelaksanaan pembayaran, yaitu pembayar memberikan otorisasi kepada banknya untuk mentransfer dana
2. Pertukaran perintah pembayaran antarbank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Proses ini biasanya disebut kliring dan
3. Setelmen antarbank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Bank pembayar harus membayar bank penerima, baik bilateral maupun melalui rekening yang dimiliki bank-bank tersebut pada lembaga penyelenggara kliring, yang umumnya adalah bank sentral.

Lembaga yang Terkait dalam Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran dapat diselenggarakan oleh bank sentral atau lembaga independen (milik pemerintah atau swasta) yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan sistem pembayaran, seperti The Tokyo Bankers Association di Jepang. Lembaga yang memberikan jasa pelayanan pembayaran adalah bank, lembaga keuangan bukan bank (seperti credit unions di Amerika Serikat dan credit cooperatives di Jerman) dan kantor pos. Selanjutnya, lembaga pengatur dan pengawas sistem pembayaran pada umumnya dilakukan oleh bank sentral sendiri atau bekerja sama dengan badan lain yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk itu. Terakhir, untuk menyelesaikan disputes dan complaints pengguna terdapat lembaga lembaga arbitrase, seperti Financial Ombudsman Service (FOS) di Inggris.

Prinsip-prinsip Dasar Sistem Pembayaran

The Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) dari bank sentral kelompok negara G10 (kelompok sepuluh negara maju) mengembangkan prinsip-prinsip dasar penting sistem pembayaran (CPSS-BIS, 2000) yang meliputi 10 kriteria di bawah ini yaitu:

1. Sistem ini harus memiliki landasan hukum yang kuat.
2. Sistem ini harus mempunyai aturan dan prosedur yang memungkinkan peserta memahami risiko keuangan yang mungkin akan dihadapi.
3. Sistem ini harus memiliki prosedur yang jelas untuk manajemen risiko kredit dan risiko likuiditas.
4. Sistem ini harus menjamin agar setelmen dapat dilakukan pada hari yang sama, minimal pada akhir hari.
5. Untuk sistem yang memiliki multilateral netting, minimal sistem ini harus mampu memastikan penyelesaian setelmen harian yang cepat pada saat peserta tidak mampu menyelesaikan kewajibannya untuk satu setelmen terbesar.
6. Aset yang digunakan untuk setelmen sebaiknya berada di bank sentral (claim on the central bank). Dalam hal aset yang berada di luar bank sentral yang digunakan, maka aset tersebut harus tidak memiliki (atau kecil) risiko kredit dan risiko likuiditas.
7. Sistem ini harus menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan operasional yang tinggi, dan harus memiliki penanganan darurat untuk penyelesaian pemrosesan harian yang cepat.
8. Sistem ini harus menyediakan alat untuk melakukan pembayaran yang praktis untuk pemakainya dan efisien untuk perekonomian.
9. Sistem ini harus memiliki tujuan dan kriteria yang transparan untuk peserta, yang memungkinkan akses yang adil dan transparan.
10. Pengaturan (governance arrangements) dari sistem ini harus efektif, akuntabel, dan transparan.

Risiko-risiko Sistem Pembayaran

Menurut CPSS-BIS (1996) risiko pembayaran dapat dibagi dalam lima jenis, yaitu:

1. Risiko kredit, yaitu risiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo atau di masa mendatang.

2. Risiko likuiditas, yaitu risiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, meskipun mungkin mampu pada waktu yang akan datang.
3. Risiko hukum, yaitu risiko ketika kerangka hukum yang lemah atau ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan atau memperburuk risiko kredit dan risiko likuiditas.
4. Risiko operasional, yaitu risiko yang ditimbulkan oleh faktor-faktor operasional, seperti tidak berfungsinya secara teknis atau kesalahan operasional, yang dapat menyebabkan atau memperburuk risiko kredit dan risiko likuiditas.
5. Risiko sistemik, yaitu risiko ketika ketidakmampuan salah satu peserta untuk memenuhi kewajibannya, atau gangguan pada sistem menyebabkan ketidakmampuan peserta lain untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Selanjutnya, kegagalan pembayaran tersebut dapat menyebar secara luas sehingga pada akhirnya dapat membahayakan sistem atau pasar keuangan.

Karakteristik Instrumen dalam Sistem Pembayaran

Menurut Sheppard (1996) instrumen dalam sistem pembayaran mempunyai tiga karakteristik utama yaitu bentuk fisik, sistem pengamanan, dan basis pembayaran:

1. Bentuk Fisik Secara fisik, instrumen dalam sistem pembayaran dapat berupa
 - Warkat atau dokumen, seperti cek, bilyet giro, nota debit, nota kredit, dan sebagainya.
 - kKartu, seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, smart cards, dan sebagainya.
 - Tanpa fisik melalui internet atau telepon.

Sistem Pengamanan

Sistem pengamanan ini ditujukan untuk memverifikasi bahwa instruksi diberikan oleh yang berhak/pemilik rekening, dan bukan merupakan pemalsuan. Bentuk pengamanan utama dalam sistem pembayaran berbeda-beda sesuai dengan bentuk instrumen pembayarannya. Untuk uang tunai, sistem pengamannya dapat berbentuk benang pengaman, rectoverso, tanda air, electrotype, dan intaglio. Untuk instrumen berbentuk warkat atau dokumen, sistem pengamannya dapat berbentuk nomor seri dan tanda tangan pemilik rekening. Untuk instrumen berbentuk kartu, sistem pengamannya berbentuk personal identification number/PIN 'nomor identifikasi pribadi' yang dimasukkan

oleh pemberi instruksi (yang diasumsikan hanya diketahui oleh pemilik rekening). Sedangkan untuk instrumen tanpa fisik melalui internet atau telepon, sistem pengamanannya dapat berbentuk satu/serangkaian password 'kata kunci' atau pertanyaan yang harus dijawab oleh pemberi instruksi.

Basis Pembayaran

Instrumen pembayaran ada yang debit-based 'berbasis debit' dan creditbased 'berbasis kredit'. Transaksi dengan instrumen berbasis debit (seperti cek) dimulai dengan penyampaian instruksi pembayaran dari pembayar ke penerima dana. Pembayaran dana dilakukan setelah instruksi pembayaran diserahkan penerima (biasanya melalui lembaga intermediasi/ bank) kepada bank pembayar, dan bank pembayar telah memutuskan untuk membayar sesuai instruksi pembayaran tersebut. Selain adanya tenggang waktu dalam pembayaran dan risiko bahwa pembayar tidak memiliki dana yang cukup, fasilitas kredit biasanya diberikan oleh bank penerima kepada penerima dana setelah menerima dan memverifikasi instruksi pembayaran. Transaksi ini banyak digunakan di negara tertentu sebagai alat pembayaran selain pembayaran tunai karena penerima dan pembayar menginginkan pertukaran sesuatu yang tangible 'nyata' sebagai pengganti uang tunai yang fleksible untuk digunakan dimana saja.

Proses Penyelesaian Pembayaran (Setelmen)

Proses penyelesaian pembayaran merupakan proses ketika instruksi pembayaran dipertukarkan antara bank pembayar dan bank penerima, dan bagaimana bank-bank yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban keuangan (setelmen) di antara mereka sehingga dapat dilakukan pendebitan atau pengkreditan rekening nasabah. Proses penyelesaian pembayaran dapat dilakukan secara batch atau realtime, bilateral atau multilateral, dengan sistem net atau gross. Sedangkan sistem penyelesaian akhir (setelmen) pembayaran yang dipilih tergantung pada besar kecilnya transaksi pembayaran.

Hubungan Bilateral dan Multilateral

Hubungan bilateral artinya setiap bank mempunyai hubungan koresponden dengan bank lain, tanpa melalui pihak ketiga, dimana setiap bank memiliki rekening di bank korespondennya. Hubungan multilateral artinya hubungan koresponden antarbank dilakukan melalui pihak ketiga atau agen setelmen. Transaksi melalui hubungan multilateral diperlukan pada saat jumlah pihak yang bertransaksi cukup banyak sehingga apabila dilakukan melalui hubungan bilateral menjadi tidak efisien.

Sistem Batch dan Real Time

Pada sistem batch instruksi pembayaran dikumpulkan terlebih dahulu sedangkan pemrosesannya dilakukan kemudian dalam jumlah tertentu sekaligus pada satu waktu tertentu, sehingga sering juga disebut sebagai sistem deferred 'tertunda'. Sementara itu, pada sistem real time 'seketika' penyampaian dan pemrosesan instruksi pembayaran dilakukan satu demi satu seketika setiap datangnya instruksi pembayaran. Fasilitas telekomunikasi dan komputerisasi modern diperlukan untuk pemrosesan secara real time ini. Sistem gross pada umumnya menggunakan pemrosesan secara real time, sedangkan sistem net pada umumnya menggunakan pemrosesan secara batch. Proses kliring pada umumnya memproses transaksi pembayaran secara batch, sedangkan sistem real time gross settlement (RTGS) memproses transaksi pembayaran secara real time.

Setelmen Gross dan Net

Pada setelmen gross, setiap instruksi pembayaran dikirim dari bank pembayar ke bank sentral dan secara individu diselesaikan pada rekening bank pembayar dan bank penerima, sehingga akan terdapat pembukuan debit dan kredit untuk setiap instruksi pembayaran yang diselesaikan. Pada setelmen net, Bank tidak menyelesaikan instruksi pembayaran secara individu, seperti pada setelmen gross, melainkan bank mengumpulkan semua tagihan dan kewajiban dalam periode tertentu yang kemudian dibuatkan posisi final sebelum proses setelmen. Dengan demikian, jumlah pembukuan setelmen akan berkurang dengan adanya proses netting ini. Prosedur netting ada dua yaitu bilateral (setelmen net bilateral) dan multilateral (setelmen net multilateral). Pada setelmen net bilateral, bank membuat posisi final untuk masing-masing bank mitra kerjanya.

Real Time Gross Settlement (RTGS)

Transaksi pembayaran dapat merupakan transaksi pembayaran bernilai kecil dan besar. Sistem pembayaran/transfer dan setelmen dari kedua transaksi ini berbeda. Sistem pembayaran bernilai besar dapat diumpamakan seperti urat nadi sistem pembayaran suatu negara. Operasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan efisien sangat bergantung pada kelancaran sistem pembayaran bernilai besar. Dengan berjalan lancarnya sistem pembayaran bernilai besar ini, maka kelancaran sistem pembayaran nasional akan terjaga.

Kliring

Kliring pada umumnya merupakan sistem penyelesaian transaksi berbasis deferred net multilateral. Deffered atau batch karena instruksi pembayaran dikumpulkan terlebih dahulu sedangkan pemrosesannya

dilakukan kemudian dalam jumlah tertentu sekaligus pada satu waktu tertentu. Net multilateral karena setiap bank membuat satu posisi final untuk semua bank mitra kerjanya (korespondennya), sehingga hanya akan ada satu setelmen untuk setiap bank. Proses kliring dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain kliring manual, semiotomasi, otomasi, dan elektronik.

1. Sistem kliring manual

Sistem kliring manual merupakan sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring.

2. Sistem kliring semiotomasi

Sistem kliring semiotomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring.

3. Sistem kliring otomasi

Sistem kliring otomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) serta pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi.

4. Sistem kliring elektronik

Sistem kliring elektronik adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk dipilah secara otomasi. Selanjutnya, hasil penghitungan secara otomasi dicocokkan dengan penghitungan secara elektronik.

Peran Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran

Keterlibatan atau peran bank sentral dalam sistem pembayaran secara umum meliputi empat hal, yaitu:

1. Pemakai sistem pembayaran; bank sentral mempunyai transaksi-transaksi yang harus dilaksanakan, seperti setelmen dari operasi pasar terbuka, transaksi devisa, pembayaran tagihan, gaji, pensiun, dan sebagainya.

2. Anggota sistem pembayaran; bank sentral perlu membayar dan menerima pembayaran atas nama nasabahnya sendiri, seperti pemerintah dan lembaga keuangan internasional.
3. Penyedia sistem pembayaran; bank sentral menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan sistem pembayaran.
4. Pelindung kepentingan umum; sebagai regulator, pengawas anggota sistem pembayaran (pengawas perbankan), administrasi dan perencanaan, dan arbitrase dalam hal terjadi perselisihan.

Bank Indonesia sebagai Regulator dan Fasilitator Pengembangan

Salah satu peran pokok Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. Secara umum, pengaturan terhadap sistem pembayaran di Indonesia yang diatur dalam berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia antara lain memuat:

1. Cakupan wewenang dan tanggungjawab penyelenggara sistem pembayaran, termasuk tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen risiko.
2. Jenis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan prosedur pemberian persetujuan.
3. Persyaratan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
4. Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang wajib menyampaikan laporan, jenis laporan kegiatan, dan tata cara penyampaiannya.
5. Jenis dan persyaratan keamanan instrumen pembayaran yang dapat digunakan di Indonesia termasuk instrumen pembayaran yang bersifat elektronik, seperti kartu Automated Teller Machine (ATM), kartu debit, kartu kredit, kartu Prabayar, dan kartu elektronik.
6. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Bank Indonesia yang tidak ditaati.

Untuk mewujudkan adanya suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan penyempurnaan dan pengembangan terhadap sistem yang telah ada sesuai dengan perencanaan sistem pembayaran nasional. Penyempurnaan dan pengembangan tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan, pengembangan mekanisme, infrastruktur dan ketentuan yang diarahkan untuk mengurangi risiko pembayaran antarbank, serta peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran. Pengembangan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia selalu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sistem pembayaran, terutama pihak perbankan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menyamakan kepentingan dan menampung serta memfasilitasi kebutuhan pengguna,

khususnya perbankan, dalam setiap pengembangan aplikasi dan produk sistem pembayaran dibentuk media (forum) komunikasi dan konsultasi sistem pembayaran nasional. Forum tersebut mewakili seluruh perbankan dan pihak-pihak yang terkait dengan sistem pembayaran, seperti payment system provider. Melalui forum ini diharapkan dapat dilakukan identifikasi kebutuhan berbagai pihak terkait terutama perbankan agar dapat dilakukan sinkronisasi pengembangan sistem pembayaran di masa mendatang.

Bank Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas

Dalam kaitannya dengan pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh layanan jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman. Dalam menjalankan fungsi pengawasan sistem pembayaran ini, selain berwenang untuk memberikan izin operasional, Bank Indonesia juga berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun oleh pihak lain. Dalam memantau penyelenggaraan sistem pembayaran, Bank Indonesia mewajibkan seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran di Indonesia untuk menyampaikan laporan. Hal ini dimaksudkan juga untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai Lembaga Penyelenggara

Penyediaan jasa sistem pembayaran (transfer dana) di Indonesia pada umumnya dilakukan oleh perbankan dan PT Pos Indonesia. Walaupun secara umum terdapat keterkaitan di antara kedua penyedia jasa tersebut, namun keduanya menggunakan sistem yang berbeda. Pada awalnya, jasa sistem pembayaran banyak dilakukan melalui sistem yang diselenggarakan oleh PT Pos Indonesia (dulu dikenal dengan Kantor Pos dan Giro). Sejalan dengan semakin memasyarakatnya sistem perbankan di Indonesia, jasa sistem pembayaran sebagian besar dilakukan melalui sistem perbankan. Sementara itu, instrumen sistem pembayaran yang digunakan pada umumnya berbasis warkat dan penyelesaiannya dilakukan melalui sistem kliring lokal atau antardaerah, yang sebagian besar dilakukan oleh Bank Indonesia.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, sistem pembayaran mulai menggunakan instrumen berbasis elektronik. Sejalan dengan perkembangan tersebut, sejak November 2000 Bank Indonesia mengoperasikan sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

Sistem RTGS yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia menyediakan keandalan, kecepatan, dan kepastian dalam mengirim dan menerima dana. Hal tersebut menjadi penting karena di samping

mengurangi risiko sistem pembayaran, penggunaan sistem ini telah mengubah cara tradisional penyelesaian transfer dana yang selama ini berbasis warkat (paper based) menjadi berbasis elektronik (electronic based).

Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Australia dan Selandia Baru pada umumnya telah menerapkan sistem RTGS. Sementara itu, sebagian besar negara-negara berkembang, seperti Thailand, Malaysia, dan menyusul Sri Lanka, juga telah menerapkan sistem RTGS.

Aturan Hukum

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kepada Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan perangkat hukum yang mencakup undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dalam sistem pembayaran, termasuk juga aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya, antarbank, antarbank dengan bank sentral, antarbank dan nasabah, dan lain-lainnya.

Perangkat hukum ini sangat penting untuk menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Ketiadaan perangkat hukum tertentu dapat menghambat penyelenggaraan dan pengembangan sistem pembayaran. Sebagai contoh, perkembangan sistem pembayaran elektronik memerlukan perangkat hukum yang mengatur bukti pembayaran elektronik agar penyelenggaraan sistem tersebut menjadi lebih efektif dan efisien

Instrumen Pembayaran

Instrumen pembayaran dapat berupa cash 'tunai' atau noncash 'nontunai' yang paper-based 'berbasis warkat' dan nonpaper-based 'berbasis bukan warkat'. Penggunaan instrumen pembayaran tunai maupun nontunai dewasa ini telah berkembang dengan cepat, terutama penggunaan instrumen pembayaran nontunai.

Instrumen Pembayaran Tunai

Instrumen pembayaran tunai adalah mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu Rupiah, yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal dan uang logam.

Instrumen Pembayaran Nontunai

Di Indonesia, instrumen pembayaran nontunai disediakan terutama oleh sistem perbankan. Instrumen yang disediakan terdiri dari instrumen yang berbasis warkat, seperti cek, bilyet giro, nota debit, dan nota kredit,

serta instrumen yang berbasis bukan warkat, seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit.

a) Instrumen berbasis warkat

- **Cek** yakni surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- **Bilyet Giro** yakni surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan (tidak berlaku untuk penarikan tunai) sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.
- **Nota Debet** yakni warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut.
- **Nota Kredit** yakni warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut.
- **Wesel Bank** Untuk Transfer yakni wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.
- **Surat Bukti Penerimaan Transfer** yakni surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank penerima dana transfer melalui kliring lokal.

b) Pemindahan dana

Saat ini bank-bank memberikan berbagai jenis layanan pemindahan dana melalui jaringan kantornya, termasuk perintah pembayaran secara reguler dan pemindahan dana secara elektronik.

Layanan pemindahan dana bagi nasabah bank dapat dilakukan oleh bank melalui: 1) transfer elektronik antar bank; 2) sistem kliring berbasis warkat untuk transaksi lokal; 3) jaringan bank koresponden, bagi pemindahan dana lintas wilayah; dan 4) sistem RTGS baik untuk pemindahbukuan dana lokal maupun lintas wilayah.

c) Pendebetan Secara Langsung

Pemakaian fasilitas pendebetan secara langsung masih dibatasi untuk transaksi di dalam satu bank. Mengingat belum ada sistem giro antarbank, perusahaan telekomunikasi dan perusahaan listrik harus memiliki perjanjian dengan bank umum dalam menangani penerimaan pembayaran tagihan dari nasabahnya untuk pembayaran jasa telekomunikasi dan listrik.

d) Instrumen berbasis kartu

Masyarakat Indonesia telah mengenal berbagai jenis kartu pembayaran, antara lain yang bersifat kredit, seperti kartu kredit, private-label cards (misalnya, kartu pasar swalayan) dan yang bersifat debit, seperti debit card dan ATM.

e) Instrumen Melalui Kantor Pos

Instrumen sistem pembayaran yang cukup penting yang disediakan oleh lembaga keuangan bukan bank (PT Pos Indonesia) adalah giro dan pos wesel baik dalam negeri maupun luar negeri.

f) Instrumen Berbasis Internet/Telepon

Jasa electronic banking melalui internet dan/atau telepon telah disediakan oleh sejumlah bank besar sejak pertengahan 1999. Penggunaan instrumen berbasis internet untuk melakukan transaksi, selain memerlukan verifikasi pengaman, seperti PIN dan password, juga memerlukan komputer pribadi (PC).

Sistem Setelmen Antarbank

Ada dua sistem pembayaran antarbank di Indonesia, yaitu sistem antarbank untuk transaksi ritel dan sistem antarbank untuk pembayaran bernilai besar. Sebagian besar pembayaran ritel dilaksanakan oleh bank umum dengan menggunakan berbagai instrumen, yaitu cek dan bilyet giro, warkat pemindahan dana (nota kredit) dan bank draft 'wesel aksep'. Sementara itu, untuk pembayaran yang bernilai besar dan/atau mendesak diselesaikan melalui sistem BI-RTGS.

BI - RTGS

Sistem BI-RTGS adalah proses setelmen pembayaran yang dilakukan per transaksi (individually processed/gross settlement) dan bersifat real time (electronically processed), ketika rekening bank peserta dapat didebet/ dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Tujuan dikembangkannya sistem BI-RTGS di antaranya adalah:

1. Menyediakan sarana transfer dana antar bank yang lebih cepat, efisien, andal, dan aman kepada bank dan nasabahnya.
2. Kepastian setelmen dapat diperoleh dengan segera.
3. Menyediakan informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh.
4. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya.

5. Mengurangi risiko-risiko setelmen.

Penggunaan sistem BI-RTGS dapat mengurangi risiko yang bersifat sistemik dalam sistem pembayaran melalui tiga hal yaitu:

1. Penurunan secara signifikan intraday interbank exposure dapat mengurangi kemungkinan ketidakmampuan suatu bank dalam menutup kekurangan likuiditas karena bank lain tidak mampu memenuhi kewajibannya.
2. Dapat mencegah terjadinya unwinding payment
3. Waktu setelmen yang dilakukan setiap saat selama window time, memberikan waktu yang cukup bagi bank untuk menyelesaikan kesulitan likuiditasnya dengan cara meminjam dari bank lain atau menunggu transfer masuk dari bank lain.

Kliring

Tujuan utama dilaksanakan kliring, antara lain:

1. Untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral antarbank di seluruh Indonesia
2. Untuk melaksanakan penghitungan penyelesaian utang piutang yang lebih mudah, aman, dan efisien.
3. Untuk menjadi salah satu bentuk pelayanan sistem pembayaran bank kepada nasabah masing-masing.

Peran Bank Sentral dalam Kebijakan Pengedaran Uang

Dalam kebijakan pengedaran uang, hampir semua bank sentral berperan penting didalamnya karena mereka memiliki wewenang dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, dengan berbagai variasi. European Central Bank (ECB) mempunyai hak khusus untuk menyetujui pengeluaran uang dalam euro area yang dapat dikeluarkan oleh ECB sendiri atau bank sentral anggotanya. Di Amerika, Federal Reserve mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas, sedangkan Departemen Keuangan mengeluarkan dan mengedarkan uang logam. Di Hong Kong, Hong Kong Monetary Authority (HKMA) mendelegasikan wewenangnya kepada tiga bank komersial untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang yang dicetak oleh sebuah perusahaan percetakan uang milik HKMA. Apa pun variasinya, otoritas pengeluaran dan pengedaran uang tetap berada pada bank sentral sebagai otoritas moneter.

Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia Sasaran

Sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk dapat memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang

sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar. Sehubungan dengan itu, sasaran pengedaran uang diarahkan untuk:

1. Dapat mempermudah kelancaran transaksi pembayaran tunai serta dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat, dengan karakteristik mudah digunakan dan nyaman, tahan lama, mudah dikenali, dan sulit dipalsukan;
2. Selalu mengupayakan tersedianya jumlah uang tunai yang cukup dengan berbagai pecahan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun perekonomian nasional;
3. Terciptanya kelancaran arus uang tunai baik secara regional maupun nasional
4. Melakukan penanganan kas yang didukung oleh ketentuan dan prosedur serta peralatan yang menjamin adanya kelancaran, kecepatan, dan keamanan serta efisiensi biaya.

Pengadaan Uang

Tujuan pengadaan uang adalah agar Bank Indonesia mempunyai stok uang yang cukup dalam berbagai pecahan dengan kondisi layak edar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Pengadaan uang mempunyai fungsi yang penting untuk memperlancar pembayaran tunai dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah karena selalu tersedianya uang yang dibutuhkan

Distribusi Uang

Distribusi atau pengiriman uang antarkantor Bank Indonesia, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kas setiap Kantor Bank Indonesia dalam rangka menjaga posisi/persediaan kas yang aman. Kebutuhan kas tersebut meliputi kebutuhan uang untuk persediaan yang seharusnya ada di khazanah serta untuk keperluan pembayaran, penukaran, dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu.

Kebijakan Uang Segar (clean money policy)

Tujuan Kebijakan Uang Segar adalah untuk mewujudkan tersedianya uang yang layak edar di masyarakat sehingga diharapkan dapat menjaga citra dan integritas Bank Indonesia sebagai lembaga penerbit uang dan menjaga tingkat kesehatan masyarakat dalam penggunaan uang dimaksud.

Pencabutan dan Pemusnahan Uang

Tujuan dari pencabutan uang dari peredaran adalah untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta untuk penyederhanaan komposisi dan emisi pecahan. Dasar pertimbangannya antara lain tingkat pemalsuan yang cukup tinggi dan lamanya beredar (lebih dari tujuh tahun).

Penanganan Uang Palsu

Pemalsuan uang merupakan jenis kejahatan yang sudah sangat lama muncul di dunia seiring dengan digunakannya alat bantu (uang) di dalam kegiatan transaksi perekonomian. Berbagai bentuk alat bantu tersebut selalu diupayakan untuk dipalsu karena adanya keperluan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan uang asli tidak mudah untuk didapat. Hal tersebut menimbulkan motivasi sebagian masyarakat untuk melakukan pemalsuan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi (motif ekonomi).

Soal Latihan & Jawaban

Pilihan Ganda

1. Berikut ini merupakan alat pembayaran nontunai kecuali...
 - A. Uang tunai
 - B. Kartu kredit
 - C. Cek
 - D. Bilyet giro
2. System pembayaran yang menggunakan uang giral adalah...
 - A. Kredit
 - B. Debit
 - C. Tunai
 - D. Non tunai
3. Salah satu kebijakan moneter untuk menekan deflasi adalah...
 - A. Mengurangi jumlah pengeluaran
 - B. Menaikkan pajak
 - C. Menaikkan suku bunga
 - D. Menurunkan suku bunga
4. Untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan dari peredaran merupakan tugas wewenang dari...
 - A. Bank Indonesia
 - B. Bank umum milik swasta asing
 - C. Bank koperasi
 - D. Bank perkreditan
5. Komponen system pembayaran yang merupakan alat pembayaran baik tunai maupun nontunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan transaksi disebut...
 - A. Regulator
 - B. Penyelenggara
 - C. Infrastruktur
 - D. Instrument

Essay

1. Apa yang anda ketahui tentang ATM?
2. Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang mata uang rupiah!
3. Apa yang dimaksud dengan uang?
4. Uraikan apa yang dimaksud dengan uang giral!
5. Sebutkan melalui apakah transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar yang diselenggarakan Bank Indonesia?

MODUL 11 PERTEMUAN 6

PENGELOLAAN CADANGAN DEvisa DI BANK INDONESIA

Tujuan: Mempelajari pengelolaan cadangan devisa di Bank Indonesia

Capaian pembelajaran: Pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

A	Pendahuluan
B	Konsepsi Pengelolaan Cadangan Devisa
C	Pengalaman Negara lain mengelola cadangan devisa
D	Pengelolaan Cadangan devisa di Bank Indonesia

A. Pendahuluan

Cadangan devisa merupakan bagian dari tabungan nasional sehingga pertumbuhan dan besar kecilnya cadangan devisa merupakan sinyal bagi global financial markets mengenai kredibilitas kebijakan moneter dan creditworthiness suatu negara. Berdasarkan konsep international reserves and foreign currency liquidity (IRFCL) yang dikeluarkan oleh IMF, cadangan devisa didefinisikan sebagai seluruh aktiva luar negeri yang dikuasai oleh otoritas moneter dan dapat digunakan setiap waktu guna membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran atau dalam rangka stabilitas moneter dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing dan untuk tujuan lainnya. Dari definisi ini dapat dilihat adanya dua fungsi penting cadangan devisa, yaitu untuk membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran dan untuk menjaga stabilitas moneter. Dalam kaitan dengan neraca pembayaran, cadangan devisa biasanya digunakan untuk membiayai impor dan membayar kewajiban luar negeri, sementara dalam fungsinya untuk menjaga stabilitas moneter adalah untuk mempertahankan nilai tukar mata uang. Besar kecilnya 1 akumulasi cadangan devisa suatu negara biasanya ditentukan oleh kegiatan perdagangan (ekspor dan impor) serta arus modal negara tersebut. Sementara itu, kecukupan cadangan devisa ditentukan oleh besarnya kebutuhan impor dan sistem nilai tukar yang digunakan. Dalam sistem nilai tukar yang mengambang bebas, fungsi cadangan devisa adalah untuk menjaga stabilitas moneter hanya terbatas pada tindakan untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar yang terlalu tajam. Oleh karena itu, cadangan devisa yang dibutuhkan

tidak perlu sebesar cadangan devisa yang dibutuhkan apabila negara tersebut mengadopsi sistem nilai tukar tetap. Oleh karena cadangan devisa dituntut harus dapat dipergunakan setiap saat apabila diperlukan, maka cadangan devisa biasanya berupa kekayaan dalam bentuk mata uang asing yang mudah diperjualbelikan, emas, dan tagihan jangka pendek kepada bukan penduduk yang bersifat likuid. Selanjutnya, agar cadangan devisa tersebut bersifat likuid, maka cadangan devisa sebaiknya dalam bentuk aset yang dapat dengan mudah dipergunakan setiap saat sesuai kebutuhan. Oleh karena, itu cadangan devisa harus tersimpan sebagai tagihan pemerintah kepada bukan penduduk dalam bentuk valuta asing yang mudah dikonversikan. Dengan demikian aset yang tidak dikuasai pemerintah dan yang terikat persyaratan tertentu untuk jangka waktu lebih dari satu tahun tidak dapat dikatakan sebagai official reserve assets.

B. Konsep Pengelolaan Cadangan Devisa

a) Komponen Cadangan Devisa

Cadangan devisa dapat berbentuk seperti di bawah ini :

1. Emas moneter (monetary gold)

Emas Moneter adalah persediaan emas yang dimiliki oleh otoritas moneter berupa emas batangan dengan persyaratan internasional tertentu (London Good Delivery/LGD),⁴ emas murni, dan mata uang emas yang berada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Emas moneter ini merupakan cadangan devisa yang tidak memiliki posisi kewajiban finansial seperti halnya Special Drawing Rights (SDR). Otoritas moneter yang akan menambah emas yang dimiliki misalnya dengan, misalnya, menambang emas baru atau membeli emas dari pasar, harus memonetisasi emas tersebut. Sebaliknya otoritas yang akan mengeluarkan kepemilikan emas untuk tujuan nonmoneter harus mendemonetisasi emas tersebut.

2. Special Drawing Rights (SDR)

SDR dalam bentuk alokasi dana dari Dana Moneter Internasional (IMF) merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh IMF kepada anggotanya. Fasilitas ini memungkinkan bertambah atau berkurangnya cadangan devisa negara-negara anggota. Tujuan diciptakan SDR adalah dalam rangka menambah likuiditas internasional.

3. Reserve Position in the Fund (RPF) RPF merupakan cadangan devisa dari suatu negara yang ada di rekening IMF dan menunjukkan posisi kekayaan dan tagihan negara tersebut kepada IMF sebagai hasil transaksi negara tersebut dengan IMF sehubungan dengan keanggotaannya pada IMF. Seperti diketahui, anggota IMF dapat memiliki posisi di Fund's General Resources Account yang dicatat pada kategori cadangan devisa. Posisi cadangan devisa anggota merupakan jumlah reserve tranche

purchase⁵ yang dapat ditarik anggota (menurut perjanjian utang) yang siap diberikan kepada anggota.

4. Valuta asing (foreign exchange)

Valuta asing terdiri dari :

- a. uang kertas asing (convertible currencies) dan simpanan (deposito)
- b. surat berharga berupa : penyertaan, saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya (equities, bonds and notes, money market instrument)
- c. derivatif keuangan (financial derivatives) Valuta asing mencakup tagihan otoritas moneter kepada bukan penduduk dalam bentuk mata uang, simpanan, surat berharga dan derivatif keuangan. Contoh transaksi derivatif keuangan adalah forward, futures, swaps, dan option.

5. Tagihan lainnya

Tagihan lainnya merupakan jenis terakhir yang mencakup tagihan yang tidak termasuk dalam kategori tagihan tersebut di atas. Pencatatan nilai cadangan devisa dalam statistik pada umumnya menurut harga pasar, yaitu kurs pasar yang berpengaruh pada saat transaksi. Harga pasar untuk tagihan seperti penyertaan dan kurs SDR ditentukan oleh IMF. Transaksi emas moneter dinilai menurut harga pasar transaksi yang mendasarinya, sedangkan untuk penilaian posisi cadangan devisa dipergunakan harga pasar yang berpengaruh pada akhir periode.

b) Tujuan Kepemilikan Cadangan Devisa

- Motif transaksi
Ditujukan terutama untuk mencukupi kebutuhan likuiditas internasional, membiayai defisit neraca pembayaran, dan memberikan jaminan kepada pihak eksternal (para kreditor dan rating agency) bahwa kewajiban luar negeri senantiasa dapat dibayar tepat waktu (zero default) dengan biaya seminimal mungkin tanpa mengurangi optimalisasi pendapatan bagi negara.
- Motif berjaga-jaga
Ditujukan terutama dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter dan kebijakan nilai tukar, yaitu memelihara kepercayaan pasar, melakukan intervensi pasar sebagai upaya mengendalikan volatilitas nilai tukar apabila diperlukan, meredam market shocks bila terjadi krisis⁶ , dan memberikan kepercayaan kepada pelaku pasar domestik bahwa mata uang domestik senantiasa di-back up oleh aset valas.
- Motif spekulasi

Ditujukan terutama untuk memperoleh return dari kegiatan investasi cadangan devisa.

Berdasarkan tiga jenis motif tersebut di atas, tujuan suatu negara memiliki cadangan devisa juga bervariasi tergantung dari berbagai pertimbangan yang diwarnai oleh karakteristik perekonomian pemerintahan negara tersebut. Beberapa tujuan kepemilikan cadangan devisa yang sering dikemukakan adalah sebagai berikut.

- Sebagai alat kebijakan moneter khususnya untuk meredam gejolak nilai tukar, misalnya, dengan melakukan intervensi apabila diperlukan
- Memberikan kepercayaan kepada pelaku pasar bahwa negara mampu memenuhi kewajibannya terhadap pihak luar negeri
- Membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban ketika akan melakukan pembayaran utang luar negeri
- Membiayai transaksi yang tercatat di dalam Neraca Pembayaran
- Menunjukkan adanya suatu kekayaan dalam bentuk external asset untuk mem-back up mata uang dalam negeri (domestic currency)
- Memelihara suatu cadangan untuk dapat dipergunakan apabila negara mengalami suatu keadaan darurat.
- Merupakan salah satu sumber investasi. Tujuan ini pada umumnya bukan merupakan tujuan utama, tetapi lebih alasan untuk memaksimalkan pemanfaatan cadangan devisa yang dimiliki.

C. Pengelolaan Cadangan Devisa

a. Tujuan dan Prinsip Pengelolaan cadangan Devisa

Definisi pengelolaan cadangan devisa menurut IMF adalah suatu proses yang memastikan adanya cadangan devisa yang siap pakai dan dikuasai oleh otoritas moneter untuk memenuhi berbagai tujuan.

Pengelolaan cadangan devisa yang baik akan bermanfaat bagi meningkat ketahanan ekonomi suatu negara ketika ada tekanan (shocks) yang kemungkinan baik berasal dari pasar finansial global (global financial market) maupun dari masalah yang timbul karena sistem keuangan dalam negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka manajer pengelola cadangan devisa (pihak bank sentral atau otoritas moneter) harus memantau pergerakan nilai tukar mata uang domestik setiap saat melalui interaksi dengan para pelaku pasar dan diharapkan dapat mengakses informasi secara benar dan tepat waktu.

Dari pengamatan terhadap praktek pengelolaan cadangan devisa di beberapa negara, terdapat keseragaman pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan praktek pengelolaan cadangan devisa yang aman. Dalam Guideline yang dikeluarkan oleh IMF praktek pengelolaan yang aman meliputi hal-hal dibawah ini :

- ✓ kejelasan tujuan dari pengelolaan cadangan devisa
- ✓ manajemen risiko yang hati-hati
- ✓ struktur kelembagaan dan tata kelola (governance) yang sehat
- ✓ kerangka kerja yang transparansi yang memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan cadangan devisa, baik aktivitas maupun hasilnya
- ✓ pelaksanaan pengelolaan cadangan devisa yang efisien dan sehat (sound)

Ada tiga prinsip pengelolaan cadangan devisa, yaitu:

- ✓ keamanan
Pengelolaan cadangan devisa yang lebih mengutamakan keamanan, maka sebagian besar portofolionya akan terdiri dari surat-surat berharga atau bond-bond yang dikeluarkan oleh pemerintah negara maju atau instrumen investasi berkualitas tinggi lainnya, dengan rating AAA.
- ✓ Likuiditas
Apabila likuiditas yang diprioritaskan, maka portofolio investasi sebagian besar akan berupa bond-bond dengan kapitalisasi yang besar di pasar keuangan, seperti US Treasury , European Government Bonds dan bond lain yang menunjukkan likuiditas tinggi⁹ , sehingga apabila diperlukan dana cash mendadak, instrumen yang dimiliki akan mudah dijual/dicairkan.
- ✓ Keuntungan
Sedangkan apabila pengelolaan cadangan devisa lebih mementingkan profitabilitas, maka komposisi portofolio investasinya sebagian besar akan berbentuk bond-bond yang memiliki yield tinggi (dan risiko tinggi secara bersamaan), misalnya, bonds yang dikeluarkan oleh korporasi seperti IBM, Ford, atau bonds lainnya yang dikeluarkan oleh agency yang ratingnya di bawah rating investasi.

b. Faktor yang Berpengaruh terhadap Strategi Pengelolaan Cadangan Devisa

Strategi pengelolaan cadangan devisa merupakan rangkaian kebijakan dan kegiatan yang berkaitan erat dengan tujuan kepemilikan cadangan devisa. Tujuan tersebut akan berpengaruh terhadap keputusan tentang adanya kecukupan cadangan devisa maupun komposisi cadangan devisa yang harus tersedia.

c. Kecukupan Cadangan Devisa dan system nilai tukar

Sehubungan dengan sifat dari rezim nilai tukar¹¹, di negara yang menganut fixed exchange rate 'sistem nilai tukar tetap. pada umumnya memerlukan cadangan devisa yang besar untuk mempertahankan nilai tukar pada level yang ditetapkan. Apabila nilai tukar yang ditetapkan di atas harga pasar, maka pemerintah/otoritas moneter akan menjual cadangan devisa atau valuta asing. Sebaliknya, jika nilai tukar di bawah harga pasar, maka pemerintah/otoritas moneter akan membeli valuta asing atau cadangan devisa sebagai upaya untuk mempertahankan nilai tukar pada level yang ditetapkan. Adapun dalam sistem floating exchange rate 'sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar mata uang suatu negara ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dan penawaran yang ada di pasar, sehingga tidak ada kewajiban bagi otoritas moneter untuk mempertahankan suatu tingkat nilai tukar tertentu. Dalam sistem ini, otoritas moneter pada dasarnya tidak memerlukan cadangan devisa untuk menjaga nilai tukar. Namun, hampir tidak ada negara yang menganut sistem ini secara murni, sehingga otoritas moneter masih memerlukan cadangan devisa untuk melakukan intervensi agar nilai tukar tidak terlalu berfluktuasi¹⁴. Intervensi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengarahkan atau mencapai nilai tukar pada tingkat tertentu, tetapi semata-mata hanya untuk menjaga agar gejolak nilai tukar yang terjadi tidak berlebihan yang membahayakan perekonomian secara keseluruhan.

d. Kerangka Kerja manajemen risiko

Pengelolaan cadangan devisa, sebagaimana kegiatan investasi keuangan (financial investment) yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank maupun nonbank, tidak dapat terlepas dari kemungkinan terjadinya kerugian akibat berbagai risiko yang dihadapi.

Business risk terdiri dari risiko pasar dan risiko kredit. Risiko pasar terdiri dari:

- ✓ Risiko nilai tukar kerugian yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar suatu mata uang yang menjadi denominasi dari investasi.
- ✓ Risiko harga risiko merosotnya nilai investasi karena perubahan harga dari instrumen pasar keuangan sebagai instrumen investasi, baik harga di pasar modal maupun harga surat-surat berharga yang menghasilkan bunga tetap.

Sedangkan risiko kredit atau counterparty risk adalah kerugian investasi yang disebabkan oleh kepailitan mitra transaksi. Sementara itu, consequential risk suatu lembaga keuangan (financial institution) dapat berupa hal-hal berikut :

- ✓ Risiko likuiditas, yaitu risiko tidak tersedianya jumlah likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek (cash flow mismatching). Risiko ini pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu (a) risiko pendanaan (cash flow), merupakan risiko yang timbul karena lembaga tidak dapat memperoleh dana untuk memenuhi kewajibannya pada waktu yang ditentukan dan (b) risiko likuiditas pasar atau risiko yang timbul karena lembaga tidak dapat dengan mudah mensinkronkan posisi tertentu dengan harga pasar sebelumnya karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memungkinkan.
- ✓ Risiko Penyelesaian Transaksi (settlement risk) risiko kerugian yang terkait dengan pelaksanaan sistem pembayaran, yaitu tidak diselesaikannya transaksi kewajiban pembayaran yang telah disepakati pada waktu yang telah diperjanjikan.
- ✓ Risiko operasional (operational risk) risiko yang timbul karena kesalahan sistem, manajemen, kontrol, manusia, dan kejadian.
- ✓ Risiko hukum (legal risk) risiko yang mungkin timbul karena adanya kontrak yang tidak didukung oleh kekuatan hukum atau yang tidak terdokumentasikan dengan baik.

Di samping businessrisk dan consequential risk, terdapat juga reputational risk yang merupakan risiko yang muncul sebagai akibat kegiatan yang dilakukan oleh institusi ataupun individu di dalam institusi dan menciptakan persepsi negatif terhadap lembaga termaksud di pasar.

Selain jenis-jenis risiko tersebut di atas, pengelompokan risiko dapat pula dipisahkan menjadi risiko sistematis dan risiko nonsistematis. Dari kedua jenis risiko tersebut, risiko sistematis merupakan risiko yang timbul dari suatu instrumen. Oleh karena itu, risiko ini dapat diminimalisasi dengan jalan melakukan diversifikasi instrumen. Namun, diversifikasi instrumen tersebut tidak dapat menghilangkan risiko nonsistematis atau risiko pasar.

Meskipun sampai saat ini tidak ada suatu aturan yang baku mengenai manajemen risiko, pada umumnya proses manajemen risiko melalui beberapa tahap yang berkesinambungan dimulai dengan adanya (1) identifikasi risiko; (2) pemetaan risiko untuk mengetahui kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap kegiatan usaha; (3) pengukuran risiko ; (4) pengawasan risiko agar risiko tersebut dapat dikelola secara sistematis, dan akhirnya (5) penyusunan laporan kinerja dari keseluruhan kegiatan manajemen risiko. Proses manajemen risiko dapat digambarkan di bawah ini.

Tahap paling awal dari manajemen risiko adalah pemahaman terhadap kegiatan usaha yang meliputi pemahaman terhadap kondisi internal yang meliputi sumber pendanaan, komposisi kekayaan dan kewajiban, jenis-jenis investasi yang sesuai, sifat kegiatan usaha, dan keadaan infrastruktur perusahaan.



Adapun kondisi eksternal yang harus dipahami, antara lain siapa stakeholders dan counterparties dari perusahaan, aspek hukum yang terkait, perkembangan kondisi pasar finansial, dan instrument yang tersedia di pasar finansial. Pemahaman yang baik terhadap faktor-faktor tersebut diharapkan dapat mempercepat dan mempertajam proses identifikasi risiko. Setelah berbagai risiko teridentifikasi dan dipetakan, meskipun tidak semua risiko dapat dikuantifikasi, diupayakan agar pengukuran risiko mempergunakan metode kuantitatif sehingga dampak risiko terhadap keuangan lembaga dapat terukur.

Dalam mengukur risiko pasar, metode yang pada umumnya dipakai antara lain: (a) Penghitungan Value at Risk (VaR) (Penza et. al, 2001), yaitu cara untuk mengetahui besarnya potensi kerugian maksimum yang mungkin timbul dari suatu portofolio dalam suatu jangka waktu tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu yang disebabkan oleh perubahan harga pasar portofolio tersebut (penjelasan VaR baca Boks di bawah); (b) Penghitungan duration yaitu cara untuk mengetahui seberapa besar persentase perubahan harga surat-surat berharga yang diakibatkan perubahan yield sebesar tertentu; dan (c) Analisis sensitivitas dilakukan dalam rangka mencari perubahan harga untuk setiap perubahan yield sebesar 1 (satu) basis point.

Pengukuran risiko likuiditas biasanya mempergunakan metode Gap Analysis, yaitu untuk mengetahui gapping (tenor dan size)

dari kekayaan dan kewajiban yang dimiliki. Analisis gap ini dilakukan untuk seluruh jangka waktu baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Tahap monitoring dan evaluasi risiko merupakan suatu proses dalam rangka memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan masih dalam batas toleransi risiko yang diperbolehkan dan apakah masih sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan arahan yang sudah ditetapkan. Selain hal tersebut di atas, kegiatan monitoring ini juga bermaksud untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh seimbang dengan risiko yang diambil. Agar kegiatan antisipatif dapat segera diambil bila muncul kemungkinan meningkatnya risiko, maka kegiatan monitoring dan evaluasi itu biasanya dilakukan secara berkesinambungan.

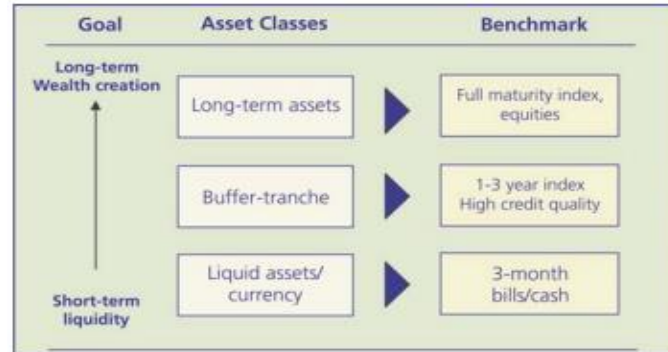
Proses pelaporan risiko sebaiknya dilaksanakan secara harian dan materi laporan antara lain mencakup komposisi portofolio, profil risiko, kinerja portofolio dibandingkan benchmark, serta evaluasi atas kepatuhan terhadap arahan investasi (investment guide line) . Proses manajemen risiko hendaknya didasarkan pada Specific Risk Policies and Procedures yang merupakan dokumen tertulis berisi mengenai berbagai kebijakan, prosedur serta pedoman yang mengatur secara rinci seluruh tahapan pengelolaan risiko oleh lembaga.

Verifikasi dan audit merupakan suatu proses untuk mengevaluasi apakah proses manajemen risiko yang diimplementasikan telah berjalan dengan efektif sesuai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Audit dapat dilaksanakan oleh pihak internal maupun oleh auditor independen. Auditor juga dapat diminta untuk melakukan evaluasi apakah metode, kebijakan, dan prosedur yang dipergunakan dalam manajemen risiko sesuai dengan karakteristik dari tujuan usaha lembaga dimaksud. Termasuk dalam proses ini adalah melakukan back testing untuk menguji keakuratan dari metode yang dipergunakan dalam pengukuran risiko.

e. Manajemen portofolio / investasi

Bank sentral dalam manajemen portofolionya sebagai upaya untuk optimalisasi kegiatan investasi, tergantung dari besarnya kewajiban internasional, biasanya membagi cadangan devisa dalam beberapa subportofolio (tranches) yang disesuaikan dengan tujuan pengelolaan cadangan devisa. Sejalan dengan pembagian portofolionya, bank sentral pada umumnya menggunakan benchmark yang berbeda-beda untuk masing-masing portofolio sesuai dengan tujuan pembentukan portofolio tersebut. Beberapa contoh portofolio cadangan devisa dan benchmark yang dibentuk antara lain adalah sebagai berikut :

- ✓ Portofolio Likuiditas Portofolio ini mempunyai dua tujuan, yaitu (1) mengelola likuiditas cadangan devisa guna tetap memenuhi kebutuhan pembayaran kewajiban jangka pendek dan (2) merupakan portofolio yang dengan return yang dapat diperoleh. Untuk jenis portofolio ini, benchmark yang biasa digunakan adalah short-term duration benchmark, misalnya, tingkat bunga penanaman dana pasar uang London dengan jangka waktu tiga bulan (3 month LIBID). Dengan struktur semacam ini, dealer akan melakukan penanaman pada beberapa jenis instrumen jangka pendek, misal, Floating Rate Notes (FRNs), bonds berjangka pendek, deposito, Forward Rate Agreements, repo, dan lain-lain.
- ✓ Portofolio Investasi Tujuan utama dari jenis portofolio ini adalah mendapatkan return atau untuk meningkatkan rate of return. Sehubungan dengan itu, benchmark yang dipergunakan pada umumnya berjangka panjang (full maturity index). Aset yang dimasukkan dalam portofolio ini biasanya surat-surat berharga jangka panjang. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan indeks sebagai benchmark pada umumnya disesuaikan dengan tujuan (goals) yang ingin dicapai, sebagai contoh dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Strategi pertama dilakukan dengan cara pengelola investasi berdasarkan benchmark yang sudah disepakati, hanya mereplikasi (meniru) komposisi benchmark secara utuh sehingga hasil yang diperoleh kurang lebih akan sama dengan benchmark. Sedangkan strategi kedua dilakukan dengan cara pengelola investasi secara aktif mengubah-ubah komposisi portofolionya atau melakukan deviasi terhadap benchmark untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi.

Dalam hal pengelola investasi/dealer memilih strategi melakukan deviasi terhadap benchmark, diperlukan alat kontrol yang baik agar dealer tidak terlalu jauh menyimpang

dari benchmark. Tracking error adalah alat kontrol yang biasanya dipakai untuk mengukur standar deviasi kelebihan return yang diperoleh dealer terhadap benchmark. Tracking error yang semakin rendah menunjukkan bahwa risiko dan return dari portofolio tersebut semakin mendekati benchmark.

Meskipun tidak ada ketentuan yang pasti, pada umumnya penentuan proporsi cadangan devisa yang dialokasikan pada masing-masing subportofolio biasanya didasarkan pada beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan kepemilikan cadangan devisa dan faktor-faktor antara lain seperti :

- kebijakan nilai tukar dan kestabilan nilai tukar domestic
- kebijakan pembayaran perdagangan internasional dan lalu lintas devisa
- besarnya cadangan devisa
- akses ke pasar modal internasional

D. Pengelolaan cadangan devisa oleh bank Indonesia

Pengertian cadangan devisa yang dikelola oleh Bank Indonesia seperti dijelaskan dalam Undang-undang Bank Indonesia no.3 Tahun 2004 adalah “cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia, yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia”. Adapun cadangan devisa dapat berupa :

- uang kertas asing, giro, deposito berjangka, wesel, dan surat berharga luar negeri
- tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri
- hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu badan keuangan internasional.

Pemanfaatan cadangan devisa jenis bank notes dan cadangan devisa yang bersifat likuid paling dominan digunakan untuk pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan impor yang dibiayai oleh APBN. Adapun pemanfaatan cadangan devisa untuk sterilisasi/intervensi² dalam rangka mendukung kebijakan moneter dilakukan dengan tujuan utama untuk mengendalikan (smoothing out) fluktuasi Rupiah agar tidak tak terkendali sehingga akan menyulitkan sektor usaha, bukan untuk mempertahankan level tertentu dari nilai tukar. Oleh karena sistem nilai tukar yang dianut adalah free floating exchange rate system, maka kegiatan ini dilakukan secara berhati-hati dan dalam jumlah yang terukur sesuai dengan perkembangan indikator moneter terutama nilai tukar rupiah dan perkembangan pasar valas dengan tetap memperhitungkan kecukupan cadangan devisa. Selain itu, penjualan atau pembelian dolar oleh Bank Indonesia di

pasar valas juga ditujukan untuk mendukung pencapaian target moneter dengan memperhatikan jumlah uang primer sehingga diharapkan dalam jangka menengah tingkat inflasi dapat dijaga. Sejak tanggal 14 Agustus 1997, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang bebas. Seperti diketahui berdasarkan mekanisme dalam sistem nilai tukar tersebut, Bank Indonesia tidak berkewajiban untuk melakukan intervensi (menjual/membeli dolar ke pasar valas) sehingga cadangan devisa dapat lebih difokuskan untuk memenuhi keperluan Pemerintah.

a. Jenis Pasar dan Produk yang dipergunakan dalam kegiatan Pengelolaan Cadangan Devisa.

Kegiatan pengelolaan cadangan devisa dilakukan dengan melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa yang antara lain meliputi transaksi jual beli dan penempatan devisa, emas dan surat-surat berharga dalam valuta asing. Pelaksanaan transaksi tersebut dilakukan di berbagai pasar, yaitu pasar valuta asing (foreign exchange market), pasar uang internasional (money market), pasar surat-surat berharga internasional (bonds market) dan pasar emas internasional (gold market). Adapun berbagai produk yang ditransaksikan di berbagai jenis pasar adalah sebagai berikut :

- ✓ Pasar Valuta Asing
Pasar valuta asing adalah pasar tempat terjadi transaksi jual beli valuta asing antarpelaku pasar. Produk valuta asing yang ditransaksikan di pasar tersebut, antara lain meliputi transaksi spot, forward, swap, option, futures, dan produk lainnya.
- ✓ Pasar Uang Internasional
Pasar uang internasional adalah pasar tempat terjadi transaksi penanaman dana secara berjangka dalam valuta asing, jual beli surat-surat berharga jangka pendek, dan transaksi derivatif yang berkaitan dengan suku bunga jangka pendek. Produk pasar ini meliputi time deposit, call money, deposit on call, certificates of deposit, banker's acceptance, commercial paper, interest rate swap, dan produk lainnya.
- ✓ Pasar surat-surat berharga internasional.
Pasar surat-surat berharga internasional adalah pasar dimana terjadi transaksi pembelian dan penjualan surat-surat berharga dalam valuta asing. Jenis produk atau instrumen yang ditransaksikan pada pasar ini meliputi fixed income securities, floating rates notes, zero coupon

bond, repurchased agreement, bond option, interest rate swap, bond futures, dan produk lainnya.

- ✓ Pasar emas internasional. Pasar emas internasional adalah pasar dimana terjadi transaksi penanaman dan jual beli emas serta transaksi derivative yang berkaitan dengan emas dengan kualifikasi emas yang memenuhi standar LGD (London Good Delivery). Adapun produk yang ditransaksikan di pasar emas internasional meliputi deposito emas (gold deposit), Gold Location Swaps, Gold Bonds, dan produk emas lainnya.

E. Strategi manajemen risiko

Dalam rangka manajemen risiko yaitu pengukuran dan monitoring risiko, Bank Indonesia mempergunakan metode maupun pendekatan yang disesuaikan dengan jenis risiko yang dihadapi sebagai berikut :

- ✓ Risiko pasar.

Beberapa metode yang dipergunakan adalah (a) penghitungan VaR dengan metode variance-covariance melalui sistem tresuri plato dilakukan secara harian dengan confidence level 99% dan holding period 10 hari ke depan. Adapun data statistik yang dipergunakan adalah data volatilitas, korelasi mata uang dan suku bunga dari Risk Metrics data set dari Risk Metrics Group (RMG) melalui internet; (b) penghitungan durasi untuk mengetahui risiko perubahan harga surat berharga (SSB) yang terjadi karena perubahan yield; (c) analisis sensitivitas yang dihitung dalam rangka mencari perubahan harga untuk setiap perubahan yield 1 basis point; (d) marking to market dalam rangka memonitor perubahan harga pasar dari portfolio SSB-Available For Sale (AFS) yang berpengaruh terhadap pendapatan dan modal Bank Indonesia dan (e) penetapan dan pemantauan limit-limit terhadap durasi maksimum SSB-AFS, Forex open position para dealer secara berjenjang sesuai dengan tingkat jabatan dan pemantauan terhadap kepatuhan mengikuti limit yang dilakukan secara harian.

- ✓ Risiko kredit

Dalam rangka mengelola risiko ini Bank Indonesia menetapkan limit counterparty yang mencerminkan toleransi atas eksposur investasi pada instrumen pasar uang dan transaksi valuta asing. Penentuan limit didasarkan pada rating dari credit agencies seperti Moody's Investor Services dan Standard and Poor (S&P). Selain mengacu pada rating yang dibuat oleh pihak eksternal, DPD juga menghitung limit yang disusun oleh internal antara lain dengan penetapan limit

berdasarkan persentase tertentu dari cadangan devisa Bank Indonesia. Dalam rangka mengelola risiko kredit ini, Bank Indonesia melakukan monitoring aktif terhadap kemungkinan adanya perubahan rating counterparty yang akan berdampak kepada perubahan besarnya limit. Bank Indonesia juga menetapkan kriteria penanaman terhadap penerbit (issuer), yaitu investasi dalam SSB hanya dapat ditempatkan pada sovereign bonds, state & government bonds, supranational paper dari suatu agency dengan rating tertentu yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat internasional

- ✓ Risiko likuiditas. Pengukuran dan monitoring terhadap risiko likuiditas pengelolaan cadangan devisa dilakukan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan (a) expected cash flow, yaitu menilai kemungkinan kekurangan dana (short funding) baik harian maupun dalam jangka menengah (3-4 bulan ke depan). Penghitungan kebutuhan dana secara harian dilakukan dengan menilai seluruh cash inflows dan outflows, sedangkan untuk menghitung kebutuhan dana jangka menengah dipergunakan metode gap analysis yaitu menganalisis kesenjangan antara liquidity asset yang jatuh waktu dan jumlah kewajiban dalam suatu periode yang sama; (b) kemampuan Bank Indonesia untuk memperoleh likuiditas di pasar baik dalam kondisi normal maupun tidak normal

- ✓ Risiko operasional

Meskipun dalam melakukan investasi belum ada pengukuran risiko operasional secara formal, Bank Indonesia melakukan upaya pengelolaan risiko ini, antara lain dengan upaya di bawah ini :

- Penetapan standard and operation procedure (SOP) dan petunjuk teknis dalam setiap tahapan kegiatan di setiap unit kerja di DPD. Misalnya, contoh adanya SOP Dealing Guide Lines untuk para Dealers, Settlement Guidelines untuk pelaksana setelmen transaksi, SOP sistem tresuri, dan SOP untuk melakukan perhitungan – perhitungan risiko.
- Penetapan limit-limit bagi dealer secara berjenjang sesuai dengan tingkat jabatannya yang tercantum dalam SOP dealing guideline yang meliputi limit transaksi untuk dealer pasar uang, pasar valuta asing, surat-surat berharga, dan forex turn over limit bagi setiap dealer valuta asing.
- Pembentukan Disaster Recovery Plan Sistem Tresuri (DRP ST) dalam rangka mengantisipasi bila ada situasi

dan kondisi yang tidak normal, misalnya gangguan teknis akibat jaringan komunikasi rusak, listrik padam, virus komputer, maupun adanya gangguan nonteknis misalnya huru-hara, kebakaran yang terjadi di lingkungan kantor Bank Indonesia dengan mengadakan back up sistem dan database transaksi yang up to date di beberapa lokasi yang terpisah

Soal PENGELOLAAN CADANGAN DEvisa – Modul 11 Pertemuan 6

1. Yang bukan merupakan usaha formal yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menangani risiko investasi yaitu :
 - a. Disaster Recovery Plan Sistem Tresuri (DRP ST)
 - b. Melakukan redenominasi rupiah
 - c. Penetapan standard and operation procedure (SOP)

2. Tujuan portofolio likuiditas, kecuali
 - a. mendapatkan return atau untuk meningkatkan rate of return
 - b. mengelola likuiditas cadangan devisa guna tetap memenuhi kebutuhan pembayaran kewajiban jangka pendek
 - c. merupakan portofolio yang dengan return yang dapat diperoleh.
Untuk jenis portofolio ini, benchmark yang biasa digunakan adalah short-term duration benchmark.

3. Jenis produk atau instrumen yang ditransaksikan pada pasar surat berharga internasional, kecuali :
 - a. zero coupon bond
 - b. repurchased agreement
 - c. certificates of deposit

4. Beberapa tujuan kepemilikan cadangan devisa, kecuali :

- a. Sebagai alat kebijakan moneter khususnya untuk meredam gejolak nilai tukar, misalnya, dengan melakukan intervensi apabila diperlukan
 - b. Untuk menimbun kekayaan dari hasil perdagangan internasional
 - c. Memberikan kepercayaan kepada pelaku pasar bahwa negara mampu memenuhi kewajibannya terhadap pihak luar negeri
5. Yang bukan merupakan komponen cadangan devisa
- a. Special drawing right (SDR)
 - b. Valuta asing
 - c. Surat utang Negara
- 6.** Valuta asing terdiri dari ? !
7. Jelaskan 3 motif kepemilikan cadangan devisa
8. Guideline yang dikeluarkan oleh IMF praktek pengelolaan yang aman meliputi hal-hal apa saja ?
9. Jelaskan prinsip pengelolaan cadangan devisa
10. *Business risk* terdiri dari risiko pasar, jelaskan risiko pasar tersebut !

PERTEMUAN 8 MODUL 12
KONSEP, DINAMIKA, DAN RESPON KEBIJAKAN NILAI TUKAR
DI INDONESIA

Tujuan: untuk mempelajari kebijakan nilai tukar di Indonesia

Capaian Pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

A	Pendahuluan
B	Landasan Teori Nilai Tukar
C	Mikrostruktur dalam Pasar Valas
D	Reim Nilai tukar dalam Sejarah Internasional
E	Volatilitas Nilai tukar dan respon Bank Sentral
F	Kebijakan nilai tukar dan devisa di Indonesia

Pendahuluan

Pada system perekonomian terbuka, negara-negara melakukan transaksi barang dan jasa serta melakukan pembayaran dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang negara mereka sendiri sesuai dengan kesepakatan. Inilah yang menjadi cikal bakal munculnya nilai tukar.

Kemudian, transaksi antara mata uang asing tersebut kian berkembang melalui investasi internasional. Inilah yang menjadi pengaruh besar dalam nilai tukar, yaitu pergerakan mata uang non-fisik baik berupa portofolio atau investasi (modal) asing. Negara-negara yang menganut system nilai tukar tetap sangat rentan terhadap kegiatan spekulasi dan krisis.

Sebagaimana diketahui, nilai tukar memengaruhi perekonomian dan aktivitas bisnis melalui saluran langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, nilai tukar akan memengaruhi perekonomian suatu negara melalui harga barang ekspor dan impor suatu negara. Sementara secara tidak langsung, nilai tukar dapat memengaruhi perekonomian melalui kegiatan ekspor dan impor suatu negara.

Dalam menerapkan tata kelola yang baik, kebijakan nilai tukar otoritas moneter harus konsisten mencapai tujuanyang telah ditetapkan, seperti menjaga kestabilan nilai tukar jangka pendek, mengarahkan nilai tukar sesuai target inflasi menengah dan panjang, serta mendukung competitiveness dengan negara peer.

Besarnya pengaruh nilai tukar dalam sector bisnis memunculkan dua pandangan berbeda, pandangan pertama nilai tukar dibiarkan bergerak bebas sesuai dengan permintaan dan penawaran valas di asar valuta asing. Mereka menganggap bahwa campur tangan pemerintah dalam mengatur nilai tukar akan mengganggu nilai tukar itu sendiri untuk mencapai titik keseimbangan. Sementara kubu sebaliknya beranggapan bahwa pergerakan nilai tukar harus selalu diatur oleh pemerintah atau otoritas karena pergerakan nilai tukar tidak selalu menjadikan perekonomian kearah yang seimbang.

1.1 Pengelolaan Dinamika Arus Modal dan Nilai Tukar

Penguatan pengelolaan dinamika arus modal dan nilai tukar dilakukan dengan

beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

1. Koordinasi penerapan bauran instrumen kebijakan menjadi bagian strategi yang penting dalam menerapkan 'possible trinity' yang optimal
2. Di sisi aliran modal, dengan tetap menganut rezim devisa bebas, langkah-langkah makroprudensial di bidang arus modal merupakan opsi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi arus modal jangka pendek yang berlebihan
3. Di sisi nilai tukar, menghadapi arus modal, nilai tukar dikelola untuk tetap flksibel dan memberi ruang gerak untuk terapresiasi, namun dijaga agar jangan sampai terlalu melenceng jauh dari nilai tukar fundamentalnya (overvalued)
4. Kebijakan moneter didukung oleh kebijakan makroprudensial yang bertujuan meminimalisir dampak aliran modal masuk pada aset price bubble dan pertumbuhan kredit yang berlebihan, yang dapat menimbulkan risiko kestabilan moneter dan kestabilan sistem keuangan, termasuk kebijakan capital flow management (CFM).

1.2 Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka

Keterbukaan ekonomi suatu negara akan membawa konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, termasuk kebijakan moneternya. Semakin besar transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara, semakin besar pula aliran dana luar negeri yang masuk dan keluar dari negara yang bersangkutan yang akan memengaruhi jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan nilai tukar dalam perekonomian, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

1.3 Sistem Nilai Tukar dan Devisa

Nilai tukar suatu mata uang didefinisikan sebagai harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Pemilihan sistem yang

diterapkan akan tergantung pada situasi dan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan, khususnya besarnya cadangan devisa yang dimiliki, keterbukaan ekonomi, sistem devisa yang dianut (bebas, semi terkontrol, atau terkontrol), dan besarnya volume pasar valuta asing domestic. Ada tiga system nilai tukar, yaitu:

1. *Fixed exchange rate* atau sistem nilai tukar tetap

Pada sistem nilai tukar tetap, nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu, misalnya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dipatok Rp 8.000,- per dolar. Sistem nilai tukar tetap mempunyai kelebihan karena adanya kepastian nilai tukar bagi pasar. Akan tetapi, sistem ini membutuhkan cadangan devisa yang besar karena keharusan bagi bank sentral untuk mempertahankan nilai tukar pada level yang ditetapkan.

2. *Floating exchange rate* atau sistem nilai tukar mengambang.

Pada sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Sistem nilai tukar mengambang mempunyai kelebihan dengan tidak perlunya cadangan devisa yang besar, karena bank sentral tidak harus mempertahankan nilai tukar pada suatu level tertentu. Akan tetapi, nilai tukar yang terlalu berfluktuasi dapat menambah ketidakpastian bagi dunia usaha.

3. *Managed floating exchange rate* atau sistem nilai tukar mengambang terkendali

Sistem nilai tukar mengambang terkendali merupakan sistem yang berada di antara kedua sistem nilai tukar di atas. Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut *intervention band* atau batas pita intervensi. Nilai tukar akan ditentukan sesuai dengan mekanisme pasar sepanjang berada di dalam batas kisaran pita intervensi tersebut. Apabila nilai tukar menembus batas atas atau batas bawah dari kisaran tersebut, maka bank sentral akan secara otomatis melakukan intervensi di pasar valuta asing sehingga nilai tukar bergerak kembali ke dalam pita intervensi.

Pergerakan nilai tukar di pasar dipengaruhi oleh faktor fundamental dan non-fundamental. Faktor fundamental yaitu faktor fundamental dan non-fundamental. Faktor fundamental tercermin dari variabel-variabel ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan perkembangan ekspor impor. Sementara itu faktor non-fundamental yaitu berupa sentimen pasar terhadap perkembangan sosial politik, faktor

psikologi para pelaku pasar dalam memperhitungkan informasi, rumor, atau perkembangan lain dalam menentukan nilai tukar sehari-hari.

Penetapan sistem devisa pada suatu negara ditujukan untuk mengatur pergerakan lalu lintas devisa antara penduduk dan bukan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Ada tiga system devisa, yaitu:

1. System devisa terkontrol

Pada sistem devisa terkontrol, devisa pada dasarnya dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, setiap perolehan devisa oleh masyarakat harus diserahkan kepada negara dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh izin dari negara.

2. System devisa semi terkontrol

Pada sistem devisa semi terkontrol, kewajiban penyerahan dan izin dari negara diterapkan untuk perolehan dan penggunaan devisa-devisa tertentu, sementara jenis devisa lainnya dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan

3. System devisa bebas

Pada sistem devisa bebas, masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa.

Landasan Teori Nilai Tukar

Teori yang melandasi pergerakan nilai tukar dapat dibagi menjadi tiga besaran pendekatan, yaitu: pendekatan fundamental, pendekatan teknikal, dan pendekatan mikrostruktur.

2.1 Pendekatan Fundamental atas Nilai Tukar

terdapat dua faktor utama terkait fundamental ekonomi dalam konteks nilai tukar, yaitu:

1. Kondisi fundamental yang menentukan nilai tukar berdasarkan kondisi dinamis di pasar barang yang melahirkan konsep Purchasing Power Parity (PPP). Konsep PPP menekankan asumsi bahwa pada dasarnya semua mata uang memiliki daya beli yang sama di berbagai negara.
2. Konsep yang berasal dari dinamika di pasar aset yang melahirkan konsep Uncovered Interest Rate Parity (UIP). UIP mengasumsikan bahwa imbal hasil atas kepemilikan asset akan menyamakan nilai mata uang yang berbeda jika dikonversi ke dalam mata uang yang sama.
3. Faktor fundamental juga memasukkan pendekatan baru yaitu pendekatan mikrostruktur. Konsep ini menekankan pentingnya

memerhatikan faktor informasi dan institusional dalam menganalisa pergerakan nilai tukar.

2.2 Purchasing Power Parity (PPP)

Konsep absolute PPP menyatakan bahwa daya beli (purchasing power) dua mata uang terhadap suatu barang adalah sama. Dengan demikian, PPP adalah perbandingan (rasio) tingkat harga di kedua negara.

Asumsi:

- Barang yang diperdagangkan bersifat homogen dan harga barang nontraded bersifat flksibel;
- Tidak ada hambatan perdagangan internasional;
- Biaya transportasi yang relatif rendah atau tidak ada; dan
- Tingkat inflsi yang setara.

Contoh:

Jika inflasi di AS naik 5% dan inflasi di Indonesia naik 10%, maka berdasarkan PPP relatif (dalam kondisi paritas) rupiah akan terdepresiasi sebesar 5% terhadap USD.

Kelemahan:

- Adanya variabel penentu lain di luar inflasi; dan
- Sulit terpenuhinya asumsi yang mendasari teori.

2.3 Interest Rate Parity (IRP)

Yaitu perbedaan suku bunga antara dua negara adalah sama dengan perubahan yang diharapkan (ekspektasi) dalam nilai tukar dua mata uang. Penentuan nilai tukar terbagi menjadi dua yaitu:

1. Uncovered interest rate parity (UIP)
Menjelaskan bahwa nilai tukar kedepan akan ditentukan oleh besaran perbedaan suku bunga antarnegara mata uang yang diperbandingkan.
2. Covered interest rate parity (CIP)
Dalam konsep CIP, nilai tukar tidak hanya dipengaruhi perbedaan suku bunga antarnegara yang diperbandingkan, tapi juga oleh besaran risiko yang terkait (risk premium).

2.4 Teori Penentuan Nilai Tukar

Beberapa teori yang digunakan dalam penentuan nilai tukar yang dikembangkan sejak tahun 1960-an, yaitu:

1. Model Mundell-Fleming
Model ini adalah perpanjangan dari IS-LM yang sama-sama menekankan antara pasar barang dan pasar uang. Perbedaannya

ialah IS-LM digunakan pada system ekonomi tertutup, swmwn tara model ini digunakan pada system perekonomian terbuka.

2. Model Moneter Harga Kaku (The Sticky Prices Monetary Model/ SPMM)

Model ini mengasumsikan adanya variabel-variabel fleksibel dalam sistem, yaitu nilai tukar dan suku bunga sebagai sebuah kompensasi atas kakunya variabel lain, terutama harga barang.

3. Model Moneter Harga Fleksibel (The Flexible Prices Monetary Model/FPMM)

Model harga fleksibel mengasumsikan tingkat suku bunga domestic bersifat eksogen dalam jangka panjang dan ditentukan oleh pasar dunia berdasarkan asumsi mobilitas modal sempurna. Model harga flksibel juga mengasumsikan adanya paritas daya beli. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dalam model harga flksibel, kenaikan dalam penawaran uang relatif terhadap pasokan mata uang asing menyebabkan mata uang domestik terdepresiasi.

4. Model Keseimbangan dan Model Likuiditas

Model likuiditas ini hampir sama dengan model SPMM. Namun, berbeda dengan model SPMM, model likuiditas ini pada dasarnya mengasumsikan bahwa portofolio melakukan penyesuaian terhadap guncangan secara perlahan dan harga-harga barang bersifat flksibel.

5. Model Keseimbangan Portofolio

Pada model keseimbangan portofolio (PBM) ini, faktor yang menentukan nilai tukar adalah permintaan dan penawaran aset finansial, setidaknya dalam jangka pendek.

Mikrostruktur Dalam Pasar Valas

Terkait dengan asumsi, tidak seperti pendekatan makroekonomi konvensional, pendekatan mikrostruktur umumnya tidak mengasumsikan bahwa hanya informasi public yang relevan terhadap nilai tukar di mana agen-agen dalam pasar valuta asing bersifat homogen, dan mekanisme transaksi valas yang digunakan dalam perdagangan valas tidak harus berurutan. Dalam hal metodologi, pendekatan mikrostruktur biasanya menggunakan pendekatan dasar-dasar mikroekonomi (microeconomic approach) dengan menganalisis pergerakan nilai tukar. Aspek-aspek mikroekonomi tersebut berasal dari:

1. Perilaku Market-Makers dan Penentuan Bid-Ask Spread

Market makers adalah pihak yang membuat pasar untuk satu atau lebih mata uang dengan cara menetapkan harga bid dan ask sesuai dengan permintaan terhadap mata uang terkait. Salah satu karakteristik dalam aktivitas jual beli mata uang adalah satu mata uang memiliki dua harga, yaitu harga bid dan ask. Harga bid adalah harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh pembeli (buyer) untuk suatu mata uang. Sedangkan harga ask adalah harga terendah yang bersedia diterima oleh pembeli untuk suatu mata uang. Perbedaan antara harga bid dan ask disebut dengan bid-ask spread.

2. **Intensitas Perdagangan: Hot Potatoes vs. Event Uncertainty**
Fenomena event uncertainty menyatakan bahwa perdagangan menjadi lebih informatif pada saat intensitas perdagangan tinggi. Sedangkan, fenomena hot potatoes menganggap bahwa perdagangan menjadi lebih informatif pada saat intensitas perdagangan rendah. Fenomena hot potatoes sering digunakan sebagai salah satu penjelasan terkait dengan tingginya turnover antardealer di pasar valas. Tingginya turnover antardealer tersebut bisa menjadi salah satu factor penentu nilai tukar.
3. **Time-Varying Volatility**
Salah satu karakteristik dari pasar valas adalah volatilitas berdasarkan variasi waktu (time-varying volatility) atau flktuasi volatilitas sepanjang waktu. Volatilitas itu sendiri didefinisikan sebagai variasi perubahan harga atau nilai. Adanya volatilitas ini tentunya dapat memengaruhi penentuan nilai tukar suatu mata uang.
4. **Peran Informasi dan Order Law**
Perbedaan informasi yang dimiliki antarpelaku dalam pasar valas, baik itu informasi yang bersifat publik maupun pribadi, dapat memengaruhi pergerakan nilai tukar. Salah satu bentuk informasi publik adalah pengumuman (news) kebijakan makroekonomi oleh otoritas berwenang, baik yang diantisipasi maupun yang tidak diantisipasi. Pengumuman berita makro tersebut biasanya menyebabkan terjadinya lonjakan dalam volume perdagangan dan volatilitas nilai tukar.
5. **Ekspektasi Nilai Tukar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya**
Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan ekspektasi tersebut, antara lain, adanya informasi, berita atau bahkan rumor mengenai perubahan fundamental di masa depan, dan adanya spekulasi mengenai perubahan nilai tukar di masa depan.

6. Lokasi pasar valas

Penentuan nilai tukar di pasar valas yang berlokasi di Eropa, New York, Tokyo tentunya akan berbeda dengan penentuan nilai tukar di pasar valas yang berlokasi di Indonesia, India, China dan Korea Selatan, misalnya. Perbedaan tersebut terutama berasal dari jumlah atau kualitas informasi yang menjangkau pasar, atau perbedaan waktu yang cukup bagi para pelaku pasar untuk memproses informasi baru secara penuh

7. Struktur kelembagaan/institusional pasar valas.

Beberapa fitur khusus yang membedakan pasar valas dengan pasar keuangan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pasar valas merupakan pasar dua tingkat (two-tier) yang terdiri dari pasar antarbank (interbank market) dan pasar retail
- Pasar valas secara umum merupakan pasar yang terdesentralisasi
- Dealer perbankan memperjualbelikan mata uang satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui broker
- Dealer tidak memiliki informasi yang lengkap terkait dengan kondisi pasar valas, terutama pasar valas antarbank
- Dealer yang bekerja pada bank yang memiliki banyak nasabah dan jaringan pasar yang meliputi seluruh dunia memiliki keuntungan dalam hal informasi daripada pelaku pasar valas lainnya.
- Aktivitas perdagangan mata uang oleh nasabah dapat didasari oleh motif likuiditas, spekulasi, dan manajemen resiko.

REZIM NILAI TUKAR DALAM SEJARAH INTERNASIONAL

Penetapan nilai tukar suatu negara memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas neraca pembayaran dan efektivitas kebijakan moneter yang pada gilirannya mendorong kegiatan perekonomian negara tersebut. Nilai tukar mata uang yang menguat secara signifikan dapat mengurangi daya saing ekspor barang domestik dan membuat harga barang impor menjadi relatif lebih murah. Hal ini kemudian dapat menyebabkan deficit neraca perdagangan dari waktu ke waktu. Terkait dengan kebijakan moneter, depresiasi nilai tukar yang berlebihan dapat mengganggu berjalannya fungsi kebijakan moneter dan pada akhirnya mengganggu tercapainya kestabilan harga dalam negeri.

A. Sistem Nilai Tukar Tetap Murni

Pada sistem nilai tukar tetap ini, besaran nilai tukar mata uang domestic terhadap mata uang negara lain ditetapkan pada tingkat tertentu oleh otoritas moneter/bank sentral tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. Apabila terjadi pergerakan nilai tukar yang menjauhi besaran yang telah ditetapkan, maka dalam hal ini otoritas moneter/bank sentral akan melakukan intervensi dengan membeli atau menjual mata uang di pasar valas untuk mendorong nilai tukar ke tingkat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, di bawah rejim ini, bank sentral melakukan intervensi aktif di pasar valas dalam penetapan nilai tukar.

B. Sistem Nilai Tukar Mengambang Penuh

Dalam sistem nilai tukar mengambang penuh, nilai tukar suatu mata uang tidak ditetapkan pada tingkat/besaran tertentu melainkan dibiarkan berfluktuasi berdasarkan banyaknya permintaan dan penawaran mata uang tersebut relative terhadap mata uang lainnya. Jika permintaan valas relatif terhadap mata uang domestik lebih besar dari penawarannya, maka nilai tukar mata uang domestic akan menurun. Sebaliknya, nilai tukar domestik yang menguat menunjukkan bahwa penawaran valas relatif terhadap mata uang domestik lebih besar dari permintaannya.

C. Fixed but Adjustable Rate (FBAR)

Sistem nilai tukar FBAR disebut juga dengan sebutan *adjustable peg* dan merupakan perpaduan antara sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar mengambang murni. Salah satu ciri dari sistem nilai tukar ini adalah komitmen untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu oleh bank sentral. Oleh karena itu, dalam sistem ini, tingkat nilai tukar juga ditentukan oleh pembuat kebijakan/bank sentral dan bank sentral akan melakukan intervensi langsung dengan menjual dan membeli mata uang dengan harga tetap di pasar valas untuk mempertahankan tingkat nilai tukar tersebut. Yang membedakan FBAR dengan nilai tukar tetap murni adalah tingkat nilai tukar yang dapat berubah. Namun pada kenyataannya, perubahan tersebut tidak selalu dilakukan oleh bank sentral dengan tujuan untuk menjaga kredibilitas. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran terkait dengan reaksi pasar, karena adanya perubahan tingkat nilai tukar dapat mencerminkan perubahan fundamental ekonomi atau terjadinya tekanan pasar yang kuat yang memengaruhi cadangan devisa yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. Keunggulan dari sistem ini adalah dapat mendorong terciptanya kebijakan moneter dan nilai tukar yang independen, terutama jika diterapkan oleh negara dengan mobilitas arus modal yang rendah. Arus modal yang rendah mempermudah otoritas

moneter untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa perlu mengkhawatirkan arus masuk dan keluar modal.

1. Sistem nilai tukar terpatok (*peg*)

Sistem nilai tukar terpatok (*pegged exchange rate system*) merupakan varian dari sistem nilai tukar FBAR dan mengambang. Sistem nilai tukar terpatok adalah suatu sistem nilai tukar di mana mata uang suatu negara dipatokkan atau dikaitkan ke suatu mata uang asing atau ke sekeranjang mata uang asing (*multi-currency pegging*). Sistem ini terbagi menjadi dua sebagai berikut:

a. Flexible peg

Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral mematok atau mengaitkan (*peg*) nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing sebesar besaran tertentu dalam jangka waktu yang pendek

b. crawling peg

Dalam sistem nilai tukar *crawling peg* aktif, pemerintah atau bank sentral menetapkan nilai tukar pada besaran tertentu dan secara berkala besaran tersebut disesuaikan berdasarkan perkembangan indikator-indikator ekonomi tertentu, seperti perbedaan inflasi dengan negara mitra dagang utama

2. Sistem nilai tukar *target zone* (*band*)

Secara definisi, nilai tukar mata uang dalam sistem ini dibiarkan mengambang dalam target daerah tertentu (*band*) dengan penetapan rentang *band* berupa batas atas dan batas bawah. Dalam sistem ini, bank sentral berkewajiban untuk menjaga nilai tukar dalam rentang *band* tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem ini penetapan besarnya rentang *band* menjadi salah satu factor penting yang harus diperhatikan.

3. Sistem nilai tukar mengambang terkendali

Penerapan sistem nilai tukar mengambang terkendali oleh suatu negara ditandai dengan adanya intervensi di pasar valas oleh bank sentral, namun tidak ada komitmen untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu atau pada suatu batasan (*target zone*) tertentu. Berbeda dengan sistem nilai tukar mengambang murni, sistem nilai tukar mengambang terkendali tidak melarang adanya intervensi di pasar valas. Namun demikian, intervensi tersebut tidaklah ditujukan untuk mengarahkan nilai tukar pada tingkat tertentu, melainkan untuk menstabilkan nilai tukar secara berkala atau setidaknya mengurangi volatilitas pada tingkat yang moderat, serta mencegah pergerakan nilai tukar yang terlampau besar.

VOLATILITAS NILAI TUKAR DAN RESPON BANK SENTRAL: STUDI KASUS BEBERAPA NEGARA

A. Praktik Kebijakan Pengendalian Nilai Tukar di Negara Maju

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat menekankan sistem nilai tukar yang berbasis mekanisme pasar. Namun dalam praktiknya, pergerakan nilai tukar tidak sepenuhnya disebabkan oleh mekanisme pasar, sehingga otoritas moneter AS terkadang tetap melakukan campur tangan dalam transaksi di pasar valas. Sejak runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1971, Amerika Serikat telah menggunakan intervensi nilai tukar, baik untuk memperlambat nilai tukar yang cepat, maupun untuk memberikan sinyal mengenai pandangan otoritas moneter AS bahwa nilai tukar tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi dalam negeri. Intervensi nilai tukar oleh otoritas moneter AS menjadi jauh lebih jarang dilakukan pada akhir tahun 1990-an.

2. Australia

Australia saat ini sudah mengadopsi rezim nilai tukar mengambang. Kebijakan nilai tukar Australia bergeser melalui beberapa rezim sebelum dolar Australia akhirnya dibiarkan mengambang pada tahun 1983. Dari tahun 1931, mata uang Australia dipatok (*peg*) ke mata uang poundsterling Inggris, sebelum akhirnya dipatok terhadap dolar AS pada tahun 1971. Ketika sistem Bretton Woods runtuh di awal tahun 1970-an, negaranegara maju mengambangkan nilai tukar mata uang mereka. Namun, Australia tetap menerapkan sistem nilai tukar yang dipatok dengan dolar AS. Penerapan ini mempertimbangkan sektor keuangan Australia yang saat itu relatif masih terbelakang. Kemudian, dimulai dari sekitar pertengahan tahun 1970-an, dolar Australia menjadi semakin lebih fleksibel.

3. Jepang

Saat ini, Jepang masih mempertahankan rezim nilai tukar mengambang. Sejak tahun 2013, Jepang tidak lagi melakukan intervensi di pasar valuta asing. Dalam pernyataan G-7 pada Februari 2013, Jepang berjanji akan mendasarkan kebijakan ekonomi untuk tujuan-tujuan domestik dan menghindari kebijakan penargetan nilai tukar. Hal ini juga dipertegas oleh Gubernur Bank Sentral G-20, pada pertemuan yang diadakan di Moskow pada Februari 2013, yang menyatakan bahwa negaranegara yang tergabung dalam G-20, termasuk Jepang, tidak akan menargetkan nilai tukar untuk tujuan kompetitif. Sejak

Februari 2013, pejabat Jepang telah jelas mengesampingkan pembelian asset asing sebagai alat kebijakan moneter.

4. Kanada

Kanada mengadopsi sistem nilai tukar mengambang. Baik pemerintah maupun bank sentral Kanada tidak menargetkan tingkat tertentu untuk dolar Kanada. Bank sentral Kanada dapat mengintervensi nilai tukar di pasar valuta asing atas nama pemerintah federal untuk mengantisipasi arus modal masuk jangka pendek yang mengganggu dolar Kanada.

5. Korea Selatan

Korea Selatan secara resmi mempertahankan rezim nilai tukar yang ditentukan oleh pasar, dan otoritas terkait melakukan intervensi dengan tujuan untuk mengurangi volatilitas pada won. Tidak seperti kebanyakan negara berkembang dan negara industri besar lainnya, Korea Selatan tidak terbuka terkait dengan laporan intervensi pasar valuta asing.

6. Swiss

Pada tahun 2011, akibat adanya tekanan dari krisis global dan Eropa, Swiss mulai mengadopsi nilai tukar terpatok (*pegged exchange rate*) terhadap euro. Oleh karena itu, mata uang Swiss, franc, terkenal di kalangan para investor sebagai mata uang yang paling aman.

B. Praktik Kebijakan Pengendalian Nilai Tukar di Negara Berkembang

Bagi negara berkembang, arus modal masuk diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, membantu peluang investasi keuangan, menyerap guncangan terhadap konsumsi, dan memfasilitasi transfer teknologi dalam kasus FDI. Namun, disadari bahwa arus modal masuk juga dapat membawa risiko. Salah satunya adalah, bahwa arus masuk besar-besaran dapat menyebabkan nilai tukar domestik mengalami apresiasi yang kuat, yang pada gilirannya dapat melemahkan daya saing ekspor. Arus modal masuk yang besar juga dapat mempersulit kebijakan makroekonomi dengan mendorong aktivitas ekonomi yang sudah terlalu terkontraksi (*overheat*). Masuknya arus modal dapat mengganggu penerapan kebijakan moneter yang ketat dalam upaya menekan tingkat inflasi. Dari sisi kehati-hatian, terdapat kekhawatiran bahwa arus modal masuk terkait dengan struktur liabilitas eksternal yang berisiko, dan secara umum arus modal masuk tersebut mungkin tidak diarahkan untuk penggunaan produktif, sehingga kemudian memicu ledakan konsumsi dan gelembung harga asset.

Ekspektasi nilai tukar merupakan salah satu faktor penting dalam keputusan kebijakan moneter di negara-negara berkembang. Sementara itu, salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi ekspektasi nilai tukar adalah fundamental makroekonomi. Prospek pertumbuhan ekonomi yang positif atau persepsi kerentanan ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal yang rendah, dapat menarik arus masuk modal asing dan memperkuat nilai tukar. Selain itu, intervensi di pasar valas oleh bank sentral juga berpotensi memengaruhi ekspektasi nilai tukar.

Berikut ini kebijakan pengendalian nilai tukar di beberapa negara berkembang, di antaranya:

1. Afrika Selatan

Kebijakan nilai tukar Afrika Selatan yang berevolusi dari rezim nilai tukar tetap pada tahun 1970 menjadi rezim nilai tukar mengambang terkendali dari pertengahan tahun 1979 sampai dengan pertengahan tahun 1999. Pada Maret 1995, otoritas moneter Afrika Selatan melakukan penyatuan nilai tukar (*unified exchange rate*) dengan sistem nilai tukar mengambang di bawah mekanisme kebijakan moneter berupa penargetan inflasi (*inflation targeting*). Kebijakan nilai tukar Afrika Selatan saat ini adalah membiarkan nilai tukar mata uang rand ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar, meski tidak menutup kemungkinan bagi bank sentral Afrika Selatan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk meredam volatilitas nilai tukar yang berlebihan dan memastikan stabilitas ekonomi dan keuangan.

2. Argentina

Langkah-langkah tersebut termasuk di antaranya adalah mempromosikan penurunan risiko mata uang, misalnya dengan menetapkan aturan kecukupan modal untuk ketidaksesuaian mata uang (*currency mismatch*), bersama-sama dengan kerangka peraturan yang menetapkan bahwa deposito dalam dolar di bank lokal harus digunakan hanya untuk pinjaman dalam dolar. Demikian pula dengan kredit berdenominasi dolar yang hanya boleh diberikan saat kapasitas pembayaran debitur berkaitan dengan dolar (misalnya, kegiatan sektor *tradable*). Dalam rangka menjaga kestabilan nilai tukar, Argentina juga melakukan peraturan arus masuk modal jangka pendek dan mencegah kemungkinan terjadinya arus modal keluar secara tiba-tiba. Untuk mengurangi efek negatif dari arus modal jangka pendek, Argentina telah berhasil mengambil serangkaian tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejak pertengahan 2005, otoritas ekonomi Argentina telah menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatur dan mengurangi arus masuk modal jangka pendek. Pinjaman

keuangan yang baru dibuat yang diperdagangkan di pasar valuta asing domestik, dan arus modal balik (*rollover capital*) yang berasal dari sektor swasta non-keuangan, serta liabilitas eksternal yang berasal dari aktivitas keuangan penduduk, harus dibuat dan disimpan dalam system keuangan negara untuk setidaknya 365 hari berturut-turut (di mana dalam regulasi pertama, syaratnya hanya 180 hari). Pinjaman ini tidak dapat dibayar sebelum tanggal jatuh tempo, terlepas dari adanya modalitas pembayaran (*settlement modality*) dan apakah modalitas tersebut melibatkan akses ke pasar valuta asing domestik atau tidak.

3. Brasil

Sejak tahun 1999, Brasil mulai mengimplementasikan kebijakan nilai tukar mengambang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, otoritas moneter Brasil telah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan volatilitas mata uang Brasil, yaitu real. Pada bulan Maret 2015, bank sentral Brasil menanggukuhkan program intervensi resmi, yang sebenarnya telah dimulai pada Agustus 2013, untuk memenuhi permintaan sektor swasta terkait dengan lindung nilai (*hedging*) terhadap depresiasi real. Akan tetapi, program intervensi resmi tersebut kembali mulai dilakukan pada bulan September 2015 dan dilakukan sesuai kebutuhan. Pihak berwenang Brasil juga telah menggunakan intervensi pasar valuta asing -- terutama melalui pasar derivative valuta asing -- serta ajakan melalui lisan dan langkah-langkah manajemen arus modal untuk meredam pergerakan arah mata uang yang berlebihan.

C. Volatilitas Nilai Tukar dan Respon Bank Sentral: Studi Empiris

Di Turki bank sentral Turki (CRBT) telah merancang dan meluncurkan alat kebijakan makroprudensial baru yang disebut dengan *Reserve Options Mechanism* (ROM) yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan cadangan valas dalam sistem perbankan Turki, meningkatkan cadangan devisa CBRT dan membatasi efek samping dari volatilitas aliran modal yang berlebihan terhadap stabilitas makroekonomi dan keuangan ekonomi. ROM memberikan pilihan bagi perbankan Turki untuk menyimpan valas atau emas cadangan sebagai ganti atas porsi tertentu persyaratan cadangan Lira Turki. Mekanisme ini dirancang untuk beroperasi sebagai penstabil otomatis ketika terjadi perubahan arus modal dan memberikan fleksibilitas kepada perbankan Turki untuk menyesuaikan cadangan devisa mereka secara endogen sesuai dengan kebutuhan likuiditas masing-masing bank. Oduncu, Yasin, and Ermisoglu (2013) menganalisis efektivitas kebijakan ROM terhadap volatilitas Lira Turki. Menggunakan *generalized autoregressive conditional heteroskedastic* (GARCH), Oduncu, Yasin,

and Ermisoglu (2013) menemukan bukti bahwa kebijakan ROM mampu mengurangi volatilitas nilai tukar Lira Turki selama periode waktu penelitian.

KEBIJAKAN NILAI TUKAR DAN DEvisa DI INDONESIA

Pemilihan sistem nilai tukar dan sistem devisa sangat memengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Dalam kondisi suatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, apabila terjadi aliran dana luar negeri masuk/keluar, maka hal tersebut berpengaruh langsung terhadap jumlah uang beredar di dalam negeri dan sebagai akibatnya berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam memengaruhi kegiatan ekonomi dan inflasi. Karena itu, sistem nilai tukar tetap biasanya disertai dengan penerapan sistem devisa terkontrol, karena mobilitas aliran dana dari dan ke luar negeri cenderung berkurang sehingga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang lebih efektif. Kondisi sebaliknya terjadi untuk sistem nilai tukar mengambang dan sistem devisa bebas, ketika aliran dana luar negeri yang lebih bebas dapat diserap melalui pergerakan nilai tukar yang mengambang sesuai mekanisme pasar, sehingga kebijakan moneter dapat lebih independen diarahkan pada pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dan inflasi di dalam negeri.

A. Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia

Dalam sejarah perekonomian Indonesia, sistem nilai tukar tetap, sistem mengambang terkendali, dan sistem mengambang bebas pernah diterapkan di Indonesia. Sistem nilai tukar tetap dianut pada periode tahun 1973 hingga Maret 1983.10 Sementara itu, sistem nilai tukar mengambang terkendali secara ketat diterapkan pada periode Maret 1983 – September 1986. Selanjutnya, sistem nilai tukar mengambang terkendali secara lebih fleksibel pernah diterapkan di Indonesia dari September 1986 – Januari 1994 dan dengan mekanisme pita intervensi dari Januari 1994 – Agustus 1997. Sementara itu, sistem nilai tukar mengambang diterapkan di Indonesia sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang.

Pada awalnya, pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah, antara lain dengan intervensi di pasar valuta asing dan beberapa kali memperlebar kisaran pita intervensi nilai tukar rupiah sesuai sistem nilai tukar mengambang terkendali yang dianut pada saat itu. Akan tetapi, tekanan yang sangat besar dan demikian cepat terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang disertai dengan penurunan cadangan devisa yang terus berlangsung memaksa Pemerintah mengubah sistem nilai tukar rupiah menjadi sistem mengambang. Apabila sistem mengambang terkendali tetap dipertahankan, maka cadangan devisa negara yang mulai menipis dikhawatirkan dapat terkuras habis dan menimbulkan krisis neraca pembayaran yang berat. Sejumlah negara tetangga, seperti Korea Selatan

dan Thailand, juga melakukan hal yang sama dengan menerapkan sistem nilai tukar mengambang.

Dengan diaduknya sistem nilai tukar mengambang sejak Agustus 1997, pergerakan nilai tukar rupiah pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan valuta asing di pasar. Dalam kaitan ini, kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia berupa intervensi di pasar valuta asing lebih diarahkan untuk menstabilkan atau menghindari gejolak nilai tukar rupiah di pasar. Intervensi dimaksud tidak dimaksudkan untuk mencapai atau mengarahkan pergerakan nilai tukar rupiah pada tingkat atau kisaran tertentu.

B. Kebijakan Devisa di Indonesia

Sesuai dengan undang-undang, pada waktu itu setiap perolehan devisa, baik DHE maupun DU, wajib diserahkan kepada negara, yaitu melalui Bank Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk. Demikian pula setiap penggunaan devisa, baik untuk impor maupun keperluan lainnya, harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Dengan kewajiban seperti ini, Bank Indonesia mengadministrasikan pergerakan devisa yang masuk dan keluar Indonesia sehingga jumlah cadangan devisa, besarnya arus lalu lintas devisa, dan penggunaannya dapat dipantau dan diperkirakan secara lebih pasti.

Kebijakan terbaru di bidang devisa yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah mengenai Kebijakan Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Utang Luar Negeri pada September 2011. Kebijakan tersebut didasari atas perlunya ketersediaan valas yang memadai, khususnya bilamana terjadi *sudden capital reversal*. Dengan adanya kestabilan ketersediaan pasokan valas untuk memenuhi kebutuhan permintaan valas di pasar domestik diharapkan dapat mendukung upaya menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya stabilitas nilai tukar. Terdapat dua sumber dana yang potensial untuk menambah pasokan valas di pasar domestik yaitu penarikan devisa hasil ekspor (DHE), dan penarikan devisa utang luar negeri (DULN).

C. Sejarah Sistem Nilai Tukar dan Sistem Devisa di Indonesia

Perkembangan kebijakan nilai tukar yang diterapkan Bank Indonesia dalam rangka merespon gejolak ekonomi dan keuangan global yang memiliki imbas terhadap nilai tukar rupiah. Pun, sistem devisa di Indonesia guna mendukung perubahan dinamika nilai tukar dan respon atas ekonomi global. Sementara itu, perjalanan sistem devisa di Indonesia, dimulai dari sistem devisa kontrol di tahun 1964 dan terus berevolusi ke sistem devisa hingga sekarang ini, karena menyesuaikan dengan dinamika perekonomian dan kepentingan Indonesia.

D. Kebijakan Nilai Tukar Terkini

Secara berkala dan hati-hati, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan pendukung lainnya (*policy mix*) dalam rangka merespon gejolak ekonomi domestik dan global guna mendukung tercapainya stabilitas nilai tukar dalam upaya mencapai target inflasi yang diinginkan. Bank Indonesia menggabungkan penerapan berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial, baik di pasar valas maupun pasar rupiah, untuk kestabilan moneter dan sistem keuangan domestik. Berbagai instrument kebijakan tersebut diimplementasikan secara terukur dan pada waktu yang tepat. Tujuan dari kebijakan tersebut selama ini cukup baik mendorong kestabilan khususnya di pasar valas yaitu cukup stabilnya nilai tukar, dan juga mendukung kestabilan di pasar uang dengan terjaganya likuiditas perbankan dan kestabilan suku bunga di pasar

Sementara itu, dalam jangka pendek berbagai instrumen kebijakan yang mendukung nilai tukar, khususnya intervensi valas, menjadi andalan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar jangka pendek. Selain itu, koridor suku bunga kebijakan berupa *standing facilities* diharapkan juga bias diandalkan mendukung kestabilan nilai tukar, selain juga menjaga kestabilan likuiditas sistem keuangan di pasar domestik. Kebijakan makroprudensial seperti LTV, GWM, dan pengawasan SIPS yang tujuan utamanya menjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan juga secara tidak langsung (mencegah krisis) juga diharapkan bisa mendukung kestabilan nilai tukar dalam jangka menengah-panjang.

SOAL Modul 12 Pertemuan 8

A. PILIHAN GANDA

1. Nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu adalah pengertian dari system nilai tukar?
 - a. Managed flating exchange rate
 - b. Fixed exchange rate
 - c. Floating exchange rate
2. Nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar adalah pengertian dari system nilai tukar?
 - a. Managed flating exchange rate
 - b. Fixed exchange rate
 - c. Floating exchange rate
3. Penetapan sistem devisa pada suatu negara ditujukan untuk mengatur pergerakan lalu lintas devisa antara penduduk dan bukan

penduduk dari suatu negara ke negara lain. Ada tiga system devisa, yaitu? Kecuali

- a. System devisa terkontrol
 - b. System devisa campur
 - c. System devisa bebas
4. Fitur khusus yang membedakan pasar valas dengan pasar keuangan lainnya adalah kecuali?
- a. Pasar valas secara umum merupakan pasar yang terdesentralisasi
 - b. Dealer perbankan tidak memperjualbelikan mata uang satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui broker
 - c. Dealer tidak memiliki informasi yang lengkap terkait dengan kondisi pasar valas, terutama pasar valas antarbank
5. Pemerintah atau bank sentral menetapkan nilai tukar pada besaran tertentu dan secara berkala besaran tersebut disesuaikan berdasarkan perkembangan indikator-indikator ekonomi tertentu, seperti perbedaan inflasi dengan negara mitra dagang utama. Pengertian dari?
- a. Crawling peg
 - b. Flexible peg
 - c. Currency peg

B. ESSAY

1. Apa pengertian dari sistem nilai tukar tetap murni?
2. Sebut dan jelaskan bagian dari system nilai tukar FBAR (Fixed but Adjustable Rate)
3. Resiko apa yang terjadi ketika arus modal masuk pada suatu negara berkembang?
4. Jelaskan Nilai tukar apa saja yang sudah digunakan Indonesia dari dahulu hingga sekarang!
5. Bagaimana proses system nilai tukar mengambang yang dianut Indonesia ?

PERTEMUAN 8 MODUL 13

SISTEM DAN KEBIJAKAN NILAI TUKAR

Tujuan: mempelajari sistem dan kebijakan nilai tukar di Indonesia

Capaian pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa diharapkan mampu memahami:

A	Pendahuluan
B	Pengertian nilai tukar
C	Faktor yang mempengaruhi nilai tukar
D	Sejarah singkat sistem moneter internasional
E	Kebijakan dan sistem nilai tukar di dunia
F	Nilai tukar dan kebijakan moneter
G	Perkembangan sistem dan kebijakan nilai tukar di Indonesia

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD) adalah harga satu dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD.

Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai Rupiah dalam valuta asing dapat diformulasikan sebagai berikut: $NT_{IDR/USD} = \text{Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika (USD)}$ $NT_{IDR/YEN} = \text{Rupiah yang diperlukan untuk membeli satu Yen Jepang}$ Dalam hal ini, apabila NT meningkat maka berarti Rupiah mengalami depresiasi, sedangkan apabila NT menurun maka Rupiah mengalami apresiasi. Sementara untuk sesuatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan revaluasi, sementara kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing tersebut devaluasi.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian tersebut diberikan contoh sebagai berikut. Misalnya, nilai tukar satu dolar Amerika (USD) terhadap mata uang Rupiah sebesar Rp8.500. Apabila nilai tukar satu USD berubah menjadi Rp9.000, maka nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau depresiasi. Sebaliknya apabila nilai tukar 1

USD berubah menjadi sebesar Rp8.000, maka nilai tukar rupiah mengalami peningkatan atau apresiasi.

Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai valuta asing terhadap Rupiah

$NT_{USD/IDR}$ = dolar Amerika yang diperlukan untuk membeli satu Rupiah

$NT_{YEN/IDR}$ = Yen yang diperlukan untuk membeli satu Rupiah

Dengan menggunakan konsep ini, apabila NT meningkat, maka Rupiah mengalami apresiasi untuk sistem nilai tukar mengambang bebas atau revaluasi untuk sistem nilai tukar tetap, sedangkan apabila NT menurun, maka Rupiah mengalami depresiasi untuk sistem nilai tukar mengambang bebas atau devaluasi untuk sistem nilai tukar tetap.

Dengan contoh di atas, maka dalam pengertian ini, satu Rupiah dinilai sebesar $1/8.500$ USD atau $0,00012$ USD. Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi jika menurun atau dengan contoh di atas sebesar $1/9000$ USD atau $0,00011$, mengalami apresiasi dengan nilai pada contoh $1/8.000$ USD = $0,00013$ USD.

Nilai tukar yang kita kenal dalam pengertian sehari-hari sebagaimana diuraikan di atas adalah dalam pengertian nominal (nilai tukar nominal). Dalam menganalisis nilai tukar kita juga mengenal apa yang disebut sebagai nilai tukar riil. Nilai tukar riil adalah nilai tukar nominal yang sudah dikoreksi dengan harga relatif, yaitu harga-harga didalam negeri dibanding dengan harga-harga di luar negeri. Nilai tukar riil tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sederhana sebagai berikut:

$$Q = S P / P^*$$

dimana Q adalah nilai tukar riil, S adalah nilai tukar nominal, P adalah tingkat harga di dalam negeri dan P^* adalah tingkat harga di luar negeri.

Formula di atas digunakan untuk menghitung nilai tukar riil bilateral dari dua negara. Dalam transaksi perdagangan internasional, suatu negara tidak hanya melakukan transaksi pada satu negara, tetapi juga dengan beberapa negara. Dengan demikian, pengukuran nilai tukar riil suatu negara terhadap mitra dagangnya perlu juga disesuaikan dengan memperhitungkan laju inflasi dan nilai tukar dari masing-masing negara tersebut. Pengukuran rata-rata nilai tukar suatu mata uang riil terhadap seluruh atau sejumlah mata uang asing disebut sebagai nilai tukar efektif.

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR

Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Pertama, faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai

tukar. Kedua, faktor aliran modal keluar (capital outflow). Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia (baik swasta dan pemerintah) kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. Ketiga, kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan⁵ maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing.

Sementara itu, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara dan pada lanjutannya nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika ekspor menurun, maka jumlah valuta asing yang dimiliki semakin menurun sehingga nilai tukar juga cenderung mengalami depresiasi. Kedua, faktor aliran modal masuk (capital inflow). Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh pihak asing (Portfolio investment) dan investasi langsung pihak asing (foreign direct investment).

Sebagaimana diuraikan dalam topik faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, permintaan dan penawaran valuta asing sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor dan impor serta aliran modal dari dan ke luar negeri. Dilihat dari faktor yang mempengaruhinya, perkembangan ekspor dan impor antara lain dipengaruhi oleh harga relatif antara suatu negara dengan negara mitra dagangnya. Semakin tinggi laju inflasi suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya, maka harga barang ekspor suatu negara akan lebih mahal dan dapat menurunkan ekspor serta pada lanjutannya akan menurunkan nilai tukar suatu negara.

Sementara itu, besarnya aliran modal terutama dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri (interest rate differential). Semakin tinggi perbedaan suku bunga di dalam negeri dibandingkan suku bunga luar negeri, maka semakin besar kecenderungan aliran modal masuk ke suatu negara. Namun, dalam perkembangannya, ukuran yang digunakan oleh investor untuk menempatkan dananya tidak terbatas pada suku bunga nominal, tetapi suku bunga riil. Dalam suku bunga riil tersebut, suku bunga nominal telah dikoreksi dengan laju inflasi. Selain itu, tingkat resiko juga mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan dana di suatu negara. Negara yang mempunyai resiko penanaman yang tinggi, pada umumnya cenderung dihindari investor.

KEBIJAKAN SISTEM DAN NILAI TUKAR DUNIA

Sejalan dengan tujuan kebijakan nilai tukar, maka dikenal berbagai jenis sistem nilai tukar yang digunakan oleh suatu negara khususnya lagi setelah runtuhnya sistem nilai tukar Bretton Woods. Berdasarkan perkembangan terakhir, terdapat kecenderungan negara-negara dunia menggunakan sistem nilai tukar mengambang. Namun, masih terdapat beberapa negara yang menggunakan sistem nilai tukar tetap ataupun variasi dari sistem nilai tukar mengambang dengan sistem nilai tukar tetap. Corden (2002) mengklasifikasikan sistem nilai tukar ke dalam tiga kelompok, yaitu 1) sistem nilai tukar tetap murni (Absolutely fixed rate regime), 2) sistem nilai tukar mengambang murni (Pure floating regime), dan 3) sistem nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan (Fixed But Adjustable Rate/FBAR) yang merupakan kombinasi sistem nilai tukar tetap dan mengambang.

Selanjutnya terdapat beberapa jenis sistem nilai tukar yang merupakan kombinasi dari ketiga sistem nilai tukar tersebut. Di antara sistem nilai tukar mengambang murni dengan FBAR terdapat currency board system (CBS). Sementara itu, di antara sistem nilai tukar mengambang murni dengan FBAR terdapat tiga jenis sistem nilai tukar, yaitu i) pegged, ii) target zone (band) dan iii) managed floating. Selanjutnya sistem nilai tukar pegged dapat dibagi atas dua jenis, yaitu flexible and crawling pegged. Sementara crawling pegged dapat dibagi atas dua jenis lagi, yaitu active (pre-announced) dan pasive crawling pegged.

1. 'Absolutely Fixed Exchange Rate Regime' Sistem Nilai Tukar Tetap

Pada sistem nilai tukar tetap ini, mata uang suatu negara ditetapkan secara tetap dengan mata uang asing tertentu, misalnya, mata uang rupiah ditetapkan secara tetap terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Dengan penetapan nilai tukar secara tetap, terdapat kemungkinan nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi (overvalued) atau terlalu rendah (under-valued) dari nilai sebenarnya

2. 'Pure Floating Exchange Rate Regime' Sistem Nilai Tukar Mengambang Penuh

Dalam sistem nilai tukar mengambang penuh, mekanisme penetapan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing ditentukan oleh mekanisme pasar. Dengan demikian, pada sistem ini nilai mata uang akan dapat berubah setiap saat tergantung dari permintaan dan penawaran mata uang domestik relatif terhadap mata uang asing dan perilaku spekulasi. Dalam sistem nilai tukar mengambang murni, bank sentral tidak menargetkan besarnya nilai tukar dan melakukan intervensi langsung ke pasar valuta asing.

3. 'Fixed But Adjustable Rate' Sistem nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan

Dalam sistem nilai tukar FBAR, besarnya nilai tukar ditetapkan oleh pembuat kebijakan, bank sentral, dan dipertahankan melalui intervensi langsung di pasar valuta asing atau bank sentral mengarahkan pasar dengan jalan menjual dan membeli valuta asing dengan harga tetap. Sistem ini dicirikan dengan adanya komitmen dari bank sentral/pemerintah untuk mempertahankan nilai tukar sebesar tertentu. Nilai tukar dapat berubah, tetapi penyesuaiannya jarang dilakukan untuk menjaga kredibilitas.

4. Currency Board System (CBS)

Terdapat dua ciri utama dari sistem nilai tukar ini. Pertama, suatu negara secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk menjaga nilai mata uangnya dengan mata uang negara lain dengan nilai tukar yang tetap. Kedua, setiap uang lokal yang diedarkan harus dijamin sepenuhnya dengan cadangan devisa. Selain menggunakan mata uang lokal terdapat juga negara yang menerapkan CBS menggunakan mata uang asing sebagai uang beredar di negaranya, misalnya, menggunakan dolar Amerika Serikat dan sistem ini sering disebut dengan dolarisasi. Dengan ciri kedua ini berarti setiap terjadinya perubahan di dalam cadangan devisa akan mendorong perubahan yang sama di dalam uang beredar atau uang primer. Aturan ini hampir sama dengan aturan yang berlaku dalam standar emas. Ketiga, tidak ada kebijakan pembatasan devisa.

5. Flexible Peg

Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan besarnya (peg) nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing dalam jangka waktu yang pendek. Penetapan (peg) nilai mata uang dapat dilakukan baik melalui intervensi ataupun melalui mekanisme pasar. Kurs atau nilai tukar dengan sistem ini dengan cepat dan sering disesuaikan sebagai respons terhadap kekuatan pasar atau perubahan fundamental. Dalam sistem ini, tidak terdapat komitmen untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu atau mempertahankan nilai tukar riil tertentu. Sistem ini dapat mencegah terjadinya ketidakstabilan atau volatilitas nilai tukar dalam jangka pendek. Sistem ini tidak dapat digunakan sebagai jangkar nominal, tetapi fleksibilitas dari sistem ini dapat mendorong pelaksanaan kebijakan moneter yang independen.

6. 'Managed Floating' Mengambang Terkendali

Suatu negara menerapkan sistem nilai tukar terkendali apabila bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing tetapi tidak ada komitmen untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu atau pada suatu batasan target (target zone) tertentu. Intervensi di pasar valuta asing merupakan sejenis batasan target yang tidak resmi (unannounced target zone). Perbedaan mendasar sistem ini dengan FBAR dan standard (announced) target zone adalah tidak ada komitmen pada tingkat nilai tukar tertentu. Dengan demikian, dalam sistem ini tidak ada usaha untuk mempengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap pergerakan nilai tukar atau permasalahan kredibilitas.

7. Target Zone (Band)

Pada sistem ini, nilai tukar dibiarkan mengambang dalam target daerah tertentu. Band yang ditetapkan mempunyai batas atas dan batas bawah. Bank sentral mempunyai komitmen untuk mencegah agar nilai tukar tidak keluar dari batas atas dan batas bawah yang ditetapkan. Dengan pembiaran nilai tukar mengambang pada band yang ditetapkan, maka penetapan besarnya band merupakan salah satu faktor penting untuk diperhatikan.

8. Active Crawling Peg

Dalam sistem ini, pemerintah/bank sentral menetapkan nilai tukar pada tingkat tertentu, tetapi pemerintah secara berkala dapat melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan indikator-indikator ekonomi tertentu, seperti perbedaan inflasi dengan negara mitra dagang utama. Penetapan nilai tukar terhadap mata uang asing tersebut dilakukan di depan (pre-announced rate).

9. Passive Crawling Peg

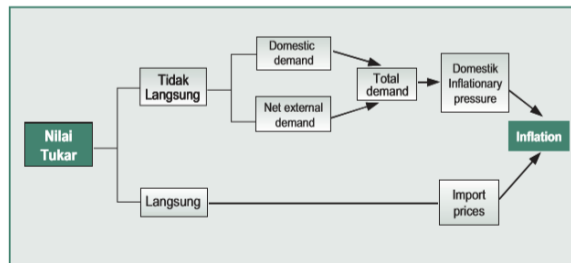
Pada sistem passive crawling peg, nilai tukar nominal pada suatu waktu tertentu disesuaikan sejalan dengan perkembangan inflasi pada masa lalu atau inflasi saat ini dan inflasi negara mitra dagang dan negara pesaing utama. Penyesuaian nilai tukar nominal dengan inflasi di dalam negeri relatif terhadap negara mitra dagang dan negara pesaing dimaksudkan untuk nilai tukar riil konstan. Dalam sistem ini tidak ada penetapan nilai tukar di depan (pre-announced). Jika inflasi meningkat akibat kenaikan upah dan penambahan jumlah uang beredar (monetary expansion), maka tingkat devaluasi juga meningkat.

NILAI TUKAR DAN PEREKONOMIAN

1. Nilai tukar dan inflasi

Hubungan nilai tukar dengan inflasi dapat dijelaskan dengan the law of one price atau hukum satu harga. Dalam perekonomian tertutup, hukum tersebut mengemukakan bahwa harga barang-barang yang sama jika dijual di dua tempat yang berbeda akan sama harganya. Hukum ini memang banyak diperdebatkan karena untuk mengangkut suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain diperlukan biaya transportasi.

Gambar 5
Mekanisme Transmisi Nilai Tukar ke Inflasi



Dengan mengacu konsep PPP di atas, dapat dijelaskan hubungan antara nilai tukar dan inflasi pada suatu negara. Harga barang-barang impor dipengaruhi oleh harga di luar negeri dan nilai tukar. Apabila harga di luar negeri meningkat, maka harga barang dalam negeri yang berasal dari impor juga meningkat. Dalam kaitannya dengan nilai tukar, apabila terjadi penurunan nilai tukar lokal terhadap mata uang asing atau depresiasi maka harga barang-barang yang diimpor juga meningkat. Sebagai contoh, nilai tukar rupiah dimisalkan sebesar Rp8.500 per satu dolar Amerika Serikat (USD). Kemudian nilai tukar rupiah mengalami depresiasi menjadi Rp9.000 per 1 USD. Depresiasi tersebut mengakibatkan CocaCola impor menjadi $2 \times \text{Rp}9.000 = \text{Rp}18.000$ atau lebih mahal Rp1.000 dibandingkan harga sebelum terjadinya depresiasi.

Penjelasan di atas lebih menitikberatkan hubungan langsung antara nilai tukar dengan harga. Selain hubungan langsung, dikenal juga hubungan tidak langsung antara nilai tukar dengan harga (gambar 5). Hubungan tidak langsung nilai tukar dan harga ditransmisikan melalui permintaan domestik dan permintaan eksternal bersih atau ekspor dan impor. Mekanisme transmisi permintaan domestik dapat terjadi melalui perubahan harga relatif antara harga barang domestik dengan harga barang impor. Kenaikan harga barang impor relatif terhadap harga barang di dalam negeri akibat depresiasi mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk membeli lebih banyak barang di dalam negeri. Kenaikan permintaan tersebut dapat mendorong peningkatan harga-harga barang dalam negeri. Sementara itu, transmisi tidak langsung melalui permintaan eksternal bersih terjadi melalui mekanisme perubahan harga

barang barang impor dan ekspor. Devaluasi nilai tukar mengakibatkan harga barang impor lebih mahal dan harga barang ekspor lebih murah. Kenaikan harga barang impor dapat mendorong terjadinya penurunan jumlah barang impor, sementara penurunan harga barang ekspor dapat meningkatkan ekspor. Secara keseluruhan kedua faktor ini akan meningkatkan permintaan eksternal bersih dan pada lanjutannya meningkatkan total permintaan agregat dan pada akhirnya meningkatkan laju inflasi.

2. Nilai tukar dan krisis ekonomi

Berdasarkan konsep purchasing power parity (PPP), harga barang-barang ekspor dan impor suatu negara dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Devaluasi atau depresiasi nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing mengakibatkan harga barang impor lebih mahal dan harga barang ekspor menjadi lebih murah. Sebaliknya, apabila kebijakan revaluasi atau apresiasi dilakukan harga barang impor menjadi lebih murah dan harga barang ekspor lebih mahal.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dapat diberikan contoh sebagai berikut. Misalnya, harga barang impor tas sebesar USD 30 dan harga barang ekspor sepatu sebesar Rp200.000. Kurs 1 USD terhadap Rupiah sebesar Rp8.000. Kemudian Pemerintah melakukan kebijakan devaluasi dengan menurunkan nilai mata uang rupiah menjadi Rp9.000. Dalam contoh ini, sebelum dilakukan devaluasi harga barang impor dalam mata uang Rupiah adalah sebesar $30 \times \text{Rp}8.000 = \text{Rp}240.000$ dan harga sesudah devaluasi sebesar $\text{Rp}30 \times \text{Rp}9.000 = \text{Rp}270.000$, lebih mahal Rp30.000. Sementara itu, harga barang ekspor dalam USD sebelum devaluasi sebesar $\text{Rp}200.000 : \text{Rp}8.000 = \text{USD } 25$ dan harga sesudah devaluasi sebesar $\text{Rp}200.000 : \text{Rp}9.000 = \text{USD } 22,2$, lebih murah USD 2,8. Contoh yang sama dapat digunakan untuk melihat dampak dari kebijakan revaluasi atau apresiasi nilai tukar.

Berdasarkan penjelasan di atas, kebijakan devaluasi atau penurunan nilai tukar mata uang lokal dapat digunakan untuk memperbaiki neraca perdagangan. Devaluasi nilai tukar mengakibatkan penurunan harga barang ekspor dan pada lanjutannya mendorong peningkatan daya saing barang-barang ekspor dan pada akhirnya dapat meningkatkan volume barang-barang ekspor. Dari sisi barang impor, devaluasi dapat mengakibatkan semakin mahalnya barang impor dan pada akhirnya dapat mengurangi permintaan impor. Dasar pemikiran tersebut mendorong beberapa negara menerapkan kebijakan devaluasi untuk memperbaiki neraca perdagangannya, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1978, 1983 dan 1986.

PERKEMBANGAN SISTEM DAN NILAI TUKAR DI INDONESIA

- Kebijakan Nilai Tukar pada Periode Perjuangan Kemerdekaan (1945-1959)

Sejarah nilai tukar pada periode ini diawali dari tahun 1945 hingga tahun 1953, ketika Pemerintah menerapkan sistem nilai tukar tetap dengan menetapkan nilai tukar rupiah sebesar tertentu terhadap mata uang asing atau mata uang lokal lainnya. Penetapan Rupiah terhadap mata uang lokal lainnya tersebut disebabkan banyaknya mata uang lokal yang digunakan sebagai alat pembayaran sehingga diperlukan nilai penukaran antarmata uang guna mempermudah transaksi. Pada sisi kebijakan devisa, pada 12 Maret 1950 pemerintah menetapkan sertifikat devisa untuk mendapatkan hak membeli devisa. Perorangan atau perusahaan pemegang sertifikat dapat membeli devisa dari bank devisa untuk membiayai kegiatan impor, dengan kurs resmi sebesar Rp. 3,80 per USD. Sementara itu, dalam transaksi devisa, Pemerintah Indonesia menetapkan nilai tukar yang berbeda antara penghasil dan pemakai devisa atau sering disebut dengan multiple exchange rate system. Dalam sistem ini, nilai tukar bagi penghasil devisa adalah sebesar 200% dari kurs resmi dan bagi pemakai devisa sebesar 300%. Sistem nilai tukar ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah yang berasal dari selisih kurs guna menutupi defisit keuangan negara.

- Kebijakan Nilai Tukar Pada Periode Ekonomi Terpimpin (1959-1966)

Pada masa ini, perekonomian Indonesia menghadapi masalah yang lebih berat dibandingkan dengan periode perjuangan kemerdekaan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan dengan kepentingan ekonomi. Perekonomian pada periode ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, inflasi yang membumbung tinggi (635% pada tahun 1966), dan investasi merosot tajam. Sementara itu, kebijakan devisa yang ketat menghambat perdagangan dan lalu lintas modal internasional, serta menciptakan pasar gelap dan kegiatan spekulasi valuta asing. Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang memburuk dan inflasi yang tinggi tersebut, nilai tukar rupiah riil merosot terus sebagaimana terjadi periode kemerdekaan. Perkembangan tersebut mengakibatkan nilai rupiah yang ditetapkan dengan sistem nilai tukar tetap menjadi over-valued.

- Kebijakan Nilai Tukar pada Periode Stabilisasi, Rehabilitasi dan Pembangunan Ekonomi (1966-1983)

Laju inflasi Indonesia yang cenderung lebih besar dibandingkan negara-negara mitra dagang utama pada tahun 1970-an mengakibatkan nilai tukar rupiah over-valued. Nilai tukar yang cenderung over-valued dapat mengganggu ekspor karena harga-harga barang ekspor lebih mahal

dibandingkan negara pesaing. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mendevaluasi nilai tukar rupiah sebesar 33,6% dari Rp415 per USD menjadi Rp625 per USD pada 15 November 1978 (Knop 15). Sejalan dengan kebijakan devaluasi tersebut, sistem nilai tukar yang digunakan juga diubah menjadi sistem nilai tukar mengambang terkendali. Dalam sistem ini, nilai tukar rupiah diambang dengan sekeranjang mata uang mitra dagang utama. Secara harian ditetapkan kurs indikasi dan dibiarkan bergerak pada kisaran kurs tertentu. Pemerintah akan melakukan intervensi apabila nilai tukar bergerak melebihi batas atas atau batas bawah yang ditetapkan.

- Kebijakan Nilai Tukar Periode Deregulasi Ekonomi (1983-1996)

Deregulasi sektor moneter, keuangan, dan perbankan tahun 1988 (Pakto 1988) telah berhasil meningkatkan arus modal masuk asing ke Indonesia. Arus modal masuk tersebut tidak terbatas pada arus modal jangka panjang, tetapi juga arus modal jangka pendek. Arus balik modal jangka pendek dapat berbahaya bagi perekonomian nasional jika Pemerintah tidak mempunyai cadangan devisa yang cukup untuk mempertahankan sistem nilai tukar mengambang terkendali. Untuk menghindarkan dampak negatif dari arus modal jangka pendek tersebut, sejak tahun 1992 dilakukan penyesuaian kebijakan nilai tukar dengan cara memperlebar pita intervensi. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah dana jangka pendek dipergunakan untuk spekulasi di pasar valuta asing dalam negeri. Kebijakan pelebaran pita intervensi dilakukan dengan pelebaran pita intervensi nilai tukar rupiah sebesar Rp 6 pada tahun 1992. Pelebaran band intervensi dilakukan masing-masing sebanyak dua kali pada tahun 1994, 1995 dan 1996, dengan pelebaran band pada bulan September 1996 dari sebesar R118 (5%) menjadi Rp192 (8%). Pelebaran tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong perkembangan pasar valuta asing dan mengurangi ketergantungan permintaan valas terhadap Bank Indonesia.

Bersamaan dengan kebijakan tersebut, sistem nilai tukar mengambang terkendali disempurnakan pada 29 Desember 1995 dengan menerapkan penggunaan batas kurs intervensi di samping kurs konversi. Penetapan batas kurs intervensi dimaksudkan sebagai batas bagi bank untuk membeli atau menjual USD dari Bank Indonesia. Jika kurs rupiah lebih tinggi dari batas atas intervensi, bank dapat membeli USD dari Bank Indonesia. Sebaliknya, dapat menjual USD kepada Bank Indonesia apabila kurs rupiah lebih rendah dari batas bawah intervensi.

- Kebijakan Nilai Tukar pada Periode Saat dan Setelah Krisis Ekonomi dan Moneter (1997- 2003)

Untuk mengurangi permintaan terhadap valuta asing maka transaksi forward jual rupiah antara bank dengan nonresident dibatasi menjadi hanya USD lima juta per nasabah. Perkembangan Sistem dan

Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia. Berbagai kebijakan nilai tukar tersebut ternyata tidak mampu meredam depresiasi lebih lanjut terhadap nilai tukar rupiah. Intervensi pasar valuta asing Bank Indonesia hanya memberikan dampak yang sangat marginal, sementara cadangan devisa mulai menurun akibat kebijakan ini. Dalam rangka mencegah terkuras habisnya cadangan devisa, maka Pemerintah pada tanggal 14 Agustus 1997 mengambil kebijakan untuk mengambang rupiah dengan menganut sistem nilai tukar mengambang bebas.

Soal PILIHAN GANDA

1. Nilai tukar mata uang antara negara satu dengan yang lain disebut :
 - a. Kurs
 - b. Valuta asing
 - c. Mata uang
2. Apabila nilai tukar satu dolar Amerika (USD) terhadap mata uang Rupiah sebesar Rp7.500. Apabila nilai tukar satu USD berubah menjadi Rp10.000, maka nilai tukar rupiah mengalami :
 - a. Apresiasi
 - b. Revaluasi
 - c. Depresiasi
3. nilai tukar nominal pada suatu waktu tertentu disesuaikan sejalan dengan perkembangan inflasi pada masa lalu atau inflasi saat ini dan inflasi negara mitra dagang dan negara pesaing utama. Merupakan kebijakan nilai tukar yang disebut :
 - a. sistem mengambang bebas
 - b. target zone (band)
 - c. passive crawling peg
4. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi nilai tukar domestic dalam permintaan adalah
 - a. Faktor pembayaran impor
 - b. SEMUA BENAR
 - c. Faktor aliran modal keluar
5. Laju inflasi Indonesia yang cenderung lebih besar dibandingkan negara-negara mitra dagang utama pada tahun 1970-an mengakibatkan nilai tukar rupiah over-valued. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mendevalusi nilai tukar rupiah sebesar 33,6% dari Rp415 per USD menjadi Rp625 per USD. Sejalan dengan kebijakan devaluasi tersebut, sistem nilai tukar yang digunakan berubah menjadi :
 - a. Sistem nilai tukar mengambang terkendali
 - b. Sistem mengambang bebas
 - c. Sistem mengambang penuh

ESSAY

1. Jelaskan yang dimaksud Kurs dan nilai tukar rill serta analisisnya!
2. Jelaskan yang dimaksud :
 - Apresiasi
 - Depresiasi
 - Devaluasi
 - Revaluasi
3. Jelaskan apa saja faktor faktor yang dapat mempengaruhi permintaan valuta asing!
4. Corden (2002) mengklasifikasikan sistem nilai tukar ke dalam tiga kelompok, sebutkan dan jelaskan!
5. Jelaskan mekanisme transmisi nilai tukar ke inflasi!

PERTEMUAN 9 MODUL 14

PENERAPAN KEBIJAKAN MONETER DALAM KERANGKA INFLATION TARGETING DI INDONESIA

Tujuan: mempelajari penerapan kebijakan moneter di Indonesia

Capaian pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

A	Pendahuluan
B	Gambaran umum inflation targeting framework
C	Implementasi ITF di Negara lain
D	Penerapan ITF di Indonesia

1. PENDAHULUAN

Dalam teori ekonomi moneter, inflasi dijelaskan sebagai fenomena moneter yang dapat diatasi dengan empat cara atau kebijakan, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan output, dan kebijakan harga dan indexing. Mengingat peran Bank Sentral sebagai otoritas moneter, pembahasan pengendalian inflasi akan dilihat dari sisi kebijakan moneter.

Secara umum, kerangka kebijakan moneter meliputi strategi kebijakan moneter dan implementasi kebijakan moneter. Strategi kebijakan moneter terdiri dari penentuan tujuan akhir, sasaran antara, indikator policy stance, indikator penting lainnya, respons kebijakan moneter, dan mekanisme penetapannya. Implementasi kebijakan moneter meliputi penentuan kombinasi instrumen moneter, target operasional, dan pelaksanaan operasi pengendalian moneter di pasar keuangan yang sesuai dengan arah dan respons kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat ditransmisikan melalui berbagai jalur yaitu jalur suku bunga, jalur kredit perbankan, jalur neraca perusahaan, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Dengan melewati jalur-jalur tersebut, kebijakan moneter akan ditransmisikan dan berpengaruh ke sektor finansial dan sektor riil setelah beberapa waktu lamanya. Terdapat beberapa pilihan strategi dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Masing-masing memiliki karakteristik, sesuai dengan indikator nominal yang digunakan sebagai dasar atau acuan atau sasaran antara dalam mencapai tujuan akhir. Beberapa strategi kebijakan moneter tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Exchange rate targeting (target nilai tukar)

Target nilai tukar merupakan strategi kebijakan dengan tiga kemungkinan pelaksanaan, yaitu dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditi tertentu yang diakui secara internasional (seperti emas), dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang memiliki laju inflasi yang rendah, atau dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu pada saat perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara.

2. Monetary targeting (target besaran moneter) atau base money targeting (target jumlah uang beredar)

Target besaran moneter merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar (M1 dan M2) dengan harapan masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral. Kelebihan dari strategi ini adalah kebijakan moneter lebih independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan seperti laju inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

3. Inflation targeting (target inflasi) Target inflasi

merupakan strategi kebijakan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang kebijakan moneter². Strategi ini merupakan instrumen yang baik untuk mencapai stabilitas makroekonomi dengan inflasi di bawah 15%. Hal ini sulit untuk dilakukan karena sangat bergantung pada forecasting yang tepat, dan menuntut nilai tukar yang menganut sistem terbuka sehingga memberi kesempatan bagi para spekulan untuk beraksi.

4. Implicit but not explicit anchor (kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas) Kebijakan moneter tanpa jangkar yang jelas merupakan strategi kebijakan tanpa penargetan secara tegas, tetapi tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter.

Dari keempat strategi kebijakan moneter di atas, keseluruhannya bertujuan untuk menciptakan kestabilan makroekonomi. Pada banyak kasus termasuk Indonesia, terdapat beberapa sasaran sebagai indikator kestabilan makroekonomi, yaitu stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan ketersediaan lapangan kerja. Melalui pengalaman empiris yang ada, pencapaian ketiga sasaran ini sangatlah sulit dan hampir mendekati tidak mungkin sehingga beberapa negara mulai menggeser strategi kebijakan moneternya dengan mulai fokus pada sasaran tunggal yaitu kestabilan harga.

Gambaran Umum Inflation Targeting Framework (ITF)

Pengertian ITF Inflation targeting framework atau lebih dikenal sebagai ITF merupakan salah satu strategi kebijakan moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada publik mengenai target kuantitatif (kisaran target) dari tingkat inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan, serta adanya pernyataan secara eksplisit bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan tujuan jangka panjang yang utama dari kebijakan moneter. Keutamaan dari ITF adalah adanya komunikasi kepada masyarakat mengenai rencana dan tujuan dari kebijakan moneter, dan bahkan untuk beberapa negara, komunikasi juga menyangkut mengenai mekanisme dalam mencapai tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri juga dilakukan. ITF merupakan kerangka kerja kebijakan moneter yang relatif baru digunakan dan pada awalnya lebih banyak diadopsi oleh negara-negara berbasis industri. Selandia Baru menjadi negara yang pertama kali menerapkan kerangka kerja kebijakan moneter ini pada tahun 1990. Dalam perkembangannya, ITF semakin mendapatkan perhatian dari negara-negara lain yang menghadapi masalah dalam penerapan kebijakan moneter. Untuk saat ini, tidak kurang dari 42 negara, baik negara maju maupun negara berkembang emerging, telah menerapkan ITF sebagai strategi kebijakan mereka. ITF diyakini akan membantu bank sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan harga dengan menentukan sasaran kebijakan moneter secara eksplisit dengan berdasarkan pada proyeksi dan target inflasi tertentu. Terdapat empat prinsip pokok strategi kebijakan moneter dengan ITF. Yang pertama, ITF memiliki sasaran utama, yaitu sasaran inflasi yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian (overriding objective) dan acuan (nominal anchor) kebijakan moneter. Yang kedua, ITF bersifat antisipatif (preemptive atau forward looking) dengan mengarahkan respons kebijakan moneter saat ini untuk pencapaian sasaran inflasi ke depan. ITF juga mendasarkan pada analisis, perkiraan, dan kaidah kebijakan tertentu dalam menerapkan pertimbangan respons kebijakan moneter (constrained discretion). Dan terakhir, penerapan ITF sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat (good governance), yaitu memiliki tujuan yang jelas, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas.

Ruang Lingkup ITF

Penerapan inflation targeting mendasarkan diri pada proyeksi inflasi yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Proyeksi inflasi juga akan menjadi pertimbangan dalam penentuan target inflasi. Dalam penetapan target inflasi yang pada akhirnya akan diumumkan kepada publik, harus ditentukan terlebih dahulu jenis inflasi yang ditargetkan. Untuk pemerintah, inflasi yang ditargetkan biasanya berupa inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen), sementara bagi bank sentral, inflasi yang ditargetkan adalah inflasi inti karena bank sentral

sebagai otoritas moneter hanya mampu mengontrol inflasi inti. Penerapan inflation targeting juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang memungkinkan stakeholder melakukan evaluasi dan komunikasi mengenai kinerja bank sentral dalam pencapaian sasaran tunggal kestabilan harga yang ditunjukkan dengan tingkat inflasi yang rendah. Hal ini dilakukan dengan melakukan disclose terhadap laporan kinerja sekaligus laporan keuangan bank sentral.

Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Berbasis ITF

Penerapan full-fledged inflation targeting (FFIT) mendasarkan pada lima pilar, yaitu komitmen lembaga untuk menjaga stabilitas harga, tidak adanya dominasi fiskal, independensi instrumen kebijakan, dan transparansi dan akuntabilitas kebijakan, serta tidak adanya nominal anchor .¹⁰ Lima pilar di atas yang akan mendukung kesuksesan penerapan inflation targeting . Sementara itu, keberhasilan pencapaian target inflasi dalam kerangka inflation targeting akan sangat mempengaruhi kredibilitas bank sentral. Dengan demikian, lima pilar ini juga akan berpengaruh pada kredibilitas bank sentral. Secara jelas, lima pilar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Komitmen lembaga untuk menjaga stabilitas harga

Komitmen lembaga untuk menjaga kestabilan harga ditunjukkan dalam bentuk perubahan bank sentral menjadi lembaga yang independen dengan pemberian fungsi kontrol yang penuh dalam memilih dan menetapkan instrumen-instrumen kebijakan moneter.

2. Tidak adanya dominasi fiskal

Penghapusan dominasi fiskal yang bersifat tiba-tiba merupakan syarat mutlak dalam penerapan target inflasi. Sistem keuangan yang baik juga merupakan syarat jika ITF akan digunakan sebagai kerangka kebijakan moneter.

3. Independensi instrumen kebijakan

Independensi instrumen kebijakan terkait dengan komitmen lembaga yang ada untuk menjaga stabilitas harga. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian independensi kepada bank sentral. Independensi instrumen yang dimaksud adalah kebebasan dan kemandirian bank sentral untuk memilih instrumen kebijakan moneter dari intervensi pemerintah

4. Transparansi dan akuntabilitas kebijakan Transparansi dan akuntabilitas kebijakan terkait dengan kemudahan publik untuk mendapatkan informasi dan membaca stance kebijakan yang akan diterapkan oleh bank sentral.

5. Tidak adanya nominal anchor atau jangkar nominal Adanya jangkar nominal yang lain akan menyebabkan pencapaian target inflasi

menjadi tidak fokus. Jangkar nominal merupakan sasaran yang akan dituju.

Penerapan ITF di Indonesia

Bank Indonesia dan Inflasi Tujuan Bank Indonesia,

sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 pasal 7 adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adanya amanat ini semakin menegaskan peran bank sentral dalam perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia dapat lebih fokus dalam pencapaian sasaran tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi. Tingkat inflasi tercermin dari naiknya harga barang-barang secara umum. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. BI hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan, sedangkan tekanan inflasi dari sisi penawaran (bencana alam, musim kemarau, distribusi tidak lancar, dan lainnya) sepenuhnya berada di luar pengendalian BI. Dengan demikian, adanya kerja sama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah, maupun swasta menjadi penting untuk mencapai kestabilan rupiah. Pengendalian inflasi melibatkan tidak hanya otoritas moneter, tetapi juga fiskal, pemerintah dan pengambil kebijakan lainnya. Tanpa dukungan dan komitmen dari keseluruhan elemen, tingkat inflasi yang sangat tinggi selama ini akan sulit dikendalikan.

Pengendalian nilai tukar juga dilakukan dengan sistem free float exchange rate. Dalam sistem ini, nilai tukar rupiah diserahkan pada mekanisme pasar melalui permintaan dan penawaran. Bank Indonesia hanya menjaga volatilitas nilai tukar agar tidak terlalu fluktuatif. Dengan demikian BI memiliki batas (band) tersendiri untuk nilai tukar sehingga pada saat nilai tukar melebihi batas, BI akan melakukan intervensi melalui pasar.

Perubahan Base Money Menuju ITF

Kerangka kerja kebijakan moneter yang diterapkan sejak masa krisis hingga tahun 1999 pada awalnya ditujukan untuk menyerap kembali kelebihan likuiditas di perbankan akibat tindakan bail out terhadap perbankan pada saat krisis dalam bentuk BLBI. Kerangka ini pada saat itu diformalkan sebagai bagian dari proses restrukturisasi dan pemulihan ekonomi dalam program IMF. Pendekatan ini dipandang sebagai langkah yang tepat untuk mengatasi dampak krisis pada saat itu.

Secara umum, kebijakan moneter yang sehat memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Bersifat antisipatif (forward looking) karena adanya lag kebijakan moneter;
- 2) Hanya memiliki satu nominal anchor;
- 3) Mengikatkan diri pada suatu rule , tetapi cukup fleksibel dalam operasionalisasi (constrained discretion); dan
- 4) Sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance , yaitu memiliki tujuan yang jelas, transparan dan berakuntabilitas.

Kerangka Kebijakan Moneter Berbasis ITF

Dengan berakhirnya masa krisis, Indonesia mulai berupaya untuk merubah kebijakan moneter untuk mendapatkan sistem moneter yang kuat terhadap guncangan-guncangan. Sistem moneter yang kuat seharusnya fokus pada pencapaian sasaran tunggal. Hubungan antara uang primer dan inflasi juga semakin dirasakan tidak stabil. Oleh sebab itu, kebijakan moneter dengan target jumlah uang beredar dirasakan tidak tepat lagi. Kajian-kajian mengenai alternatif kebijakan moneter dilakukan sejak tahun 1999, yang dikenal sebagai tahap Inflation Targeting Framework lite . Hal ini didasarkan pada UU no.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang secara implisit telah mengamanatkan penerapan inflation targeting sebagai kerangka kerja kebijakan moneter. Amanat tersebut dapat dibagi menjadi enam.

- 1) Adanya pengaturan dan pemahaman bahwa tujuan utama kebijakan moneter adalah kestabilan harga
- 2) Adanya penetapan dan pengumuman sasaran inflasi kepada masyarakat

Penerapan ITF di Indonesia

- 3) Adanya pengaturan bahwa sasaran inflasi merupakan sasaran akhir dan sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter
- 4) Adanya pemberian independensi kepada Bank Indonesia dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter
- 5) Adanya kewajiban bagi Bank Indonesia untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan moneter kepada masyarakat sebagai perwujudan asas transparansi
- 6) Adanya mekanisme akuntabilitas bagi bank sentral untuk mempertanggungjawabkan dan dinilai kinerjanya dalam pelaksanaan kebijakan moneter oleh DPR.

Sebelum penerapan ITF, sasaran operasional dari kebijakan moneter adalah jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar pada saat itu diyakini mempengaruhi output dan inflasi. Dalam frame kebijakan seperti ini, pencapaian kestabilan harga dilakukan melalui operasi moneter

dengan menjaga jumlah uang beredar. Akan tetapi, hal ini sulit dilakukan karena bank sentral hanya mampu mempengaruhi Mengingat tugas spesifik yang diemban oleh Bank Indonesia seperti tersebut di atas, Bank Indonesia tidak sepenuhnya dapat mengendalikan inflasi, terutama tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran (cost push inflation).¹² Bank Indonesia, melalui kebijakan moneter, hanya dapat mempengaruhi inflasi dari sisi permintaan, seperti investasi dan konsumsi masyarakat. Misalnya, kebijakan kenaikan suku bunga dapat menurunkan pengeluaran masyarakat dan pemerintah sehingga dapat menurunkan permintaan secara keseluruhan yang pada akhirnya dapat menurunkan inflasi.

Selain itu, kenaikan suku bunga ini dapat menguatkan nilai tukar melalui peningkatan (positive) interest rate differential . Demikian juga, Bank Indonesia dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat melalui kebijakan yang konsisten dan kredibel.¹³ Diharapkan bahwa sasaran (target) inflasi Bank Indonesia dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menyusun perencanaan bisnis sehingga inflasi yang terjadi dapat sama atau mendekati sasaran inflasi. Apabila kondisi ini terjadi, maka biaya pengendalian moneter dapat diminimalkan.

Lima hal penting dalam desain ITF adalah operasi moneter, respons kebijakan, indikator kebijakan, dan sasaran akhir. Berikut ini merupakan penjabaran masing-masing bagian-bagian penting dalam desain ITF adalah sebagai berikut

1. Operasi Pengendalian Moneter Operasi Pengendalian Moneter Operasi Pengendalian Moneter Operasi Pengendalian Moneter Operasi Pengendalian Moneter Berbeda dengan pelaksanaan selama ini yang menggunakan uang primer, sasaran operasional pengendalian moneter adalah BI rate.
2. ns Kebijakan Moneter Respons Kebijakan Moneter Respons Kebijakan Moneter Respons Kebijakan Moneter Respons kebijakan moneter (stance kebijakan moneter) dinyatakan dalam besaran BI rate , baik dalam bentuk kenaikan, penurunan maupun tidak berubahnya BI.
3. Indikator Kebijakan Moneter Indikator Kebijakan Moneter Indikator Kebijakan Moneter Indikator Kebijakan Moneter Dalam merumuskan kebijakan moneter, Bank Indonesia akan selalu melakukan analisis dan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi, khususnya prakiraan inflasi, pertumbuhan ekonomi, besaran-besaran moneter, dan perkembangan sektor ekonomi dan keuangan secara keseluruhan, dan juga memperhatikan langkah-langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah
4. Sasaran Inflasi Sasaran Inflasi Sasaran Inflasi Sasaran Inflasi Sasaran Inflasi Sasaran inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank

Indonesia. Penetapan sasaran inflasi tersebut mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

5. Koordinasi dengan Pemerintah Koordinasi dengan Pemerintah Koordinasi dengan Pemerintah

Koordinasi dengan pemerintah menjadi bagian yang paling penting dalam penetapan dan pencapaian target inflasi. Koordinasi juga dimaksudkan agar kebijakan moneter Bank Indonesia sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian dengan tetap menjaga tugas dan wewenang masing-masing

Berikut isue yang terkait dengan ITF

1. EFEKTIFNYA PENERAPAN IRF UNTUK MENERAPKAN TINGGINYA INFLASI

Chili mulai menerapkan tahun 1991. Pada waktu itu, Chili menghadapi persoalan yang serius, yaitu tingginya inflasi akibat dari kebijakan yang ekspansif di masa lalu dan tingginya harga minyak dunia serta kegagalan dalam menciptakan stabilitas nilai tukar. Karakteristik utama dari kebijakan inflation targeting di Chili adalah melakukan pendekatan dis-inflasi sejak awal secara bertahap. Hasilnya sungguh luar biasa, tingkat inflasi bisa diturunkan dalam waktu yang cepat tanpa penurunan output secara signifikan. Kebijakan fiskal yang hati-hati juga memiliki sumbangan besar dalam menurunkan tingkat inflasi. Chili tetap menganut crawling peg dengan tingkat band tertentu sampai 1999, dan sejak itu Chili mengadopsi rezim nilai tukar bebas. Pengalaman Chili menunjukkan bahwa inflation targeting tidak harus dilakukan dengan membebaskan nilai tukar sejak awal. Setelah membebaskan nilai tukar peso pada bulan Desember 1994, Bank Sentral Meksiko mencoba menjaga monetary targeting untuk beberapa tahun. Tetapi karena adanya ketidakstabilan hubungan antara uang inti dan inflasi, akhirnya Meksiko mengadopsi inflation targeting secara bertahap mulai tahun 1999. Di Brasil, setelah menerapkan real plan pada tahun 1994, inflasi bisa diturunkan secara cepat yaitu dari sekitar 2000 persen menjadi hanya 1,5 persen pada tahun 1998. Sayangnya pemerintah Brasil tidak mampu melakukan reformasi fiskal, sehingga menimbulkan spekulasi nilai tukar yang hebat pada akhir 1998, yang berlanjut menjadi kebangkrutan ekonomi pada awal 1999. Menyadari hal ini, kemudian Bank Sentral mengadopsi inflation targeting pada bulan Juni 1999. Keberhasilan Chili banyak mengilhami negara berkembang lainnya untuk mengadopsi inflation targeting. Korea Selatan mulai mengadopsi pada April 1998. Dimana sebelumnya Korea menerapkan kebijakan moneter dengan agregat moneter sebagai sasaran antara (monetary targeting). Namun

dengan semakin kompleksnya sektor keuangan, agregat M2 menunjukkan kecenderungan ketidakstabilan. Krisis keuangan Asia yang memaksa ditinggalkannya nilai tukar tetap, mendorong Korea untuk menerapkan inflation targeting. Langkah ini kemudian diikuti oleh beberapa negara Asia Timur lainnya seperti Philipina (2002) dan Thailand (2000).

2. MASIH ADA KELEMAHAN DALAM PENERAPAN ITF

Galbraith (1997) memberikan komentar atas penelitian Bernanke dan Mishkin (1997) bahwa ITF berjalan atas pondasi yang lemah dimana para ahli ekonomi masih belum sepakat tentang teori yang melatarbelakangi ITF yakni Non-Accelerating- Inflation Rate of Unemployment (NAIRU). Selain itu, ITF hanya membuat bank sentral tidak peduli kepada besaran kinerja ekonomi makro lain yang penting yakni output dan pengangguran karena menjadikan inflasi sebagai satu-satunya jangkar nominal untuk menentukan kebijakan moneter yang diambil. Selain itu, dari klaim capaian ITF yakni rendahnya inflasi di Negara ITF, sebagaimana disampaikan sendiri oleh Bernanke dan Mishkin (1997), telah terjadi sebelum penerapan ITF sehingga tidak bisa dianggap sebagai capaian dari penerapan ITF.

Dari sudut transparansi yang menjadi fitur utama, ITF juga mendapatkan sorotan tajam. Friedman (2004) menyatakan bahwa ITF justru tidak transparan karena Bank Sentral negara ITF pada kenyataannya tetap memperhatikan besaran makro ekonomi selain inflasi seperti output, tingkat pengangguran atau nilai tukar. Sementara dalam penyampaiannya kepada publik hanya terbatas kepada besaran target inflasi yang ingin dicapai.

Sementara itu Stiglitz (2008) dalam sebuah artikel mengatakan bahwa dewasa ini inflasi di banyak negara terjadi karena kenaikan harga pangan dan energi dunia. Upaya meredam inflasi tersebut dengan menaikkan suku bunga pada negara yang menerapkan ITF tidak dapat menyelesaikan masalah karena sumber inflasi merupakan imported inflation. Dalam kondisi seperti itu maka kenaikan suku bunga justru akan membuat perekonomian berjalan lebih lambat dan semakin tidak berdaya untuk mengatasi permasalahan pangan dan energi.

A. Pilihan Ganda

1. Terdapat empat prinsip pokok strategi kebijakan moneter dengan ITF, yaitu...
 - a. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan output, dan kebijakan harga

- b. Indexing, policy stance, sasaran antara, dan tujuan akhir
 - c. Sasaran utama, bersifat aspiratif, berdasar pada analisis, dan good governance
 - d. Tujuan akhir, sasaran utama, bersifat aspiratif, dan kebijakan output
2. Penggunaan tingkat inflasi sebagai target akan membuat kebijakan moneter menjadi kaku atau rigid, kekakuan ini akan menuntut adanya disreccion atau penyesuaian-penyesuaian responsive pada pelaksanaan kebijakan. Disreccion ini dapat menyebabkan?
- a. Terjadinya kestabilan output yang akan menaikkan pertumbuhan ekonomi
 - b. Terjadinya ketidakstabilan output yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi
 - c. Terjadinya kestabilan input, yang akan menyebabkan ekonomi menguat
 - d. Terjadinya ketidakstabilan input, yang akan melemahkan perekonomian.
3. Penerapan ITF di banyak Negara hanya memiliki satu tujuan dan maksud yaitu
- a. Kestabilan ekonomi
 - b. Kesejahteraan rakyat
 - c. Inflasi
 - d. Persaingan ekonomi
4. Tujuan bank Indonesia untuk memelihara kestabilan nilai rupiah telah diamanatkan dalam undang-undang tentang bank Indonesia, yaitu....
- a. UU No.23 Tahun 1990
 - b. UU No.3 Tahun 2004
 - c. UU No.3 Tahun 1999
 - d. UU No.23 Tahun 2004
5. Kebijakan moneter yang sehat memiliki karakteristik secara umum, diantaranya yaitu.....
- a. Hanya memiliki satu nominal anchor
 - b. Bersifat rigid
 - c. Mengikatkan diri pada banyak rule
 - d. Tidak sesuai dengan good corporate governance

B. Essai

1. Mengapa dalam penerapan inflation targeting inflasi yang ditargetkan pemerintah adalah indeks harga konsumen, sedangkan untuk bank sentral adalah inflasi inti?
2. ITF sebagai kerangka kebijakan moneter memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan kebijakan moneter lainnya, sebutkan!
3. Penerapan full-fledged inflation targeting (FFIT) mendasar pada lima pilar yang akan sangat mempengaruhi kredibilitas bank sentral, sebutkan!
4. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi. Tingkat inflasi tercermin dari naiknya harga barang-barang secara umum. adapun factor yang mempengaruhi inflasi, sebutkan!
5. Dalam inflasi ada yang disebut dengan inflasi inti dan inflasi non inti, perbedaan keduanya adalah dilihat dari penyebabnya, sebutkan!

PERTEMUAN 9 MODUL 15

INFLASI

Tujuan: Mempelajari aspek Inflasi

Capaian Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, mahasiswa mampu memahami:

A	Pendahuluan
B	Gambaran umum
C	Inflasi di Indonesia
D	Inflasi daerah

Pengertian Inflasi

Pengertian Inflasi Pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga-harga. secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.

Dalam inflasi harus terkandung unsur kenaikan harga, dan selanjutnya kenaikan harga tersebut adalah harga secara umum. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut sebagai inflasi. Hal ini penting untuk membedakan kenaikan harga atas barang dan jasa tertentu. Misalnya, meningkatnya harga beras atau harga cabe merah saja belum dapat dikatakan sebagai inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum, artinya inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan (atau dikonsumsi) dalam suatu perekonomian. Kata kunci kedua adalah terus menerus, kenaikan harga yang terjadi karena faktor musiman, misalnya, menjelang hari-hari besar atau kenaikan harga sekali saja dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan juga tidak dapat disebut inflasi karena kenaikan harga tersebut bukan Δ masalah kronis Δ ekonomi.

Laju inflasi pada umumnya dinyatakan dalam angka persentase (%) . Laju inflasi dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Menurut Wikipedia, inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah 10%; inflasi sedang antara 10 - 30%; dan inflasi

berat antara 30 -100% per tahun; dan hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Penghitungan Inflasi

Penghitungan inflasi tidak sesederhana menghitung kenaikan satu jenis barang atau jasa. Dalam hal suatu perekonomian sudah cukup berkembang dan barang serta jasa yang dikonsumsi masyarakat sudah sangat beranekaragam, maka penghitungan inflasi dapat menjadi sangat kompleks.

Untuk menghitung angka laju inflasi jenis ini terlebih dahulu dilakukan penghitungan angka indeks dengan menggunakan sejumlah barang dan jasa yang dipergunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Jumlah barang dan jasa yang dipergunakan dalam penghitungan angka indeks tersebut berbeda dari satu negara dan negara yang lain dan juga dari waktu ke waktu dalam satu negara tertentu, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi konsumen atau masyarakat yang bersangkutan. Contoh : di Indonesia pada awalnya hanya dipergunakan sembilan bahan pokok (yang meliputi pangan, sandang, dan perumahan) yang dikonsumsi masyarakat. Dalam perkembangannya jumlah barang dan jasa tersebut berkembang menjadi semakin banyak dan tidak hanya meliputi sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup antara lain jasa kesehatan dan pendidikan.

Selain dihitung berdasarkan IHK, inflasi juga dapat dihitung berdasarkan Indeks Biaya Hidup (IBH), Indeks Harga Produsen (IBP), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), atau juga dapat dihitung dengan deflator Produk Domestik Bruto (PDB deflator). Misalnya, untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa kebutuhan hidup dipergunakan Indeks Biaya Hidup (IBH), untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa perdagangan dikenal Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), untuk mengukur perubahan harga bagi produsen dikenal adanya Indeks Biaya Produsen (IBP), untuk mengukur perubahan harga properti dihitung indeks harga properti, serta angka inflasi yang dihitung dengan deflator Produk Domestik Bruto (Deflator PDB).

Teori tentang Inflasi

Teori Kuantitas

Teori kuantitas pada dasarnya merupakan suatu hipotesis tentang faktor yang menyebabkan perubahan tingkat harga ketika kenaikan jumlah uang beredar merupakan faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Teori kuantitas uang juga terkait dengan teori tentang :

- (1) proporsionalitas jumlah uang dengan tingkat harga,
- (2) mekanisme transmisi moneter,
- (3) netralitas uang, dan

(4) teori moneter tentang tingkat harga.

Ahli ekonomi moneter yang menganut teori kuantitas dalam perkembangannya lebih dikenal dengan ahli ekonomi yang beraliran Monetaris. Salah satu tokoh aliran monetaris ini adalah ekonom Milton Friedman. Milton Friedman adalah ekonom yang menyempurnakan teori kuantitas dan memformulasikan lebih lanjut teori kuantitas uang serta menyusun teori tentang permintaan uang.

Teori permintaan uang pada dasarnya menyatakan bahwa permintaan uang masyarakat ditentukan oleh sejumlah variabel ekonomi yang antara lain pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan tingkat harga.

Teori Keynes

Ekonom Keynesian menyatakan bahwa teori kuantitas tidak valid karena teori tersebut mengasumsikan ekonomi dalam kondisi full employment (kapasitas ekonomi penuh). full employment (kapasitas ekonomi penuh). Dalam kondisi kapasitas ekonomi yang belum penuh, maka ekspansi (pertambahan) uang beredar justru akan menambah output (meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja) dan tidak akan meningkatkan harga. Lebih lanjut dikatakan bahwa uang tidak sepenuhnya netral, pertambahan uang beredar dapat mempunyai pengaruh tetap (permanen) terhadap variabelvariabel riil seperti output dan suku bunga.

Dalam pengertian umum dapat dikatakan bahwa inflasi terutama timbul karena jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian melebihi jumlah uang beredar yang diminta atau diperlukan oleh perekonomian bersangkutan. Pengertian tersebut tidak mengatakan bahwa tidak terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan laju inflasi. Banyak faktor lain yang dapat menjadi penyebab timbulnya inflasi, tetapi inflasi terutama disebabkan oleh jumlah uang beredar atau likuiditas yang berlebihan.

Teori Strukturalis

Menurut teori ini ada dua masalah struktural di dalam perekonomian negara berkembang yang dapat mengakibatkan inflasi. Pertama, penerimaan ekspor tidak elastis, yaitu pertumbuhan nilai ekspor yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh terms of trade yang memburuk dan produksi barang ekspor yang kurang responsif terhadap kenaikan harga. Dengan melambatnya pertumbuhan ekspor, maka akan terhambat kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan. Seringkali negara berkembang melakukan kebijakan substitusi impor meskipun dengan biaya yang tinggi dan mengakibatkan harga barang yang tinggi sehingga menimbulkan inflasi. Kedua, masalah struktural perekonomian negara

berkembang lainnya adalah produksi bahan makanan dalam negeri yang tidak elastis, yaitu pertumbuhan produksi makanan dalam negeri tidak secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita sehingga harga makanan dalam negeri cenderung meningkat lebih tinggi daripada kenaikan harga barang-barang lainnya. Hal ini mendorong timbulnya tuntutan kenaikan upah dari pekerja sektor industri yang selanjutnya akan meningkatkan biaya produksi dan pada gilirannya akan menimbulkan inflasi. Sementara itu, proses inflasi, dalam prakteknya, kemungkinan dapat mengandung aspek-aspek dari ketiga teori inflasi tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan Inflasi

Inflasi Permintaan

Inflasi permintaan adalah inflasi yang timbul sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran domestik dalam jangka panjang. Tekanan inflasi dari sisi permintaan akan timbul apabila permintaan agregat berbeda dengan penawaran agregat atau potensi output yang tersedia. Yang dimaksud dengan permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi dan investasi dalam suatu perekonomian.

Inflasi Penawaran

Jenis inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. Termasuk dalam jenis inflasi ini adalah inflasi yang disebabkan faktor penawaran lainnya yang memicu kenaikan harga penawaran atas suatu barang (termasuk barang-barang yang harus diimpor), serta harga barang-barang yang dikendalikan oleh Pemerintah. Contoh : adanya kenaikan harga minyak dunia, harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Di samping itu, inflasi juga disebabkan oleh faktor alam misalnya, gagalnya panen atau panen yang berlebih, faktor-faktor sosial ekonomi, misalnya, adanya masalah atau hambatan dalam distribusi suatu barang, atau faktor-faktor yang timbul karena kebijakan tertentu, misalnya, karena adanya kebijakan tarif, pajak, pembatasan impor, atau kebijakan lainnya.

Inflasi Ekspektasi

Faktor ketiga yang menyebabkan inflasi adalah ekspektasi. Faktor yang menyebabkan inflasi tidak hanya oleh faktor permintaan dan penawaran. Inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspektasi para pelaku ekonomi atau yang sering disebut inflasi ekspektasi. Inflasi ekspektasi sangat berperan dalam pembentukan harga dan juga upah tenaga kerja.

Ekspektasi inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspektasi pelaku ekonomi yang didasarkan pada perkiraan yang akan datang akibat adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Misalnya, dengan adanya kebijakan moneter ketat yang dilakukan oleh otoritas

moneter pada saat ini, pelaku usaha akan mengambil keputusan usahanya didasarkan ekspektasi mereka terhadap dampak kebijakan moneter ketat tersebut pada masa yang akan datang.

Dampak Inflasi

Sebagai akibat kenaikan harga barang dan jasa, maka nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin lemah. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi akan berakibat negatif terhadap suatu perekonomian secara keseluruhan. Namun, penurunan nilai mata uang sebagai akibat inflasi dampaknya tidak akan sama terhadap seluruh masyarakat. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap, misalnya, pegawai negeri, adalah kelompok masyarakat yang menderita akibat inflasi. Kelompok masyarakat berpendapatan tetap tersebut akan menderita karena secara riil pendapatannya akan menurun atau menjadi lebih kecil. Sementara kelompok masyarakat lainnya yang mempunyai kemampuan untuk melindungi diri tidak menerima beban yang sama sebagai akibat adanya inflasi.

Inflasi akan mengakibatkan merosotnya daya beli suatu mata uang. Dengan kata lain, secara riil nilai suatu mata uang menjadi lebih kecil dari nilai nominalnya. Hal tersebut lebih lanjut akan berpengaruh terhadap transaksi ekonomi dan alokasi sumber daya yang ada dalam perekonomian yang bersangkutan.

Pengendalian Inflasi

Untuk dapat mengendalikan laju inflasi, tentunya perlu diketahui faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Bertitik tolak dari faktor-faktor penyebab inflasi yang telah didiskusikan pada bagian sebelumnya, maka untuk mengendalikan inflasi perlu kebijakan yang sesuai dengan faktor penyebabnya. Untuk mengatasi inflasi permintaan, karena faktor penyebabnya adalah kelebihan uang beredar, maka kebijakan yang sesuai adalah kebijakan moneter. Sementara, itu untuk mengatasi inflasi yang disebabkan oleh faktor penawaran, maka kebijakan yang sesuai adalah kebijakan fiskal atau kebijakan ekonomi lainnya. Namun, untuk mengendalikan laju inflasi dapat dilakukan dengan lebih efektif, maka diperlukan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, maupun kebijakan lainnya dengan sebaik-baiknya.

Inflasi di Indonesia

Penghitungan Laju Inflasi di Indonesia

Pengertian inflasi sebagaimana dipahami oleh masyarakat secara luas adalah inflasi yang dihitung berdasarkan suatu indeks yang disebut

sebagai Indeks Harga Konsumen atau yang lebih sering disebut sebagai inflasi IHK. Angka IHK dihitung berdasarkan survei terhadap harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga IHK adalah angka yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut.

Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum selama periode pengamatan (bulan, kuartal, dan tahun). Tingkat inflasi dihitung dengan IHK, yaitu dengan membandingkan IHK pada tahun dasar dengan IHK periode pengamatan.

IHK Indonesia tersebut disusun berdasarkan indeks bulanan sehingga inflasi bulanan didefinisikan sebagai perbandingan IHK pada bulan periode tertentu dengan IHK bulan sebelumnya.

Perkembangan Inflasi di Indonesia

Laju inflasi di Indonesia telah mengalami dinamika dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ekonomi sejak awal kemerdekaan Indonesia. Laju inflasi yang tercatat secara teratur dalam berbagai terbitan sejak proklamasi kemerdekaan adalah sejak tahun 1953. Perhitungan dan pencatatan laju inflasi tersebut dilakukan oleh Biro Pusat Statistik atau yang sekarang dikenal sebagai Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS.

Inflasi sebagaimana dikenal masyarakat pada saat ini adalah angka inflasi yang dihitung berdasarkan suatu angka indeks, yang dikenal sebagai indeks harga konsumen (IHK). Angka indeks ini disusun berdasarkan survei biaya hidup yang dilakukan oleh BPS.

Inflasi 1953 - 1965

Perkembangan laju inflasi di Indonesia pada 1953 s.d. 1965 dipresentasikan pada Tabel 4 Laju inflasi dihitung berdasarkan perubahan indeks harga konsumen. Tabel tersebut menunjukkan bahwa, laju inflasi telah mengalami laju pertumbuhan yang sangat pesat, terutama mulai dari tahun 1960 sampai tahun 1965.

Inflasi 1966 - 1970

Dengan membaiknya situasi politik, pada 1967 pemerintah mulai melakukan kebijaksanaan yang lebih diarahkan pada usaha-usaha untuk menyetabilkan perekonomian nasional, khususnya kebijaksanaan untuk menekan laju inflasi. Inflasi mulai memperlihatkan perkembangan yang lebih baik dan pada akhir tahun 1970 inflasi telah berhasil ditekan menjadi di bawah 10%.

Inflasi 1971 - 1997

Kebijakan stabilisasi ekonomi yang telah dijalankan sejak tahun 1968 berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat harga sehingga tingkat harga terus menunjukkan tendensi penurunan yang sangat signifikan. Namun demikian, perkembangan tersebut mengalami gangguan pada akhir tahun 1972 yang ditunjukkan dengan tingkat inflasi yang tinggi sehingga mencapai 25,7% selama tahun 1972. Kenaikan inflasi yang tinggi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan indeks bahan makanan, khususnya indeks harga beras (harga beras naik 88%) karena panen yang kurang baik sebagai akibat musim kemarau yang panjang.

Kenaikan laju inflasi terus berlanjut pada tahun 1973-74. Kenaikan inflasi yang tinggi pada tahun ini terkait dengan faktor eksternal karena meningkatnya harga minyak di pasar dunia.

Untuk mengurangi tekanan inflasi, pemerintah melakukan kebijakan stabilisasi pada April 1974.

Selanjutnya, dengan menurunnya harga minyak di pasar dunia pada awal 1980an, maka pada 1983 dilakukan kebijakan deregulasi di sektor moneter dan perbankan.

Secara singkat tersimpul bahwa selama periode 1970-an sampai dengan 1996/97 (sebelum krisis finansial Asia), laju inflasi menunjukkan kecenderungan yang menurun sehingga pada 1996 inflasi hanya 6.63%

Inflasi 1998-2008

Dengan terjadinya krisis finansial Asia yang berdampak sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, maka laju inflasi meningkat tajam dalam tahun 1998 sehingga mencapai 77.6% setahun.

laju inflasi pada 1999 menurun tajam menjadi 2.01%.

laju inflasi selama tahun 2000 sampai dengan 2008 mengalami fluktuasi yang pada dasarnya dapat ditekan pada tingkat yang relatif rendah, tetapi inflasi juga mengalami kenaikan yang tinggi pada waktu tertentu karena adanya kenaikan administered prices

Faktor faktor yang menyebabkan inflasi di Indonesia

1. Faktor Permintaan
kesenjangan perekonomian karena dipacu melebihi kapasitas yang tersedia (output gap).
2. Faktor penawaran
bahwa adanya perubahan harga barang-barang tertentu (misalnya, harga bahan bakar minyak-BBM) dapat mengakibatkan melonjaknya laju inflasi
3. Ekspektasi

Pentingnya ekspektasi dalam mempengaruhi inflasi juga dinyatakan sebelumnya oleh Chopra (1985). Semua faktor yang menyebabkan inflasi tersebut di atas akan digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi di Indonesia.

4. Meningkatnya jumlah uang yang beredar
5. Depresiasi mata uang domestik

Misalnya pada waktu pemerintah masih menganut sistem nilai tukar tetap, setiap pemerintah melakukan devaluasi (misalnya, pada tahun 1978, 1983, dan 1986), maka selalu diikuti dengan lonjak laju inflasi yang lebih tinggi

Pengendalian Inflasi di Indonesia

Bank sentral mempunyai peran yang penting dalam mengendalikan inflasi, dan pada umumnya bank sentral akan berusaha untuk mengendalikan inflasi pada tingkat yang wajar. Pengendalian inflasi di Indonesia yang dilakukan dengan kebijakan moneter telah dilakukan sejak awal tahun 1950 an, terutama sejak diberlakukannya undang-undang tentang Bank Indonesia pada tahun 1953.

Sasaran inflasi yang digunakan adalah inflasi IHK. Ada beberapa alasan yang mendasari dipilihnya inflasi IHK sebagai target bank sentral :

- Pertama, IHK merupakan alat ukur yang paling tepat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena IHK mengukur indeks biaya hidup konsumen.
- Kedua, inflasi IHK relatif lebih populer di masyarakat.

Bank Indonesia mempunyai tiga tugas utama, yaitu:

- i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
- iii) mengatur dan mengawasi bank.

Tiga tugas utama tersebut kelihatannya merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi dalam pelaksanaannya merupakan tiga tugas yang berkaitan erat untuk mencapai efektivitas kebijakan moneter.

Untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan Pemerintah , Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan yang antara lain dengan:

- i) operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah, termasuk intervensi valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah;
- ii) penetapan BI rate sebagai suku bunga acuan; dan
- iii) penetapan kebijakan cadangan wajib minimum bagi bank-bank.

Pelaksanaan pengendalian moneter tersebut tidak hanya dilakukan melalui kegiatan bank-bank yang beroperasi secara konvensional, tetapi juga melalui kegiatan bank-bank yang beroperasi berdasarkan syariah.

Inflasi Daerah

Inflasi yang rendah merupakan kebutuhan semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas karena inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi nasional merupakan cerminan dari inflasi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Inflasi daerah yang rendah dan stabil merupakan ujung tombak untuk tercapainya tingkat inflasi nasional yang rendah dan stabil. Bab ini akan membahas karakteristik inflasi daerah dan pengendalian inflasi daerah.

Karakteristik Inflasi Daerah

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 33 provinsi atau terdiri lebih dari 740 kota dan kabupaten. Banyaknya pulau dan perbedaan karakteristik daerah menjadikan setiap daerah mempunyai karakteristik perekonomian dan karakteristik inflasi yang kemungkinan besar berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di samping karakteristik inflasi yang berbeda, tingkat inflasi daerah juga beranekaragam. Ada daerah yang mempunyai tingkat inflasi lebih rendah daripada inflasi nasional, tetapi cukup banyak juga daerah yang mempunyai inflasi lebih tinggi daripada tingkat inflasi nasional.

faktor gangguan pasokan berpengaruh besar dalam mempengaruhi inflasi 25 di daerah, faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

- Adanya ketergantungan pasokan dari daerah lain dan manajemen stock yang belum optimal;
- Keterbatasan jalur distribusi;
- Produksi bahan makanan dan makanan relatif terbatas;
- Dalam mekanisme pembentukan harga beberapa komoditas pangan, peranan distributor dan pedagang pengumpul di daerah sangat dominan; dan
- Panjangnya rentang distribusi sehingga menjadikan tingginya biaya.

Pengendalian Inflasi Daerah di Indonesia

Upaya untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil terus dilakukan oleh Bank Indonesia dengan berbagai kebijakan dan koordinasi dengan berbagai pihak baik tingkat nasional maupun daerah. Bank Indonesia menyadari bahwa pengendalian inflasi tidak dapat hanya dilakukan dengan penggunaan kebijakan moneter semata, tetapi

memerlukan kebijakan yang lebih komprehensif dari berbagai pihak. Koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik pada tingkat nasional maupun daerah merupakan kunci untuk tercapainya inflasi yang rendah. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Tujuan umum pembentukan atau penguatan tim pengendalian inflasi daerah adalah untuk menurunkan inflasi di daerah sehingga inflasi nasional juga turun pada tingkat yang rendah dan stabil. Tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Menurunkan laju inflasi daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan inflasi nasional yang rendah dan stabil;
2. Meningkatkan kerja sama dan komitmen kelembagaan di daerah dalam pengendalian inflasi di daerah; dan
3. Memantau dan mengendalikan inflasi di daerah dengan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diimplementasikan dan dimonitor.

Pengendalian inflasi daerah dari sisi penawaran antara lain dilakukan sebagai berikut.

1. Menjaga agar pasokan barang tersedia. Untuk itu, perlu terus ditingkatkan kelancaran distribusi sehingga permintaan masyarakat dapat terpenuhi.
2. Mengurangi seminimal mungkin dampak dari administered prices yang antara lain melalui peningkatan efisiensi dan mencari sumber energi alternatif.
3. Mempengaruhi ekspektasi inflasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat menuju ekspektasi inflasi yang rendah.

Soal PILIHAN GANDA 1-5 – Pertemuan 9 Modul 15

1. Teori yang tidak hanya menyatakan bahwa jumlah uang beredar sebagai faktor penyebab perubahan tingkat harga disebut teori?
 - a. Teori Kuantitas
 - b. Teori Keynes
 - c. Teori Strukturalis
 - d. Teori Kualitatif
2. Teori ini ada dua masalah struktural di dalam perekonomian negara berkembang yang dapat mengakibatkan inflasi disebut teori?
 - a. Teori Keynes
 - b. Teori Strukturalis
 - c. Teori Kuantitas
 - d. Teori Kualitatif

3. Dampak Inflasi yang termasuk negatif dibawah ini kecuali?
 - a. Harga barang-barang dan jasa naik.
 - b. Nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun atau berkurang.
 - c. Menimbulkan tindakan spekulasi
 - d. Peredaran / perputaran barang lebih cepat.
4. Yang termasuk Dampak Inflasi yang positif kecuali?
 - a. Pendapatan nominal bertambah, tetapi riil berkurang, karena kenaikan pendapatan kecil.
 - b. Produksi barang-barang bertambah, karena keuntungan pengusaha bertambah.
 - c. Kesempatan kerja bertambah, karena terjadi tambahan investasi.
 - d. Nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun atau berkurang.
5. Dengan membaiknya situasi politik, pada tahun pemerintah mulai melakukan kebijaksanaan yang lebih diarahkan pada usaha-usaha untuk menyehatkan perekonomian nasional, khususnya kebijaksanaan untuk menekan laju inflasi.
 - a. 1970
 - b. 1967
 - c. 1980
 - d. 1972

ESSAY 6-10

6. Inflasi mulai memperlihatkan perkembangan yang lebih baik dan pada akhir tahun inflasi telah berhasil ditekan menjadi di bawah 10%.
7. Kesenjangan perekonomian karena dipacu melebihi kapasitas yang tersedia (output gap) disebut factor...
8. Bank Indonesia mempunyai tiga tugas utama kecuali...
9. Operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah, termasuk intervensi valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah, Penetapan BI rate sebagai suku bunga acuan, Penetapan kebijakan cadangan wajib minimum bagi bank-bank ini termasuk BI dari segi...
10. - Pertama, IHK merupakan alat ukur yang paling tepat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena IHK mengukur indeks biaya hidup konsumen.
 - Kedua, inflasi IHK relatif lebih populer di masyarakat. Maksud dari Kedua penjelasan ini adalah termasuk Inflasi dari segi ...

PERTEMUAN 9 MODUL 16

INFLASI DI INDONESIA KARAKTERISTIK DAN PENGENDALIANNYA

Tujuan: untuk mempelajari karakteristik inflasi dan pengendaliannya di Indonesia

Capaian Pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

A	Pendahuluan
B	Konsep dan Teori Inflasi
C	Inflasi di Indonesia
D	Pengendalian inflasi di Indonesia

1. Pengertian

Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Pada tingkat yang rendah dan stabil, inflasi memberikan efek positif bagi perekonomian. Inflasi yang rendah umumnya disertai suku bunga yang rendah, sehingga mendorong dunia usaha investasi untuk peningkatan produksi yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi menimbulkan ketidakpastian sehingga mengurangi insentif untuk investasi dan konsumsi serta menggerus daya saing ekspor domestic. Inflasi yang tinggi juga menjadi masalah social karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah. Dampak yang paling berpengaruh adalah bagi masyarakat bawah yang dimana penghasilan upah yang diterima akan mengalami perlambatan, sehingga apabila terjadi inflasi yang tinggi banyak buruh yang melakukan aksi menyatakan pendapat kepada pemerintah dengan melakukan demonstrasi yang berisi tuntutan mengenai kenaikan upah. Dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, Bank Indonesia (BI) bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah yaitu yang dimaksudkan menjaga ke stabilan terhadap barang dan jasa mengenai inflasi dan kesetabilan terhadap nilai tukar Negara lain. Dalam tugasnya BI melakukan kebijakan moneter yaitu mengendalikan jumlah uang beredar yang merupakan besaran

moneter. Diperlukan sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah, untuk menciptakan inflasi yang rendah dan stabil.

2. Konsep dan Teori Inflasi

Dalam konsep makroekonomi, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga pada komoditas tertentu yang terjadi karena faktor musiman, seperti halnya dalam mendekati hari-hari penting atau besar yang dimana permintaan tinggi sesaat dan tidak berkelanjutan tidak disebut inflasi. Konsep nilai dari uang (time value of money) menunjukkan seberapa besar nilai uang pada saat ini memiliki nilai yang sama dimasa yang akan datang, dengan asumsi uang tersebut tidak diinvestasikan dalam surat-surat berharga atau disimpan dalam tabungan dan sejenisnya yang menghasilkan bunga. Besarnya tingkat inflasi berakibat tingginya penurunan nilai uang, yang dimaksudkan jumlah barang dan jasa yang dibeli dengan sejumlah rupiah semakin sedikit jika terjadi inflasi di tahun depan.

3. Pengukuran Inflasi

Semakin berkembangnya suatu perekonomian dan semakin banyak barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, maka perhitungan inflasi juga menjadi semakin jelas data yang dihasilkan. Untuk mengukur perubahan dari waktu pada umumnya digunakan suatu angka indeks. Angka indeks disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan digunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi. Semakin besar tingkat penggunaan suatu barang dan jasa, maka akan juga berdampak besar terhadap bobot dalam perhitungan indeks.

Angka indeks yang umum dipakai untuk menghitung besarnya inflasi adalah :

a. Indeks Harga Produsen (IHP)

Indeks Harga Produsen mengukur perubahan harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan. IHP mengukur tingkat harga yang terjadi pada tingkat produsen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Yaitu untuk mengukur perubahan harga untuk transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang besar pertama dan pembeli atau pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama. Di beberapa Negara termasuk Indonesia. IHPB merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu daerah.

c. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Yaitu yang paling banyak digunakan dalam perhitungan inflasi. Indeks ini disusun dari harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jumlah barang dan jasa yang digunakan dalam perhitungan angka indeks tersebut berbeda antara Negara dan antar waktu. Tergantung bagaimana pola konsumsi masyarakat akan barang dan jasa.

Terdapat juga indikator lainnya yang dapat dijadikan nilai ukur perubahan tingkat harga :

a. Produk Domestik Bruto Deflator (PDB Deflator)

Yaitu untuk mengukur perubahan harga dalam perekonomian keseluruhan. Angka deflator tersebut dihitung dengan membandingkan PDB nominal pada suatu tahun tertentu dengan PDB pada tahun tertentu yang ditetapkan. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi local, barang jadi dan jasa.

b. Indeks Harga Aset (IHA)

Perilaku pergerakan harga asset, baik asset berupa property dan saham, dapat dijadikan indikator adanya tekanan terhadap harga secara keseluruhan.

4. Teori Inflasi

Teori mengenai inflasi dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu menegnat paham monetaris dan paham non monetaris :

a. Teori Monetaris

Menjelaskan bahwa tingkat harga secara umum ditentukan dari interaksi antara penawaran (supply) dan permintaan (demand) dari uang. Harga berpengaruh terhadap keseimbangan jika tingkat harga berada diatas tingkat keseimbangan, maka jumlah uang yang diminta masyarakat lebih tinggi dibandingkan jumlah uang yang diterbitkan oleh bank sentral yang mengakibatkan tingkat harga akan turun menuju tingkat keseimbangan, begitupun sebaliknya. Nilai uang ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan uang. Teori permintaan uang berkembang sejalan dengan perkembangan dari fungsi uang yang semula sebagai media pertukaran tetapi juga sebagai penyimpan nilai (investasi). Permintaan uang secara umum ditentukan oleh sejumlah variabel ekonomi, diantaranya, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan tingkat harga. Jumlah uang yang beredar yang melebihi kebutuhan masyarakat akan mendorong peningkatan harga dan memicu jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat maka tingkat harga akan turun dan terjadilah deflasi.

b. Teori Non Monetarist

Dalam teori ini dijelaskan bahwa inflasi bukan hanya fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural. Sebagai contoh permasalahan struktural yaitu seperti adanya fenomena gagal panen yang dimana Indonesia merupakan Negara pertanian yang cukup besar dan apabila terdapat permasalahan dalam pertanian maka akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi seperti halnya gagal panen yang diakibatkan bencana alam, tidak hanya permasalahan dalam pertanian akan tetapi permasalahan luar negeri seperti kekuatan produksi, utang luar negeri, dan nilai tukar asing. Dalam teori Keynes disebutkan bahwa kuantitas uang bukanlah satu-satunya factor penentu tingkat harga karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun tingkat kuantitas uang tetap konstan, inflasi terjadi karena permintaan total (agreat demand) dari barang dan jasa melebihi total penawaran (agreat supply) saat keadaan melebihi output potensialnya.

5. Komponen Inflasi

Karakteristik atau sifat inflasi dibagi berdasarkan perubahan harga dari kelompok barang dan jasa, perubahan inflasi cenderung lebih disebabkan peraturan regulator, dan sebagainya. Inflasi dapat dirinci menjadi dua komponen yaitu inflasi inti (core inflation) dan inflasi non inti :

a. Inflasi inti

Inflasi inti adalah komponen yang cenderung menetapkan atau peristen didalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh factor fundamental, seperti penawaran dan permintaan,, factor eksternal yang berkaitan dengan nilai tukar, harga komoditi, inflasi mitra dagang dan yang terkait factor ekspektasi dari perdagangan dan konsumen. Inflasi inti dikendalikan oleh bank sentral, karena mencerminkan karakteristik perkembangan harga yang bersifat peristen. Ada dua pengertian mengenai inflasi inti yang pertama inflasi yang cenderung menetap didalam setiap pergerakan laju inflasi dan yang kedua inflasi inti sebagai kecenderungan perubahan harga-harga secara umum.

b. Inflasi Non Inti

Inflasi non inti adalah komponen dengan volatilitas cenderung tinggi karena dipengaruhi factor non fundamental yang cenderung bersifat sementara. Dalam inflasi non inti disebabkan oleh gangguan dari penawaran dan diluar kendali otoritas moneter serta bersifat sesaat. Gangguan atau perubahan harga relative dalam hal ini dipandang sebagai inflasi sesaat karena secara teoritis gangguan atau perubahan harga relative tidak

dapat mendorong terjadinya kecenderungan kenaikan harga secara umum yang bersifat persisten, kecuali bila diakomodasi oleh kebijakan moneter.

Komponen inflasi non inti dapat dibagi dalam dua kelompok :

- Pertama, Inflasi komponen bergejolak

Yaitu yang dimana inflasi didominasi oleh pengaruh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti halnya dalam gangguan panen, atau perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional seperti halnya mengenai pemasok bahan pokok makanan sebagai kebutuhan sehari-hari contoh beras, cabe dan sebagainya yang mengalami penurunan produksi karena gangguan dalam penyediaan barang.

- Kedua, inflasi komponen harga yang diatur pemerintah

Yaitu yang didominasi oleh pengaruh kebijakan pemerintah seperti halnya dalam hal kenaikan bahan bakar minyak yang cukup berpengaruh besar terhadap harga barang karena berpengaruh dalam biaya transportasi.

6. Determinasi Inflasi Di Indonesia

Umunya Negara-negara memiliki sejarah tingkat inflasi yang monderet hingga tinggi. Kondisi ini umumnya terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif dan despirasi nilai tukar. Sebagaimana Negara emerging lainnya, tingkat inflasi Indonesia cenderung tinggi dan secara rata-rata mencapai 7,8%. Sebelum krisis keuangan . Karakteristik yang menjelaskan mengapa inflasi diindonesia lebih tinggi dari Negara emerging lainnya dindonesia yaitu :

a. Inersa / persistensi inflasi yang lebih tinggi

Analisis perilaku inflasi menunjukkan bahwa inflasi Indonesia bersifat sangat persisten. Pemberntukan kepsitansi inflasi ini banyak diwarnai oleh inflasi costpush atau suply shocks yang tinggi dan sering terjadi seperti kejutan harga minyak dunia.

b. Dampak output gap terhadap inflasi lebi tinggi

Sebagimana diketahui output gap meerupakan salah satu factor yang mendorong inflasi. Kenaikan output gap menggambarkan tekanan inflasi yang meingkatkan. Rumbaugh (2012) menyatakan bahwa penigkatan inflasi lebih tinggi diindonesia dibandingkan Negara lainnya.

c. Korelasi yang kuat antara factor stabilitas politik dan institusional dengan inflasi.

Instituasi yang lemah mempersulit upaya pemerintah untuk melaksanakan kebijakan menjaga inflasi yang rendah secara

konsisten. Factor public dan institusional memebreikan pengaruh berbed aterhadap inflasi disetiap Negara.

Factor lain yang mempengaruhi inflasi diinonesia dari sisi permintaan adalah permintaan musiman. Berdasarkan survey mekanisme pembentukan harga pada tahun 2001, tambahan inflasi pada periode idul fitri terutama disebabkan oleh tingginya permintaan dan kecenderungan perilaku permintaan yang kurang elastis terhadap harga pada periode tersebut. Faktor lainnya adalah factor doorngan persaingan yang menaikkan harga. Factor penawaran juga berperan penting dalam pembentukan inflasi di Indonesia. Pengelompokan tiga jenis kebijakan pemerintahan yang berpengaruh terhadap harga jual barang dan jasa :

- Pertama, kebijakan administered prices seperti harga bahan bakar minyak (BBM).
- Kedua, kebijakan tarif cukai / pajak untuk beberapa komoditas domestic. Seperti produk rokok dan produk audio-video. Kebujakan tariff juga dapat dikenakan kepada komoditas yang diimpor dari luar negeri melalui penetapan bea masuk dan pajak impor.
- Ketiga, kebijakan penetapan harga seceran tertiiinggi (HET) terutama untuk produk farmasi atau obat-oabat .

Dari ketiga hal tersebut kebijakan yang sangat berpengaruh signifikasn adalah kenaikan BBM yang dimana BBM berdampak terhadap pada biaya produksi listrik yang selanjutnya akan mendesat peningkatan, kenikan BBM secara langsung akan meingkatkan biaya transportasi dan menaikkan biaya transportasi dan menaikkan biaya distribusi barang sehingga mendorong peningkatan harga barang.

Selain factor permintaan dan penawaran, inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspetasi. Ekspetasi tersebut terkait dengan ekspetasi masyarakat dalam pembentukan harga dan upah. Sejumlah riset mengenai ekspetasi inflasi menunjukkan bahwa perilaku ekspetasi sebagian besar masyarakat, khususnya pelaku pasar barang, masih mengacu pada inflasi terkini dan masa lalu.

7. Pengendalian inflasi diindonesia

Sebagi mana dikethauai tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga stbailitas nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi yang rendah dan stabil serta nilai tukar yang terkendali. Dalam hal ini kebijakan monter diarahkan untuk dapat meminimalkan berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan tekanan inflasi termasuk tekanan yang berasal dari nilai tukar. Diterbelakangi untuk memperkuat kebijakan moneter, kernagka kerja kebijakan moneter dengan sasaran akhir kestabilan harga (inflation targeting framework, ITF). Kernagka ITF memiliki karakteristik utama :

- Pertama, kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai target inflasi yang diumumkan secara eksplisit ke masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Dalam kaitan ini target inflasi diterapkan oleh pemerintah setelah berkordinasi dengan Bank Indonesia.
- Kedua, kebijakan moneter diterapkan secara forward looking, dengan merespon terhadap perkembangan inflasi.
- Ketiga, kebijakan moneter dilaksanakan secara transparansi dan akuntabel.

Dalam menghadapi krisis global memberikan pelajaran berharga bagi perumusan kebijakan moneter,

- Pertama, dalam perekonomian terbuka, kebijakan moneter dihadapkan pada berbagai tantangan sehingga instrument yang digunakan perlu berupa bauran instrument.
- Kedua, krisis global menunjukkan bahwa ketidakstabilan makroekonomi juga dapat bersumber dari sector keuangan.
- Ketiga, perlunya secara jelas menempatkan posisi nilai tukar dalam kerangka ITF.

Penerapan enhanced ITF, merupakan format yang ideal untuk perekonomian Indonesia. Subsistensi enhanced dan ITF tercermin pada orientasi pencapaian tujuan akhir kebijakan yaitu inflasi, namun dengan tetap memperhitungkan dinamika perkembangan variabel.

8. Penerapan Metode Sasaran Inflasi di Indonesia

Hal yang paling penting dalam kesepakatan ini adalah adanya kesepahaman akan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Nota kesepakatan ini, antara lain bertujuan untuk :

- Pertama, mengatur proses koordinasi dan menentukan peran dan tanggung jawab pemerintah dan Bank Indonesia dalam penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi.
- Kedua, membentuk dan mengarahkan harapan masyarakat mengenai tingkat inflasi di masa datang.
- Ketiga, memberikan pedoman kepada perilaku pasar dan pembuat kebijakan dalam rangka mencapai dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
- Keempat, memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai komitmen dan mengendalikan antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam mencapai dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil.

- Ke lima, mewujudkan terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas kebijakan ekonomi.

9. Kemanisme Kerja Pengendalian Inflasi

Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, pemerintah dan Bank Indonesia membentuk tim oengendali inflasi (TPI). Dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD). Keberadaan TPID memebrikan optimisme terciptanya stabilitas harga, mengingat kendala-kendala yang kerap memicu inbflasi didaerah hanya dapat fiatasi melalui kebijakan yang bersifat lintas sector dan lintas daerah. Dalam menjaga dan mencapai stabilitas didaerahnya TPID bertugas untuk :

- Menjaga dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian, khusus bahan pokok.
- Mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung poin 1.
- Mendorong terciptanya struktur dan tata niaga yang kopetitif dan efisien.
- Mengelola dampak penyesuaian harag barang dan jasa yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah.
- Mendorong ketersediaan informasi terkait produksi,,stok, dan harga.
- Melakukan koordinasi intensif antara SKPD, KPw Bank Indonesia, kantor K/L terkait didaerah, untuk menjamin produksi, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pokok.
- TPID sebagai wadah koordinasi pengendalian inflasi daerah.

Dalam rangka pengendalia inflasi dilevel provinsi, masing-masing TPID kabupaten/kota akan melakukan koordinasi meelalui rapat koordinasi daerah. Rapat koordinasi nasional merupakan forum kooordinasi tertinggi TPID yang terdiri dari seluruh TPID diitngkat provinsi, kabupaten/kota, TPI pusat dan Pokjanas (Kelompok Kerja Nasional) yang nantinya mengasilkan solusi dan langkah yang perlu ditempuh TPID atas permasalahan terkait dengan stabilitas harga.

10. Isu Berkaitan dengan Inflasi

Dikutip dari media katadata.com bahwa BI (Bank Indonesia) menghitung virus corona sebagai risiko inflasi RI (Republik Indonesia). Wabah virus corona yang berasal dari tiongkok mulai berdampak pada perkonomian Indonesia. BI berpendapat bahwa virus ini masuk dalam ridiko terhadap inflasi yang berasal dari kondisi global. BI memprediksi yekanan inflasi datang dari factor risiko domestic terutama yang berasal dari penyesuaian harag yang diatur pemerintah. BI tetap

menargetkan inflasi tahun 2020 tetap berada diangka 3% plus minus 1%. Salah satu tindakan yaitu memaksimalkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memaantau ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi, koordinasi efektif, menjaga harga. Selain berpengaruh terhadap kondisi pangan dampak dari adanya virus corona juga berpengaruh terhadap pasar keuangan, akan tetapi tidak bersifat permanen. Mata uang Garuda saat ini berada pada level Rp 13.694 per dollar AS. Kegiatan ekspor dan impor juga terpengaruh akibat adanya virus corona yang dimana china merupakan salah satu Negara sebagai salah satu yang bergerak dalam perekonomian global.

Pilihan Ganda Pertemuan 9 Modul 16

1. Tujuan akhir dari terciptanya pembangunan ekonomi adalah
 - a. Kesejahteraan masyarakat
 - b. Kelangsungan hidup
 - c. kemudahan
 - d. kelancaran
2. Undang Undang yang pertama mengatur Bank Indonesia adalah
 - a. UU No 6 Tahun 2009
 - b. UU No 23 Tahun 1999
 - c. UU No 8 Tahun 2009
 - d. UU No 5 Tahun 2005
3. Setiap akhir pekan tarif hotel atau angkutan udara selalu meinggkat merupakan salah satu factor yang disebabkan oleh
 - a. Supply
 - b. Kenyamanan
 - c. demand
 - d. Kesehatan
4. Salah satu konsep yang menunjukkan seberapa besar nilai uang pada saat memiliki nilai yang sama salaha
 - a. Supply
 - b. Time Value of Money
 - c. demand
 - d. ITF
5. Dalam mengukur perubahan indlasi dari waktu ke waktu diperlukan suatu angka ukur yang disebut
 - a. Angka indeks
 - b. Angka bobot
 - c. angka nominal
 - d. angka hasil

Essay mengenai inflasi diindonesia

1. Sebutkan dan jelaskan angka indkes yang umumnya dipakai untuk menghitung besarnya inflasi ?
2. Jelaskan apa yang dimaksud mengenai inflasi yang menganut paham monetaris dan paham moentaris ?
3. Sebutkan dan jelaskan 2 konsep dalam pengertian inflasi inti ?
4. Sebutkan dan jelaskan masing-masing metode pendekatan pengukuran ifnlasi?
5. Sebutkan dampak dari inflasi yang tinggi dan tidak stabil ?

PERTEMUAN 10 MODUL 17 BAURAN KEBIJAKAN BANK SENTRAL :(KONSEPSI POKOK DAN PENGALAMAN BANK INDONESIA)

Tujuan: mempelajari konsep bauran kebijakan Bank Indonesia

Capaian Pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa diharapkan mampu memahami:

A	Pendahuluan
B	Peran bank sentral dalam stabilitas sistem keuangan
C	Bauran kebijakan bank sentral
D	Bauran kebijakan bank Indonesia

Sekitar dua dekade sebelum terjadinya krisis keuangan global 2008/2009, bank-bank sentral di berbagai negara memfokuskan tujuannya, baik karena amanat undang-undang maupun praktik kebijakannya, pada stabilitas harga (inflasi) guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Sekitar dua dekade sebelum terjadinya krisis keuangan global 2008/2009, bank-bank sentral di berbagai negara memfokuskan tujuannya, baik karena amanat undang-undang maupun praktik kebijakannya, pada stabilitas harga (inflasi) guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, sebagian bank sentral juga melakukan stabilisasi nilai tukar sebagai bagian untuk mencapai stabilitas harga yang menjadi tujuan utama. krisis keuangan global 2008/2009 di tahun 2008, tampaknya telah mengubah secara mendasar cara pandang terhadap mandat dan praktik kebijakan bank sentral. Bukan dikarenakan kebijakan moneter berdasar ITF tersebut gagal.

PERAN BANK SENTRAL DALAM STABILITAS SISTEM KEUANGAN Krisis Keuangan Global 2008/2009 dan Bank Sentral

Krisis Keuangan Global 2008/2009 dan Bank Sentral Krisis keuangan global 2008/2009, dan krisis-krisis yang berulang terjadi sebelumnya, telah berdampak sangat buruk terhadap sistem keuangan, perekonomian, kondisi fiskal, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, pengelolaan ekonomi, perilaku agen ekonomi, pengelolaan fiskal, utang luar negeri, dan lain-lain yang tidak tepat juga menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi. akar permasalahan terjadinya krisis itu dari akumulasi utang secara berlebihan seiring dengan peningkatan risk-tasking behavior, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta, telah terbukti dari sejarah panjang krisis

dalam peradaban manusia (Reinhart dan Rogoff, 2009; Kindleberger, 1978). Demikian pula, bahwa prosiklisitas gelembung properti dan boom kredit yang mendahului dan menyebabkan krisis di banyak negara bukanlah hal baru (Claessens dan Kose, 2013). Dalam perkembangannya, krisis ekonomi semakin sering terjadi dan menjadi multidimensi dari krisis nilai tukar, utang, dan sistem keuangan, yang telah terbukti di banyak negara (Bordo, et.al., 2001). Setiap terjadi krisis, secara natural, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah agar krisis tidak terulang kembali. Reformulasi kebijakan ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Reformasi mandat dan pranata. Sejumlah fitur penting dari kerangka kerja yang mendukung kredibilitas kebijakan moneter itu termasuk kejelasan target inflasi yang akan dicapai, model analisis dan prakiraan makroekonomi yang kuat, konsistensi kebijakan suku bunga untuk mencapai target inflasi, proses perumusan kebijakan yang formal dan reguler, publikasi prakiraan inflasi dan komunikasi lainnya untuk menjangkar ekspektasi inflasi. Kerangka kerja dengan analisis dan prakiraan makroekonomi seperti ini dapat dengan mudah diperluas dengan memasukkan keterkaitan makrofinansial, khususnya melalui sistem keuangan dan aliran modal asing, sebagai dasar perumusan bauran kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan manajemen aliran modal asing tersebut.

Mandat Ganda Bank Sentral

Mempunyai definisi terdapat lima aspek penting yang perlu ditekankan. **Pertama**, kesehatan individual lembaga keuangan sangat penting tetapi tidaklah cukup (necessary but not sufficient). Stabilitas sistem keuangan (SSK) terkait dengan bagaimana sistem keuangan berfungsi untuk dan mampu bertahan terhadap gejolak di dalam perekonomian. Karenanya, kuncinya adalah pada keterkaitan makrofinansial dari sistem keuangan dengan aktivitas perekonomian daripada kesehatan individual lembaga keuangan. **Kedua**, sejarah menunjukkan terdapat empat jenis keterkaitan makrofinansial yang sering menyebabkan krisis, yaitu: asset bubbles (baik finansial dan properti), boom kredit, akumulasi utang secara berlebihan, dan pembalikan modal asing secara tiba-tiba atau sudden-stop (Reinhart dan Rogoff, 2009; Claessens dan Kose, 2013). Ketidakseimbangan yang muncul dari empat keterkaitan makrofinansial tersebut sering menimbulkan prosiklisitas keuangan, dengan akselerasi pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi pada masa ekspansi ekonomi, dan sebaliknya tumbuh lebih lambat dan bahkan cenderung memperburuk siklus ekonomi pada masa resesi. **Ketiga**, kebijakan pengendalian gejolak perekonomian domestik dan kemampuan mengantisipasi gejolak dari luar negeri sangat penting untuk mendukung terjadinya SSK. Ekspansi permintaan domestik yang jauh lebih cepat dari

kapasitas perekonomian menyebabkan pemanasan ekonomi tercermin, antara lain, pada tingginya inflasi, dan/atau defisit transaksi berjalan, dan/atau defisit fiskal. **Keempat**, sementara krisis dapat dipicu dari kegagalan suatu lembaga keuangan, meletusnya gelembung prosiklisitas ketidakseimbangan makrofinansial, atau gejolak perekonomian domestik atau internasional, pewabahan contagion menjadi krisis sistemik ke seluruh sistem keuangan dapat terjadi sangat cepat, karena eratnya interkoneksi dan jejaring di dalam pasar dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran (Allen, et. al., 2010; Acemoglu, et.al., 2015). Krisis nilai tukar, misalnya, dapat dipicu karena pembalikan aliran modal asing atau dampak rambatan dari global atau regional, yang kemudian mewabah karena eratnya interkoneksi dan jatuhnya pasar valuta asing (Calvo dan Reinhart, 2000). Semuanya ingin membeli dan tidak ada pemasok valuta asing kecuali bank sentral. **Kelima**, puncak dari krisis secara luas terjadi manakala pewabahan melalui interkoneksi dan jejaring keuangan disertai dengan perilaku latah (herding behavior) dan pewabahan informasi atau information contagion (Acharya dan Yorulmazer, 2003; Bikhchandani dan Sharma, 2001). Kepanikan di antara pelaku pasar, para deposan, atau bahkan lembaga keuangan karena latah dan penyebaran informasi ini semakin memperburuk krisis finansial yang mengakibatkan terjadinya jual obral aset (fire sales), kekeringan likuiditas, dan ambruknya pasar keuangan. Krisis sekuritas hipotik kelas dua, subprime mortgage, di AS menunjukkan bagaimana pewabahan dengan cepat meluas melalui dampak jual obral di dalam pasar keuangan dan keketatan kredit di sistem perbankan (Diamond dan Rajan, 2010).

BAB 3 BAURAN KEBIJAKAN BANK SENTRAL

Sasaran dan Instrumen Bauran Kebijakan

Sasaran bauran kebijakan bank sentral adalah untuk mencapai stabilitas harga dan mendukung stabilitas sistem keuangan (SSK). Instrumen yang digunakan adalah: kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan manajemen aliran modal asing, di samping kebijakan di bidang sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan.

Dengan pemikiran ini, tiga konsepsi penting di bawah ini melandasi bangunan pokok dari bauran kebijakan bank sentral:

Pertama, kebijakan moneter tetap diarahkan untuk mencapai stabilitas harga, dengan memberi pertimbangan yang lebih pada harga aset (finansial dan properti). Seperti diketahui, asset prices bubbles umumnya membesar pada periode ekonomi meningkat yang kemudian pecah sehingga dapat menyebabkan krisis finansial dan resesi ekonomi.

Kedua, kebijakan makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dari perspektif makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong SSK. Kebijakan

ini diarahkan pada risiko prosiklisitas dari keterkaitan makrofinansial sistem keuangan.

Ketiga, manajemen aliran modal asing diarahkan untuk memitigasi risiko prosiklisitas dan risiko sistemik yang muncul dari akumulasi utang luar negeri dan volatilitas aliran modal asing.

Kebijakan Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan

Mengenai kaitan antara kebijakan moneter dan harga properti, terjadi debat menarik tentang apakah keberhasilan Fed dalam mencapai inflasi dan suku bunga yang rendah dalam dua dekade masa Great Moderation sebagai salah satu penyebab krisis finansial di AS. Pandangan Taylor (2010), misalnya, menyatakan bahwa kebijakan Fed pada masa itu terlalu longgar, dengan suku bunga fed-fund rate (FFR) yang terlalu rendah dalam masa yang lama, sehingga mendorong bubble sektor perumahan dan ketidakseimbangan ekonomi lainnya yang kemudian menyebabkan krisis. Sedangkan Bernanke (2010), di sisi lain, tidak sependapat atas pandangan ini. Menurutnya, penyebab utama dari housing bubbles lebih karena berbagai tipe pembiayaan kredit dan sekuritas mortgage yang begitu murah dan menarik, dengan standar perkreditan dan underwriting yang terlalu longgar, dan karenanya solusi yang tepat adalah pengaturan prudensial, bukan kebijakan moneter.

Kebijakan Makroprudensial

kebijakan makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong SSK. Sasaran pokoknya adalah untuk memitigasi risiko yang muncul dari prosiklisitas keterkaitan makrofinansial, serta akumulasi risiko sistemik yang muncul dari interkoneksi dan jejaring di antara dan di dalam lembaga, pasar dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran.

Manajemen Aliran Modal Asing

Manajemen Aliran Modal Asing (MAM) ditujukan untuk mitigasi prosiklisitas dan risiko sistemik dari akumulasi utang luar negeri dan volatilitas aliran modal asing. Kebijakan ini juga untuk mendukung stabilitas nilai tukar serta mencegah risiko terjadinya krisis pembalikan modal asing sudden-stop dan krisis neraca pembayaran. Kedua sasaran ini sangat penting untuk stabilitas moneter dan SSK. Aliran modal asing seperti ini dapat melonjak masuk dalam suatu periode dan berbalik ke luar dalam periode lain, merespon kekuatan secara relatif antara “push factors” dari kinerja ekonomi, suku bunga dan tingkat risiko global di satu sisi, dengan “pull factors” dari kinerja ekonomi, imbal hasil, dan risiko domestik di sisi lain. Banjirnya aliran modal asing ke EMEs dalam periode sejak krisis keuangan global 2008/2009 dan kemudian pembalikannya karena Fed taper tantrum pertengahan 2013 sebagai contoh nyata. Meningkatnya volatilitas aliran modal asing memberikan tantangan yang

sulit bagi bankbank sentral di EMEs dalam menjaga stabilitas moneter dan SSK.

BAB 4 BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Sasaran dan Instrumen Bauran Kebijakan

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan ITF yang mulai diperkenalkan pada tahun 2003 dan kemudian secara penuh ditetapkan sejak pertengahan 2005. Sasaran akhir kebijakan moneter adalah stabilitas harga (inflasi) dengan stabilitas nilai tukar yang konsisten, sehingga mendukung stabilitas makroekonomi secara keseluruhan, termasuk dalam pengelolaan defisit transaksi berjalan dan aliran modal asing. Instrumen utama yang digunakan adalah suku bunga, dengan didukung oleh instrumen kebijakan nilai tukar, MAM, giro wajib minimum dan sejumlah pengaturan prudensial lainnya. Meskipun diarahkan pada sasaran akhir stabilitas harga, namun perumusan kebijakan moneter senantiasa mempertimbangkan kondisi makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Kebijakan Suku Bunga dan Nilai Tukar

Sesuai dengan kebijakan moneter berdasar ITF, keputusan atas kebijakan suku bunga diarahkan agar prakiraan inflasi ke depan berada dalam sasaran inflasi yang ditetapkan. Isunya adalah bagaimana menyikapi pergerakan nilai tukar di pasar yang dapat menyebabkan prakiraan inflasi keluar dari kisaran sasaran inflasi. Kondisi seperti ini sering dijumpai di EMEs ketika menghadapi volatilitas aliran modal asing yang tinggi sejak krisis keuangan global 2008/2009. Tidak seperti di negara maju, stabilitas nilai tukar sangat penting bagi EMEs karena berbagai faktor, seperti pasar keuangan yang belum berkembang, dampaknya yang besar terhadap kondisi perbankan dan SSK, serta rigiditas di dalam perekonomian.

Manajemen Aliran Modal Asing

MAM di Indonesia ditujukan untuk mengkomplementasi, bukan menggantikan, kebijakan makroekonomi yang sehat. Pertahanan terbaik untuk memetik manfaat dan memitigasi dampak negatif dari aliran modal asing adalah dengan memperkuat fundamental ekonomi, kebijakan makroekonomi dan SSK yang pruden, serta akselerasi dari kebijakan reformasi struktural di sektor riil. Berikut ini sejumlah pengaturan MAM yang ditempuh. Dalam periode aliran modal asing yang besar sejak krisis keuangan global 2008/2009 hingga Fed taper tantrum, maka pada tahun 2010 Bank Indonesia memberlakukan pengaturan MAM dalam bentuk six month holding period untuk transaksi pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan batasan maksimum pinjaman luar negeri jangka pendek bank sebesar 30% dari modal. Artinya, dengan memberlakukan waktu tunggu

enam bulan untuk penjualan kembali atas pembelian SBI, aliran modal asing jangka pendek dapat dibatasi dan didorong ke jangka yang lebih panjang.

Kebijakan Makroprudensial

penerapan kebijakan makroprudensial di Indonesia diperlukan dan mampu memperkuat efektivitas kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga (dan nilai tukar) dan SSK. Transmisi kebijakan moneter dapat menjadi lebih efektif, khususnya melalui sistem perbankan, dan SSK juga dapat lebih terjaga. Tanpa saling mendukungnya kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial, respon suku bunga dari sisi kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga (dan nilai tukar) dan mendukung SSK akan jauh lebih besar. Sebagai contoh, untuk mengendalikan pertumbuhan kredit perbankan yang terlalu cepat, diperlukan kenaikan suku bunga yang jauh lebih tinggi apabila tidak disertai dengan pengetatan kebijakan makroprudensial. Dampaknya juga dapat merugikan, tidak saja bagi perekonomian tetapi juga bagi sistem keuangan.

Pranata Kelembagaan

Efektivitas bauran kebijakan bank sentral memerlukan penguatan pranata kelembagaan, baik di bank sentral itu sendiri maupun koordinasinya dengan pemerintah dan otoritas terkait. Di dalam bank sentral, seperti dikemukakan sebelumnya, Bank Indonesia Proses pengambilan keputusan juga diperkuat. Dalam praktik di sejumlah bank sentral, terdapat perbedaan pandangan apakah lebih baik tetap mempertahankan atau mengintegrasikan komite-komite yang berbedabeda untuk kebijakan moneter dan kebijakan SSK. Kohn (2015), misalnya, lebih merekomendasikan untuk tetap mempertahankan komite yang berbeda, karena mempertimbangkan perbedaan sasaran dan fokus, instrumen, maupun akuntabilitasnya.

Kerangka kerja kebijakan moneter berdasar ITF merupakan landasan yang kuat untuk mendukung bauran kebijakan bank sentral tersebut. Kuncinya adalah memperluas kerangka analisis kebijakan dan prakiraan makroekonomi dalam ITF tersebut dengan memasukkan keterkaitan makrofinansial dari sistem keuangan, khususnya asesmen prosiklisitas dan risiko sistemik, serta bauran kebijakan yang konsisten dengan permasalahan yang dihadapi. Sejumlah riset dan analisis juga dikembangkan untuk lebih memahami keterkaitan makrofinansial, khususnya terkait dengan prosiklisitas kredit, properti, utang luar negeri, dan volatilitas aliran modal, serta asesmen risiko sistemik dari sistem perbankan, khususnya interkoneksi dan jejaring finansial di pasar keuangan dan sistem pembayaran. Proses perumusan kebijakan juga diperkuat dengan membentuk komite bersama kebijakan moneter,

Koordinasi yang erat juga dilakukan dengan pemerintah dan otoritas terkait. Di tingkat nasional, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan stabilitas makroekonomi dan SSK yang terjaga, perlu bauran ekonomi nasional yang terdiri dari: kebijakan makroekonomi, kebijakan SSK, dan reformasi struktural. Akselerasi kebijakan reformasi struktural ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi kapasitas produksi nasional (output potensial). Koordinasi kebijakan makroekonomi ditujukan untuk mengelola siklus ekonomi agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan internal, yaitu inflasi yang tinggi, dan ketidakseimbangan eksternal, yaitu defisit transaksi berjalan yang berlebihan. Sementara itu, koordinasi kebijakan SSK ditujukan untuk mengelola siklus keuangan tidak menimbulkan boom bust dan risiko sistemik yang berujung pada krisis finansial. Bauran kebijakan ekonomi nasional seperti ini akan dijelaskan dalam buku Seri Kebanksentralan yang lain.

PILIHAN GANDA

- 1.) Bauran kebijakan bank sentral pada konsepsi pokok dan pengalaman bank Indonesia terjadi krisis keuangan global pada tahun berapakah?..
 - a. 2006-2007
 - b. 2007-2008
 - c. 2008-2009
 - d. 2006-2009

- 2.) Apakah kepanjangan dari SSK pada mandat ganda bank sentral?
 - a. Stabilitas sistem keuangan
 - b. Sistem stabilitas keuangan
 - c. Siklus sistem kesehatan
 - d. Sistem siklus kesehatan

- 3.) Apakah pengertian dari sasaran dan instrumen bauran kebijakan...
 - a. Untuk instrumen pada sistem keuangan
 - b. Untuk mencapai modal asing
 - c. Untuk mencakup pengetahuan jasa keuangan
 - d. Untuk mencapai stabilitas harga dan mendukung SKK

- 4.) Sebutkan salah satu konsepsi penting pada bangunan pokok dari bauran kebijakan bank sentral?
 - a. Kebijakan sistem pembayaran
 - b. Volatilitas modal asing
 - c. Melandasi bangunan pokok
 - d. Kebijakan makroprudensial

- 5.) Merespon kekuatan secara relatif antara suatu kinerja ekonomi harus lebih pada tingkat suku bunga ialah..
- EMes
 - Pull factors
 - MAM
 - SSK

ESSAY

- 1.) Sebutkan & jelaskan pengertian kerangka kerja kebijakan moneter berdasarkan ITF?.
- 2.) Apa saja bauran tentang suatu kebijakan pada bank Indonesia?
- 3.) Jelaskan yang anda ketahui tentang penyebab utama dari housing bubbles?
- 4.) Jelaskan 3 konsepsi penting yang melandasi bangunan pokok dari bauran kebijakan bank sentral?
- 5.) Apakah yang anda ketahui tentang istilah push factor?

PERTEMUAN 18 MODUL 12

MODUL 18 – PERTEMUAN 12

PARIS CLUB

Tujuan: mempelajari aspek terkait Paris Club

Capaian pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

A	Pendahuluan
B	Gambaran umum Paris Club
C	Prinsip dan Ketentuan Paris Club
D	Prosedur Paris Club
E	Penjanjian Agreed Minute
F	Beberapa jenis Rescheduling Paris Club
G	Rescheduling utang luar negeri pemerintah Indonesia melalui Paris Club

Paris Club adalah suatu forum informal yang dibentuk secara spontan pada tahun 1950-an oleh negara-negara terkaya di dunia yang menjadi kreditur resmi. Klub ini bertujuan membantu negara debitur, khususnya yang menerima pinjaman dari negara-negara kreditur, untuk mengatasi kesulitan pembayaran hutang yang tercermin pada kesulitan neraca pembayaran. Upaya yang ditempuh melalui klub ini, yaitu pertemuan antara negara kreditur dan negara debitur untuk melakukan negosiasi pembayaran hutang bilateral Pemerintah (sovereign debt) yang menghasilkan kesepakatan rescheduling hutang. (Rescheduling merupakan salah satu jenis konsolidasi hutang melalui perubahan syarat-syarat pembayaran hutang yang bertujuan untuk meringankan debitur, dan dapat dilakukan baik dengan penangguhan hutang (memperpanjang jangka waktu pembayaran hutang) atau melalui penghapusan hutang). Upaya ini ditempuh apabila negara debitur sudah tidak dapat melakukan pembayaran kembali hutangnya pada waktu jatuh tempo pembayaran sesuai perjanjian pinjaman. Sampai dengan saat ini, rescheduling masih merupakan salah satu solusi terbaik yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan pembayaran hutang. Selain itu, melalui rescheduling

hutang, negara debitur dapat terhindar dari kondisi tidak mampu bayar (default) yang sudah pasti akan mempengaruhi kredibilitasnya di dunia internasional. Sedangkan bagi negara kreditur, Rescheduling akan meningkatkan peranannya dalam menciptakan dan menjaga keseimbangan sistem keuangan internasional yang dilakukan dengan dasar semangat kerja sama internasional. Paris Club beranggotakan 19 negara yang disebut sebagai participating countries antara lain, australia, austria, belgia, brazil, kanada, denmark, firlandia, prancis, jerman, irlandia, israel, italia, jepang, belanda, no rwegia, rusia, korea selatan, spanyol, swedia, swiss, inggris, dan amerika serikat, sebagian besar adalah negara anggota kelompok Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Negara-negara tersebut selain sebagai anggota tetap Paris Club juga merupakan negaranegara yang memiliki saham terbesar dalam lembaga keuangan internasional seperti Internasional Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Dalam sidangsidang Paris Club, selain dari negara kreditur yang menjadi anggota tetap, juga dapat hadir negara-negara kreditur yang memiliki outstanding atau posisi pinjaman dengan negara debitur.

Prinsip

Pada awalnya, Paris Club tidak memiliki prinsip ataupun aturan yang mendasari kegiatannya secara formal dan tertulis. Hampir selama dua puluh tahun prinsip dan prosedur yang digunakan hanya berdasarkan pada perjanjian tertulis (Agreed Minute) pada akhir pertemuan setiap sidang. Baru pada tahun 1970-an forum dialog antara negara-negara maju dan negaranegara berkembang yang dikenal dengan North-South Dialog mendorong supaya prinsip dan ketentuan Paris Club yang berlaku dapat dikodifikasikan. Sekitar pertengahan tahun 1980-an, dalam forum dialog tersebut diidentifikasi tiga prinsip, yaitu imminent default (yang saat ini dipisah menjadi dua prinsip, yakni case by case approach dan conditionality), conditionality, dan burden sharing. Selanjutnya sampai dengan tahun 2001 sebagaimana dijelaskan dalam website Paris Club yang dibentuk pada tahun tersebut, terdapat lima prinsip Paris Club yang menjadi dasar kegiatan operasional, yaitu case by case approach, consensus, conditionality, solidarity, and comparability of treatment.

Prinsip Case by case Approach

Negosiasi rescheduling hutang yang dilakukan dan keputusan yang diambil dalam sidang Paris Club dilakukan melalui pendekatan kasus per kasus yang disesuaikan dengan kondisi negara debitur secara individual. Proses ini merupakan cara atau alternatif solusi masalah hutang yang pragmatis dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara spesifik karena tidak terdapat satu model yang tersedia untuk menyelesaikan masalah hutang yang sama bagi semua negara.

Prinsip Consensus

Keputusan yang diambil dalam sidang Paris Club merupakan hasil konsensus dari semua negara kreditur yang hadir. Semua prinsip dan ketentuan yang ada dilakukan atas dasar prinsip konsensus karena prinsip konsensus mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas dari setiap negara anggota. Negara kreditur yang lebih besar tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk diterapkan terhadap negara kreditur lainnya, misalnya, dalam negosiasi untuk menetapkan jadwal restrukturisasi hutang, pengurangan hutang dan jangka waktu penundaan pembayaran pokok hutang.

Prinsip Conditionality

Prinsip conditionality dikaitkan dengan pelaksanaan program reformasi yang didukung oleh IMF di negara debitur. Dalam hal ini, IMF akan memberikan asesmen mengenai kondisi makroekonomi negara debitur dan neraca pembayarannya yang memerlukan restrukturisasi hutang atau pengurangan hutang. Pelaksanaan prinsip conditionality ini didasarkan pada dua hal, pertama, kebutuhan restrukturisasi yang disebabkan karena negara dimaksud mengalami kondisi kesulitan pembayaran (default), dan kedua, program reformasi melalui program IMF yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan perekonomian.

Prinsip Solidarity

Negara-negara kreditur yang tergabung dalam Paris Club menyatakan setuju dan memiliki komitmen untuk melakukan butir-butir perjanjian kesepakatan yang telah diputuskan dalam perjanjian Paris Club (Agreed minute). Pernyataan setuju dan komitmen para kreditur tersebut selanjutnya dituangkan dalam negosiasi dan perjanjian bilateral yang dilakukan oleh setiap negara kreditur dengan negara debitur. Perjanjian Paris Club tersebut hanya merupakan suatu framework untuk melakukan negosiasi dan perjanjian bilateral. Sedangkan perjanjian bilateral menjadi aspek hukum dalam kesepakatan Paris Club yang dicapai.

Prinsip Comparability of Treatment

Paris Club menerapkan prinsip kesetaraan/perlakuan yang sama untuk semua kreditur Paris Club dengan kreditur non-Paris Club seperti bank dan pemegang obligasi Pemerintah. Tujuan diterapkannya prinsip ini supaya negara debitur tidak menggunakan keringanan pembayaran yang diterima dari suatu negara kreditur untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada kreditur lainnya. Prinsip ini dianut karena sumber pinjaman dari negara-negara berkembang semakin luas baik yang berasal dari kreditur Pemerintah maupun dari kreditur swasta, termasuk bank dan pemegang obligasi. Dalam praktek hal ini cukup sulit dilakukan karena keanekaragaman jadwal hutang itu sendiri, mulai dari perbedaan mata uang, jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan lain sebagainya.

Ketentuan

Implementasi dari prinsip-prinsip Paris Club di atas menghasilkan 4 poin ketentuan yang digunakan untuk menetapkan kesepakatan/keputusan dalam proses negosiasi.

Ketentuan Debt Treated

Tidak semua hutang dari negara debitur dapat direstrukturisasi. Hutang yang dapat diajukan baik untuk di-reschedule jatuh waktu pembayarannya maupun untuk memperoleh pengurangan hutang melalui perjanjian Paris Club adalah hutang yang ditandatangani sebelum tanggal cut off date, dan merupakan hutang bilateral Pemerintah. Hutang tersebut mencakup :

-Hutang Pemerintah, ketika perjanjian dilakukan dengan Pemerintah negara debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban eksternal. Termasuk dalam jenis hutang ini adalah hutang swasta dan hutang dagang berjangka waktu di atas satu tahun yang dijamin oleh Pemerintah.

-Hutang jangka menengah dan panjang. Hutang jangka pendek (hutang yang jatuh tempo setahun atau kurang) tidak tercakup di dalam perjanjian Paris Club karena dapat mengganggu transaksi perdagangan internasional.

-Hutang lainnya yang tidak di-reschedule melalui perjanjian Paris Club adalah hutang yang diterima dari kreditur/lembaga multilateral dan hutang komersial dari kreditur swasta (perbankan dan pemegang obligasi) yang memerlukan perlakuan comparability treatment.

Ketentuan Flow and Stock Treatment

Restrukturisasi hutang mencakup dua cara, yaitu flow and stock treatments. Penekanan rescheduling hutang melalui flow treatment adalah pada suatu periode jatuh waktu pembayaran kembali hutang sebagaimana disepakati dalam perjanjian Paris Club untuk di-reschedule. Sesuai dengan ketentuan, hutang yang dapat di-reschedule adalah hutang yang jatuh tempo dalam periode konsolidasi atau consolidation period tersebut yang pada umumnya merujuk pada periode waktu dilaksanakan program reformasi yang direkomendasikan oleh IMF. Setelah itu, baru dibuat skedul baru pembayaran hutang yang jatuh waktu dalam periode konsolidasi dimaksud. Pada umumnya, standar periode konsolidasi satu tahun. Namun demikian, negara kreditur dapat memperpanjang periode konsolidasi menjadi dua atau tiga tahun.

Ketentuan Payment Terms

Dalam perkembangannya dikenal dua bentuk restrukturisasi pembayaran kembali hutang negara debitur sesuai dengan perjanjian Paris Club.

a). Jangka waktu pembayaran kembali hutang yang lebih panjang. Pada periode awal perjanjian Paris Club, jangka waktu pembayaran

kembali hutang yang disepakati antara pihak negara kreditur dan negara debitur tidak lebih dari 10 tahun (termasuk masa tenggang atau grace period). Selanjutnya, kesepakatan tersebut diperbaharui dengan memberikan periode waktu pembayaran yang lebih panjang kepada negara-negara miskin untuk membayar kembali kewajibannya, yaitu diperpanjang hingga mencapai 23 tahun (termasuk masa tenggang 6 tahun) untuk pinjaman komersial, dan 40 tahun (termasuk 16 tahun masa tenggang) untuk pinjaman Official Development Aid (ODA).

b). Penghapusan hutang. Pada Desember 1994, Paris Club setuju untuk melakukan penghapusan/ pemotongan hutang yang disebut dengan Naples terms, yaitu perlakuan hutang lebih lunak atau concessional dengan memberikan penghapusan hutang sampai 67% atas hutang negara-negara miskin yang merupakan penghutang besar. Dalam perkembangannya, pada November 1996, program penghapusan hutang ditingkatkan sampai dengan 80% atau disebut Lyon terms yang difokuskan bagi negara-negara yang termasuk dalam HIPC's Initiative. Selanjutnya, pada November 1999, berdasarkan persetujuan dari komunitas keuangan internasional dari enhanced HIPC's initiative, para negara kreditur Paris Club setuju untuk meningkatkan lagi penghapusan hutang hingga mencapai 90% atau bahkan lebih apabila sangat diperlukan dan disebut dengan Cologne terms.

Ketentuan Debt Swap Provision

Dalam perjanjian Paris Club juga dapat diberlakukan klausul debt swap, yaitu kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk melakukan pertukaran hutang yang didasarkan pada asas kerelaan dari pihak kreditur. Pada umumnya hal tersebut dilakukan dengan negara Least Developed Countries. Implementasi pertukaran hutang tersebut dilakukan dengan cara penjualan hutang oleh kreditur Pemerintah kepada investor dengan harga diskon, dan kemudian investor tersebut menjual kembali hutang kepada negara debitur dalam mata uang lokal negara debitur dengan imbalan untuk memperoleh saham kepemilikan pada perusahaan lokal (debt for equity swaps), pembangunan sumber daya alam/lingkungan (debt for nature swap), atau untuk membiayai pembangunan/pelaksanaan proyek Pemerintah yang diperlukan untuk pembangunan perekonomian di negara debitur. Untuk memelihara komparabilitas dan solidaritas antar kreditur, jumlah debt swap yang dapat dilakukan ditetapkan pada persentase tertentu dari kewajiban hutang yang dimiliki oleh kreditur.

Prosedur Paris Club

Proses rescheduling Paris Club dimulai manakala suatu negara debitur mengalami kesulitan keadaan ekonomi atau neraca pembayaran yang menyebabkan negara yang bersangkutan mengalami kesulitan atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban untuk membayar hutang luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, negara debitur menyampaikan

permintaan tertulis secara resmi kepada Pemerintah Perancis untuk bertemu dan melakukan negosiasi hutang dengan para kreditur resmi atau official creditor. Permintaan ini dapat dipertimbangkan apabila negara yang bersangkutan telah mencapai kesepakatan dengan IMF menyangkut program penyesuaian ekonominya. Selanjutnya, perundingan dilakukan secara multilateral ketika negara debitur bertemu dengan para kreditur resminya pada waktu yang bersamaan. Negosiasi secara multilateral tersebut dimaksudkan supaya hasil kesepakatan yang dicapai lebih efektif dan dapat memenuhi prinsip dan ketentuan Paris Club yang berlaku. Sekretariat Paris Club melakukan persiapan sebelum perundingan berlangsung. Biasanya dengan meminta informasi dari para kreditur menyangkut jumlah hutang negara debitur. Sekretariat juga membantu debitur untuk menyiapkan permintaannya. Mereka bekerja sama dengan IMF menganalisis kondisi hutang serta menuangkannya dalam proyeksi neraca pembayaran dengan memperhatikan asumsi rescheduling yang dibutuhkan serta menghitung kebutuhan debitur selama mengikuti program IMF. Dokumen yang memuat informasi kemampuan membayar kembali tersebut biasanya disebut dengan "capacity of payment" yang akan digunakan oleh negara kreditur sebagai dasar dalam pertimbangan dalam proses negosiasi. Delegasi negara debitur biasanya diwakili oleh menteri keuangan atau gubernur bank sentral, sedangkan pihak negara kreditur diwakili oleh pejabat tinggi dari kementerian keuangan, ekonomi, atau hubungan internasional. IMF dan World Bank, bank-bank pembangunan regional, seperti Asian Development Bank dan Inter-American Development Bank, serta UNCTAD, berpartisipasi sebagai pengamat atau observer dalam proses siding

Perjanjian Agreed Minute

Bentuk dan Legalitas Perjanjian. Pimpinan sidang, kreditur, dan debitur menandatangani perjanjian, yang tercakup di dalam Agreed Minute. Biasanya, Paris Club membuat dokumen Agreed Minute dalam dua bahasa, yaitu Inggris dan Perancis. Secara legal, Agreed Minute merupakan rekomendasi kepada Pemerintah kreditur dan debitur untuk melakukan perjanjian rescheduling berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Isi dari Agreed Minute tidak bersifat legal. Karena itu, perjanjian ini tidak mengikat. Kreditur dan debitur harus mewujudkan Agreed Minute tersebut dalam bentuk perjanjian bilateral untuk memperoleh legalitas perjanjian atau setiap partisipan meratifikasi Agreed Minute agar bersifat mengikat di bawah hukum internasional.

Memiliki 5 isi poin sebagai berikut:

Pembukaan. Bagian pembukaan dari Agreed Minute berisikan daftar negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yang menghadiri proses perundingan dan mengindikasikan bahwa negara dan lembaga tersebut mengetahui presentasi yang dilakukan pihak debitur mengenai

permasalahan ekonomi yang dihadapi dan usahanya untuk memperbaiki keadaan.

1. Cakupan Hutang. Hutang yang termasuk di dalam perjanjian rescheduling Paris Club adalah hutang Pemerintah negara debitur, termasuk hutang swasta dan hutang dagang komersial yang digaransi oleh Pemerintah negara kreditur atau lembaga yang diakui. Hutang tersebut harus memiliki jatuh tempo pembayaran kembali dengan jangka waktu satu tahun atau lebih, dan terbatas pada perjanjian kredit yang ditandatangani sebelum cut-off date. Sedangkan perjanjian hutang yang ditandatangani setelah cut-off date tidak dapat di-reschedule. Biasanya, cut-off date berkisar antara 6-12 bulan sebelum tanggal perjanjian rescheduling ditandatangani.

2. Periode Konsolidasi. merupakan periode waktu pembayaran kembali hutang yang disetujui untuk di-reschedule sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian Paris Club secara multilateral. Sesuai jadwal pembayaran semula, debitur seharusnya membayar angsuran hutang dalam periode waktu ini. Pada umumnya, periode waktu ini mengacu dan sejalan dengan jangka waktu pelaksanaan program reformasi ekonomi yang dilakukan oleh negara debitur atas rekomendasi dari IMF, yaitu berkisar dari satu sampai dengan tiga tahun. Dewasa ini dalam perkembangannya, Paris Club memberikan opsi rescheduling hutang untuk multi-year rescheduling agreements (MYRAs) dengan periode konsolidasi antara dua-lima tahun.

3. Cakupan Rescheduling. rescheduling Paris Club tidak hanya mengenai hutang pokok, tetapi juga hutang bunga. Atas pertimbangan kesulitan keuangan yang dihadapi debitur, Paris Club dapat me-reschedule 100% hutang pokok dan/ atau hutang bunga. Jangka waktu pembayaran kembali hutang yang di-reschedule dapat dilakukan sampai dengan 10 tahun atau lebih, termasuk masa tenggang berkisar empat-enam tahun.

4. Moratorium tingkat bunga. Perjanjian secara multilateral atau kesepakatan yang tertuang dalam Agreed Minute menetapkan bahwa tingkat bunga moratorium yang dikenakan pada hutang yang di-reschedule didasarkan pada tingkat bunga yang berlaku di pasar, yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral antara negara debitur dan masing-masing negara krediturnya.

5. Implementasi. Perjanjian Agreed Minute merekomendasikan seluruh Pemerintah baik dari negara-negara kreditur yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut maupun Pemerintah negara debitur untuk melaksanakan/mengimplementasikan kesepakatan yang dihasilkan sesuai perjanjian melalui proses negosiasi bilateral antara debitur dan kreditur. Batas waktu akhir yang diberikan untuk implementasi tersebut enam-delapan bulan setelah perjanjian Agreed Minute ditandatangani.

Beberapa Jenis Rescheduling Paris Club

Penyelesaian masalah hutang melalui Paris Club merupakan suatu alternatif penyelesaian masalah manakala suatu negara mengalami kesulitan keadaan ekonomi yang menyebabkan negara tersebut mengalami kesulitan atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban untuk membayar hutang luar negeri yang telah jatuh tempo. Dalam penyelesaian masalah hutang dengan pola rescheduling dapat dilakukan berdasarkan salah satu terms dari beberapa terms yang berlaku dalam perjanjian Paris Club. Pemilihan terms penyelesaian untuk penyelesaian hutang suatu negara didasarkan pada pertimbangan tingkat kemiskinan serta jumlah hutang debitur. Pola rescheduling dapat dilakukan dengan concessional atau non-concessional. Penyelesaian dengan pola non-concessional dilakukan bagi negara-negara berpendapatan menengah ke bawah. Jenis pinjaman yang di-reschedule dengan pola ini adalah pinjaman ODA karena pinjaman tersebut pada dasarnya dinilai sudah cukup lunak dengan masa pembayaran sekitar 20 sampai dengan 40 tahun, termasuk masa tenggang 10-16 tahun.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa jenis rescheduling hutang yang dapat dilakukan berdasarkan pada tingkat kelunakan pembayaran yang dapat diperoleh oleh debitur. Tingkat kelunakan yang dimaksud dapat diukur seperti dari ada atau tidaknya pengurangan hutang (debt reduction), dan perpanjangan waktu yang disetujui oleh kreditur untuk pembayaran kembali hutang oleh debitur. Beberapa jenis rescheduling paris club adalah:

-Classic Terms. Pola rescheduling pembayaran hutang dengan menggunakan Classic Terms merupakan cara standar yang berlaku. Penanganan hutang melalui pola ini dilakukan dengan menjadwalkan kembali periode jatuh tempo pembayaran hutang atau rescheduling tanpa diikuti dengan pemotongan/ pengurangan nilai hutang. Penyusunan jadwal baru pembayaran hutang tersebut mengacu pada perjanjian multilateral Paris Club (MoU) yang ditetapkan sebelumnya. Cakupan jenis hutang yang dapat di-reschedule adalah hutang ODA dan hutang NonODA dengan mengenakan tingkat bunga pasar yang berlaku yang ditetapkan berdasarkan negosiasi antara kreditur dan debitur. Untuk dapat menggunakan pola ini, negara debitur wajib menerapkan program penyesuaian/reformasi ekonomi yang ditetapkan oleh IMF.

-Toronto Terms. Dalam pertemuan negara-negara kreditur yang tergabung dalam Paris Club di Toronto pada Oktober 1988, dicetuskan pola penyelesaian pembayaran hutang dengan mekanisme baru, yaitu dimungkinkan pemberian potongan/penghapusan hutang selain dari penundaan pembayaran kembali. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk dapat lebih membantu negara debitur dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang lebih baik/ringan dibandingkan dengan pola Classic terms yang ditujukan bagi negara-negara miskin untuk mengatasi masalah pembayaran hutangnya. Kesepakatan di antara para

kreditur untuk memberikan potongan hutang tersebut sampai dengan sepertiga atau 33.33% dari nilai hutang (Net Present Value) untuk hutang jenis NonODA.

-Houston Terms. Sampai dengan tahun 1990, negara-negara berpendapatan menengah ke bawah hanya mendapat syarat rescheduling yang standar (classic terms), sementara proposal permohonan pengurangan hutang difokuskan kepada negara-negara dunia ketiga yang miskin. Houston terms menekankan pada negara-negara berpendapatan menengah ke bawah dengan tingkat hutang resmi yang tinggi. Melihat masalah neraca pembayaran yang serius dialami oleh negara-negara tersebut, maka pertemuan para kreditur dalam Paris Club yang juga merupakan negara-negara kelompok G-7 merekomendasikan perbaikan syarat-syarat pembayaran kepada negara-negara tersebut dan dikenal dengan Houston terms sebagai hasil kesepakatan pertemuan yang diadakan di Houston pada September tahun 1990 tersebut.

-London Terms. Pada Desember tahun 1991, para kreditur Paris Club menyetujui untuk melaksanakan pola rescheduling baru atas hutang negara-negara miskin. Pola baru tersebut dinamakan London terms yang meningkatkan porsi pengurangan hutang dari 33.33% (dalam Toronto terms) menjadi 50%. Untuk rescheduling hutang ODA, dilakukan dengan mengenakan tingkat bunga atas hutang yang di-reschedule setidaknya sama lunak dengan tingkat bunga sesuai dengan perjanjian pinjaman pokok/semula yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Jangka waktu pengembalian hutang menjadi 30 tahun termasuk masa tenggang 12 tahun. Sedangkan pengurangan hutang atas nilai present value pinjaman ODA diberikan berdasarkan tingkat bunga yang dikenakan oleh masing-masing kreditur terhadap debiturnya dan dilakukan atas dasar kasus per kasus sebagaimana disetujui oleh pihak kreditur.

-Naples Terms. Pada pertemuan Naples Summit yang diadakan Desember 1994, disepakati bahwa negara-negara miskin yang memiliki masalah hutang memerlukan tambahan bantuan dalam pengurangan hutang. Sehubungan dengan itu, para kreditur Paris Club menyetujui diberlakukannya Naples terms, yang merupakan perbaikan dari London terms dalam pemberian pengurangan hutang dan termin penjadwalan pembayaran hutang. Perjanjian ini memberikan kemungkinan kepada kreditur untuk memberikan pengurangan hutang sampai dengan 67% dari Net Present Value (NPV) hutang komersial atau hutang NonODA. Negara-negara yang dapat menerima pinjaman dengan Naples terms adalah negara-negara yang mendapat pembiayaan IDA dari World Bank (dengan pendapatan perkapita USD755 atau kurang).

-Lyon Terms. Pada pertemuan November 1996, dalam kerangka HIPC's Initiative para kreditur yang tergabung dalam Paris Club menyetujui untuk menaikkan lagi tingkat pemotongan/pengurangan

hutang sampai dengan 80% dari nilai hutang (Net Present Value) untuk membantu negara-negara miskin dengan kondisi beban pembayaran hutang yang tinggi. Pola rescheduling tersebut dikenal dengan Lyon terms. Rescheduling hutang ODA dilakukan dengan mengenakan tingkat bunga atas hutang yang di-reschedule setidaknya sama lunak dengan tingkat bunga sesuai dengan perjanjian pinjaman pokok/semula yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Jangka waktu pengembalian hutang menjadi 40 tahun termasuk masa tenggang 16 tahun. Sedangkan pengurangan hutang atas nilai present value pinjaman ODA diberikan berdasarkan tingkat bunga yang dikenakan oleh masing-masing kreditur terhadap debitemnya dan dilakukan atas dasar kasus per kasus sebagaimana disetujui oleh pihak kreditur.

-Cologne Terms. Pertemuan para kreditur Paris Club yang dilakukan di Cologne pada November 1999 menyepakati untuk meningkatkan kembali bantuan kepada negara-negara debitur yang termasuk dalam Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) dengan meningkatkan pengurangan hutang mencapai 90% (atau lebih jika diperlukan). Untuk dapat menggunakan pola rescheduling ini, negara debitur terlebih dulu memenuhi persyaratan mengikuti pola Naples Terms dan termasuk ke dalam HIPC's Initiative berdasarkan persetujuan IMF dan World Bank. Pemberian pengurangan hutang tersebut dilakukan atas dasar perhitungan suatu lembaga keuangan internasional yang ditunjuk berdasarkan masukan dari para negara kreditur. Berkaitan dengan itu, pertimbangan para kreditur Paris Club untuk turut ambil bagian dalam pemberian pengurangan hutang didasarkan atas kesepakatan dan komitmen bersama seluruh kreditur baik kreditur Pemerintah, kreditur swasta/komersial, dan kreditur multilateral.

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

Gambaran Umum Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia.

Sejak masa Orde Lama hingga sekarang, hutang luar negeri Pemerintah cenderung meningkat. Pemerintah Orde Lama mewariskan hutang luar negeri sebesar USD2,21 miliar (per Juni 1966). Pada akhir tahun 1966 posisi hutang yang tercatat sebesar USD2,01 miliar meningkat menjadi sebesar USD53,86 miliar pada tahun 1997. Kenaikan rata-rata selama kurun waktu 31 tahun tersebut tercatat sebesar 11,20% dengan posisi hutang rata-rata sebesar USD23,55 miliar per tahun.

Pada periode 1970-1980, kondisi perekonomian Indonesia membaik ditandai dengan meningkatnya penerimaan Pemerintah dari minyak dan gas bumi. Pada pertengahan tahun 1970-an, posisi hutang luar negeri Pemerintah melonjak cukup signifikan, yaitu sebesar 36,28% karena adanya kenaikan ekspor migas sehingga meningkatkan credit worthiness Indonesia dan adanya peningkatan hutang Pertamina (Harinowo, 2002).

Kondisi tersebut terjadi kembali pada pertengahan tahun 1986 dan 1987, dimana pada masing-masing periode tersebut hutang luar negeri Pemerintah meningkat sebesar 24,49% dan 21,88%.

Pada periode ini, lonjakan hutang luar negeri didorong oleh faktor-faktor eksternal berupa penguatan mata uang Yen Jepang terhadap Dolar Amerika Serikat dan jatuhnya harga minyak di pasar dunia. Kejatuhan harga minyak di pasar dunia mengakibatkan Pemerintah harus menarik hutang luar negeri yang lebih besar, termasuk di antaranya hutang dari IMF dalam bentuk compensatory financing facility di samping pinjaman Bank Dunia, ADB, dan Pemerintah Jepang dalam bentuk fast disbursing loans (Harinowo,2002).

Memasuki dekade 1990-an terjadi perkembangan pesat kegiatan investasi di Indonesia. Hal ini didorong oleh stabilitas politik dan keamanan, semakin terintegrasinya pasar modal domestik dengan pasar modal internasional, dan semakin kondusifnya iklim investasi domestik. Kepadatan investasi juga didorong oleh peningkatan pinjaman luar negeri.

Pada akhir tahun 1990, posisi hutang Pemerintah berada pada angka USD 45,10 miliar dan selama kurun waktu empat tahun (sampai dengan tahun 1994), posisi hutang tersebut terus menunjukkan peningkatan hingga sebesar USD58,61 miliar. Rata-rata pertumbuhan hutang luar negeri dalam kurun waktu ini mencapai 6,84% dengan puncak pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1994 sebesar 11,73%.

Dalam kurun waktu tiga tahun setelahnya, mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 1997, pertumbuhan hutang luar negeri mulai menunjukkan penurunan. Pada tahun 1995, pertumbuhan hutang luar negeri Pemerintah dapat ditekan hingga 1,66%, demikian juga pada tahun 1996 dan 1997, hutang luar negeri Pemerintah mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,19% dan 2,90%.

Krisis moneter dan ekonomi yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 memaksa Indonesia bekerja sama dengan IMF (International Monetary Fund) untuk memperbaiki perekonomian. Kerja sama dalam bentuk pinjaman tersebut hanya bisa ditempatkan dalam cadangan devisa Bank Indonesia, bukan untuk menutupi kekurangan pembiayaan APBN. Sejak krisis menghantam Indonesia, posisi hutang luar negeri Pemerintah meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 24,97% pada tahun 1998 menggambarkan posisi hutang luar negeri Pemerintah Indonesia yang naik turun sejak periode Orde Baru hingga periode reformasi. Jika pada tahun 1966, posisi hutang luar negeri Pemerintah berjumlah sebesar USD2,01 miliar, angka ini terus meningkat hingga mencapai jumlah sebesar USD53,86 miliar pada masa sebelum krisis tahun 1997. Peningkatan rata-rata dalam kurun waktu 31 tahun tersebut tercatat sebesar 11,20% dan posisi hutang rata-rata sebesar USD23,55 miliar per tahun.

Setelah krisis, hutang luar negeri Pemerintah kembali meningkat yaitu dari USD67,31 miliar pada tahun 1998 menjadi USD75,72 miliar pada tahun 1999 atau meningkat sebesar 12,49%. Jumlah ini sempat menurun pada periode dua tahun sesudahnya, yakni pada tahun 2000 dan 2001 yang masing-masing berjumlah sebesar USD74,89 miliar dan USD69,40 miliar. Dalam kurun waktu dua tahun tersebut, posisi hutang luar negeri Pemerintah turun sebesar 8,34%.

Pada periode dua tahun selanjutnya tahun 2002 dan 2003, hutang luar negeri Pemerintah kembali meningkat masing-masing sebesar USD74,49 miliar dan USD80,90 miliar. Pada tahun 2004, Indonesia memasuki babak baru dengan menghentikan pinjaman IMF sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap hutang luar negeri.

Isu-isu paris club

Menteri Keuangan Perancis Herve Gaymard mengatakan, negara-negara kreditor yang tergabung dalam Paris Club setuju untuk membahas soal moratorium (penundaan pembayaran) utang negara-negara yang terkena bencana tsunami. Paris Club akan mengadakan pertemuan di Paris, dengan isi pembahasan “Kami akan mengusulkan soal moratorium ini. Negara-negara yang tergabung dalam Paris Club sudah setuju untuk membahas soal ini,” kata Gaymard. Gaymard mengatakan, penundaan pembayaran untuk negara seperti Indonesia pada 2005 bisa memberi tambahan sumber (dana) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana. Sementara itu, sumber yang dekat dengan Paris Club mengatakan, pemberian moratorium itu akan sangat berguna bagi Sri Lanka dan Indonesia. Kedua negara ini merupakan negara-negara yang paling parah ketika gempa dan tsunami melanda kawasan Asia pada 26 Desember 2004 lalu. Sumber itu juga menambahkan, tampaknya Paris Club setuju untuk menunda pembayaran atau membekukan sementara tapi tidak untuk menghapuskan utang-utang tersebut. Presiden Uni Eropa, yang juga Perdana Menteri Luxembourg Jean-Claude Juncker mendukung langkah-langkah untuk memberikan pengurangan utang kepada negara-negara yang terkena tsunami. “Secara pribadi, saya setuju negara-negara ini diberi keringanan,” katanya. Indonesia berharap akan memperoleh keringanan pembayaran utang tanpa persyaratan tertentu. Berdasarkan catatan Bank Dunia, pemerintah Indonesia memiliki utang US\$ 132 miliar (sekitar Rp 1.214,4 triliun), sebesar US\$ 70 miliar (sekitar Rp 644 triliun) merupakan utang Indonesia kepada kreditor publik. Paris Club beranggotakan Austria, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Denmark, Finlandia, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Norwegia, Perancis, Rusia, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Namun, pengamat memperingatkan, keringanan pembayaran utang itu akan menjadi *counter productive* khususnya bagi Indonesia, karena akan

menurunkan peringkat utang negara itu. Penurunan peringkat utang ini akan membuat investor asing khawatir.

Soal Pilihan ganda :

- 1.) Apakah tujuan dibentuknya Paris Club tersebut?
 - A. Bertujuan membantu negara debitur, khususnya yang menerima pinjaman dari negara-negara kreditur, untuk mengatasi kesulitan pembayaran hutang yang tercermin pada kesulitan neraca pembayaran.
 - B. Bertujuan membantu negara kreditur, yang kesulitan menangani perekonomian dinegaranya.
 - C. Bertujuan agar anggota club dari negara-negara kaya didunia mendapatkan keuntungan lebih dari negara peminjam (debitur).
- 2.) Ada berapakah prinsip yang dimiliki oleh paris club?
 - A. 3
 - B. 4
 - C. 5
- 3.) Dalam paris club memiliki salah satu ketentuan yaitu ketentuan Debt Treated, apakah isi dari ketentuan tersebut?
 - A. Adalah pada suatu periode jatuh waktu pembayaran kembali hutang sebagaimana disepakati dalam perjanjian Paris Club untuk di-reschedule.
 - B. Hutang yang dapat diajukan baik untuk di-reschedule jatuh waktu pembayarannya maupun untuk memperoleh pengurangan hutang melalui perjanjian Paris Club adalah hutang yang ditandatangani sebelum tanggal cut off date, dan merupakan hutang bilateral Pemerintah.
 - C. Pada periode awal perjanjian Paris Club, jangka waktu pembayaran kembali hutang yang disepakati antara pihak negara kreditur dan negara debitur tidak lebih dari 10 tahun (termasuk masa tenggang atau grace period).
- 4.) Ada berapakah negara yang termasuk dalam anggota paris club?
 - A. 19
 - B. 20
 - C. 21
- 5.) “Yaitu kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk melakukan pertukaran hutang yang didasarkan pada asas kerelaan dari pihak kreditur. Pada umumnya hal tersebut dilakukan dengan negara Least Developed Countries.” Berdasarkan kutipan tersebut, manakah yang termasuk dalam arti ketentuan tersebut?
 - A. Ketentuan Debt Swap Provision
 - B. Ketentuan Payment Terms
 - C. Ketentuan Flow And Stock Treatment

ESSAY :

1. Apakah yang dimaksud dengan Paris Club?
2. Dalam Paris Club terdapat 5 poin prinsip, salah satunya adalah Prinsip Case By Case Approach, apakah yang dimaksud dari prinsip tersebut?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Ketentuan Flow And Stock Treatment?
4. Jelaskan apa yang dimaksud pada periode konsolidasi dalam Perjanjian Agreed Minute?
5. Jelaskan Pengertian Terkait Prosedur Paris Club?

PERTEMUAN 12 MODUL 19

PINJAMAN SINDIKASI LUAR NEGRI

Tujuan: mempelajari pinjaman sindikasi luar negeri

Capaian pembelajaran: pada akhir pertemuan ini,

A	Pendahuluan
B	Konsep dan prinsip dasar pinjaman sindikasi
C	Mekanisme pinjaman sindikasi
D	Pinjaman sindikasi pemerintah Indonesia

Pinjaman sindikasi merupakan salah satu praktek perbankan yang telah berkembang dalam kurun waktu cukup panjang. Pinjaman sindikasi digunakan pada saat dibutuhkan pendanaan dalam jumlah besar, Pinjaman sindikasi mempunyai peranan penting sebagai sumber pembiayaan dalam valuta asing dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya. Ciri efisiensi secara geografis dan sharing of risk secara kelembagaan menjadikan pinjaman sindikasi sebagai pilihan sumber pembiayaan yang menarik bagi negara berkembang.

Pinjaman sindikasi yang pertama dilakukan oleh Bank of London dengan BOLSA dari Amerika Selatan yang memberikan pinjaman kepada perusahaan aluminium dari Hungaria yang bernama Hungary Aluminium Industry dengan jaminan sepenuhnya oleh bank sentral mereka, yaitu National Bank of Hungary. Pinjaman sindikasi ini diberikan pada tahun 1968 dan merupakan awal dari pinjaman internasional tersebut.

Tujuan dan Alasan Melakukan Pinjaman Sindikasi

Dewasa ini sindikasi perbankan yang terlibat dalam pinjaman sindikasi merupakan gabungan antara bank swasta dengan bank pemerintah, bank swasta dengan bank asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, atau antara bank pemerintah dengan bank asing yang mempunyai perwakilan, untuk mengetahui alasan dilakukannya pinjaman sindikasi kita dapat membaginya atas alasan dari sudut pandang borrower, lender dan sudut pandang nasional.

Tujuan dan Alasan Melakukan Pinjaman Sindikasi, dari sudut pandang borrower, alasan dan tujuan dilakukannya pinjaman sindikasi adalah .

1. Pembiayaan dalam jumlah besar

Pinjaman sindikasi umumnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek raksasa yang membutuhkan dana dalam jumlah besar, misalnya, pembangunan jalan tol, yang pendanaannya tidak mungkin ditanggung oleh hanya satu bank. Untuk itu dibentuklah suatu sindikasi perbankan yang beranggotakan lebih dari satu bank guna menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan.

2. Beban Bunga yang Rendah (Low interest rate)

Beberapa negara mungkin saja mengalami kelebihan supply dana. Dengan adanya kelebihan ini, maka secara relatif tingkat suku bunganya akan lebih rendah. Beberapa borrower memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pembiayaan murah.

3. Exchange rate expectation

Ada borrower yang melakukan pinjaman sindikasi dalam mata uang asing dengan harapan mata uang tersebut akan terdepresiasi terhadap mata uang negaranya. Dengan mengkonversikan pinjaman dalam mata uang asing tersebut ke dalam mata uang lokal negaranya, borrower berharap akan mendapatkan keuntungan.

Dari sudut pandang lender, beberapa alasan pemberian pinjaman sindikasi adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran risiko

Kegagalan suatu proyek yang didanai oleh pinjaman sindikasi berakibat pada ketidakmampuan kreditur untuk melakukan pembayaran kewajibannya secara tepat waktu. Hal ini mengakibatkan bank menanggung risiko kerugian. Dengan sistem sindikasi, maka risiko ditanggung bersama sesuai dengan besarnya porsi pendanaan masing-masing bank peserta sindikasi.

2. Adanya keterbatasan

Keterbatasan terkait pada dua hal. Pertama, keterbatasan dalam menyediakan jumlah dana yang besar bagi individual bank dan kedua, keterbatasan karena peraturan. Di Indonesia, aturan yang membatasi pemberian pinjaman oleh perbankan ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dikenal dengan istilah 3 L (legal lending limit); bank tidak boleh memberikan kredit kepada kelompok usahanya melebihi pagu yang telah ditetapkan. Selain itu, ada juga aturan Bank Indonesia lainnya berupa BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).

3. Pengalaman sindikasi perbankan

Tidak semua bank memiliki pengalaman dalam memberikan pinjaman sindikasi. Bagi bank yang baru pertama kali ikut serta dalam sindikasi perbankan kesempatan ini dapat dimanfaatkan

untuk menimba pengalaman. Pengalaman tersebut mencakup analisis kredit, legal aspect, dokumentasi, manajemen pinjaman, maupun monitoring.

4. Fee income

Dengan ikut berperan sebagai peserta sindikasi, sebuah bank akan mendapatkan fee dari borrower. Fee ini merupakan pendapatan bagi bank tersebut.

5. Cross selling

Bank-bank yang terlibat dalam sindikasi perbankan mengikat suatu bentuk kerja sama tidak terbatas untuk satu proyek tertentu. Apabila ada bank ditawarkan oleh suatu bank tertentu untuk mendanai suatu proyek, tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari bank yang menawarkan proyek tersebut akan dilibatkan oleh bank yang sebelumnya ditawari proyek.

6. Image

Bank-bank yang sering berpartisipasi dalam sindikasi perbankan akan meningkatkan kredibilitas dan citranya di mata masyarakat. Hal ini tentunya akan membawa keuntungan bagi bank tersebut karena peluang untuk merebut pasar lebih terbuka.

Dari sudut pandang nasional, tujuan pinjaman sindikasi adalah untuk menunjang pembangunan dan mendukung pengembangan industri perbankan. Pinjaman sindikasi berperan besar dalam mewujudkan proyek-proyek yang terkait dalam pembangunan suatu negara, misalnya, pembangunan pabrik-pabrik, hotel, pusat niaga, dan lainnya. Hasil pembangunan tersebut menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, bagi perbankan, keterlibatan dalam pinjaman sindikasi dapat meningkatkan kredibilitas bank dalam menangani pendanaan suatu proyek. Dengan meningkatnya kredibilitas, maka kinerja juga diharapkan semakin membaik. Kinerja yang membaik pada gilirannya akan memacu perkembangan industri perbankan. Selain itu, banyaknya pihak yang memanfaatkan pinjaman sindikasi dalam pendanaan proyek-proyek turut memberikan andil bagi berkembangnya industri perbankan.

Mekanisme Pinjaman Sindikasi

Secara garis besar mekanisme pinjaman sindikasi dimulai dari pembentukan managing group dan penunjukan lead manager. Fungsi sentral dalam proses pembentukan pinjaman sindikasi berada di tangan lead manager. Dalam praktek, di Indonesia umumnya yang menjadi lead manager adalah bank utama (main bank) dari calon penerima pinjaman. Namun, adakalanya main bank tersebut tidak memiliki pengalaman dan kemampuan teknis operasional yang diperlukan untuk membentuk pinjaman sindikasi yang dimaksud sehingga bank tersebut menunjuk

bank lain yang telah memiliki pengalaman dan reputasi baik untuk bertindak sebagai lead manager. Dapat pula terjadi bank yang ditunjuk selaku lead manager terdiri dari beberapa bank yang disebut co-lead managers.

Selanjutnya lead manager akan membentuk suatu kelompok bank yang disebut managing group atau bidding group untuk bersama-sama menjadi arrangers yang akan membentuk sindikasi pinjaman yang diharapkan. Managing group bukan hanya sekedar membentuk sindikasi pinjaman, tetapi juga diharapkan dapat memberikan underwriting commitment yaitu persetujuan secara prinsip untuk menyediakan sebagian atau seluruh dana yang diperlukan borrower.

Tugas lead manager tidaklah ringan karena lead manager harus mempertaruhkan reputasinya dalam menyukseskan transaksi di pasar sindikasi sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat yang diinginkan oleh calon penerima pinjaman. Ada komitmen dan tanggung jawab moral untuk sukses. Apabila komitmen tersebut juga disertai kesediaan untuk meng-underwrite sebagian atau jika memungkinkan seluruh dana yang diperlukan, maka hal itu menunjukkan kemantapan profesionalisme dari lead manager tersebut. Dengan kedudukan dan tanggung jawab yang khusus tersebut, lead manager memperoleh kompensasi berupa fee yang disebut Praecipirum Fee. Fee 11 tersebut lebih besar dibandingkan dengan fee yang diperoleh anggota sindikasi lainnya.

Dalam rangka pembentukan suatu sindikasi, sebelum lead manager membentuk sindikasi, terlebih dahulu lead manager harus mendapatkan mandate (mandat) dari calon borrower. Mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh calon borrower kepada lead manager atau kepada managing group untuk membentuk suatu sindikasi yang terdiri dari beberapa bank yang akan menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan calon borrower. Calon borrower dapat terdiri dari perusahaan-perusahaan multinasional (multinational corporations) sampai ke negara-negara (sovereign states). Sebelum surat mandat dibuat ada tiga kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu deal organization, credit evaluation, dan structuring the credit.

Deal organization berarti mengorganisasi seluruh kegiatan untuk menunjang terbentuknya pinjaman sindikasi, misalnya, merencanakan jumlah pinjaman yang akan diberikan; hubungan borrower dengan bank-bank peserta sindikasi, jangan sampai terjadi borrower pernah memiliki tunggakan macet di salah satu bank; informasi mengenai proyek yang akan dibiayai; keunggulan proyek yang akan dibiayai; dan persiapan information memorandum.

Credit evaluation adalah kegiatan untuk mengevaluasi pinjaman yang akan diberikan. Untuk mengevaluasi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu latar belakang perusahaan/negara sebagai calon borrower; siapa saja pemegang sahamnya (untuk perusahaan) atau pemerintah yang

berkuasa (untuk negara); bagaimana manajemennya atau kondisi pemerintahannya; laporan keuangan atau anggaran negara; struktur modal; prospek pasar perusahaan; country risk (untuk borrower negara); image atau nama baik; aspek operasional perusahaan; bagaimana record pinjaman dari bank-bank lain; proyeksi keuangan; serta jaminan dan penutupan asuransi.

Langkah-Langkah yang Perlu Dipersiapkan oleh Peminjam

Pinjaman sindikasi melibatkan serangkaian urutan kegiatan, dan pada setiap tahapan kegiatan ada beberapa pihak yang memainkan aneka fungsi. Ada beberapa langkah dalam proses mempersiapkan pinjaman sindikasi, yaitu :

- analisis fasilitas
- penawaran/offer letter
- Mandate
- Invitation
- allocation/ alokasi penyertaan final
- dokumentasi sindikasi
- Signing
- Publisitas
- pelaksanaan pemberian kredit
- dan administrasi kredit sindikasi

Partisipasi Dalam Pinjaman Sindikasi

Pertimbangan awal keikutsertaan dalam pinjaman sindikasi memiliki kemiripan dengan proses pemberian pinjaman perbankan pada umumnya. Perbankan yang akan terlibat dalam sindikasi tentunya berusaha mengetahui kebutuhan keuangan calon borrower dan merumuskan bagaimana cara memenuhinya. Bagi calon borrower, pembentukan fasilitas pinjaman sindikasi merupakan salah satu alternatif memenuhi kebutuhan keuangannya.

Jenis sindikasi dapat digolongkan kepada single step syndication dan multiple step syndication. Single step syndication merupakan suatu sindikasi ketika bank mendapatkan mandat yang langsung diteruskan ke pasar sindikasi tanpa membentuk suatu management group atau sub-underwriting group sebelumnya. Sedangkan multiple step syndication adalah suatu sindikasi ketika setelah mandat diserahkan dibentuk suatu management group atau sub-underwriting group untuk mengurangi tanggung jawab underwriting pada tahap awal.

Aspek Hukum

Setelah dicapai kesepakatan mengenai paket sindikasi dan bank-bank peserta yang bersedia mendukung telah ada dan setuju untuk ikut membiayai suatu proyek, maka pekerjaan berikutnya adalah mempersiapkan hal-hal yang terkait dan aspek legal dan dokumentasi. Tidak jarang perbedaan visi masing-masing bank peserta mengenai aspek

hukum menyebabkan penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi tertunda lama.

Apabila pinjaman sindikasi tersebut merupakan pinjaman dari sindikasi internasional (international syndicated loan), maka muncullah masalah mengenai hukum negara mana yang akan diberlakukan bila terjadi dispute atau sengketa di antara para pihak yang terkait dengan perjanjian pinjaman sindikasi. Apakah hukum yang digunakan hukum negara facility agent, hukum negara borrower, hukum dari salah satu negara pemberi pinjaman (lender), hukum dari negara tempat berlangsungnya penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi atau hukum negara yang tidak terkait sama sekali dengan perjanjian pinjaman sindikasi ini. Penentuan hukum negara yang menjadi acuan ini ditentukan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian pinjaman sindikasi dengan mencantumkan klausula khusus di dalam perjanjian tersebut.

Umumnya pada pinjaman sindikasi dalam negeri (domestic syndicated loan), hukum yang berlaku adalah hukum negara setempat. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa di dalam perjanjian pinjaman sindikasi, ditetapkan yang menjadi acuan adalah hukum negara asing bagi penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman sindikasi tersebut. Misalnya, perjanjian pinjaman sindikasi bagi suatu perusahaan patungan yang berkedudukan di Indonesia yang diberikan oleh beberapa bank yang berkedudukan di Indonesia ditetapkan dalam perjanjian bahwa sengketa yang timbul di antara para pihak akan diselesaikan oleh suatu badan arbitrase yang berkedudukan di Singapura dengan menggunakan hukum negara tersebut.

Ravi C. Tennekoon³ menyebutkan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih sistem hukum yang diberlakukan bagi suatu pinjaman sindikasi:

- Kebebasan untuk memilih hukum yang akan diberlakukan.
- Kepastian dan harapan atas hasil yang diinginkan berdasarkan dokumendokumen hukum yang dimaksud.
- Kecanggihan dari sistem hukum yang dipilih.
- Bahasa.
- Forum Litigasi.
- Pengenalan dan pemahaman atas sistem hukum yang dipilih

Dokumentasi

Dokumentasi dalam pinjaman sindikasi dimulai dari penyusunan perjanjian pinjaman. Setelah sindikasi terbentuk dan syarat-syarat pinjaman, telah disepakati, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian pinjaman sindikasi. Dalam perjanjian ini diatur segala hak dan kewajiban para pihak juga kewenangan dan kewajiban dari agent bank yang ditunjuk. Bila terjadi

perbedaan pendapat atau sengketa di antara para pihak berkaitan dengan pelaksanaan pinjaman sindikasi, maka perjanjian pinjaman tersebut yang akan dijadikan dasar dan rujukan bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa di antara mereka.

Peranan Agen

Peranan arranger atau management group yang dipimpin oleh lead manager berakhir setelah perjanjian pinjaman sindikasi ditandatangani. Dengan ditandatanganinya perjanjian pinjaman, maka peranannya diambil alih oleh salah satu bank peserta yang ditunjuk sebagai agent. Apabila terdapat beberapa lead manager, maka salah satu lead manager yang merupakan bank umum dapat ditunjuk sebagai agent. Adakalanya juga yang menjadi agent adalah bank lain yang independen, tidak menjadi anggota sindikasi. Perbedaan peranan antara lead manager dengan agent adalah bahwa lead manager bertugas membentuk sindikasi sampai dengan perjanjian pinjaman ditandatangani, sedangkan agent bertugas sehubungan dengan penggunaan pinjaman setelah perjanjian ditandatangani.

Ada beberapa agent dalam pinjaman sindikasi, yaitu facility agent atau sering juga disebut general agent, tender panel agent, issuing and paying agent, swing line agent, security agent, dan documentation agent. Secara umum tugas-tugas agen adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan bahwa conditions precedent telah dipenuhi oleh borrower sebelum penggunaan pinjaman.
- 2) Menagih dana dari bank-bank peserta sindikasi dan membayarkan dana itu kepada borrower.
- 3) Menghitung dan menagih bunga maupun fee dari borrower dan mendistribusikannya kepada bank-bank peserta sindikasi sesuai dengan bagiannya masing-masing.
- 4) Mengawasi penggunaan pinjaman dan pembangunan proyek.
- 5) Melaporkan penggunaan pinjaman dan pembangunan proyek kepada peserta sindikasi.
- 6) Melaporkan dan memintakan persetujuan dari peserta sindikasi apabila borrower ingin melakukan sesuatu yang merupakan negative covenant.
- 7) Melaporkan penyimpangan penggunaan pinjaman kepada peserta sindikasi.

Pinjaman Sindikasi Pemerintah Indonesia

Secara umum, negara-negara berkembang memerlukan pinjaman komersial untuk melengkapi pinjaman resmi dari lembaga-lembaga keuangan internasional dan dari negara-negara lain secara bilateral. Meskipun Pinjaman komersial memiliki terms and conditions yang lebih mahal memiliki kelebihan relatif lebih mudah diperoleh dan lebih fleksibel untuk penarikan maupun penggunaannya. Preferensi oleh negara-negara berkembang ini juga mengakibatkan ketatnya pasokan pendanaan dari sumber tradisional (bank) baik sindikasi maupun bilateral di pasar

keuangan internasional, sehingga diperlukan pula upaya diversifikasi untuk memanfaatkan sumber dana dalam bentuk lain, misalnya, notes atau bonds.

Secara lebih rinci beberapa pertimbangan yang melandasi penerimaan pinjaman komersial adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan salah satu diversifikasi sumber pembiayaan karena bersumber dari lembaga perbankan/LKBB dan pasar modal internasional.
- 2) Jumlah pinjaman relatif besar dengan cara penarikan yang relatif cepat dan luwes.
- 3) Penggunaan dana pinjaman tidak terikat dan bersifat multi-purpose sehingga dapat digunakan untuk membiayai proyek, untuk cadangan devisa atau untuk keperluan stand-by loan.

Kebutuhan Bank Indonesia sebagai bagian dari Pemerintah pada kurun waktu tahun 1980-1990-an (masa sebelum krisis 1997) untuk mengelola pinjaman komersial dalam bentuk pinjaman siaga (standby loan) yang bersumber dari pinjaman sindikasi erat kaitannya dengan posisi/ level cadangan devisa. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi level cadangan devisa seperti skala ekonomi, kerentanan transaksi berjalan, kerentanan neraca modal, sistem nilai tukar, opportunity cost dan integrasi finansial, maka kebijakan Bank Indonesia pada kurun waktu tersebut adalah berusaha untuk memelihara cadangan devisa pada suatu tingkat yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan yaitu setara dengan impor nonmigas lima sampai enam bulan.

Penutup

Pengelolaan pinjaman sindikasi dengan baik merupakan kunci pokok dari keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan pinjaman luar negeri. Pengelolaan ini hendaknya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. Pinjaman sindikasi diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk memelihara kemantapan neraca pembayaran dan keseimbangan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka mendorong kelancaran pembangunan nasional.

Dalam kenyataannya, pinjaman ini telah membantu neraca pembayaran Indonesia dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan transaksi internasional sehingga mampu memantapkan cadangan devisa nasional.

Sebelum terjadinya krisis keuangan di Asia, Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia merupakan peminjam yang aktif dalam pasar sindikasi perbankan internasional. Namun, selama hampir sepuluh tahun terakhir, Bank Indonesia tidak lagi masuk ke pasar sindikasi tersebut. Dalam kurun waktu terakhir tersebut, Bank Indonesia lebih mengutamakan perolehan informasi dari sajian para potential lenders mengenai kondisi dan sentimen pasar perbankan internasional terhadap sovereign syndicated lending termasuk Indonesia.

Dalam kurun waktu 1998/1999, 2000/2001, dan 2002, Pemerintah Indonesia telah menghubungi para kreditor bank-bank untuk keperluan London Clubs I, II dan III dalam rangka negosiasi restrukturisasi utang. Pada kurun waktu tersebut, para kreditor Paris Club menekankan agar dapat diterapkannya principle of comparability of treatment antara kreditor sektor publik dan sektor swasta dan Indonesia merestruktur utang komersialnya. Meskipun demikian, tidak terdapat pengurangan hutang yang prinsipil, dalam arti tidak terdapat potongan hutang atau hair cut pada kedua sektor tersebut, dan Indonesia tetap memperlakukan bank-bank secara fair selama negosiasi restrukturisasi hutang berlangsung.

Sebagaimana telah diuraikan, selama sepuluh tahun terakhir telah terdapat perubahan yang cukup besar di pasar perbankan internasional antara lain sebagai berikut:

- Terjadinya domestic consolidation/concentration yang telah menurunkan jumlah pemain dan pemberi pinjaman yang potensial. Dorongan iklim perbankan yang semakin kompetitif telah mendorong bank-bank di Jepang, Amerika Serikat dan Eropa untuk melakukan merger, sehingga menjadi pemain global di pasar perbankan internasional dan merupakan peminjam potensial bagi Indonesia banyak berkurang.
- Terjadinya disintermediation pada lembaga keuangan bukan bank telah mengurangi partisipasi bank-bank dalam kapasitas mereka sebagai penyedia dana. Banyak investor internasional baik di pasar modal domestik maupun internasional meningkatkan perannya sebagai penyedia dana bagi debitor negara dan perusahaan.
- Terjadinya peningkatan accounting treatment yang semakin ketat. Otoritas pengatur perbankan dalam skala global secara simultan menyempurnakan analisis risiko dan penggunaan prudential ratios. Negara-negara kreditor menerbitkan pedoman akunting yang disempurnakan dengan secara khusus mengatur tingkat penyediaan dana yang cukup.

Soal Pilihan Ganda :

1. Salah satu penggunaan sindikasi utang luar negeri digunakan untuk ?
 - a. Pembiayaan yang sangat besar.
 - b. Menambah uang negara.
 - c. Pembiayaan utang negara.
 - d. Memperbanyak uang negara.

2. Pinjaman sindikasi yang pertama dilakukan oleh Bank of London dengan ?
 - a. BOTSA
 - b. BOLSA
 - c. IMF
 - d. BI
3. Dengan adanya kelebihan ini, maka secara relatif tingkat suku bunganya akan ?
 - a. Lebih tinggi
 - b. Lebih stabil
 - c. Lebih rendah
 - d. Lebih fluktuatif
4. Dengan ikut berperan sebagai peserta sindikasi, sebuah bank akan mendapatkan fee dari borrower. Fee ini merupakan pendapatan bagi bank tersebut, adalah pengertian dari...
 - a. Cross seling
 - b. Fee income
 - c. Image
 - d. Bank luar
5. Bank-bank yang sering berpartisipasi dalam sindikasi perbankan akan meningkatkan kredibilitas dan citranya di mata masyarakat. Merupakan penjelasan dari...
 - a. Cross selling
 - b. Fee income
 - c. Image
 - d. Bank luar

Essay...

1. Jelaskan dari sudut pandang nasional, tujuan pinjaman sindikasi ...
2. Jelaskan tentang mekanisme sindikasi luar negeri...
3. Jenis sindikasi dapat digolongkan kepada single step syndication dan multiple step syndication, jelaskan salah satunya ...
4. Jelaskan secara singkat Aspek Hukum dalam sindikasi luar negeri ...
5. Sebutkan salah satu kasus Sindikasi Luar negeri yang ada di Indonesia serta kegunaanya untuk apa ...

PERTEMUAN 12 MODUL 20
PERANAN BANK INDONESIA DIDALAM MENDUKUNG
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Tujuan: mempelajari peranan Bank Indonesia dalam mendukung UMKM

Capaian pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

A	Pendahuluan
B	Profil UMKM
C	Program pemberdayaan UMKM
D	Peran bank sentral dalam pengembangan UMKM di beberapa negara
E	Peran bank Indonesia dalam pengembangan UMKM

Definisi dan Karakteristik

Secara umum ada beberapa indikator atau kriteria yang lazim digunakan dalam definisi. Indikator yang digunakan dalam definisi UMKM tersebut antara lain berupa besarnya volume usaha, besarnya modal, nilai aset, kekayaan bersih, dan besarnya jumlah pekerja. Definisi ini dibedakan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Misalnya, di antara negara anggota SEACEN, sebagian besar menggunakan definisi UMKM berdasarkan jumlah pekerja. Perbedaan definisi tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan tingkat kemajuan perekonomian masing-masing negara. Sebagai contoh, suatu perusahaan di negara Fiji, yang memiliki jumlah pekerja 51 orang sudah diklasifikasikan sebagai usaha besar, sedangkan di Korea dan Amerika Serikat perusahaan dengan jumlah pekerja sebesar 300 orang dan 500 orang masih berada pada tingkat usaha menengah.

Difinisi atau kriteria UMKM berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berlaku saat ini didasarkan kepada nilai kekayaan bersih dan nilai hasil penjualan :

Difinisi atau Kriteria UMKM

Skala Usaha	Kriteria
Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) • Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp. 300 juta
Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) • Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan Rp. 2,5 milyar
Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) • Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar

Sumber: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peranan UMKM dalam Perekonomian

Dalam era perubahan lingkungan ekonomi global dan perdagangan bebas, yang diikuti dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, UMKM mempunyai peranan baru yang lebih penting lagi bagi perekonomian, yaitu sebagai salah satu sumber pendorong pertumbuhan ekspor nonmigas, dan sebagai unit usaha pendukung bagi usaha besar dengan menyediakan bahan-bahan tertentu, seperti komponen-komponen dan suku cadang melalui keterkaitan proses produksi antara lain dengan sistem subcontracting.

Pengalaman di negara-negara industri baru, seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Cina, penerapan inovasi kerja sama antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dengan pola subcontracting ini ternyata membuat produk-produk negara tersebut lebih kompetitif, baik di pasar domestik maupun di pasar global dalam menghadapi produk-produk sejenis dari negara lain. Selain itu, dari pengalaman Bank Indonesia menangani proyek-proyek UMKM seperti Proyek Pengembangan

Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK) dan Proyek Kredit Mikro (PKM), menunjukkan bahwa UMKM pada waktu terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 terbukti lebih mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar. Hal ini terjadi karena sifat UMKM yang kurang bergantung pada pasar formal sehingga unit usaha tersebut dapat bergerak lebih cepat dan lebih fleksibel terhadap gejolak yang datang tiba-tiba.

Permasalahan UMKM

Di Indonesia, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM, terutama menyangkut aspek kemampuan pengelolaan usaha dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif. Selain permasalahan internal yang dihadapi oleh UMKM, juga cukup kompleksnya permasalahan yang di hadapi oleh berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan sektor usaha tersebut, seperti pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dan pihak eksternal UMKM lainnya.

Permasalahan Internal UMKM

Pada dasarnya permasalahan secara umum yang dihadapi oleh UMKM dapat disederhanakan menjadi dua kelompok, yaitu :

- **Rendahnya kemampuan pengelola usaha, terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM**

Kondisi ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman dalam sektor usaha tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia menurunkan kualitas produk, sehingga rendahnya kemampuan untuk menembus pasar baru bagi sektor usaha tersebut. Peningkatan pengetahuan dan keahlian tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan usaha, apalagi di era globalisasi diperlukan untuk

mendorong peningkatan daya saing produk UMKM di pasar internasional.

- **Terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif.**

Permasalahan kedua, yang sebagian besar dihadapi oleh UMKM, adalah adanya keterbatasan akses kepada sumber daya produktif, terutama :

- Disebabkan kurangnya informasi yang akurat dan terkini mengenai peluang-peluang pasar di dalam dan di luar negeri.
- Kedua masalah finansial berupa kekurangan modal dan sulitnya akses untuk memperoleh permodalan dari lembaga keuangan, terutama perbankan.
- Ketiga keterbatasan teknologi, khususnya ditemukan pada usaha mikro dan kecil.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah

Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pembinaan UMKM lebih mengarah pada masih lemahnya iklim yang kondusif bagi pengembangan sektor usaha, seperti koordinasi lintas sektoral yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, baik horizontal antar departemen teknis terkait maupun vertikal, koordinasi antar instansi terkait di pusat dan daerah. Pembuatan kebijakan, pembinaan yang diberikan, serta penanganan permasalahan UMKM sering dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi dan dalam beberapa hal terjadi tumpang tindih. Penyebab belum mulusnya koordinasi antar instansi terkait tersebut antara lain adanya ego sektoral yang masih kental dari masing-masing lembaga. Oleh karena itu, perlunya kemungkinan untuk membentuk atau menunjuk lembaga yang lebih tinggi yang berfungsi sebagai koordinator pembinaan UMKM.

Selain itu, adanya keanekaragaman definisi tentang UMKM di Indonesia juga sebagai penyebab sulitnya perencanaan dan penetapan kebijakan pengembangan UMKM yang terpadu dan terkoordinasi. Ketidaksamaan tersebut menimbulkan hambatan untuk mendapatkan statistik data potensi UMKM sebagai dasar pembuatan kebijakan karena sampai saat ini sulit untuk mengetahui secara pasti dengan data yang terkini, berapa jumlah UMKM, dan sumbangannya terhadap penciptaan tenaga kerja, ekspor, dan PDB. Statistik tentang kinerja UMKM ini juga sangat diperlukan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas dari pembinaan yang telah dilakukan.

Permasalahan yang terkait dengan Bank Indonesia

Sampai saat ini, Bank Indonesia telah berperan banyak dalam pengembangan UMKM di Indonesia, antara lain melalui pengaturan kebijakan perkreditan dan pemberian bantuan teknis kepada bank-bank. Dalam hal kebijakan kredit, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-undang no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah disempurnakan dengan Undang-undang no. 3 tahun 2004, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK), yang bersifat anjuran kepada bank-bank di Indonesia untuk menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian KUK. Walaupun jumlah pemberian kredit kepada UMKM meningkat yang pada posisi Juni 2006 pangasanya mencapai 51% dari total kredit perbankan, namun sekitar 50%nya berupa kredit konsumtif, padahal ketentuan Bank Indonesia mendefinisikan KUK untuk membiayai usaha produktif. Selain itu, pemberian kredit investasi kepada UMKM oleh perbankan masih relatif kecil, hanya sekitar 9% dari total kredit UMKM.

Permasalahan yang dihadapi Perbankan

Beberapa kendala yang dihadapi bank-bank dalam pemberian kredit kepada UMKM, yaitu sebagian besar bank, terutama bank-bank besar,

dengan fokus usaha atau orientasi pada pinjaman besar, menghadapi keterbatasan tenaga analis kredit kecil dan pemasaran bidang UMKM, di samping kendala jaringan kantor yang terbatas, yang sebagian besar berada di kota-kota besar. Di samping itu, pada umumnya perbankan memiliki aturan main yang baku dalam pemberian kredit, misalnya, permintaan agunan tambahan, laporan keuangan calon nasabah, dan surat-surat perizinan dsb, termasuk ketentuan ke hatian-hatian lainnya yang harus dipatuhi .

Dipihak lain, sebagian besar UMKM, terutama usaha mikro dan kecil, pada umumnya belum mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit bank tersebut sehingga permohonan kredit mereka sering tidak lengkap dan dikembalikan bank. Akibatnya, timbul kesan bahwa prosedur perbankan terlalu berbelit-belit dan sangat lama dalam pemberian kredit kepada UMKM. Di sisi lain, perbankan juga memiliki informasi yang minim mengenai bisnis atau komoditi yang potensial untuk dibiayai dan data UMKM lainnya. Kendala lain adalah relatif tingginya biaya operasional untuk pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil dibandingkan dengan kredit untuk usaha besar. Hal ini terjadi karena jumlah pekerjaan administrasi yang harus dikerjakan tidak jauh berbeda, tetapi nilai kredit yang diberikan relatif kecil.

Program Pemberdayaan UMKM

Mengingat besarnya peran UMKM dalam mendorong perekonomian, maka program pemberdayaan UMKM di beberapa negara pada umumnya merupakan bagian integral dari program pembangunan ekonomi. Berdasarkan pengalaman selama ini program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh banyak negara mencakup beberapa aspek, yaitu adanya kebijakan pemerintah yang jelas dan mendukung,tersedianya sumber-sumber pembiayaan dan mudah diakses, yang disertai dengan bantuan teknis dan pengembangan kelembagaan yang memadai.

Kebijakan Pemerintah

Di Indonesia, koordinasi dalam pengembangan UMKM, terutama yang bersifat operasional, dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan koordinasi kebijakan dilakukan oleh Kantor Menko Perekonomian. Kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia secara berencana telah dilakukan sejak dimulainya pembangunan nasional tahun 1969, sebagaimana digariskan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang (25 tahun), dan direalisasikan dalam tahapan Pembangunan Lima Tahun (PELITA) Dalam dua periode pembangunan jangka panjang tahap pertama dan kedua, sampai dengan tahun 1997/1998, pelaksanaan pembangunan nasional dilandaskan pada Trilogi Pembangunan, yang terdiri dari pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan pemantapan kestabilan ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, program pengembangan UMKM diarahkan untuk mewujudkan aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan. Komitmen pemerintah dalam pengembangan UMKM tersebut telah diwujudkan dengan dukungan berbagai kebijakan di berbagai bidang, antara lain kebijakan moneter, termasuk kebijakan kredit dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas makro; kebijakan perbankan, kebijakan kelembagaan dan peningkatan kemampuan aparat pemerintah dalam pembinaan UMKM.

Bantuan Teknis

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM seperti keterbatasan dalam pengelolaan usaha, pemasaran, produksi, akuntansi, dan keuangan. Kendala-kendala tersebut terutama disebabkan oleh kualitas SDM yang rendah dan keterbatasan informasi sehingga berpengaruh besar terhadap kemampuan pengelolaan usaha dan akses kepada sumber daya produktif. Dalam konteks tersebut, maka lembaga lembaga Internasional, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank dan lembaga Internasional lainnya, dalam pemberian bantuannya untuk pengembangan UMKM kepada

negara negara berkembang, termasuk Indonesia, pada umumnya mengelompokan bantuan tersebut dalam 2 (dua) jenis, yakni bantuan teknis (technical assistance) dan bantuan keuangan (financial assistance). Kedua jenis bantuan tersebut biasanya diberikan dalam satu paket bantuan, yang merupakan satu kesatuan.

Di Indonesia, dari sisi lembaga pemerintah, paling tidak ada beberapa instansi yang berperan kuat dalam pengembangan dan pemberian bantuan teknis kepada UMKM, yaitu kantor Menko Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan/Meneg BUMN, Bappenas, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah.

Pengembangan Kelembagaan

Di Indonesia, pada dasarnya sudah ada upaya dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat kelembagaan dalam pemberian bantuan teknis kepada UMKM. Lembaga ini pada umumnya memberikan pembinaan kepada Kelompok Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pengusaha Mikro (KPM) yang menjadi binaan mereka. Pengalaman kerja sama antara Bank Indonesia dengan lembaga lembaga ini dalam beberapa proyek pengembangan UMKM telah membuktikan keberhasilan. Permasalahan yang dihadapi adalah tidak jelasnya instansi atau lembaga yang membina kelompok- kelompok tersebut, sedangkan Kementrian Koperasi dan UKM untuk bekerja sama dengan LPSM atau KSM hanya menekankan sisi administratif dan formalitas saja karena lembaga-lembaga tersebut bukan berbentuk koperasi.

Walaupun pembinaan kepada UMKM ini sudah dilakukan sejak lama, harus diakui bahwa pembinaan tersebut belum sepenuhnya dikelola dan dikoordinasikan dengan baik. Sepatutnya dana-dana untuk pembinaan kepada UMKM dipusatkan pada satu lembaga, dan penyalurannya dirancang secara terintegrasi dan terarah oleh masing-masing instansi.

Demikian pula halnya dengan dana-dana yang dihimpun dari sebagian keuntungan BUMN/BUMD untuk kepentingan pembinaan UMKM. Selain itu, ada beberapa BUMN menyalurkan bantuan tersebut dalam bentuk kredit secara langsung kepada UMKM, diberikan dengan suku bunga yang relatif rendah sehingga mendistorsi pasar. Hal ini tidak mendidik dan bahkan dapat merugikan UMKM sendiri. Sebaiknya, dana-dana yang diperuntukan untuk kredit disalurkan oleh bank atau lembaga keuangan lain, yang kompeten untuk itu. Dana-dana untuk pembinaan UMKM baik yang berasal dari anggaran (APBN/APBD) maupun dana yang pisahkan dari keuntungan BUMN/BUMD sebaiknya disalurkan melalui lembaga yang kompeten.

Permasalahannya adalah jumlah lembaga-lembaga penyedia jasa pengembangan usaha, seperti lembaga konsultasi, pelatihan, dan penelitian, yang kompeten di daerah masih terbatas, baik jumlah maupun kualitas dibandingkan dengan kebutuhan. Sebenarnya, untuk memperkuat lembaga-lembaga penyedia jasa konsultasi UMKM, beberapa lembaga internasional, seperti Bank Dunia, UNIDO, ADB, GTZ-Jerman Barat, dan lainnya telah banyak memberikan bantuan.

Peran Bank Sentral Dalam Pengembangan UMKM di Beberapa Negara

- **Korea Selatan**

Difinisi dan Struktur

Di dalam undang undang yang berlaku UMKM didefinisikan sebagai unit usaha dengan tenaga kerja kurang dari 1000 orang dan memiliki total asset kurang dari 500 billion won (mata uang Korea). Khusus untuk industri manufaktur, UMKM didefinisikan sebagai unit usaha manufaktur dengan tenaga kerja kurang dari 300 orang dan modal disetor sampai dengan delapan billion won. Akan tetapi, suatu usaha telah mempunyai kriteria di atas tidak dapat langsung

dikategorikan sebagai UMKM karena usaha tersebut masih harus memenuhi kriteria independensi kepemilikan dan manajemen, yaitu tidak mempunyai ikatan atau hubungan dengan salah satu grup usaha besar (konglomerat) yang ada di Korea Selatan. Usaha tersebut juga harus memenuhi ketentuan kepemilikan saham. Apabila usaha telah memiliki aset lebih dari 500 billion won, perusahaan tersebut hanya dapat memiliki sahamnya maksimum sebanyak 30%.

Difinisi UMKM telah ditetapkan di dalam undang-undang, yaitu unit usaha dengan tenaga kerja kurang dari 1000 orang dan memiliki total aset lebih kecil dari 500 juta won (mata uang Korea Selatan).

Tabel 3
Difinisi atau Kriteria UMKM di Korea Selatan

Klasifikasi	Jenis Industri	Jumlah Tenaga Kerja	Modal Disetor/ Volume Penjualan
Usaha Kecil	Manufaktur, Pertambangan Konstruksi, Lain-lain	Kurang dari 50 orang	
		Kurang dari 10 orang	
Usaha Menengah	Manufaktur	300 orang	Modal disetor 8 juta KRW
	Industri 2*	300 orang	Modal disetor 3 juta KRW
	Industri 3*	300 orang	Nilai penjualan 30 juta KRW
	Industri 4*	200 orang	Nilai penjualan 20 juta KRW
	Industri 5*	100 orang	Nilai penjualan 10 juta KRW
	Lain-lain	50 orang	Nilai penjualan 5 juta KRW

Sumber : Dagva Boldbaatar (2005)

Catatan : 1 US\$ = 1050 KRW/South Korean Won (Desember 2004)

Industri 2 = pertambangan, konstruksi, transportasi

Industri 3 = penjualan eceran di pusat perbelanjaan umum, hotel

Industri 4 = pembibitan tanaman dan perikanan

Listrik, gas, dan air

Grosir gas cair, gas padat, dan bahan bakar gas

Condominium, transportasi, agen perjalanan, pos dan telekomunikasi

Jasa engineering, rumah sakit, perfilman, dan penyiaran

Industri 5 = perdagangan umum, konsinyasi, kecuali kendaraan bermotor,

penjualan eceran, penyewaan mesin dan peralatan

jasa profesional teknik dan ilmiah

jasa penunjang bisnis, seni akting, persuratkabaran, tempat hiburan, pengolahan limbah

Kebijakan

Sumber pembiayaan utama UMKM berasal dari perbankan (73,2%) selain dari anggaran pemerintah (19,4%), lembaga keuangan

nonbank (3,4%), dan surat berharga (3,1%) dan bantuan luar negeri (0,9%). Masalah yang dihadapi UMKM di dalam memperoleh pembiayaan adalah kurangnya atau ketiadaan agunan sehingga bantuan pembiayaan juga diupayakan berasal dari bank sentral, bank umum, pemerintah, maupun lembaga keuangan lainnya. Pembinaan diutamakan pada peningkatan daya saing UMKM yang ada dari pada mendorong pendirian UMKM baru, proteksi, dan pengembangan atau diversifikasi usaha.

Peran Bank Sentral

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan daya saing sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar, campur tangan bank sentral juga secara bertahap dikurangi.

Bank Sentral memberikan insentif kepada bank bank yang mempunyai rasio pemberian kredit kepada UMKM dan rasio pengembalian kreditnya di atas rata-rata berupa kenaikan pagu/batas pemberian kredit sehingga memacu bank-bank untuk meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM.

Keterbatasan informasi mengenai kegiatan usaha menyebabkan bank bank enggan memberikan fasilitas pinjaman kepada UMKM sehingga bank sentral mengupayakan peningkatan bimbingan teknis dan pelonggaran persyaratan pemberian kredit dan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman aggregate.

- **Malaysia**

Difinisi

Difinisi UMKM terutama diperuntukkan kepada unit usaha yang bergerak dalam bidang industri, antara lain manufaktur dan industri jasa yang terkait dengan manufacturing related services (MRS), pertanian, dan jasa lainnya termasuk Information and Communication Technology (ICT)

Tabel 4
Difinisi atau Kriteria UMKM di Malaysia

Klasifikasi	Industri	Tenaga Kerja Tetap	Turn Over per tahun
Usaha Mikro	- Manufaktur, MRS - Pertanian - Jasa, termasuk ICT	- kurang dari 5 org - kurang dari 5 org - kurang dari 5 org	- Kurang dr 0,25 juta MYR - Kurang dr 0,25 juta MYR - Kurang dr 0,25 juta MYR
Usaha kecil	- Manufaktur, MRS - Pertanian - Jasa, termasuk ICT	- 5 s/d 50 org - 5 s/d 19 prg - 5 s/d 19 org	- 0,25 juta s/d 10 juta MYR - 0,20 juta s/d 1 juta MYR - 0,20 juta s/d 1 juta MYR
Usaha Menengah	- Manufaktur - Pertanian - Jasa, termasuk ICT	- 51 s/d 151 org - 20 s/d 50 org - 20 s/d 50 org	- 10 juta s/d 25 juta MYR - 10 juta s/d 25 juta MYR - 10 juta s/d 25 juta MYR

Sumber : Dagva Boldbaatar (2005)

Catatan : 1 US\$ = 3,8025 MYR/Malaysian Ringgit (Desember 2004)

Sampai dengan tahun 2003 terdapat 667000 usaha baru dan 92% di antaranya adalah UKM yang sebagian besar (77%) memiliki aset di bawah 5 juta ringgit dan 74% di antaranya mempunyai kurang dari 50 orang tenaga kerja. UKM bergerak di berbagai sektor dengan sektor utama perdagangan 33%, industri 32%, jasa 23%, konstruksi 8%, serta pertanian dan pertambangan 3%. Sampai dengan tahun 2004 Pemerintah Malaysia mengutamakan untuk mendorong sektor industri tekstil dan garmen (TPT), kayu dan hasil kayu, dan makanan.

Pembiayaan dari perbankan sebagian besar atau 61% dari total pinjaman diperuntukkan kepada tiga sektor utama, yaitu perdagangan, restoran dan hotel, serta industri dan konstruksi.

Kebijakan

Kebijakan untuk pengembangan UMKM telah dilaksanakan sejak tahun 1970 yang berlandaskan program utama untuk mengentaskan kemiskinan. Fokus utama adalah mengupayakan kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar multinasional. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah menyediakan bantuan pinjaman lunak melalui lembaga keuangan yang ditunjuk, lembaga

pemerintah maupun lembaga donor. Pemerintah juga memberikan keringanan pajak, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pelaku UMKM melalui program pelatihan dan pendidikan serta mendirikan pusat-pusat industri kecil.

Peran Bank Sentral

Untuk mendukung pengembangan UMKM, Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai bank sentral membuat kebijakan langsung dibidang keuangan antara lain menyediakan dana untuk pembiayaan UMKM melalui lembaga keuangan khusus yang ditunjuk untuk menyalurkan dana/ kredit dimaksud sekaligus menjamin risiko kredit. Selain itu bank sentral menetapkan pembagian portofolio kredit untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM. BNM juga mendirikan Perusahaan Penjaminan Kredit (Credit Guarantee Corporation) yang berhasil mendorong dan meningkatkan penyaluran kredit dari perbankan kepada UMKM. Untuk membantu upaya upaya yang telah dilaksanakan tersebut BNM melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai bank khusus melayani bidang UMKM, mendirikan Small Medium Enterprise (SME) Special Unit yang antara lain menyediakan layanan informasi kredit dan menyediakan database system keuangan UMKM, mengadakan penelitian, survey, forum diskusi dan diseminasi ketentuan perbankan, serta membantu membentuk pola penanggulangan masalah keuangan UMKM terutama yang terkait dengan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).

- **Philippines**

Difinisi

Negara Philippines mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja dan besarnya aset.

Tabel 5
Difinisi atau Kriteria UMKM di Philippines

Klasifikasi	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Aset
Usaha Mikro	1 s/d 9 orang	Kurang dari 3 juta PHP
Usaha Kecil	10 s/d 99 orang	3 juta s/d 15 juta PHP
Usaha Menengah	100 s/d 199 orang	15 juta s/d 100 juta PHP

Sumber : Dagva Boldbaatar (2005)

Catatan : 1US\$ = 56.050 PHP/Philippines Peso (Desember 2004)

Berdasarkan data, sampai dengan tahun 2001 telah berdiri 811.592 usaha baru dan 99,6% adalah UKM yang menyerap 69,1% dari total tenaga kerja dan bergerak di berbagai sektor ekonomi, terutama perdagangan dan keuangan, perumahan dan jasa dengan *share* antara 14,4% sampai 38,5%. Sedangkan, kontribusi nilai tambah penjualan adalah 30,7% dari total penjualan.

Kebijakan

Kebijakan untuk mengembangkan dan membina UKM dengan program pembinaan pemerintah dilakukan melalui pendirian lembaga pengembangan UKM dan lembaga penjaminan usaha kecil. Sedangkan, yang berkaitan dengan pembiayaan dilakukan berdasarkan undang-undang perbankan yang mengatur penyediaan bantuan pinjaman bagi UKM oleh perbankan maupun upaya menjamin kelancaran pengembalian pinjaman. Terdapat pula pengaturan bagi lembaga keuangan yang menetapkan pagu kredit bagi UKM sebesar 8% dari total penyediaan kredit.

Peran Bank Sentral

Bank Sentral berperan terutama di dalam menetapkan kebijakan makro dan mikro antara lain pengaturan akses kredit yang berorientasi pasar, penetapan persentase portofolio kredit, penilaian risiko kredit, kewajiban permodalan bagi bank yang berorientasi kepada pengembangan UMKM. Bank Sentral juga menetapkan kebijakan kelembagaan untuk mendorong perluasan pasar dan

jangkauan bank dan lembaga keuangan lain kepada UMKM. Dalam rangka pembinaan bank sentral melakukan dan memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan petugas bank atau lembaga keuangan lain. Disamping itu juga melaksanakan, penelitian, survey, penyediaan informasi, diseminasi dan forum diskusi bagi lembaga keuangan dan UMKM. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dan difasilitasi oleh bank sentral untuk mendorong pembiayaan kepada UMKM menuju pembentukan pasar keuangan dan pasar modal bagi UMKM.

- **Srilanka**

- Difinisi**

- Tidak terdapat definisi yang baku untuk UMKM, walaupun terdapat beberapa definisi UMKM yang digunakan. Secara umum UMKM di Srilanka didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu unit usaha. Suatu unit usaha dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 30 orang dikategorikan sebagai usaha kecil, sedangkan unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 30 sampai dengan 149 dikategorikan sebagai usaha menengah, dan jumlah tenaga kerja mencapai lebih dari 150 orang dikategorikan sebagai usaha besar.

Tabel 6
Difinisi atau Kriteria UMKM di Srilanka

Institusi	Klasifikasi	Aktiva Tetap	Modal Investasi Mesin Peralatan	Tenaga Kerja	Ekspor
Industrial Development Board	Mikro kecil menengah	- - -	- < 4 juta LKR -	- 6 s/d 49 org -	- - -
Task Force For SME Dev. Program	Kecil menengah	1 s/d 20 jt LKR 20 s/d 50 jt LKR	- -	- -	- -
National Dev. Bank & DFCC Bank	A B C	- - -	< 10 juta LKR < 15 juta LKR < 70 juta LKR	- - -	- - -
Export Dev. Board	Kecil & menengah	-	< 5 mil LKR	-	< 40 mil LKR
Dept. of Small Industries	Kecil & menengah	-	< 5 mil LKR	< 50 org	-

Sumber : Dagva Boldbaatar (2006)
1 USS = 104,65 LKR/Srilankan rupee (Desember 2004)

Kebijakan

Kebijakan pemerintah mengenai pengembangan UMKM tertuang di dalam Strategi Nasional untuk Pengembangan sektor UMKM tahun 2002 yang mengutamakan upaya penguatan UMKM di dalam era kompetisi global yang ditunjang oleh kewirausahaan handal dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah tidak berkecimpung langsung tetapi dengan menciptakan keadaan ekonomi yang menunjang melalui pengaturan kelembagaan, menyediakan infrastruktur, kepastian hukum, fasilitas dan akses informasi dan teknologi, juga akses kepada pembiayaan, akses pasar dan hubungan industry ketenagakerjaan. Atas dasar strategi tersebut pemerintah Srilanka mendirikan Bank UMKM, mendirikan lembaga lembaga pendidikan kejuruan, memberikan fasilitas bebas bea masuk import mesin mesin berteknologi tinggi dan memperluas pola bantuan teknis kepada UMKM.

Peran Bank Sentral

Bank of Ceylon (BOC) sebagai bank sentral sangat berperan di dalam upaya mengembangkan UMKM di Srilanka melalu kebijakan kebijakan struktural yang bersifat internal maupun eksternal.

Perbaikan internal dilakukan antara lain dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas atau staf analis kredit di dalam menilai kelayakan kredit UMKM sehingga penilaian diprioritaskan kepada kelayakan usaha tidak hanya berdasarkan proyeksi keuntungan semata. Selain itu, BOC juga mendirikan dan menambah kantor-kantor cabangnya serta mendorong pendirian bank-bank pembangunan daerah untuk meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM.

BOC juga memberikan fasilitas pembiayaan melalui kredit program dengan dana berasal dari lembaga-lembaga keuangan di luar BOC, di samping mengelola fasilitas kredit program khusus untuk pembiayaan UMKM yang dilaksanakan oleh bank pembangunan di daerah sekaligus mengelola skema penjaminan kredit untuk kredit program tersebut. Sementara itu, berdasarkan undang-undang perbankan yang berlaku, BOC menjamin kredit yang diberikan oleh institusi perbankan di Srilanka.

- **Taiwan**

Difinisi dan Struktur

Secara resmi Taiwan mendefinisikan UMKM berdasarkan komponen neraca, modal di setor dan pendapatan operasional untuk industri manufaktur, konstruksi, pertambangan maupun perdagangan dan jasa.

Tabel 7
Difinisi atau Kriteria UMKM di Taiwan

Klasifikasi	Industri	Kriteria Utama	Tenaga Kerja
Usaha Mikro	A B	Tidak ada Tidak ada	Kurang dari 20 orang Kurang dari 5 orang
Usaha Kecil dan Menengah	A	Modal di setor kurang dari 80 juta TWD dan Pendapatan tahun berjalan kurang dari 100 juta TWD	Kurang dari 20 orang Kurang dari 50 orang

Sumber : Dagva Boldbaatar (2005)

Catatan : 1 US\$ = 33,4 TWD / New Taiwanese Dollar (Desember 2004)

Industri :

A : manufaktur, konstruksi, dan pertambangan

B : industri lainnya, pertanian, kehutanan, perikanan, sarana public, perdagangan, infrastruktur, keuangan, asuransi, perumahan, dan jasa

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan pelopor kegiatan perdagangan luar negeri dan kekuatan utama untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi Taiwan. Pada tahun 2003 jumlah UKM mencapai 98% dari total jumlah perusahaan yang ada di Taiwan dengan nilai perdagangan dalam negeri (total domestic sales) 84,75% dan nilai ekspor 15,25%, sedangkan perusahaan besar yang berjumlah 2% dari total jumlah perusahaan memiliki nilai perdagangan dalam negeri (total domestic sales) 68,33% dan ekspor 31,67%. Berdasarkan hal tersebut, maka UKM dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 78% dari jumlah tenaga kerja secara keseluruhan. Sebagian besar UKM atau 53,33% bergerak di bidang perdagangan grosir dan ritel, 11,65% di bidang industri manufaktur, 7,42% di bidang hotel dan restoran, serta selebihnya di sektor usaha lainnya. Umumnya UKM sebesar 58,74% adalah milik perorangan, 27,12% berbentuk perseroan terbatas, perusahaan patungan 9,76% dan selebihnya bentuk usaha lainnya.

Kebijakan

Pola pendanaan UKM di Taiwan bergantung pada sistem keuangan yang ada dan bantuan pemerintah. Sistem keuangan Taiwan terdiri dari pasar saham (financial market) dan lembaga keuangan, antara lain bank komersial lokal (domestic commercial bank) dan bank khusus (specialised banks). Dua bank komersial lokal mendanai UKM dengan nilai mencapai 73,68% dari total pemberian kredit perbankan kepada UKM.

Bantuan pemerintah umumnya berupa bantuan teknis dengan sistem pembinaan keuangan (financial guidance system), adapula yang berupa pinjaman untuk kebutuhan khusus dan penerapan sistem penjaminan kredit. Bantuan teknis dan pembinaan bertujuan meningkatkan kemampuan pengelolaan / manajemen

keuangan dan pengawasan intern, meningkatkan permodalan, dan memenuhi persyaratan untuk keikutsertaan dalam sistem penjaminan kredit.

Peran Bank Sentral

Selain peran umum di atas, secara khusus bank sentral Taiwan memberikan bantuan pinjaman atas dasar kebijakan tertentu antara lain kredit ekspor, kredit bantuan likuiditas, kredit jangka menengah dan panjang untuk pembiayaan infrastruktur proyek, pinjaman valuta asing untuk pembiayaan peningkatan teknologi dan pinjaman darurat. Bank sentral Taiwan mendorong UKM memanfaatkan dan mengikuti sistem penjaminan kredit yang merupakan upaya menjembatani hubungan UKM dengan perbankan. Mengingat pada umumnya UKM tidak dapat memenuhi persyaratan jaminan pada saat mengajukan permohonan kredit kepada perbankan, maka lembaga penjamin kredit memberikan jaminan atas pinjaman yang diberikan perbankan kepada UKM. Selain itu, bank sentral juga berupaya agar UKM dapat memperoleh fasilitas kredit yang memenuhi persyaratan kehati-hatian berdasarkan ketentuan Komisi untuk prinsip-prinsip ketentuan pengawasan perbankan yang berkedudukan di Basel, Swiss (Basel Committee on Banking Supervision).

- **Thailand**

Difinisi

Kementerian perindustrian mendefinisikan UKM (Usaha Kecil Menengah) berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai aktiva tetap, tidak termasuk kepemilikan lahan.

Tabel 8
Difinisi atau Kriteria UMKM di Thailand

Klasifikasi	Industri	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Aset (million baht)
Usaha Kecil	Manufaktur, jasa, grosir eceran	Kurang dari 50 orang Kurang dari 25 orang Kurang dari 15 orang	Kurang dari 50 juta THB Kurang dari 50 juta THB Kurang dari 30 juta THB
Usaha Menengah	Manufaktur, jasa, grosir eceran	51 orang s/d 200 orang 26 orang s/d 50 orang 16 orang s/d 30 orang	50 juta s/d 200 juta THB 50 juta s/d 100 juta THB 30 juta s/d 60 juta THB

Sumber : Dagva Boldbaatar (2005)

Catatan : 1 US\$ = 38,92 THB/ThaiBaht (Desember 2004)

Tidak dapat dipungkiri bahwa UKM sangat berperan di dalam pengembangan kewirausahaan di Thailand. Berdasarkan data tahun 2002, UKM dapat menyerap 70% dari total tenaga kerja serta kontribusi produksi UKM adalah 38,9% dari GDP dan 40% dari total ekspor. Sebagian besar UKM (36,4%) bergerak di bidang perdagangan (grosir dan eceran) diikuti industri (33,4%) dan jasa (30,1%). Bentuk badan hukum UKM berupa (93,3%) usaha perorangan selebihnya perusahaan umum, perusahaan terbatas, koperasi, dan badan usaha negara.

Kebijakan

Setelah masa krisis ekonomi tahun 1997 pemerintah Thailand memutuskan untuk mengembangkan UKM sebagai alternatif untuk menggerakkan dan memulihkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan yang mencakup evaluasi kebijakan dan pengembangan aspek keuangan. Strategi pengembangan UKM tercantum di dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Thailand yang memprioritaskan antara lain pada segi pemasaran, sumberdaya manusia dan manajemen, teknologi, infrastruktur dan pengaturan. Sementara khusus untuk aspek keuangan diprioritaskan kepada masalah akses UKM kepada pembiayaan, penjaminan kredit dan agunan.

Akses kepada pembiayaan diupayakan selain melalui perbankan juga melalui pasar modal, pasar komoditi dan lembaga pembiayaan

khusus, seperti modal ventura maupun maupun program dana pedesaan. Di samping itu, untuk menjamin kredit, pemerintah mendirikan perusahaan penjaminan kredit industri kecil dan untuk mengatasi masalah kolateral atau ketiadaan jaminan kredit didirikan assets capitalization bureau.

Peran Bank Sentral

Peran bank sentral yang utama dalam pengembangan UKM adalah memperbaiki struktur lembaga keuangan sehingga UKM dapat memperoleh kemudahan akses pembiayaan maupun pembinaan keuangan langsung dari lembaga lembaga keuangan tersebut.

Walaupun kebijakan pemerintah telah membantu mengatasi masalah akses untuk memperoleh pembiayaan namun dilapangan masih terjadi kendala, terutama akses pembiayaan untuk usaha mikro skala rumahtangga atau usaha informal. Berdasarkan hal tersebut bank sentral melakukan restructuring lembaga lembaga keuangan yang ada agar dapat lebih mudah memberikan akses pembiayaan kepada UKM melalui suatu Perencanaan Utama (Master Plan) yang mempunyai tujuan: memberikan jasa keuangan secara terpadu dan efisien dengan tetap mengutamakan perlindungan konsumen. Bank Sentral juga membentuk program bimbingan dan pendampingan keuangan selain membantu menyediakan pinjaman lunak melalui pemerintah atau lembaga donor dan menyediakan pusat informasi kredit serta bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan penjaminan terhadap risiko kredit. Pembinaan dilakukan antara lain melalui jasa konsultasi dan pendampingan, juga melaksanakan penelitian, survei, forum diskusi dan diseminasi ketentuan.

Peran Bank Indonesia Dalam Pengembangan UMKM

Peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM dibedakan dalam dua periode, yaitu kebijakan pengembangan UNKM sebelum berlakunya undang-undang no.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan kebijakan pengembangan UMKM setelah berlakunya undang-undang. Sebelum berlakunya undang-undang, peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM bersifat langsung, dengan memberikan bantuan keuangan, berupa penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan memberikan bantuan teknis dengan mendirikan berbagai proyek pengembangan UMKM seperti, Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK), dan Proyek Kredit Mikro (PKM). Sedangkan setelah berlakunya undang-undang no.23 tahun 1999, peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM relative terbatas dan bersifat tidak langsung, yaitu melalui kebijakan kredit perbankan dan pemberian bantuan teknis secara terbatas.

Kebijakan pengembangan UMKM sebelum Undang- undang Republik Indonesia nomor. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor. 3 tahun 2004

Tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Di bidang perkreditan, tugas pokok tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan menetapkan Bank Indonesia untuk menyusun rencana kredit dalam suatu jangka waktu tertentu, menetapkan tingkat dan struktur bunga serta menetapkan pembatasan kuantitatif dan kualitatif atas pemberian kredit oleh

perbankan. Sementara itu, yang menjadi dasar pijakan berbagai kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, sejak dimulainya pembangunan jangka panjang tahap pertama, tahun 1969/1970 termasuk kebijakan moneter dan perkreditan adalah Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sejak permulaan pembangunan tersebut, GBHN telah menetapkan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu antara lain mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, maka pelaksanaan pembangunan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan, yakni Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan memantapkan kestabilan ekonomi dan politik, dengan menekankan pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebenarnya seluruh bank sentral di dunia, termasuk bank sentral di negara-negara anggota SEACEN, berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk sector UMKM, di samping melaksanakan tugas pokok memelihara kestabilan moneter dan nilai mata uang negara masing. Perbedaannya adalah pada kedalaman sifat bantuan atau piranti yang digunakan, ada yang bersifat langsung melakukan pengaturan pemberian kredit perbankan untuk mendorong sektor tertentu yang dianggap prioritas, dengan atau tanpa penyediaan bantuan kredit; dan dengan, atau tanpa subsidi suku bunga; atau melalui piranti tidak langsung, misalnya melalui pengaturan reserve requirement, atau bentuk bentuk insentif lainnya.

Kebijakan Kredit Selektif (Selective Credit Policy)

Kebijakan kredit selektif dengan menggunakan dana bank sentral atau otoritas fiskal merupakan kebijakan yang lazim dilakukan oleh Negara negara berkembang, terutama di Asia. Kebijakan kredit selektif, yang seringkali juga disebut sebagai kredit langsung atau kredit prioritas atau kredit bersubsidi merupakan suatu instrumen yang dikenal sebagai

Policy-Based Lending (Maman Hendarman 1998). Kebijakan ini dirancang untuk mengalokasikan sumber dana ke sektor prioritas, baik untuk tujuan ekonomi maupun tujuan sosial. Kebijakan ini merupakan satu instrument yang hanya bermanfaat apabila dirancang dan diimplementasikan secara tepat dan tidak berlebihan, bersifat sementara untuk kebutuhan jangka pendek, adanya sasaran dan kriteria target group yang jelas, serta perlu disertai dengan pengawasan yang baik, dan dengan tetap memperhatikan stabilitas moneter.

Pemerintah melakukan kebijakan penyempurnaan system perkreditan, termasuk penyempurnaan program perkreditan untuk usaha kecil, yang dikenal dengan Paket Januari 1990 (PAKJAN 90), yang pada dasarnya mengarah pada pengurangan secara mendasar peranan KLBI dan perampingan skim kredit prioritas yang ditunjang oleh dana bank sentral.

Tujuan PAKJAN 90 Yaitu :

- memantapkan fungsi perbankan dan lembaga keuangan sebagai pengelola dan pelaksana sistem perkreditan nasional
- memantapkan peranan Bank Indonesia sebagai pemelihara keseimbangan moneter, sekaligus sebagai pembina dan pengawas perbankan agar bank-bank di Indonesia dapat berkembang makin sehat
- menyehatkan sistem perkreditan nasional
- menyempurnakan program kredit bagi usaha kecil.

Dengan adanya kebijakan PAKJAN 90 pada prinsipnya telah terjadi perubahan yang mendasar dalam kebijakan kredit di Indonesia yang diperankan oleh Bank Indonesia, yaitu dari subsidized selective credit policy menjadi market oriented credit policy, termasuk kebijakan kredit bagi usaha kecil yang menganut sistem kuota.

Kebijakan Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan Sistem Kuota

Kebijakan KUK dengan sistem kuota sebenarnya juga diterapkan pada beberapa negara di Asia; Thailand dan Malaysia pernah menganut kebijakan kredit ini pada tahun 80-an. Meskipun dalam kebijakan kredit ini masih ada campur tangan bank sentral, namun pembiayaan, prosedur, dan berbagai persyaratan kredit diserahkan kepada bank. Adapun yang menjadi dasar penerapan sistem ini, adalah menurut pengalaman di banyak Negara maupun di Indonesia sendiri, pemberian kredit menggunakan suku bunga pasar kepada UMKM tidak merupakan masalah. Menurut pengalaman tersebut tersedianya dana kredit dalam jumlah yang cukup dan pada waktu yang tepat bagi usaha kecil, adalah lebih utama dari pada harga/suku bunga. Selain itu, dengan adanya kewajiban penyaluran KUK dengan batasan minimum 20 % berarti lebih memberikan kepastian tersedianya dana dari perbankan untuk usaha kecil. Di samping itu, dengan dukungan dan partisipasi menyeluruh dari semua bank, diharapkan dapat makin meningkatkan dan memperbesar kemampuan serta peranan usaha kecil dan koperasi dalam pembangunan nasional, yang pada gilirannya akan membantu tercapainya sasaran pemerataan, kesempatan berusaha, dan penciptaan lapangan kerja.

Adapun definisi atau batasan dari KUK menurut Surat Edaran Bank Indonesia no.22/4/UKK tanggal 29 Januari 1990 adalah kredit yang diberikan kepada usaha yang memiliki aset total maksimum sebesar Rp600 juta, tidak termasuk nilai rumah dan tanah yang ditempati (kriteria usaha kecil), untuk membiayai usaha yang produktif dan KPR tipe 70 ke bawah, dengan maksimum kredit kepada masing-masing nasabah sebesar Rp. 200 juta. Selanjutnya, agar ketentuan KUK tersebut dapat terlaksana secara efektif, maka pemberian KUK oleh perbankan diperhitungkan dalam tingkat kesehatan bank masing-masing bank, dengan ketentuan bank-bank yang berhasil mencapai atau melebihi target

pemberian KUK 20 % akan memperoleh nilai kredit, yang berarti menambah tingkat nilai kesehatan bank, sedangkan bank-bank yang tidak dapat mencapai target tersebut, akan mendapat sanksi yang mengurangi tingkat nilai kesehatan bank.

Di samping penyempurnaan ketentuan KUK, Bank Indonesia tetap mengupayakan penyediaan dana Two Step Loan (TSL) untuk pemberian KUK, yang diperoleh dari lembaga lembaga internasional, antara lain dari bank Exim Bank of Japan (EXIM VI) untuk KUK dan modal ventura, Exim Bank of Taiwan untuk kredit koperasi, Bank Dunia untuk Solar Home System (SHM), OECF untuk Pollution Abatement Equipment (PAE), dan dari ADB untuk Proyek Kredit Mikro (PKM).

Ketika krisis moneter yang terjadi pada Juli 1997, yang terjadi pula pada sektor perbankan, telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut, yang ditandai dengan penarikan dana masyarakat secara besar-besaran, menyebabkan terjadinya kenaikan suku bunga, yang disertai dengan kenaikan biaya dana. Hal ini mengakibatkan terganggunya kegiatan intermediasi di sektor perbankan sehingga aliran dana untuk membiayai kegiatan investasi dan produksi mengalami berbagai hambatan, berhentinya kegiatan pemberian kredit baru, termasuk pemberian KUK dan pemberian kredit program seperti skim KKPA, dan KKUD.

Untuk mengurangi dampak negatif krisis tersebut, terutama bagi para petani dan pengusaha kecil, maka Bank Indonesia mempertimbangkan kembali arah kebijakan kredit kepada usaha kecil dan koperasi, antara lain memperlunak persyaratan bank pelaksana kredit program, dengan mempertimbangkan bank yang cukup sehat untuk ikut menyalurkan kredit tersebut; meningkatkan pangsa KLBI dalam penyaluran kredit program untuk swasembada pangan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi menjadi 100%; menyempurnakan ketentuan beberapa skim

kredit program antara lain mengubah pola penyaluran KUT diubah dari pola executing menjadi channeling, dan memperluas skim kredit untuk pembiayaan usaha kecil, termasuk usaha mikro, serta meningkatkan peranan Lembaga Keuangan Pedesaan, termasuk BPR dan BPRS dalam pengembangan usaha kecil melalui penyediaan KLBI yang disalurkan melalui BPR/BPRS tersebut.

Bantuan Teknis

Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK)

Guna mendorong bank-bank memberikan kredit kecil atas dasar kelayakan usaha, dan bukan hanya berdasarkan tersedianya agunan yang cukup, serta untuk menunjang program kredit kecil, yaitu KIK/KMKP, maka pada bulan September 1978, Bank Indonesia secara resmi memberikan bantuan teknis kepada perbankan dengan mendirikan Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK) atau Small Enterprise Development Project (SEDP). Pelaksanaan proyek ini mendapat bantuan teknis dari Bank Dunia, yang kemudian diikuti dengan bantuan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan beberapa Negara donor lainnya yang tertarik pada proyek ini. Bantuan teknis tersebut diberikan dalam satu paket dengan komponen dana untuk pemberian KIK/KMKP sebagai bentuk bantuan keuangan.

Kegiatan PPUK sebenarnya meliputi seluruh Indonesia, yang dilakukan oleh PPUK Koordinator dan PPUK cabang. Tujuan utama dibentuknya PPUK adalah meningkatkan akses usaha kecil kepada kredit perbankan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh PPUK meliputi sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek adalah meningkatkan kemampuan staf perkreditan perbankan dalam mempersiapkan program perkreditan yang sehat untuk menunjang pengembangan usaha kecil, yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian kredit kecil oleh perbankan. Sedangkan, sasaran jangka panjang untuk mengubah

cara pendekatan bank dalam pemberian kredit kecil, yaitu dengan pendekatan development banking, bukan dengan usaha pendekatan commercial banking. Dengan demikian, bank dalam pemberian kredit tidak semata-mata mendasarkan tersedia agunan yang mencukupi, tetapi lebih menitikberatkan kepada kelayakan usaha dari pengusaha kecil.

Seiring dengan berjalannya waktu, setelah PPUK beroperasi selama kurang lebih delapan tahun, pada tahun 1986 dilakukan evaluasi atau studi terhadap keragaan PPUK dan peranannya di masa yang akan datang (the future role of PPUK). Atas dasar studi tersebut, dan adanya kebutuhan masyarakat, maka dilakukan penyempurnaan beberapa kegiatan PPUK, antara lain PPUK juga memberikan konsultasi kepada kelompok nasabah atau calon nasabah (client services). Sementara itu, pada tahun 1987, Bank Dunia, MEE, dan negara-negara donor lainnya menghentikan bantuan mereka. Namun, mengingat keberadaan PPUK masih diperlukan, proyek ini tetap dilanjutkan dengan sumber dana dari Bank Indonesia.

Proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK)

sejak tahun 1989 Bank Indonesia, dengan bantuan dari Pemerintah Jerman Barat, mulai merintis pengembangan usaha mikro dan masyarakat pedesaan yang berpendapatan rendah, sekaligus untuk membantu program pengentasan kemiskinan, dengan mendirikan Pilot Proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat, yang dikenal dengan PPHBK. Model atau strategi yang dikembangkan melalui pilot proyek ini adalah pembinaan dan pemberian kredit bank dilakukan melalui kelompok. PPHBK ini pada dasarnya merupakan perluasan cakupan sasaran kegiatan PPUK, yang semula usaha kecil, diperluas mencakup usaha mikro, yang dikelola dengan strategi dan pendekatan yang berbeda dengan pembinaan usaha kecil.

Tujuan PPHBK adalah meningkatkan akses usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah kepada kredit perbankan. Sedangkan, sasaran pilot proyek ini adalah tersedianya pelayanan keuangan yang layak bagi Kelompok Swadaya Masyarakat /Kelompok Simpan Pinjam (KSM/KSP), yang mempunyai kegiatan ekonomi dan beranggotakan petani kecil serta pengusaha mikro di sektor informal pedesaan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan PPHBK diarahkan untuk memperkuat KSP/KSM sebagai lembaga keuangan informal dan memprakarsai/mempromosikan hubungan bank dengan kelompok-kelompok tersebut, melalui kegiatan identifikasi lembaga-lembaga yang terpilih, pemberian pelatihan, dan penelitian, dengan memberdayakan lembaga-lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), sebagai Lembaga yang membentuk/membina KSP/KSM.

Sementara itu, untuk mendorong kelancaran pelaksanaan PHBK, telah dibentuk satuan tugas atau task force yang berskala nasional atau dikenal dengan National Task Force (NTF), yang beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah (Bappenas dan Bank Indonesia), Perbankan (BRI dan Bukopin),serta LPSM. NTF ini mengadakan pertemuan secara rutin tiga bulan sekali,antara lain untuk memonitor dan membahas permasalahan yang terjadi di lapangan.

Proyek Kredit Mikro (PKM)

Dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, sekaligus untuk menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan peran wanita dalam pembangunan, Bank Indonesia dengan bantuan Asian Development Bank (ADB) mengembangkan pelayanan kepada usaha mikro di pedesaan melalui implementasi Proyek Kredit Mikro (PKM) di Indonesia pada tahun 1995. Bantuan ADB ini meliputi bantuan teknis dan bantuan keuangan. Pelaksanaan PKM, dengan sasaran peningkatan taraf hidup sekitar 300.000 nasabah mikro ini, pada

dasarnya merupakan pelengkap dari PHBK, yang memberikan keluwesan dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro, yang dapat dilakukan baik secara individual atau kelompok oleh lembaga keuangan peserta proyek. Selain itu, target group dari proyek ini meliputi pula penguatan kelembagaan dari lembaga keuangan peserta proyek, yang terdiri dari BPR, LDKP, LPSM dan BPD, dengan pemberian bantuan kredit untuk pembelian komputer dan kendaraan bermotor kepada lembaga tersebut, di samping pengembangan SDM nya melalui berbagai pelatihan. Untuk tahap pertama, proyek dilaksanakan selama lima tahun, sampai tahun 2000 di lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Kebijakan Pengembangan UMKM setelah Undang- undang Republik Indonesia nomor. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor. 3 tahun 2004

Undang-undang no.23 tahun 1999 (UU) tentang Bank Indonesia, yang disempurnakan dengan Undang-undang no. 3 tahun 2004, sebagai pengganti Undang-undang no.13, tahun 1968 tentang Bank Sentral, telah membuka lembaran baru bagi peran Bank Indonesia dalam membantu pengembangan UMKM di Indonesia, setelah hampir 35 tahun mengarungi keterlibatan nya secara langsung dan mendalam untuk pengembangan sector usaha tersebut. UU no.23 tahun 1999, yang disahkan dan mulai berlaku pada 17 Mei 1999, memberikan kedudukan kepada Bank Indonesia, sebagai lembaga negara yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Tujuan atau misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tercermin pada laju inflasi yang rendah serta nilai tukar yang wajar dan stabil, yang merupakan

sebagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tiga tugas yang saling terkait, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta mengatur dan mengawasi bank.

Dengan terfokusnya tujuan dan tugas-tugas Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan kredit likuiditas dalam rangka kredit program, sedangkan tugas pemberian kredit program dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah, termasuk pengalihan pinjaman penerusan yang dananya berasal dari luar negeri dan bantuan teknis dalam rangka kredit program. Pengalihan kredit program ini dijelaskan dalam pasal 74 UU no.23 tahun 1999, sebagai berikut :

1. KLBI dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada BUMN yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama enam)bulan sejak berlakunya UU ini.
2. BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas tersebut berakhir.
3. Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjadi beban Pemerintah.

Selanjutnya untuk kelangsungan pembiayaan kredit program dan bantuan teknis kepada usaha kecil dan koperasi menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan adanya kebijakan tersebut, Bank Indonesia tidak

memiliki kewenangan lagi untuk berperan langsung dalam membantu pengembangan UMKM, baik dalam pemberian bantuan keuangan maupun bantuan teknis.

Kebijakan Kredit Usaha Kecil Persuasif

Sebagai dampak dari krisis ekonomi tahun 1997, sebagian besar bank mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan kewajiban penyaluran KUK sehingga banyak bank bank yang terkena sanksi. Selain itu, ketentuan kewajiban pemberian KUK ini menjadi perhatian dari beberapa lembaga internasional, seperti ADB dan IMF, terutama dalam kaitannya dengan pemberian bantuan kepada Indonesia. Sebagian bank mengusulkan agar besarnya persentase pemberian KUK diserahkan/disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik masing-masing bank, dan plafon KUK diusulkan untuk dinaikkan menjadi sebesar Rp500 juta, dengan pertimbangan adanya kenaikan harga-harga, yang meningkatkan kebutuhan investasi dan biaya produksi.

Inti dari kebijakan pemberian KUK berdasarkan PBI No. 3/2/PBI/2001, adalah bahwa Bank Indonesia tidak lagi menetapkan besarnya kewajiban KUK kepada bank, melainkan berupa anjuran kepada bank-bank untuk menyalurkan KUK yang besarnya diserahkan kepada kebijakan dan kemampuan masing-masing bank, dengan ketentuan, bank wajib mencantumkan rencana pemberian KUK dalam bussines plan dan mengumumkan kepada masyarakat jumlah realisasi KUK secara periodik. Kebijakan KUK persuasif tersebut pada dasarnya lebih memberikan keleluasaan kepada bank-bank dalam mengatur dan merencanakan pemberian kredit, dengan mencantumkan dalam bussines plan, dan melaporkannya dalam laporan keuangan publikasi secara berkala.

Sementara itu, untuk meningkatkan pemberian KUK tersebut Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan relaksasi ketentuan antara lain dalam perhitungan kualitas aktiva produktif, khusus untuk kredit kepada

usaha kecil, penilaian terhadap kolektibilitas kredit tersebut tidak lagi berdasarkan prospek usaha dan laporan keuangannya, hanya dinilai berdasarkan ketepatan membayar angsuran kredit.

Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan

Untuk itu, guna lebih meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM, Bank Indonesia berupaya untuk mendorong pengembangan dan memperkuat kapasitas kelembagaan, baik dari sisi suplai, yaitu bank-bank dan lembaga keuangan lainnya, dan penguatan dari sisi demand, seperti lembaga-lembaga pendamping.

Pengembangan Kelembagaan Perbankan

Bank Indonesia mendorong kelembagaan perbankan baik bank umum maupun BPR untuk lebih berperan dalam pelayanan kepada UMKM. Bank-bank umum, didorong untuk membentuk unit kerja khusus yang melayani UMKM baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang (UMKM Center) dan atau membuka kantor-kantor cabang pembantu khusus untuk pelayanan UMKM. Pada saat ini terdapat beberapa bank umum yang telah membuka UMKM Center, bahkan ada bank umum yang membuka Unit Khusus Simpan Pinjam untuk melayani usaha mikro. Selain itu Bank Indonesia membantu meningkatkan kemampuan Loan Officer bank-bank yang menangani UMKM melalui berbagai pelatihan dan konsultasi.

Kehadiran bank-bank syariah yang marak berkembang pesat beberapa tahun belakangan ini memberikan dampak positif dalam pengembangan UMKM, dengan menyediakan skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, antara lain berupa bagi hasil.

Secara kelembagaan, meskipun jumlah bank umum syariah masih sedikit, jumlah kantor atau cabang bank, termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) semakin meningkat. Dalam pada itu, untuk memperluas pelayanan bank tersebut kepada masyarakat, Bank Indonesia mengeluarkan

kebijakan Office Channeling, yaitu masyarakat dapat membuka atau menjadi nasabah bank syariah melalui kantor-kantor bank umum konvensional dari bank yang sama.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga terus meningkatkan penguatan kelembagaan dan kapasitas BPR dalam memberikan pelayanan kepada usaha kecil dan mikro. Penguatan kelembagaan dilakukan dengan meningkatkan permodalan melalui restrukturisasi atau merger, memfasilitasi pembentukan Apex bank bagi BPR, dan memperkuat pendanaan BPR melalui kerja sama antara bank umum dan BPR (linkage program).

Di samping itu, untuk mendorong dan memperkuat pengembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia, Bank Indonesia memfasilitasi antara lain dengan pembentukan kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari berbagai instansi terkait untuk mempersiapkan konsep undang-undang tentang pembiayaan mikro. Pada saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 50.000 lembaga keuangan mikro bukan bank, dengan kewenangan pengaturan dan status hukum yang masih belum jelas. Oleh karena itu, untuk pengembangannya diperlukan bantuan dan pembinaan yang terencana dan terorganisasi dengan baik yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Pengembangan Lembaga Pendukung

Untuk meningkatkan akses UMKM kepada kredit perbankan, diperlukan pula peranan dari lembaga-lembaga pendukung pengembangan UMKM, antara lain lembaga penjaminan kredit dan lembaga-lembaga pendamping. Untuk meningkatkan peranan lembaga penjaminan, Bank Indonesia terus memfasilitasi kerja sama antara lembaga penjaminan kredit (PT Askrido) dengan beberapa Pemerintah Daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) tentang pemberian penjaminan kredit kepada UMKM.

Untuk memperluas informasi tentang pelayanan bank, terutama skim-skim kredit UMKM, Bank Indonesia telah mengkoordinasikan asosiasi perbankan di daerah atau yang dikenal dengan badan musyawarah perbankan daerah (BMPD) untuk mengadakan bazar intermediasi perbankan di daerah-daerah secara berkala, dengan peserta terdiri dari para UMKM dan berbagai lembaga yang terkait dalam pembinaan UMKM. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa forum bazar ini memberikan dampak positif terhadap usaha UMKM dan bank, antara lain adanya realisasi kredit bank kepada UMKM.

Bantuan Teknis

Pemberian bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia sejak diberlakukannya UU No.23 tahun 1999, yang semula bernaung dalam wadah PPUK, termasuk PHBK dan PKM, disempurnakan menjadi satu naungan, yakni bantuan teknis pengembangan usaha kecil dan mikro (PUKM), dengan fokus kegiatan tetap pada pelatihan, penelitian, dan sosialisasi tetapi diberikan secara terbatas.

Selanjutnya, untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi yang ada, pemberian bantuan teknis dalam rangka UMKM dilakukan beberapa penyempurnaan antara lain kegiatan bantuan teknis meliputi pelatihan dan atau penyediaan informasi, dan lembaga penerima pelatihan adalah bank, lembaga pembiayaan UMKM (nonbank) dan lembaga penyedia jasa pendampingan/pembinaan di bidang non keuangan (LPJ).

Di lain pihak, dalam pembinaan UMKM, penyediaan informasi sangat memegang peranan penting karena salah kendala yang cukup mendasar dalam pemberian kredit oleh bank kepada UMKM adalah keterbatasan informasi yang berkaitan dengan kondisi UMKM. Untuk itu, Bank Indonesia menyediakan dan memfasilitasi berbagai jenis informasi yang dibutuhkan bank maupun UMKM, yang dikemas dalam suatu sistem

informasi terpadu pengembangan usaha kecil (SIPUK). Sitem ini terdiri dari informasi tentang baselineeconomic survey (SIB) yang berisikan potensi berbagai subsektor/ komoditi prioritas atau komoditi unggulan di seluruh Indonesia, yang dapat dibiayai bank; sistem informasi agroindustri berorientasi ekspor (SIABE), yang berisikan berbagai komoditi yang berorientasi ekspor di bidang agroindusri, dan informasi pola pembiayaan atau lending model untuk berbagai komoditi skala usaha kecil (SILMUK); sistem penunjang keputusan untuk investasi (SPKUI), dan sistem informasi prosedur memperoleh kredit (SIPMK). SIPUK ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di www.bi.go.id.

Di samping itu, Bank Indonesia memfasilitasi dialog antara dunia usaha, pemerintah, dan perbankan untuk membahas upaya untuk meningkatkan intermediasi perbankan; dan bekerja sama dengan Swisscontact mengembangkan program kupon akses keuangan (KasKu) UMKM terhadap pembiayaan perbankan, yang di uji coba di Bandung. Program ini berupa penyediaan informasi melalui internet tentang daftar UMKM yang potensial dibiayai bank.

Pengembangan model proyek percontohan UMKM melalui klaster, dan membentuk Tim Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TFPPED) untuk lebih mengefektifkan sarana koordinasi lintas instansi di daerah.

TFPPED merupakan kelompok kerja lintas instansi untuk memfasilitasi percepatan pemberdaan sector riil/UMKM, yang bersifat implementatif dengan output yang jelas dan cepat dirasakan hasilnya, terutama dalam bentuk realisasi pembiayaan dari perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya kepada sector riil/ UMKM.

Modul 20 Pertemuan 20

Soal Pilihan Ganda dan Esay :

1. Yang termasuk dalam indikator atau kriteria yang lazim digunakan dalam definisi UMKM **kecuali** :
 - a. Besarnya volume usaha
 - b. Besarnya modal
 - c. Nilai aset
 - d. Jumlah produksi
 - e. Besarnya jumlah pekerja
2. Bantuan untuk pengembangan UMKM, dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :
 - a. Bantuan teknis dan bantuan keuangan
 - b. Bantuan keuangan dan bantuan langsung
 - c. Bantuan teknis dan bantuan langsung
 - d. Bantuan sdm dan bantuan keuangan
 - e. Bantuan sdm dan bantuan langsung
3. Tujuan Paket Januari 1990 (PAKJAN 90) Kecuali :
 - a. Menyejahterakan sistem perkreditan nasional
 - b. Menyempurnakan program kredit bagi usaha kecil
 - c. Meringankan kredit
 - d. Memantapkan fungsi perbankan dan lembaga keuangan sebagai pengelola dan pelaksana sistem perkreditan nasional
 - e. Memantapkan peranan Bank Indonesia sebagai pemelihara keseimbangan moneter, sekaligus sebagai pembina dan pengawas perbankan agar bank-bank di Indonesia dapat berkembang makin sehat
4. Tujuan atau misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah supaya tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga akan meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas yang saling terkait, yaitu :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
 - b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
 - c. Mengatur dan mengawasi bank
 - d. Semua jawaban benar
5. Yang menjadi permasalahan dalam internal UMKM adalah :
- a. Rendahnya kemampuan pengelola usaha (rendahnya kualitas SDM)
 - b. Modal
 - c. Kekurangan tenaga kerja
 - d. Tidak ada lahan
6. Dalam era perubahan lingkungan ekonomi global dan perdagangan bebas, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sebutkan peran UMKM bagi perekonomian :
7. Sebutkan Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam UMKM :
8. Dfinisi UMKM menurut negara malaysia adalah :
9. Dfinisi atau batasan dari KUK menurut Surat Edaran Bank Indonesia no.22/4/UKK tanggal 29 Januari 1990 adalah :
10. Tujuan Proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PPHBK) adalah :

PERTEMUAN 13 MODUL 21

BANK SYARIAH : GAMBARAN UMUM

Tujuan: untuk mempelajari konsep dan aplikasi Bank Syariah

Capaian pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

A	Gambaran umum perbankan Syariah
B	Perkembangan perbankan Syariah di beberapa negara
C	Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia
D	Kelembagaan perbankan Syariah di Indonesia

A. Gambaran Umum Perbankan Syariah

1. Pengertian

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

2. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

- a) Bebas dari bunga (*riba*);
- b) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*);
- c) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);
- d) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*); dan
- e) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Secara singkat empat prinsip pertama biasa disebut anti MAGHRIB (*maysir, gharar, riba, dan bathil*).

a) Pelarangan Riba

Bank Syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung unsur *riba* yang jelas-jelas dilarang dalam Al Qur'an.

Riba berarti ‘tambahan’, yaitu pembayaran “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman. Dalam pengertian ini *riba* memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*) menurut *ijma* ‘konsensus’ para *fuqaha* tanpa kecuali (Chapra, 1985).

Alternatif yang ditawarkan oleh Islam sebagai pengganti *riba*/bunga yang utama adalah praktek bagi hasil, ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang ditindas (*dizalimi*) oleh yang lain.

b) Pelarangan Maysir

Maysir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, *maysir* yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berrisiko.

c) Pelarangan Gharar

Gharar secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. Dalam Islam, yang termasuk *gharar* adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan.

Afzal-ur-Rahman (1990) membagi konsep *gharar* menjadi dua:

- 1) *Gharar* karena adanya unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan; dan
- 2) *Gharar* karena adanya unsur yang meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Semua transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas, harga, dan waktu, risiko, serta penipuan atau kejahatan termasuk dalam kategori *gharar*.

3. Pelarangan *Riba*, *Maysir*, dan *Gharar* dalam perspektif Ekonomi

Konsep pelarangan *riba* secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga). Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbandung.

Maysir (judi) secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya agar aktivitas investasi yang terjadi memiliki korelasi nyata

terhadap sektor riil dalam rangka meningkatkan *Aggregate Supply* 'penawaran agregat'.

Sementara itu, pelarangan *gharar* dimaksudkan untuk mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan. Dalam dunia modern hal ini sudah diantisipasi.

4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank Mekanisme dan Obyek Usaha	Intermediasi, Jasa Keuangan	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan
Prinsip Dasar Operasi	Tidak anti <i>riba</i> dan anti <i>maysir</i>	Antiriba dan anti <i>maysir</i>
Prioritas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Bebas nilai (prinsip materialis) • Uang sebagai Komoditi • Bunga 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) • Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi • Bagi hasil, jual beli, sewa
Orientasi	Kepentingan pribadi	Kepentingan public
Bentuk	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan
Evaluasi Nasabah	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau <i>multi-purpose</i>
Hubungan Nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (<i>creditworthiness</i> dan <i>collateral</i>)	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Terbatas debitor-kreditor	Erat sebagai mitra usaha
Pinjaman yang	Pasar Uang, Bank Sentral	Terbatas

diberikan		
Lembaga Penyelesai Sengketa	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba
Risiko Usaha	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Struktur Organisasi Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank • Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran • Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>
Investasi	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
	Halal atau Haram	Halal

5. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank Syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank Syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.

Sebagai penyedia jasa perbankan, bank Syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*.

Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

6. Kegiatan Usaha

a) Jenis Kegiatan Usaha

1) Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.

Sumber dana bank syariah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal disetor sehingga secara keseluruhan sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi:

- (a) Modal;
- (b) Rekening Giro;
- (c) Rekening Tabungan;
- (d) Rekening Investasi Umum;
- (e) Rekening Investasi Khusus; dan
- (f) Obligasi Syariah.

Di luar penghimpunan dana, kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*), dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru'*). Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contracts/ NCC*), yaitu kontrak dengan prinsip nonbagi hasil (jual-beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural uncertainty contracts/NUC*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam penyaluran dana, sedangkan transaksi tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam jasa pelayanan (*fee based income*).

2) Penyaluran Dana

(a) Pembiayaan Bagi hasil

i. Mudharabah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal, biasa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola,

biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

ii. Musyarakah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi.

Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Perbedaan utama dari *mudharabah* dan *musyarakah* adalah bahwa dalam *mudharabah* pemilik dana (dalam hal ini bank) tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya, sementara dalam *musyarakah* boleh ikut campur.

(b) Pembiayaan Nonbagi Hasil

Selain bentuk pembiayaan utama dengan prinsip bagi hasil, bank syariah memiliki bentuk-bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa operasional, dan jasa (*fee-based services*). Ciri transaksi jual beli :

- (1) Jual beli dengan pembayaran tunai di awal meliputi jual beli tunai dan *salam*;
- (2) Jual beli dengan pembayaran tahapan/dicicil meliputi *murabahah* dan *istishna*;
- (3) Jual beli dengan penyerahan barang diawal meliputi jual beli tunai dan *murebahah*; dan
- (4) Jual beli dengan barang di akhir meliputi *salam* dan *istishna*.

i) Murabahah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayaranannya bisa tunai maupun ditanggguhkan dan dicicil.

ii) Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya.

iii) Istishna

Istishna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam*. Perbedaannya, dalam *istishna* pembayaran dapat di muka, cicil sampai selesai, atau di belakang, serta *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

iv) Ijarah

Sewa (*financial* dan *operational lease*) atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif.

v) Qardh

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Saleh, 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal

ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

3) Jasa Pelayanan

Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank Syariah untuk nasabahnya, antara lain jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. Yang termasuk dalam jasa keuangan, antara lain *Wadi'ah yad dhamanah* atau titipan (dalam bentuk giro dan tabungan), *wakalah* (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), *kafalah* (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), *hiwalah* (pengalihan dana/utang dari depositor/debtor ke penerima/kreditor), *rahn* (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau *mortgage*), *sharf* (jual beli mata uang).

Bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi dalam bentuk *mudharabah muqayyadah* atau investasi terikat, ketika nasabah investor memberikan batasan-batasan investasi yang diinginkannya

Selain itu, bank syariah juga bisa memberikan layanan jasa nonkeuangan, seperti menyediakan pelayanan titipan *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*).

b) Usaha yang Dibiayai

Bank syariah hanya boleh membiayai usaha yang halal. Usaha-usaha yang berbau haram tidak boleh dibiayai oleh bank syariah. Usaha yang tidak boleh dibiayai oleh bank syariah meliputi (Antonio, 2001) :

- 1) Usaha atau obyek yang mengandung unsur haram, seperti industri pengolahan alkohol dan daging babi;
- 2) Usaha yang menimbulkan *kemudharatan* bagi masyarakat;
- 3) Usaha yang berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, seperti usaha tempat hiburan malam;
- 4) Usaha yang berkaitan dengan perjudian, seperti usaha kasino;
- 5) Usaha yang berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal; dan
- 6) Usaha yang dapat merugikan *syiar* Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Kegiatan Sosial

Bank syariah juga melakukan kegiatan sosial melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- a) Mempunyai divisi yang menerima dan menyalurkan *zakat, infaq, dan sadaqah*;
- b) Memberikan pinjaman kebajikan tanpa bunga (*qardhul hasan*); dan
- c) Menyisihkan sebagian laba untuk kegiatan sosial, seperti memberikan bea siswa.

Risiko pinjaman kebajikan *qardhul hasan* cukup tinggi karena pinjaman ini merupakan pembiayaan tanpa jaminan, tetapi manfaatnya besar sekali, antara lain (Antonio, 2001):

- 1) *Qardhul hasan* memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat dana talangan jangka pendek;
- 2) *Qardhul hasan* merupakan salah satu ciri pembeda antara bank Syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial; dan
- 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

8. Konsep Operasional Bank Syariah

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana.

B. Perkembangan Perbankan Syariah di Beberapa Negara

Perkembangan bank-bank syariah atau *Islamic bank* di negara-negara lain dimulai sejak tahun 1974. Berawal dari *Islamic Development Bank*, dan kemudian diikuti dengan berdirinya bank komersial Islam pertama di Dubai pada tahun 1975.

1) Perkembangan Perbankan Islam di Sudan

Negara Sudan mengalami perkembangan perbankan yang pesat karena komitmen pemerintah. Komitmen ini diwujudkan dalam suatu kebijakan dengan melakukan Islamisasi pada sistem ekonominya pada tahun 1984. Islamisasi sektor perbankan khususnya sektor keuangan di Sudan dimulai secara tiba-tiba pada tahun 1984. Pada saat itu, Jenderal Numeiry mengumumkan kepada bank-bank bahwa dalam waktu dua bulan sistem keuangan akan berubah dengan berasaskan Islam. Namun, dengan berakhirnya masa pemerintahan Jenderal Numeiry pada tahun 1985, sistem ekonomi Islam pun berakhir.

Pada tahun 1990, konsep Islamisasi ekonomi dimunculkan kembali. Di samping itu, pada saat itu negara Sudan tengah mengalami konflik perang saudara. Kondisi yang sama terjadi seperti pada tahun 1984, bahwa perubahan tersebut tidak disertai dengan infrastruktur baik hukum maupun kelebagaannya. Baru pada tahun 1997, kondisi politik di negara tersebut mulai membaik.

2) Perkembangan Perbankan Islam di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang menjadi pelopor berdirinya bank yang berbasis Islam di Asia Tenggara. Pada tahun 1980 *The Bumiputera Economic Congress* mendesak pemerintah untuk mendirikan bank Islam di negara tersebut. *National Steering Committee* pada tahun 1981 membuat suatu kajian dan rekomendasi kepada pemerintah tentang semua aspek pendirian maupun operasional termasuk masalah hukum, aspek religius, dan operasional kepada pemerintah. Semenjak itu, berdirilah Bank Islam pertama di Malaysia yaitu *Bank Islam Malaysia Berhad* pada bulan Juli tahun 1983.

Salah satu usaha pemerintah untuk mendorong perkembangan bank syariah adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang disebut Skim Perbankan Islam (SPI) pada bulan Maret 1993. Dengan dikeluarkannya SPI jumlah bank syariah berkembang dengan pesat, dari hanya tiga bank pada tahun 1993, jumlah lembaga keuangan syariah meningkat hingga mencapai 36. Dan pada tahun 1999, Bank Islam yang kedua berdiri, yaitu *Bank Muamalat Malaysia Berhad*.

C. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

1) Perkembangan Kebijakan

a) Perkembangan Sebelum UU No. 10 Tahun 1998

Semenjak tahun 1992, meskipun belum menyebut bank syariah secara eksplisit, UU No. 7 Tahun 1992 telah memberikan isyarat untuk awal berkembangnya bank syariah di Indonesia, yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank dengan Prinsip Bagi Hasil.

Sampai tahun 1998 baru ada satu bank syariah di Indonesia, yaitu BMI yang berkedudukan di Jakarta, ditambah dengan 76 BPR Syariah (BPRS) di berbagai kota di Indonesia. Karena harus tunduk pada peraturan perbankan konvensional, kebutuhan masyarakat akan produk-produk perbankan yang sesuai dengan Syariah belum dapat terpenuhi dengan baik karena masih terbatasnya variasi produk yang pada umumnya mirip produk-produk bank konvensional yang “disyariahkan.”

Pada masa-masa sebelum tahun 1998 Pemerintah belum memiliki komitmen dan arah kebijakan yang jelas untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Sejak tahun 1992 Pemerintah mulai memperkenalkan bank syariah dan sistem perbankan ganda meskipun komitmen yang diberikan untuk pengembangannya masih sangat terbatas.

b) Perkembangan Sesudah UU No. 10 Tahun 1998

Tahun 1998 merupakan tonggak bersejarah bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia ketika Pemerintah memberikan komitmennya secara penuh. Pada tahun itu, *UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan* diubah dengan *UU No. 10 Tahun 1998* yang memberikan landasan kelembagaan dan operasional untuk perkembangan perbankan syariah secara komprehensif. Dengan undang-undang ini, bank umum maupun BPR dapat beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dan bank umum konvensional, melalui suatu mekanisme perizinan tertentu dari Bank Indonesia, dapat melakukan kegiatan usaha perbankan Syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Amanah untuk mengembangkan perbankan syariah ini ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan ketentuan mengenai kelembagaan dan jaringan kantor bagi bank umum syariah (BUS), bank umum konvensional (BUK) yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah (KCS), serta ketentuan mengenai BPR Syariah (BPRS).

Pada tahun 1999, undang-undang mengenai bank sentral yang lama, yaitu *UU No. 13 tahun 1968*, diubah dengan *UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Dalam undang-undang tentang Bank Indonesia yang baru ini dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tiga pilar tugas pokok yang salah satu di antaranya adalah mengatur dan mengawasi bank (pasal 8), termasuk bank umum dan BPR syariah. Dalam melaksanakan tugas pokok yang lain, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (pasal 10).

Bank Indonesia pada tahun 1999 membentuk tim peneliti untuk perbankan syariah. Hasilnya, satu bank umum syariah lagi, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri dan UUS mulai bermunculan.

Selanjutnya, Bank Indonesia pada tahun 2000 mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur kliring,

pembukaan rekening giro pada Bank Indonesia bagi UUS, Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank umum syariah, Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS), dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI).

Dengan semakin pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, Bank Indonesia kemudian mendirikan Biro Perbankan Syariah (BPS) pada tahun 2001 untuk menangani segala urusan yang berhubungan dengan perbankan syariah yang diamanahkan oleh undang-undang. Perbankan syariah terus berkembang pesat, sehingga urusan yang ditangani BPS menjadi semakin banyak. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2003 BPS diperbesar menjadi direktorat, yaitu Direktorat Perbankan Syariah (DPbS). MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah *riba* dan haram hukumnya. Dengan keluarnya fatwa ini, masyarakat muslim yang peduli berbondong-bondong memindahkan dananya dari bank konvensional ke bank syariah.

Pada tahun 2004 Bank Indonesia melakukan penyempurnaan peraturan perbankan Syariah dengan melakukan kajian dalam rangka mempersiapkan beberapa peraturan pendukung, seperti standarisasi akad, tingkat kesehatan, dan lembaga penjamin simpanan.

2) Perkembangan Kegiatan Usaha

a) Perkembangan Sebelum UU No. 10 Tahun 1998

Sebelum UU No. 10 tahun 1998, jumlah bank syariah di Indonesia baru sebuah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada saat berdiri pada 1992, BMI hanya mempunyai satu kantor pusat dan satu kantor cabang yang bertempat di Jakarta dengan rata-rata pertumbuhan kantor cabang setiap tahun hanya satu.

Pertumbuhan kantor cabang yang pesat justru terjadi menjelang krisis pada tahun 1997, dari empat kantor cabang pada tahun 1996 menjadi 10 kantor cabang pada tahun 1997.

Perkembangan jumlah kantor cabang BMI yang pesat dari tahun 1996 sampai dengan 1997 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu, *pertama*, *demand* masyarakat, khususnya Muslim, yang tinggi sehingga permintaan terhadap keberadaan bank syariah tidak hanya di Jakarta, *kedua*, secara implisit kondisi politik sudah mendukung keberadaan perbankan syariah meskipun pada saat itu belum dituangkan di dalam suatu kerangka hukum yang nyata.

b) Perkembangan Sesudah UU No. 10 Tahun 1998

Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang memuat secara eksplisit mengenai perbankan syariah dan mengizinkan

perbankan konvensional untuk membuka unit usaha Syariah. Dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998, perbankan syariah memiliki landasan hukum yang lebih jelas sehingga beberapa bank syariah mulai berdiri, baik bank yang sepenuhnya menjalankan prinsip syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah.

Bank Susila Bakti menjadi bank konvensional pertama yang meng-*convert* sistem perbankannya menjadi sistem Syariah dan mengganti namanya menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 1999. Sebelumnya, Bank Susila Bakti merupakan bank yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Bank Dagang Negara sebelum dimerges ke dalam Bank Mandiri per 19 Nopember 1999. Selanjutnya bank-bank konvensional mulai membuka unit usaha syariah, seperti BNI Syariah (2000), Bank IFI Syariah (2000), BRI Syariah (2002), dan terakhir BPD Aceh (Oktober, 2004). Hingga saat ini (November, 2004) sudah ada tiga bank umum syariah, 15 unit usaha syariah, dan 88 BPRS.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan mempertimbangkan indikator-indikator, seperti (1) perkembangan jaringan kantor, (2) perkembangan aset, (3) perkembangan Dana Pihak Ketiga, (4) perkembangan aktiva produktif utama, (5) perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan (6) Tingkat Kesehatan Bank Syariah.

3) Tantangan dan Kendala Pengembangan

a) Tantangan Utama Pengembangan

- (1) Kerangka pengaturan perbankan syariah yang belum lengkap dan sesuai dengan keunikan karakteristik perbankan syariah;
- (2) Jaringan kantor yang terbatas yang menentukan akses perbankan syariah terhadap nasabah potensial;
- (3) Potensi pasar relatif besar, tetapi pengetahuan dan pemahaman masyarakat secara umum tentang produk, jasa, dan manfaat perbankan syariah relatif rendah;
- (4) Infrastruktur dan institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif;
- (5) Perlunya peningkatan kinerja keuangan dan kualitas pelayanan secara berkesinambungan agar dapat berdaya saing, memperbesar pangsa pasar, menarik SDM profesional dan permodalan;
- (6) Portofolio pembiayaan belum mencerminkan hakekat bank syariah dominasi yang besar pembiayaan non-PLS; dan
- (7) Perlu mengadopsi *best practice* dan standar keuangan internasional agar dapat berkompetisi dalam era globalisasi

b) Kendala Pengembangan

- (1) Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional yang masih terbatas akan menghambat kemajuan perbankan syariah nasional. Keterbatasan pada SDM ini akan mempengaruhi besarnya risiko perbankan syariah dalam operasionalnya.
- (2) Pemahaman masyarakat sebagai pemakai yang kurang tentang perbankan syariah selain menjadi faktor yang memperlambat perkembangan industri juga dikhawatirkan akan mengurangi proses *check & balance* berkaitan dengan kepatuhan syariah dalam operasional bank atau aplikasi produk-produk Syariah.
- (3) Belum terdapat standar baku dalam aplikasi produk-produk syariah berikut ketentuannya, membuat aplikasinya di lapangan masih berpotensi untuk menyimpang dari apa yang telah ditetapkan secara syariah.
- (4) Sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, seperti kebijakan pajak dan aspek legal.
- (5) Belum tersedia *uniform regulatory*, meskipun saat ini hal tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh IFSB dan AAOIFI. Jika masalah ini dapat diselesaikan, diharapkan integrasi pasar perbankan syariah di dunia internasional dapat segera terwujud. Hal itu pada akhirnya tentu akan mendorong pertumbuhan perbankan Syariah di masing-masing negara muslim.
- (6) Inovasi pada produk atau instrumen syariah yang masih lambat.
- (7) Masih terdapat perbedaan pada aplikasi prinsip-prinsip Syariah (*lack of uniformity in the religious principles*) dalam perbankan syariah di beberapa negara muslim. Beberapa instrumen tidak dapat diterima oleh semua negara muslim.

4) Arah Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Kedepan

Bank Indonesia telah menetapkan beberapa prinsip pokok sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan ketentuan pengembangan perbankan syariah, sebagai berikut (Bank Indonesia, 2002).

- (1) Pengembangan jaringan kantor perbankan syariah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar (*market driven*), yaitu interaksi antara masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan syariah dengan investor atau lembaga perbankan yang menyediakan pelayanan jasa perbankan syariah.

- (2) Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah dilaksanakan dengan tidak menerapkan *infant industry argument* atau memberikan perlakuan-perlakuan khusus. Perlakuan yang sama (*equal treatment*) antara bank syariah dan bank konvensional adalah dalam rangka menghindari penganakemasan atau penganaktirian salah satu pihak.
- (3) Pengembangan perbankan syariah baik dari sisi kelembagaan maupun pengaturan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan (*gradual and sustainable approach*). Berkaitan dengan hal ini, kita tidak dapat mengharapkan suatu kesempurnaan baik dari aspek operasional maupun dari aspek Syariah dari suatu sistem perbankan syariah yang baru berkembang.
- (4) Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah menerapkan prinsip universalitas sesuai dengan nilai dasar Islam yaitu rahmat bagi sekalian alam. Sejalan dengan hal itu, pengembangan perbankan syariah diarahkan bahwa jasa bank syariah dapat digunakan dan dikembangkan oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat muslim.

D. Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia

1) Bank Syariah

a) Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

b) Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit Syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. Sebagai suatu unit kerja khusus, UUS mempunyai tugas untuk 1) mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah, 2) melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah, 3) menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah, dan 4) melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.

c) Bank Perkredita Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

2) Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (bank, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya) dengan prinsip syariah.

Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu, DSN membuat *guidelines* produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain DSN antara lain meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. DSN juga mempunyai kewenangan untuk memberikan/mencabut rekomendasi para ulama yang akan/ sedang ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah.

3) Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan setingkat dewan komisaris yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas utama DPS bank Syariah adalah mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang tertuang dalam *guidelines* dan fatwa-fatwa DSN.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DSN adalah lembaga yang berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan keuangan, sedangkan DPS adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa DSN tersebut di lapangan oleh lembaga ekonomi dan keuangan syariah.

4) Badan Arbitrase Syariah Nasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara bank dan nasabahnya sesuai dengan tata cara dan hukum syariah. Apabila terjadi perselisihan antara bank dan nasabahnya, mereka pertama kali biasanya memilih datang ke BASYARNAS sebelum ke pengadilan negeri karena cara ini lebih efisien dalam hal biaya dan waktu.

5) Bank Indonesia

Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, kompetitif, efisien, dan hati-hati bagi industri perbankan syariah. Semua ini dilakukan untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan bagi hasil yang selanjutnya akan memberikan dampak kesejahteraan bagi negara. Dalam rangka memenuhi kondisi tersebut, Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah yaitu :

- (1) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kontribusi yang besar kepada sektor riil.
- (2) Mensosialisasikan konsep Bank Islam kepada masyarakat, dengan menyelenggarakan *training-training* bagi SDM dengan standar profesionalisme yang tinggi, integritas, kehati-hatian, kerja sama, dan inovasi bagi industri perbankan syariah; dan
- (3) Berperan serta secara aktif dalam pembentukan komunitas keuangan Islam internasional, lembaga maupun institusi serta infrastruktur.

SOAL PERBANKAN SYARIAH

Pilihan Ganda

1. Pada tahun berapa BMI mulai didirikan . . .
 - a. 1990
 - b. 1991
 - c. 1992
 - d. 1993
2. Berikut ini yang merupakan peran dari bank syariah yaitu . . .
 - a. Jasa pelayanan dan sadaqah
 - b. Jasa keuangan dan jasa nonkeuangan
 - c. *Mudharabah* dan *ijarah*
 - d. Badan usaha dan badan sosial

3. Pembiayaan bagi hasil digolongkan menjadi dua yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
 - a. True
 - b. False

4. Berikut ini yang merupakan pembiayaan bagi hasil dalam bank syariah yaitu, kecuali ...
 - a. *Salam*
 - b. *Qordh*
 - c. *Tabarru'*
 - d. *Istishna*

5. Negara manakah yang menjadi pelopor berdirinya bank berbasis Islam di Asia Tenggara . . .
 - a. Sudan
 - b. Dubai
 - c. Malaysia
 - d. Indonesia

Essay

1. Sebutkan yang menjadi prinsip dasar dalam perbankan syariah !
2. Jelaskan mengenai pelarangan *Riba*, *Maysir*, dan *Gharar* dalam persektif ekonomi !
3. Sebutkan dan jelaskan pembiayaan non bagi hasil dalam perbankan syariah !
4. Apa pengertian dari bank syariah ?
5. Sebutkan kelembagaan yang berada pada bank syariah !

PERTEMUAN 14 MODUL 22

MENGUPAS KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Tujuan: mempelajari aspek terkait kebijakan makroprudensial

Capaian pembelajaran: pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu memahami:

A	Apa dan bagaimana kebijakan makroprudensial
B	Mengapakebijakan makroprudensial diperlukan
C	Siapa yang melaksanakan kebijakan makroprudensial
D	Bagaimana strategi Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan makroprudensial
E	Bagaimana Bank Indonesia mencegah dan menangani krisis: Protokol manajemen krisis

Istilah makroprudensial mengemuka dan menjadi sangat populer di sektor keuangan paska terjadinya krisis keuangan global. Krisis keuangan tersebut ditengarai terjadi karena belum diterapkannya kebijakan makroprudensial yang efektif di negara maju, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan dinamika di sektor keuangan yang bersumber dari interaksi antara makro ekonomi dengan mikro ekonomi. Di Indonesia sendiri, pendekatan makroprudensial sudah dijalankan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi akibat krisis keuangan Asia tahun 1997/1998. Pengalaman krisis tersebut sesungguhnya telah memberikan pelajaran yang berharga, sehingga pada saat krisis keuangan global 2007/2008 yang dipicu oleh kegagalan produk subprime mortgage di Amerika Serikat, Bank Indonesia dengan kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial yang dimilikinya sudah lebih siap dengan berbagai langkah yang dapat menahan pemburukan kondisi ekonomi dan sistem keuangan di dalam negeri. Selanjutnya dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi mikroprudensial yang terkait dengan kesehatan, kinerja, dan kelangsungan usaha individual bank dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013, sementara Bank Indonesia diamanatkan untuk tetap menjalankan fungsi makroprudensial.

Meskipun istilah makroprudensial telah diperkenalkan sejak tahun 1979, namun kebijakan makroprudensial baru populer pascakrisis keuangan global (global financial crisis, GFC) yang terjadi pada tahun 2008. Krisis yang dipicu permasalahan subprime mortgage di sektor keuangan ini tak hanya mengakibatkan penurunan kinerja sektor keuangan, namun juga berdampak negatif pada memburuknya perekonomian dunia. Keterkaitan hubungan, atau hubungan sebab akibat (feedback loop), antara sektor keuangan dengan sektor riil mengakibatkan biaya krisis menjadi tinggi dengan waktu pemulihan yang tidak singkat. Kondisi-kondisi tersebut mendorong pemimpin negara-negara G20 pada pertemuan di Seoul tahun 2010 untuk meminta Financial Stability Board (FSB), International Monetary Fund (IMF), dan Bank for International Settlement (BIS) agar mengembangkan kerangka kebijakan makroprudensial guna mencegah risiko sistemik pada sektor keuangan (FSB, IMF, BIS, 2011). Sebagai tindak lanjut, bank sentral dan otoritas keuangan beberapa negara turut mengembangkan pendekatan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, antara lain melalui tren perubahan penataan kelembagaan (institutional arrangement) otoritas keuangan di beberapa negara.

Bank Indonesia telah memerhatikan aspek makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran Bank Indonesia di bidang makroprudensial tertuang dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejalan dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank (mikroprudensial) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Definisi dan Karakteristik Kebijakan Makroprudensial

Dalam penelitian yang dilakukan di BIS, Swiss, kebijakan makroprudensial didefinisikan sebagai kebijakan yang bertujuan untuk membatasi risiko dan biaya dari krisis sistemik (Galati G., and Richhild M., 2011). Sementara European Systemic Risk Board Apa dan Bagaimana Kebijakan Makroprudensial 3 (ESRB), yaitu badan yang memiliki misi mengawasi sistem keuangan Eropa, serta mencegah dan membatasi terjadinya risiko sistemik di sistem keuangan Eropa, mendefinisikan kebijakan makroprudensial sebagai kebijakan yang ditujukan untuk menjaga

stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk dengan memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mengurangi penumpukan risiko sistemik, sehingga memastikan keberkelanjutan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi (ESRB, 2013). Penjelasan serupa disampaikan oleh IMF, yang mendefinisikan makroprudensial sebagai kebijakan yang memiliki tujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik (IMF, 2011).

Menjaga stabilitas sistem keuangan merupakan tujuan yang dilakukan bersama antara beberapa otoritas. Dalam hal ini, terdapat lebih dari 1 (satu) otoritas yang memiliki kepentingan dalam mencapai stabilitas sistem keuangan. Yang membedakan adalah kewenangan masing-masing otoritas dalam upaya mencapai tujuan tersebut, seperti bank sentral melalui kewenangan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran; pemerintah melalui kewenangan fiskal; dan otoritas pengawas industri jasa keuangan melalui kewenangan mikroprudensial. Dengan demikian, implementasi kebijakan makroprudensial sangat mungkin dilakukan melalui interaksi dengan kebijakan lain, terutama dengan kebijakan yang memiliki dampak pada sistem keuangan.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/11/PBI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial memberikan arahan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sementara, sistem keuangan didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan nonkeuangan dan rumah tangga yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/ atau penyediaan pembiayaan perekonomian

Bila kebijakan mikroprudensial difokuskan pada tingkat kesehatan individu institusi keuangan (bank dan nonbank) dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, maka kebijakan makroprudensial lebih

berorientasi pada sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, fokus kebijakan makroprudensial tak hanya mencakup institusi keuangan, namun meliputi pula elemen sistem keuangan lainnya, seperti pasar keuangan, korporasi, rumah tangga, dan infrastruktur keuangan. Mengapa demikian? Karena kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan dengan tujuan akhir meminimalkan terjadinya risiko sistemik.

Sementara pada PBI Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, risiko sistemik didefinisikan sebagai potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular (contagion) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran (size), kompleksitas usaha (complexity), keterkaitan antarinststitusi dan/ atau pasar keuangan (interconnectedness), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (procyclicality). Merujuk pada definisi risiko sistemik di atas, dapat disimpulkan 3 (tiga) hal berikut. Pertama, sumber risiko sistemik tidak harus berasal dari institusi keuangan, namun dapat berasal dari elemen sistem keuangan lainnya, seperti kegagalan korporasi atau permasalahan di sistem pembayaran, atau bahkan berasal dari gangguan (shock) di luar sistem keuangan. Kedua, keterkaitan (interconnectedness) di antara elemen sistem keuangan memunculkan potensi menularnya atau merambatnya risiko dari suatu elemen sistem keuangan kepada seluruh elemen sistem keuangan (contagion effect). Ketiga, potensi dampak yang ditimbulkan oleh risiko sistemik sangat luas, tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, namun dapat mengganggu perekonomian. Dengan demikian, tujuan makroprudensial untuk meminimalkan risiko sistemik sesungguhnya merupakan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan yang mencakup seluruh elemen sistem keuangan dengan tetap memerhatikan kondisi makroekonomi.

Meskipun semakin banyak otoritas keuangan yang mengimplementasikan kebijakan makroprudensial, namun belum ada teori ekonomi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan makroprudensial. Berbeda dengan kebijakan moneter yang menargetkan tingkat inflasi dengan variasi instrumen kebijakan yang jelas, seperti suku

bunga, nilai tukar, dan uang beredar, target kebijakan makroprudensial untuk mencapai stabilitas sistem keuangan dengan meminimalkan risiko sistemik tidak dapat diukur hanya dengan menggunakan satu indikator. Hingga saat ini belum ada metode kuantitatif (model) yang secara komprehensif dapat mengukur risiko sistemik pada sistem keuangan, selain model dan metodologi yang menilai satu atau beberapa aspek risiko sistemik secara terpisah (BCBS, 2012a)

Mengapa Kebijakan Makroprudensial Tidak Hanya Mengenai Perbankan?

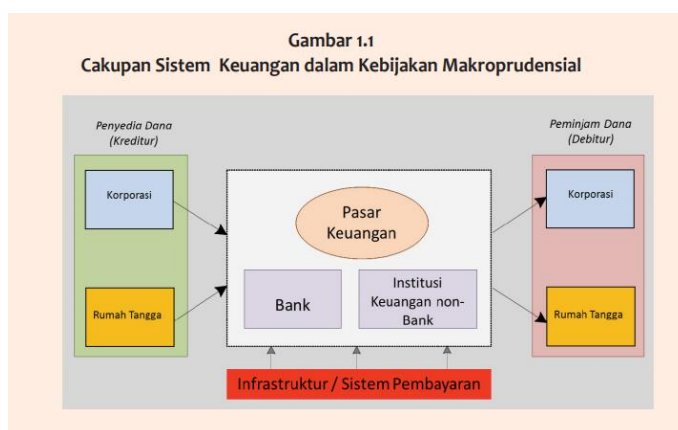
Jika seseorang punya kepastian pendapatan dalam jangka panjang, misalnya dalam bentuk pendapatan atau gaji bulanan, maka kebutuhan yang terpikirkan olehnya terlebih dahulu selain sandang dan pangan, umumnya adalah papan (atau properti). Perumahan adalah kebutuhan dasar manusia. Namun pada saat yang sama, properti juga adalah salah satu bentuk investasi yang disukai masyarakat, karena kecenderungan harganya selalu meningkat, terutama yang berlokasi di kota besar. Jika perekonomian sedang baik, dan kepastian usaha membaik, permintaan terhadap properti biasanya meningkat, baik untuk perumahan maupun untuk keperluan komersial. Apabila permintaan (demand) properti naik hingga menjadi lebih tinggi dari ketersediaannya (supply), maka harga properti meningkat. Kecenderungan peningkatan harga ini, menjadikan properti investasi yang menarik bagi masyarakat karena sudah pasti bertambah nilainya di masa depan sehingga memberikan imbal hasil yang baik. Akibatnya harga properti akan semakin terdorong untuk naik.

Masih ingat dengan krisis keuangan global 2008 yang diawali dengan permasalahan sektor keuangan di Amerika Serikat? Krisis tersebut didahului dengan fenomena yang sama, yakni tren peningkatan harga properti. Pada saat kondisi perekonomian baik, biasanya ditunjang dengan kondisi tingkat bunga yang relatif rendah, sehingga dana untuk pinjaman pun menjadi lebih mudah diperoleh. Ditambah lagi, kemudahan memperoleh pinjaman dapat memfasilitasi spekulasi terhadap aset properti yang dibiayai melalui kredit. Kondisi ini mendorong peningkatan harga properti. Bagi bank sendiri, pemberian kredit pada sektor properti yang sedang mengalami tren kenaikan

harga, dinilai cukup menguntungkan sehingga ekspansi kredit pada sektor properti pun terjadi.

Dalam kebijakan makroprudensial, kondisi korporasi dan rumah tangga, baik sebagai surplus maupun defisit unit dalam sistem keuangan, ikut menentukan keberlangsungan institusi keuangan sehingga perlu dipantau. Sebagai depositor dalam perbankan serta investor di pasar keuangan, korporasi dan rumah tangga merupakan sumber pendanaan dalam sistem keuangan. Sedangkan sebagai debitur perbankan dan institusi keuangan nonbank, kondisi keuangan korporasi dan rumah tangga juga ikut menentukan kinerja dan tingkat kesehatan institusi keuangan.

Gambar di bawah menunjukkan cakupan dari kebijakan makroprudensial, yaitu sistem keuangan. Setiap elemen menjadi penting untuk dimonitor karena risiko dapat diidentifikasi dan dinilai dari hasil pemantauan tersebut. Risiko di setiap elemen sistem keuangan yang tidak segera dimitigasi memiliki potensi untuk menjadi risiko sistemik yang akan menyebabkan instabilitas pada sistem keuangan.



Karakteristik Sistem Keuangan

Seperti diuraikan pada bab sebelumnya, upaya menjaga stabilitas sistem keuangan tidaklah cukup bila hanya difokuskan pada tingkat kesehatan dan kinerja individu bank atau institusi keuangan lainnya. Hal ini karena dalam sistem keuangan, antara institusi yang satu dengan lainnya saling terkait dalam berbagai transaksi keuangan yang ada. Aset pada satu bank merupakan kewajiban (liability) pada bank lain. Sebagai contoh, pada transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB), di mana antara bank satu dengan bank lainnya dapat melakukan kegiatan pinjam meminjam dana. Adanya gagal bayar di satu bank dapat berdampak pada bank lain atau bahkan beberapa bank sekaligus yang memiliki transaksi keuangan dengan bank tersebut. Sifat keterkaitan dan interdependensi antarindividu dalam sistem

keuangan ini dikenal dengan istilah interconnectedness. Dengan adanya karakteristik interconnectedness dalam sistem keuangan, permasalahan pada satu institusi dapat dengan cepat menyebar pada institusi lainnya, sehingga menjadi permasalahan agregat sistem keuangan yang berpotensi menimbulkan dampak hingga ke sektor riil. Merujuk pada penjelasan di atas, potensi penyebaran risiko (spillover) dari satu institusi ke institusi lain menjadi lebih tinggi apabila permasalahan terjadi pada institusi keuangan yang besar atau dominan. Kegagalan bank besar dengan pangsa yang cukup tinggi dalam sistem keuangan akan memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan kegagalan bank dengan skala yang lebih kecil. Hal ini dikenal dengan konsep too-big-to-fail

Kebijakan Makroprudensial Sebagai Komplemen Kebijakan Lain

Dalam implementasinya, kebijakan makroprudensial secara efektif bisa menjadi komplemen atau pelengkap dari kebijakankebijakan lain yang sudah ada sebelumnya. Karakteristik kebijakan makroprudensial yang berorientasi kepada sistem, mencakup dimensi runtun waktu (time series) dan antarsubjek (cross section), serta diimplementasikan dengan perangkat prudensial, diharapkan dapat menutup kekurangan (gap) kebijakan mikroprudensial, moneter, maupun fiskal dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial

Kebijakan mikroprudensial yang difokuskan pada tingkat kesehatan individu institusi keuangan lebih ditekankan pada dimensi antarsubjek (cross section), yakni bagaimana risiko teramplifikasi dalam 1 (satu) periode tertentu. Padahal, perilaku institusi keuangan dari waktu ke waktu juga perlu diperhatikan. Kesehatan institusi keuangan yang dinilai pada satu waktu tertentu tidak mampu menggambarkan evolusi risiko yang ada pada institusi tersebut. Karena pada kenyataannya, pergerakan institusi keuangan cenderung sejalan dengan naik turunnya perekonomian yang mewarnai perilaku ambil risikonya (procyclicality). Saat kondisi ekonomi sedang baik, insitusi keuangan akan melakukan ekspansi dan meningkatkan perilaku ambil risiko.

Kebijakan Makroprudensial dan Moneter

Kebijakan makroprudensial juga melengkapi kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas harga dan perekonomian secara makro tidak secara langsung bisa menjangkau permasalahan di level mikro sistem keuangan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kondisi krisis dapat terjadi meskipun dengan Mengapa Kebijakan Makroprudensial Diperlukan? 17 kondisi inflasi dan output gap yang rendah (IMF, 2013a). Sumber sumber risiko makroekonomi dapat berasal dari instabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, adanya pengawasan agregat pada sistem keuangan dari kebijakan makroprudensial dapat melengkapi fokus kebijakan moneter. Kebijakan makroprudensial dapat digunakan untuk melihat adanya potensi peningkatan risiko dari sistem keuangan yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Kebijakan Makroprudensial dan Fiskal

Kebijakan makroprudensial juga terkait erat dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang tepat dan efektif akan mengurangi potensi terjadinya shock makroekonomi, yang merupakan salah satu sumber pembentukan (build up) risiko sistemik (IMF, 2013b). Sebagai contoh, kenaikan (boom) pada konsumsi swasta dan rumah tangga dapat teramplifikasi oleh masuknya modal asing (capital inflow) yang tinggi secara persisten. Aliran modal asing yang masuk, antara lain melalui pasar saham dan obligasi, dapat meningkatkan kemampuan ekspansi usaha swasta sekaligus pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong konsumsi masyarakat.

Interaksi Kebijakan Makroprudensial dengan Kebijakan Moneter dan Mikroprudensial

Sebagai kebijakan yang paling terakhir masuk menjadi bagian tugas dari bank sentral, adalah wajar jika kebijakan makroprudensial harus beradaptasi dan menghormati kebijakan lainnya yang sudah menjadi tugas utama bank sentral, terutama kebijakan moneter. Namun perlu dicatat juga, bahwa kebijakan makroprudensial yang bertujuan membatasi risiko sistemik untuk menjaga stabilitas keuangan memang justru lahir karena stabilitas

moneter tidak akan tercapai tanpa adanya stabilitas keuangan. Demikian pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena transmisi kebijakan moneter berlangsung melalui sistem keuangan, serta perilaku institusi/agen keuangan sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Keunikan dari kebijakan makroprudensial adalah kemampuannya dalam memberikan dampak kepada target agen keuangan tertentu. Misalnya, kebijakan makroprudensial bisa saja hanya ditujukan kepada agen keuangan yang berperilaku spekulatif dalam investasi di bidang properti, seperti melalui kebijakan loan-to-value (LTV) yang dirancang untuk menahan perilaku spekulatif dengan cara mempersyaratkan uang muka yang lebih besar untuk kredit pembelian rumah kedua dan seterusnya. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh kebijakan moneter, di mana pada saat ditetapkan, akan berlaku rata bagi semua agen keuangan.

Siapa yang Melaksanakan Kebijakan Makroprudensial?

1. Mandat dan Kewenangan

Salah satu pelajaran dari krisis keuangan global adalah semakin pentingnya kebijakan makroprudensial yang didukung oleh penataan kelembagaan (institutional arrangement) otoritas keuangan, yang dapat menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dari otoritas makroprudensial. Hal tersebut telah mendorong sejumlah negara memperbaiki penataan kelembagaan otoritas keuangan yang sebelumnya terbilang terfragmentasi, atau cenderung tidak memfasilitasi koordinasi antarlembaga. Krisis global menunjukkan bahwa struktur yang terfragmentasi mengurangi efektivitas upaya mitigasi risiko sehingga meningkatkan potensi pembentukan risiko sistemik. Penataan juga dilakukan guna menetapkan otoritas yang paling tepat diberikan mandat kewenangan makroprudensial. Penataan kelembagaan institusi makroprudensial dipengaruhi oleh kondisi spesifik di suatu yurisdiksi seperti ketersediaan dan kemampuan sumber daya, histori dari penataan kelembagaan yang ada saat ini, serta rezim moneter. Selain itu, ukuran dan kompleksitas struktur sistem keuangan, kerangka hukum yang berlaku, aspek ekonomi politis (political economy), dan kerangka kerja sama antarotoritas juga turut memengaruhi penataan kelembagaan tersebut.

Di Indonesia sendiri, peran dari otoritas perekonomian dan sistem keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi bagian yang sangat penting dalam menentukan penataan kelembagaan institusi makroprudensial.

2.Landasan Hukum Berdasarkan

UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK khususnya penjelasan pasal 7, Bank Indonesia memiliki kewenangan di bidang makroprudensial. Kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial juga dinyatakan dalam pasal 40 dan penjelasannya mengenai kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan khusus kepada bank tertentu, serta penjelasan pasal 69 yang menyebutkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan makroprudensial. UU OJK mendefinisikan lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial sebagai pengaturan dan pengawasan selain aspek kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank yang merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Sementara itu, UU No. 9 Tahun 2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), khususnya penjelasan pasal 3 ayat 2c, menyebutkan makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan.

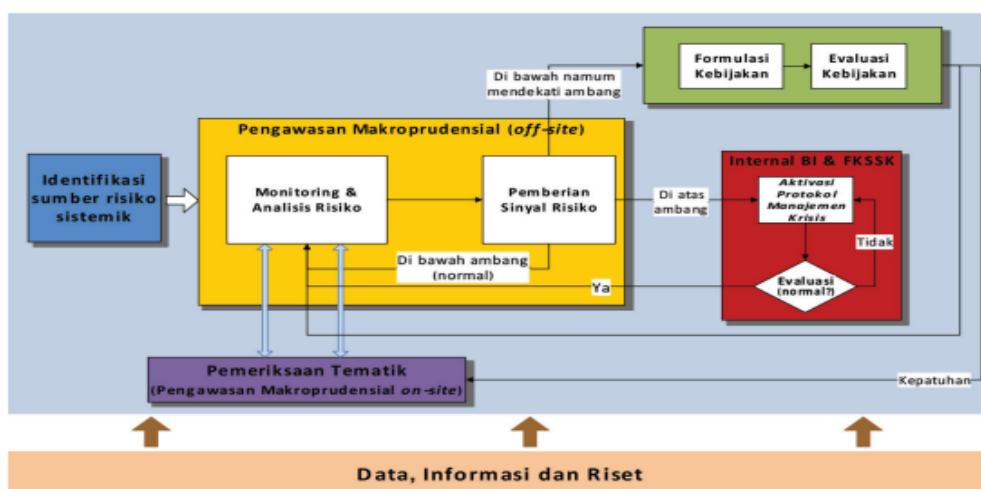
Bagaimana Strategi Bank Indonesia dalam Melaksanakan Kebijakan Makroprudensial?

Dalam melaksanakan kewenangan di bidang makroprudensial, Bank Indonesia perlu memiliki kerangka kebijakan yang tepat, jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka tersebut mencakup serangkaian pedoman bagi Bank Indonesia dalam menjalankan kewenangan guna merumuskan dan menghasilkan arah kebijakan yang tepat dan jelas. Di samping itu, kerangka dilengkapi pula dengan tujuan jangka panjang dari perumusan kebijakan. Kerangka kebijakan makroprudensial di Bank Indonesia disusun dengan difokuskan pada upaya untuk mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan yang diwujudkan melalui 4 (empat)

hal, yaitu: (i) risiko sistemik yang teridentifikasi sejak dini dan termitigasi; (ii) financial imbalances⁴ yang minimal sehingga mendukung fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas; (iii) sistem keuangan yang efisien; dan (iv) akses keuangan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang meningkat.

Pengukuran potensi dampak yang ditimbulkan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih baik pula, sehingga bisa ditentukan dengan lebih akurat kapan saat yang tepat bagi otoritas untuk mengeluarkan instrumen kebijakan yang mampu mencegah penyebaran dampak risiko tersebut bagi sistem keuangan, makroekonomi, maupun sektor riil. Untuk itu, disusunlah strategi operasional yang merupakan rangkaian (alur) dalam melaksanakan kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial sebagaimana diilustrasikan di Gambar 4.1. Terdapat 4 (empat) elemen utama dalam strategi operasional tersebut, yakni: (i) identifikasi sumber risiko sistemik; (ii) pengawasan makroprudensial melalui monitoring dan analisis terhadap risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya serta pemberian sinyal risiko; (iii) respons kebijakan melalui desain dan implementasi instrumen kebijakan makroprudensial; dan (iv) protokol manajemen krisis (PMK). Ketiga elemen yang pertama, yaitu (i), (ii), dan (iii) akan diuraikan dalam bab ini, sementara elemen (iv) akan diuraikan secara khusus di bab berikutnya. Bagaimana Strategi Bank Indonesia dalam Melaksanakan Kebijakan

Gambar 4.1.
Strategi Operasional untuk Kerangka Kebijakan Makroprudensial



Identifikasi Sumber Risiko Sistemik Identifikasi sumber risiko sistemik merupakan identifikasi terhadap kejadian dan/atau perilaku yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan dan berpotensi memiliki dampak sistemik. Menurut Bernanke (2013), risiko akan termaterialisasi ketika peristiwa gangguan (shock) berinteraksi dengan kerentanan (vulnerability) dalam sistem keuangan. Interaksi ini diibaratkan pemilik rumah yang biasanya mengunci pintunya di malam hari untuk menjaga keamanan. Pada suatu malam dia lupa mengunci pintunya, sehingga menimbulkan kerentanan. Jika tidak ada kejadian gangguan berupa pencuri yang datang dengan maksud mengambil barang di dalam rumah, maka tidak akan terjadi risiko pencurian. Risiko pencurian terjadi pada saat kejadian pencuri datang ke rumah tersebut dan menemukan pintu rumah yang tidak terkunci. Selanjutnya, risiko akan menjadi risiko sistemik apabila tidak diimbangi dengan tingkat ketahanan (resilience) yang memadai.

Monitoring dan Analisis Risiko

Sistemik Monitoring dan analisis risiko sistemik merupakan rangkaian kegiatan pengawasan makroprudensial yang dilakukan dalam bentuk off-site dan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama, yakni: monitoring, identifikasi tekanan dalam sistem keuangan (stress identification), dan penilaian risiko (risk assessment).

Pemberian Sinyal Risiko

Pemberian sinyal risiko merupakan tahap terakhir dari rangkaian kegiatan pengawasan makroprudensial. Tahap ini dinilai penting mengingat kegiatan pengawasan makroprudensial mulai dari monitoring, stress identification, dan risk assessment menjadi kurang optimal jika hasilnya tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam waktu cepat dan tepat. Pemberian sinyal risiko yang tepat akan menentukan keberhasilan respons kebijakan yang diambil. Selain kepada siapa sinyal itu diberikan dan waktu penyampaiannya, faktor lain yang juga menentukan efektivitas pemberian sinyal risiko adalah strategi bagaimana sinyal tersebut dikomunikasikan.

Desain dan Implementasi Instrumen Kebijakan

Motivasi Pengembangan Instrumen Makroprudensial

Setelah melalui serangkaian proses pengawasan makroprudensial, tahapan dilanjutkan dengan desain dan implementasi kebijakan apabila pemberian sinyal risiko mengindikasikan adanya pembentukan (build-up) risiko sistemik. Dengan kata lain, kebijakan makroprudensial disusun sebagai respons atas hasil penilaian terhadap sumber-sumber risiko yang ada dalam sistem keuangan. Sebagai contoh, instrumen Loan-to-Value (LTV) yang dikeluarkan dalam rangka pembatasan pertumbuhan kredit properti. Instrumen ini dikeluarkan sebagai respons atas hasil asesmen yang menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit properti serta Indeks Harga Properti tumbuh jauh di atas tren jangka panjangnya atau mengindikasikan adanya boom harga properti. Selain dalam bentuk instrumen pengaturan seperti disebutkan di atas, kebijakan makroprudensial dapat dirumuskan dalam bentuk himbauan (moral suasion) khususnya bagi institusi keuangan.

Memperluas Jangkauan Monitoring Risiko dengan Regional Financial Surveillance

Seiring dengan semakin terkoneksiya pelaku sistem keuangan, gangguan di suatu sektor dapat dengan mudah ditransmisikan ke sektor lainnya baik di level nasional maupun daerah. Hal ini menyebabkan risiko yang dihadapi daerah semakin kompleks, sehingga peran daerah dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan menjadi penting. Menyadari hal tersebut, Bank Indonesia memperkuat fungsi Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) untuk turut melakukan pemantauan atas kondisi stabilitas sistem keuangan di daerah melalui kegiatan Surveilans Keuangan Regional atau Regional Financial Surveillance (RFS). Mengapa RFS menjadi sangat berguna bagi upaya menjaga stabilitas sistem keuangan? Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia bahkan adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

Mengelola perekonomian dan sistem keuangan di Indonesia dengan karakteristik geografis seperti itu menjadi tantangan tersendiri, terutama karena setiap daerah memiliki keunikan dari sisi kekuatan perekonomian. Selain itu, dalam memantau sistem keuangan, ketidakseimbangan yang terjadi dalam sistem keuangan di daerah juga sama pentingnya dengan

ketidakseimbangan secara nasional, karena memburuknya kinerja sistem keuangan di daerah dapat ditransmisikan ke daerah lainnya akibat adanya keterkaitan dalam sistem keuangan, dan pada gilirannya berpotensi menimbulkan risiko sistemik. RFS dalam hal ini membantu mempercepat deteksi terhadap ketidakseimbangan tersebut karena posisi KPwDN yang dekat dapat lebih sensitif mendeteksi permasalahan di daerahnya.

Stress Testing Perbankan: Menguji Ketahanan Bank dalam Menghadapi Tekanan

Stress testing merupakan suatu metode pengujian ketahanan suatu objek dalam menghadapi kondisi buruk yang mungkin dihadapinya. Dalam dunia kedokteran, misalnya, stress testing diterapkan untuk menguji ketahanan jantung pasien dengan menggunakan treadmill yang disambungkan ke alat perekam jantung sebagai alat pengujinya. Pasien akan menjalani berbagai skenario kecepatan melalui alat tersebut untuk mengukur seberapa besar daya tahan jantungnya. Pengukuran dengan metode ini berhasil mendeteksi banyak pasien yang memiliki gangguan kesehatan jantung, sehingga dapat dilakukan tindakan dini untuk penyehatan.

Stress testing juga lazim dilakukan di dunia otomotif dalam bentuk crash test, yaitu suatu metode untuk menguji standar keamanan mobil. Suatu varian mobil baru biasanya akan menjalani pengujian ini untuk menilai tingkat keamanan mobil bagi penumpangnya. Suatu mobil dinyatakan memiliki keamanan yang baik apabila benturan destruktif yang dialaminya tidak mengakibatkan cedera fatal atau kematian penumpangnya. Dampak skenario benturan yang buruk tersebut tidak membahayakan penumpang karena mobil dilengkapi dengan ketersediaan airbag yang cukup, sidebars yang kuat, serta komponen-komponen keamanan lainnya.

Soal Pertemuan 14 Modul 22

1. Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dalam rangka?
 - a. mencegah dan mengurangi resiko sistemik
 - b. mencapai dan mendapat risiko
 - c. mendorong sistem akses keuangan

2. Definisi makroprudensial menurut IMF yaitu
 - a. menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan
 - b. memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistemik
 - c. Membatasi risiko dan biaya krisis sistemik

3. Ruang lingkup makroprudensial selain perbankan, kecuali
 - a. IKNB
 - b. Sektor koperasi
 - c. Pasar

4. Dalam melaksanakan kewenangan di bidang makroprudensial, Bank Indonesia perlu memiliki kerangka kebijakan diantaranya ...
 - a. tepat, jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. tepat, jcepat,, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. tepat, jelas, transparan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Keunikan dari kebijakan makroprudensial ...
 - a. kemampuannya dalam memberikan dampak kepada target seluruh agen keuangan
 - b. kemampuannya dalam memberikan solusi kepada target agen keuangan tertentu.
 - c. kemampuannya dalam memberikan dampak kepada target agen keuangan tertentu.

Essai

1. Definisi dan Karakteristik Kebijakan Makroprudensial

2. Mengapa Kebijakan Makroprudensial Tidak Hanya Mengenai Perbankan?
3. Siapa yang Melaksanakan Kebijakan Makroprudensial?
4. Bagaimana Strategi Bank Indonesia dalam Melaksanakan Kebijakan Makroprudensial?
5. Pemberian sinyal risiko merupakan apakah dari kerangka kebijakan makroprudensial?